

SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# S1 Akuntansi

## Aspek Akuntansi dan Pasar Modal di Masa Pandemi Covid-19

**EDITOR**

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.

Rousilita Suhendah, S.E., M.Si., Ak., CA

Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA(Aust), CSRS

Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA



**SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021**

**Aspek Akuntansi dan Pasar Modal  
di Masa Pandemi Covid-19**

**ISBN : 978-623-6463-08-6**

**Penerbit**

LPPI UNTAR (UNTAR Press)

Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara

Jln. Letjen. S. Parman No. 1

Kampus I UNTAR, Gedung M, Lantai 5

Jakarta 11440

Email: [dppm@untar.ac.id](mailto:dppm@untar.ac.id)

**Keanggotaan IKAPI**

No.605/AnggotaLuarBiasa/DKI/2021

**Copyright © 2021 Universitas Tarumanagara**

## **SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021**

### **Editor Seri**

Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Sri Tiatri, S.Psi, M.Si, Ph.D., Psikolog

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng.

## **Aspek Akuntansi dan Pasar Modal**

### **di Masa Pandemi Covid-19**

#### **Editor**

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.

Rousilita Suhendah, S.E., M.Si., Ak., CA

Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA(Aust), CSRS

Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA

#### **Penulis**

Kevin

Syanti Dewi

Henryanto Wijaya

Elsa Imelda

Widyasari

I Cenik Ardana

Elizabeth Inge Pratiwi

Nataherwin

Jessica Meta Lumanau

Rousilita Suhendah

Anastasya

Henny Wirianata

Agustin Ekadjaja

Verawati

Hendro Lukman

Dwi Egalita Novia M.

Sriwati

I Cenik Ardana

Andreas Bambang D.

Rosmita Rasyid

Karen Thalia

Linda Santioso

Amin Wijoyo

**LPPI UNTAR (UNTAR PRESS)**

**Jakarta, Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan anugerahNya kepada kami semua sehingga kami dapat membuat bookchapter yang berkaitan dengan aspek akuntansi dan pasar modal di masa pandemi covid 19 dengan baik.

Pandemi covid-19 yang melanda di seluruh belahan dunia menyebabkan timbul paradigma tatanan ekonomi, sosial, ilmu dan teknologi yang berbeda dengan era sebelumnya, tidak terkecuali dalam bidang akuntansi. Akuntansi yang merupakan bagian mikro dari ekonomi juga mengalami struktur perubahan dalam penggunaan teknologi informasi terkini. Demikian pula dengan pasar modal yang ada di Indonesia.

Selama masa pandemi covid-19, terjadi penurunan indeks harga saham gabungan pada perusahaan emiten tertentu yang cukup mencolok. Ini dikarenakan di beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penurunan penjualan ini menyebabkan kinerja perusahaan menjadi kurang baik yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga saham

Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat terutama sektor ekonomi berdampak juga pada pajak. Pajak sebagai pungutan wajib dari rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara mengalami penurunan. Ini berakibat pada realisasi penerimaan pajak yang semakin berkurang. Pada masa pandemi covid-19 dan meringankan beban hidup masyarakat, pemerintah telah melakukan program relaksasi perpajakan yang dapat memberikan kelegaan baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Pembelajaran akuntansi di pendidikan tinggi juga mengalami perubahan. Sebelum terjadinya Covid-19 pembelajaran dilakukan dengan tatap muka (luring), namun pada masa covid-19 ini pembelajaran dilakukan secara daring melalui teknologi informasi yang berkembang dengan cepat. Hal ini membuat dosen dan mahasiswa harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Untar Bersinergi, Untar Bereputasi.  
Salam, UNTAR untuk Indonesia

Ketua Program Studi Akuntansi  
Universitas Tarumanagara

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1	1-20
<i>Pengaruh Relaksasi Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Perekonomian dalam Perspektif Mahasiswa</i>	
<b><i>Hendro Lukman, Kevin</i></b>	
BAB 2	21-39
<i>Analisis Benford Law Sebagai Pendeteksi Fraud Pada Marketplace di Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>Elsa Imelda, Elizabeth Inge Pratiwi</i></b>	
BAB 3	40-86
<i>Pengaruh Covid-19 pada Return Saham Perusahaan Transportasi</i>	
<b><i>Rousilita Suhendah</i></b>	
BAB 4	87-110
<i>Analisis Penerimaan Pajak Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Pajak Daerah DKI Jakarta)</i>	
<b><i>Agustin Ekadjaja, Dwi Egalita Novia Maharani</i></b>	
BAB 5	111-130
<i>Relaksasi Pajak Sebagai Alternatif Meminimalkan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19</i>	
<b><i>Andreas Bambang Daryatno, Linda Santioso</i></b>	
BAB 6	131-151
<i>Kepatuhan WPOP Selama Pandemi Covid-19 Dengan Adanya Insentif Pajak</i>	
<b><i>Syanti Dewi, Widyasari, Nataherwin, Anastasya</i></b>	
BAB 7	152-169
<i>CSR Di Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>Verawati, Sriwati</i></b>	

BAB 8	170-189
<i>Peranan Strategi Pengelolaan Biaya dalam Akuntansi Manajemen pada Masa Covid- 19</i>	
<b><i>Rosmita Rasyid</i></b>	
BAB 9	190-212
<i>Implementasi Media Belajar Online yang Dipakai Dosen Akuntansi Selama Pandemi</i>	
<b><i>Amin Wijoyo</i></b>	
BAB 10	213-235
<i>Perkuliahan Akuntansi Masa Covid-19</i>	
<b><i>Henryanto Wijaya</i></b>	
BAB 11	236-256
<i>Analisis Kinerja Perbankan Kapitalisasi Saham Besar Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>I Cenik Ardana, Jessica Meta Lumanau</i></b>	
BAB 12	257-301
<i>Peran UMKM dalam Mempercepat Pencapaian SDGs Pasca Covid-19</i>	
<b><i>Henny Wirianata</i></b>	
BAB 13	302-319
<i>Industri Perhotelan di Indonesia Sebelum dan pada Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>Hendro Lukman, I Cenik Ardana, Karen Thalia</i></b>	
BAB 14	320-338
<i>Prospek Implementasi SAK EMKM Di Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>Elsa Imelda</i></b>	

## **BAB 1**

# **Pengaruh Pajak Ditanggung Pemerintah terhadap Perekonomian dalam Persepsi Mahasiswa**

Hendro Lukman

Kevin

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Pandemi *Corona Virus-19* (Covid-19) sangat mempengaruhi perekonomian negara, termasuk Indonesia karena pandemi datang tanpa bisa diprediksi dan melanda seluruh dunia. Oleh karena pemerintah telah mengeluarkan PERPU untuk menjaga stabilitas keuangan pada bulan April 2020, salah satunya adalah pajak ditanggung pemerintah bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai karyawan (PPh Pasal 21) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Penelitian kuantitatif ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner untuk mendapat persepsi mahasiswa terhadap kebijakan ini bagi perekonomian. Hasil penelitian ini menunjukkan pajak ditanggung pemerintah untuk PPh Pasal 21 tidak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, namun bagi UMKM kebijakan ini mempunyai pengaruh.

Kata kunci: Pajak Ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 21, UMKM

## 1.1 Pendahuluan/Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus-19* (Covid-19) yang dimulai dari Propinsi Wuhan, Cina, pada akhir tahun 2019 telah membawa dampak besar bagi dunia dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi bahkan ke perilaku individu masyarakat dunia. Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, di dalam waktu relatif singkat dari ditemukan dua kasus berkembang menjadi puluhan kasus. Pemerintah cukup sigap ketika diumumkan masuknya Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan pembatasan kegiatan dengan menutup pertokoan dan perusahaan serta Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) atau *lock down* untuk mencegah adanya kerumunan manusia yang dapat mempercepat penularan covid dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia saat itu membawa dampak besar kepada ekonomi nasional. Tidak adanya kegiatan ekonomi karena pembatasan gerak dan penutupan usaha usaha menyebabkan tidak adanya pemasukan atau pendapatan dan penghasilan bagi kebanyakan masyarakat, yaitu kaum pekerja dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Antisipasi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan menjaga daya beli masyarakat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pajak. Tujuannya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan menyelamatkan sosial masyarakat melalui jaring pengaman sosial (*social safety net*) [1]. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang terdiri dari penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan di bidang perpajakan. Fokus dalam pembahasan dalam penelitian ini adalah pada bidang perpajakan [2]. pada bulan

Maret 2020. Dalam bidang perpajakan diatur penyesuaian tarif pajak bagi wajib pajak badan, perpajakan dalam kegiatan perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), memperpanjang waktu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, dan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa keringan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional [2].

Salah satu untuk merelisasikan PERPU No.1, Menteri Keuangan membuat kebijakan dalam bidang perpajakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, PMK nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dan PMK nomor 44 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dalam PMK nomor 28 mengatur relaksasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk barang/jasa, Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk impor barang dan jasa [3]. PMK nomor 44 mengatur relaksasi perpajakan untuk pajak penghasilan karyawan (Pajak Penghasilan Pasal 21- PPh Pasal 21) yang mempunyai penghasilan yang bersifat tetap paling besar Rp 200.000.000,- setahun dengan kriteria perusahaan yang diatur dalam PMK ini dan dikecualikan karyawan yang mendapat penghasilan dari anggaran dan belanja negara atau ditanggung negara, insentif Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, yaitu peraturan yang diperuntukan untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang dalam menghitung besarnya pajak penghasilannya sebesar 0.5 % dari peredaran bruto, insentif pajak penghasilan impor untuk ketentuan yang berlaku dalam PMK ini, pengurangan cicilan pajak penghasilan pasal 25 bagi

wajib pajak badan sesuai dengan kriteria dalam PMK ini, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai sesuai dengan kriteria dalam PMK ini [4].

Dari beberapa relaksasi bidang perpajakan tersebut, penelitian ini dibatasi pada PMK nomor 44/PMK.03/2020 yang dikhususkan pada relaksasi keringanan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan untukUMKM. Relaksasi pajak ini menurut PMK nomor 44/PMK.03/2020 sangat berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah namun mempunyai jumlah yang sangat besar selain kelompok ini yang harus mendapatkan *social safety net* dan melakukan pengeluaran rumah tangga yang besar [5]. Relaksasi pajak ini merupakan Pajak Ditanggung Pemerintah. Alasan Pembatasan pembahasan dalam penelitian ini adalah, pertama, besarnya pengeluaran rumah tangga yang merupakan salah indikator adanya pertumbuhan perekonomian. Kedua PMK nomor 44/PMK.03/2020 yang pada awalnya hanya berlaku hanya enam bulan, namun diperpanjang sampai akhir tahun 2021 dengan mengganti PMK baru. Berdasarkan ini, tujuan penelitian ini adalah ingin melihat berapa besar pengaruh kebijakan Pajak Ditanggung Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan jumlah yang besar berdampak pada stabilan keuangan negara atau perekonomian Indonesia dalam masa pandemi Covid-19 dalam persepsi mahasiswa yang mempelajari ekonomi dan perpajakan. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa sebagai kelompok awam berintelektual, artinya mempunyai pengetahuan tetapi bukan ahlinya

## **1.2 Isi dan pembahasan**

### **Landasan Teori**

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan sangat menentukan untuk kelangsungan pembangunan ekonomi negara [6]. Perekonomian dikatakan

mengalami pertumbuhan jika banyaknya sektor ekonomi yang tumbuh, sehingga menjadi suatu pertumbuhan yang agregat dan akan terlihat pada output terhadap barang/jasa secara agregat, atau sering disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) [7]. Naiknya PDB akibat naiknya *output* produksi barang atau jasa. Kenaikan *output* barang dan jasa karena adanya kenaikan konsumsi pada masyarakat atas barang dan jasa dalam satu periode atau satu tahun. Konsumsi barang dan jasa membutuhkan uang untuk dibelanjakan. Dengan demikian akan menciptakan permintaan agregat, yaitu seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh laporan masyarakat guna membeli barang dan jasa [5]. Dalam perekonomian tertutup. Dalam perekonomian tertutup permintaan agregat dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu 1) Pengeluaran Konsumsi oleh Rumah Tangga (*Consumption - C*), 2) Pengeluaran Investasi yang dilakukan Perusahaan (*Investment - I*), dan 3) Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah (*Government - G*) yang dapat secara agregat dapat melalui pengeluaran pemerintah secara langsung dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi [5]. Konsumsi berarti pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan mereka [8]. Jika permintaan agregat diberi notasi  $Z$ , maka  $Z$  adalah  $C+I+G$ . Menurut teori Keynes, keputusan pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga sangat mempengaruhi perilaku perekonomian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsumsi dalam jangka pendek mempunyai peran untuk menentukan permintaan agregat, sedangkan konsumsi dalam jangka panjang konsumsi akan berperan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi [6].

Pendapatan masyarakat tidak dapat dikonsumsi semuanya. Faktor yang menyebabkan semua pendapatan tidak dibelanjakan karena adanya pajak (*Tax*- T) dan tabungan (*Saving* – S). Dengan demikian, besarnya permintaan agregat adalah  $C+I+G- T-S$ . Penerimaan pendapatan negara dari sektor perpajakan sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara [9], bahkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan panjang akan memberikan pengaruh positif terhadap PDB [10]. *Saving* merupakan suatu pilihan yang dapat dilakukan oleh seseorang, namun pajak suatu kewajiban mutlak dari penghasilan yang harus dibayarkan ke negara. Dengan demikian, kenaikan tarif atau pajak yang ditetapkan pemerintah akan mengurangi konsumsi masyarakat, walaupun menaikkan keuangan negara, pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya [5].

b. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran didefinisikan sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasaan tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum [11]. Sedangkan menurut Undang- Undang nomor 16 tahun 2009 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Dalam pengenaan pajak perlu dipahami subyek pajak dan obyek pajak. Subyek pajak adalah suatu badan usaha atau perorangan yang menurut undang-undang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Subyek pajak dapat disebut Wajib Pajak. Sedangkan obyek pajak adalah obyek yang dimiliki oleh subyek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak menurut

undang-undang, seperti penghasilan, harta tidak bergerak seperti bangunan, dan harta bergerak seperti kendaraan. Dalam konteks penelitian, obyek pajak adalah defisini yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun” [12].). Subyek pajak perorangan yang disebut Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah subyek pajak perorangan yang menurut undang-undang sebagai wajib pajak. WPOP ini mendapat penghasilan sebagai obyek pajak dari usahanya sendiri, atau bekerja dengan orang lain dengan mendapat imbalan. Sedangkan subyek pajak dalam bentuk badan usaha yang juga disebut WP Badan, mendapatkan penghasilan sebagai obyek pajak dari transaksi operasi mereka

c. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

PPh Pasal 21 merupakan peraturan pembayaran perpajakan untuk tahun berjalan, dengan cara memotong pajak penghasilan yang diperoleh atau yang didapatkan WPOP dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan [13]. Menurut undang-undang perpajakan, PPh Pasal 21 merupakan pajak yakni “pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh”[12] pemberi kerja, pemerintah, dana pensiun, dan penyelenggara yang melakukan pembayaran. Ini merupakan pajak WPOP. Pajak ini dibayarkan WPOP ke negara melalui pemberi kerja. Pemberi kerja mempunyai wewenang sebagai perantara pemerintah untuk memotong pajak atas penghasilan karyawan, kemudian pajak yang dipotong disetorkan ke kas

negara.

Relaksasi pajak PMK nomor 44/PMK.03/2020 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja terhadap pegawai yang memenuhi kriteria pada PMK ini. Pajak yang dipotong tidak disetor ke kas negara, namun kembalikan ke karyawan. Pemberi kerja tetap melakukan perhitungan pemotongan dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak, oleh karenanya relaksasi ini sering disebut Pajak Ditanggung Pemerintah.

d. Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha dengan modal dan total harta yang relatif kecil dengan menjual barang dan jasa ke banyak orang dengan nilai transaksi kecil namun dapat dengan frekuensi yang besar. UMKM dapat merupakan usaha perorangan, beberapa orang atau berbentuk badan usaha. Kategori UMKM menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UMKM dari tiga faktor, yaitu modal, perputaran penjualan dan jumlah tenaga kerja. Peraturan menetapkan usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai modal, tidak termasuk tanah dan bangunan, sampai dengan 1 milyar Rupiah bagi usaha Mikro, 1- 5 milyar Rupiah untuk usaha Kecil dan 5-10 milyar Rupiah untuk usaha Menengah. Perputaran penjualan usaha mikro maksimal 2 milyar rupiah, untuk usaha Kecil dengan perputaran penjualan 2-15 milyar Rupiah, dan usaha Menengah sebesar 15-50 Milyar Rupiah. Untuk jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga, untuk usaha Mikro paling banyak mempekerjakan 10 orang, usaha Kecil 10-49 orang dan usaha Menengah sebanyak 50-150 orang [14] UMKM dapat merupakan WPOP atau WP Badan. Penghitungan pajak bagi UMKM dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pertama dengan menyelenggarakan

pembukuan, kedua dengan norma Norma Penghitungan Penghasilan Neto, yaitu pengenaan pajak berdasarkan penghasilan dengan tarif yang ditetapkan dengan peraturan perpajakan dikali tarif pajak, dan ketiga sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang bersifat final. Cara ketiga ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Penghitungan pajak dengan cara pembukuan dapat dilakukan oleh UMKM orang pribadi dan keharusan bagi yang berbentuk badan usaha. Dalam relaksasi pajak PMK nomor 44/PMK.03/2020, pajak UMKM yang ditanggung pemerintah adalah UMKM orang pribadi yang menghitung pajaknya dengan mengikuti Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Tarif pajak untuk UMKM diberikan tarif yang rendah agar tidak mengganggu arus kas usaha dan tetap menjaga tingkat kepatuhan [15].

e. Hubungan Pajak dengan Pertumbuhan Perekonomian

Salah satu indikator pertumbuhan perekonomian suatu negara ditentukan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) [9]. PDB dipengaruhi oleh faktor konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga atau masyarakat, dan pemerintah. Konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau usaha. Penghasilan yang diperoleh masyarakat tidak semua dibelanjakan sehingga tidak mengoptimalkan PDB [5], tetapi harus dipotong dengan pajak yang sudah menjadi kewajiban kepada negara. Pajak Penghasilan akan mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan setiap individu. Dengan demikian, kenaikan pajak penghasilan akan konsumsi yang berdampak pada PDB, dan akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan pembayar pajak dan *free rider*, dan sebaliknya. Jadi tingkat pajak penghasilan akan mempengaruhi PDB atau pertumbuhan ekonomi nasional.

## **Pembahasan**

### **a. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner secara virtual. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara dengan kriteria sudah mendapat mata kuliah Pengantar Ekonomi, Perpajakan dan mengetahui kebijakan relaksasi PPh Pasal 21 dan UMKM, mahasiswa yang telah mempunyai usaha UMKM, sehingga mereka dapat memahami atau mempunyai persepsi dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan perekonomian dalam masa pandemi Covid-19. Sedangkan obyek penelitian ini difokuskan pada relaksasi yang diterima oleh karyawan dan UMKM atas Pajak yang Ditanggung Pemerintah.

Kuesioner dibuat berdasarkan ketentuan PMK yang terkait dengan Pajak yang Ditanggung Pemerintah atas PPh Pasal 21 dan UMKM, meliputi :

- 1) Pajak Ditanggung pemerintah menguntungkan bagi Karyawan/UMKM
- 2) Pajak Ditanggung Pemerintah meningkatkan penghasilan karyawan/UMKM
- 3) Pajak Ditanggung Pemerintah meningkatkan kesejahteraan kas Karyawan/UMKM
- 4) Pajak Ditanggung oleh pemerintah sangat berarti bagi karyawan/UMKM
- 5) Pajak Ditanggung Pemerintah meningkatkan daya beli/konsumsi karyawan/UMKM

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi terdiri dari pertanyaan yang meliputi

- 1) Relaksasi dapat memperlambat laju pengangguran
- 2) Relaksasi ini menyebabkan roda perekonomian tetap berjalan
- 3) Relaksasi ini menjaga daya beli masyarakat
- 4) Relaksasi ini akan menambah pendapatan negara
- 5) Relaksasi ini meningkatkan *tax ratio*

Pertanyaan mengenai pengangguran mempunyai korelasi terhadap manfaat PMK ini yaitu pajak karyawan. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja selama pandemi, maka Pajak Ditanggung Pemerintah terhadap PPh Pasal 21 ini tidak berdampak bagi mereka. Pemutusan hubungan kerja juga dapat berdampak pada UMKM jika karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja melakukan usaha sebagai UMKM. Untuk pertanyaan yang berhubungan dengan *tax ratio* diharapkan dengan diberinya relaksasi pajak, maka UMKM atau karyawan tidak ragu untuk melakukan pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan ratio pajak ini di mana ratio ini akan digunakan sebagai asumsi dalam membuat Rencana Pendapatan Belanja Negara periode berikutnya.

Dari kuesioner yang disebar tahun 2020 ketika PMK nomor 44/PMK.03/2020 baru berjalan dua bulan. Kuesioner yang valid sebanyak 178 kuesioner. Dari kuesioner tersebut dilakukan uji reliabilitas dan validitas. Hasil uji dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas – Uji Pendahuluan

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	AVE
Laten 1 - PPh Pasal 21	0,778	0.540
Laten 2 – UMKM	0,882	0.538
Laten 3 – Pertumbuhan	0.817	0.529

Sumber : Hasil proses

PLS V3.2

Dari hasil uji ini, terlihat reliabilitas data yang terkumpul mempunyai nilai di atas 0.7 yang artinya data yang terkumpul mempunyai reliabilitas. Sedangkan validitas terlihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0.5 yang menunjukkan data tersebut valid.

b. Hasil Penelitian

Survery dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2021 sampai 9 Agustus 2021 setelah 15 bulan kebijakan relaksasi berjalan. Subyek penelitian ini tetap mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unvieristas Tarumanagara dengan kriteria sudah mendapat mata kuliah Pengantar Ekonomi, Perpajakan dan mengetahui kebijakan relaksasi PPh Pasal 21 dan UMKM, mahasiswa yang telah mempunyai usaha UMKM atau membantu orang tua. Kuesioner yang masuk sebanyak 79, dengan 1 tidak valid, dari responden yang saat ini kuliah di semester 5 dan 7.

Hasil proses menggunakan PLS V3.2 menunjukkan hasil reliabilitas dengan scala *cornbach's alpha* di atas 0.7 dan validitas lebih besar dari 0.5 seperti tabel di bawah ini:

Variabel	<i>Cornbach's</i>	<i>Composite Reliability</i>	AVE
PPh Pasal 21	0.767	0,842	0.518
UMKM	0.823	0,877	0.589
Pertumbuhan ekonomi	0.768	0.832	0.501

Sumber : Hasil proses PLS V3.2

Tabel 1.2 Hasil Uj Diskriminasi Validitas

	Pertumbuhan Ekonomi	PPh Pasal 21	UMKM
Pertumbuhan Ekonomi	0.706		
PPh Pasal 21	0.519	0.719	
UMKM	0.600	0.703	0.768

Sumber : Hasil proses PLS V3.2

Tabel 1.3 Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas

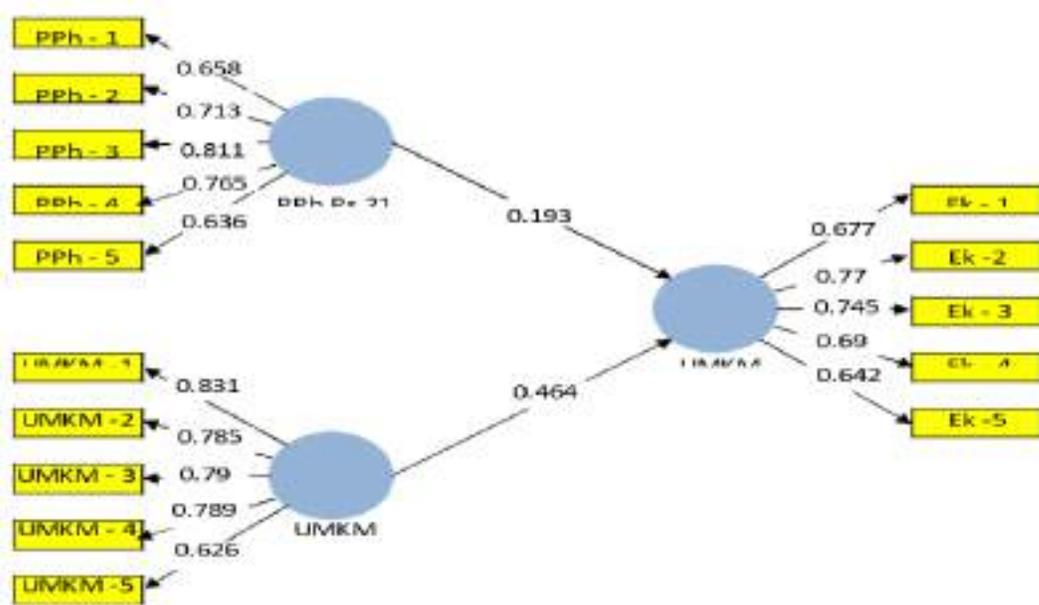
Hasil proses regresi terhadap data ini menghasilkan hasil uji pengaruh seperti dibawah ini :

<i>Original</i>	<i>Sample</i>	<i>Std</i>	<i>T-</i>	<i>P-Value</i>	
	<i>Sample</i>	<i>Mean</i>	<i>Deviation</i>	<i>Statistics</i>	
0.193	0.222	0.138	1.393	0.154	
UMKM	0.464	0.460	0.133	3.484	0.001

Sumber : Hasil proses PLS V3.2

Tabel 1.4 Tabel Hasil Uji Pengaruh

Sedangkan hasil koefisien antar variabel laten dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Koefisien Antar Variabel

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa persepsi mahasiswa terhadap Pajak Ditanggung Pemerintah untuk PPh Pasal 21 menunjukkan nilai *T-Stat* lebih kecil dari 1.96 atau nilai *P-Value* lebih besar dari 0.05 untuk tingkat kepercayaan 95%, yang artinya Pajak Ditanggung Pemerintah untuk PPh Pasal 21 tidak mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jika dilihat dari koefisien persepsi mahasiswa mengenai PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, bahwa kebijakan ini tidak menguntungkan karyawan (PPh -1) dan tidak menaikkan konsumsi rumah tangga (PPh-5) yang mungkin disebabkan nilai nominal yang diperoleh wajib pajak relatif kecil, sehingga secara keseluruhan pajak PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah tidak membawa pengaruh terhadap perekonomian, hal ini terlihat koefisien variabel ini sebesar 0.193. Hasil ini tidak sejalan dengan pendapat kenaikan pajak akan menurunkan konsumsi rumah tangga yang akan mempengaruhi perekonomian, dan sebaliknya [5], karena kebijakan pajak ditanggung pemerintah sama artinya menurunkan pajak, namun tidak mempengaruhi perekonomian.

Lain halnya untuk UMKM, Pajak Ditanggung Pemerintah menunjukkan *T-Stat* 3.484 di mana angka ini lebih besar dari 1.96 atau nilai *P-Value* sebesar 0.001 yang lebih kecil dari 0.005, dimaknai bahwa Pajak Ditanggung Pemerintah bagi UMKM mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan pajak ditanggung pemerintah bagi UMKM dirasakan mempunyai menguntungkan (UMKM-1), meningkatkan penghasilan (UMKM-2), meningkatkan kesejahteraan (UMKM-3), dan sangat berarti (UMKM-4), namun kebijakan ini tidak menaikkan konsumsi (UMKM-5), hal ini disebabkan kemungkinan nilai pajak yang ditanggung pemerintah relatif kecil dan digunakan kembali untuk usaha. Persepsi mahasiswa dalam penelitian ini dapat dikatakan sejalan dengan pendapat bahwa penurunan pajak akan meningkatkan perekonomian melalui konsumsi rumah tangga [5], dan sesuai dengan Teori

Keynes menyatakan bahwa keputusan pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga sangat mempengaruhi perilaku perekonomian [7].

Dampak kebijakan ini terhadap perekonomian menurut mahasiswa tidak hanya menjaga roda ekonomi tetap berjalan (Ek-2) dan menjaga daya beli masyarakat (Ek-3), namun tidak membawa dampak terhadap adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (Ek-1), menambah pendapatan negara (Ek-4) dari adanya konsumsi rumah tangga, dan menaikkan *tax ratio* (Ek-5) di mana hal ini memang belum terlihat sebelum adanya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak pada tahun berikutnya.

Dari penelitian ini, persepsi mahasiswa mengenai kebijakan pajak ditanggung pemerintah bagi karyawan yang mempunyai penghasilan yang bersifat tetap dengan nilai maksimum Rp 200.000.000,- per tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Indonesia melalui konsumsi rumah tangga. Hal ini mungkin dapat dijelaskan karena adanya gelombang pemutusan kerja yang lebih banyak berdampak pada karyawan pada tingkat rendah yang masuk dalam kelompok ini, sedangkan karyawan pada tingkat menengah yang tidak masuk dalam kategori pajak PPh Pasal 21 tidak terkena pemutusan hubungan kerja. Sedangkan bagi UMKM, kebijakan ini sangat berarti. Kebijakan pajak ditanggung pemerintah bagi UMKM mempunyai pengaruh terhadap perekonomian melalui konsumsi rumah tangga karena insentif pajak yang diterima dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya.

### **1.3 Penutup**

Usaha pemerintah dalam menjaga perekonomian tidak terperosok terlalu dalam dalam pertumbuhan minus dan menjaga stabilitas keuangan, kebijakan untuk Pajak Ditanggung Pemerintah untuk pegawai yang memenuhi kriteria dalam PMK nomor 44/PKM.03/2020 dan UMKM, menurut persepsi mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumangara menunjukkan bahwa Pajak Ditanggung Pemerintah untuk pajak penghasilan bagi karyawan, PPh Pasal 21, tidak mempengaruhi terhadap perekonomian Indonesia saat pandemi Covid-19. Berbeda persepsi mahasiswa terhadap UMKM, relaksasi dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah bagi UMKM menunjukkan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karenanya kebijakan pemerintah untuk memajukan UMKM harus dilanjutkan. UMKM yang pernah menjadi penolong Indonesia pada saat krisis keuangan di Indonesia tahun 1998, kiranya dapat menjadi soko guru perekonomian Indonesia untuk menjadikan perekonomian Indonesia tetap berjalan ke arah positif

## Referensi

- [1] Dewi, S., Widyasari., Nataherwin. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9 No. 2 Oktober 2020 hlm. 108-124.
- [2] Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus DiSease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- [3] Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 /PMK.03/2020. Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- [4] Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020. Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- [5] Suratman, E, Eddy. 2009. Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan: Suatu Model Teoritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 125 – 137.
- [6] Tambunan, T. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- [7] Afiftah, A.T., Juliprijanto, W, dan Destiningsih, R. 2019. Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1988-

2017. *Directory Journal of Economic* Volume 1 Nomor 2.

- [8] Padli, Hailuddin, Wahyunadi. 2018. Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Swasta Dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001-2017. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol.17 No. 2.
- [9] Saragih, A, H. 2018. Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*. Vol. 3 (No. 1), Tahun 2018, Halaman 17-27.
- [10] Sumaryan, N, Wahyu 2019. Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati*, Volume 3, Nomor 1, November 2019, Hal 16-2.
- [11] Resmi, S. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi Sepuluh*. Jakarta: Saemba Empat.
- [12] Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- [13] Gunadi. 2002. *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 7 Tahun 2021. Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- [15] Mas'ud, A., Aliyu, A. A. and Gambo, E. M. J. 2014. *Tax Rate And Tax Compliance In Africa*. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 2(3), 22-30

## **Profil Penulis**

**Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA  
(Aust.), CSRS.**



Hendro Lukman menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara tahun 1987. S2 Magister Manajemen pada STIE IPWI tahun 1997.. Saat ini berprofesi sebagai dosen dan Ketua Jurusan Akuntansi di FEB Universitas Tarumanagara. Penelitian dan bidang pengajaran terkonsentrasi pada bidang Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal, Akuntansi Prilkau, Sistem Informasi, Audit, dan Pajak. Aktif mengikuti kegiatan asosiasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen DKI sebagai Sekretaris, ICAEW (sebagai tim pembekalan).

## **Kevin**

Kevin saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tarumanagara semester terakhir dan mempunyai UMKM dalam bidang kuliner. Kevin adalah salah satu dari Koordinator Tim Relawan Pajak tahun 2021 yang berakhir pada bulan September 2021

## **BAB 2**

# **Analisis Hukum Benford pada Marketplace di Masa Pandemi Covid-19**

Elsa Imelda

Elizabeth Inge Pratiwi

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

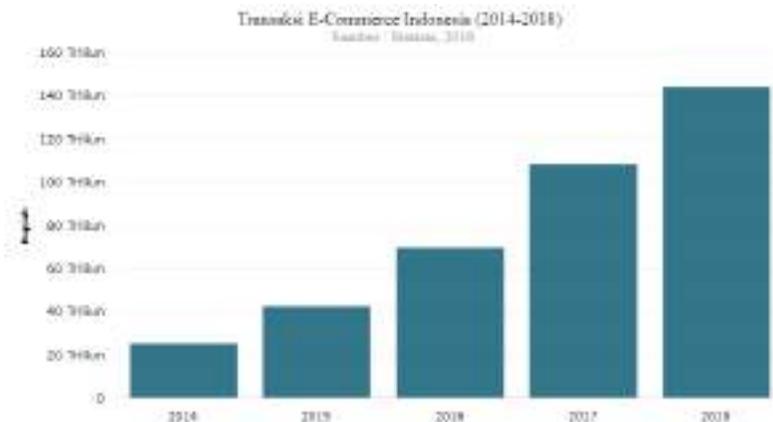
Pertumbuhan transaksi *Electronic Marketplace(EM)* semakin melejit di masa pandemi Covid-19. Hal ini juga menyebabkan peningkatan terjadinya *fraud* atau pelanggaran pada transaksi EM. Misalnya adanya transaksi fiktif di EM dengan tujuan mendapatkan *cashback* dan meningkatkan performa toko. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi fiktif di EM pada masa pandemic Covid-19 menggunakan analisis Hukum Benford. Uji Hukum Benford terdiri dari beberapa uji yang berbeda. Untuk mengidentifikasi transaksi fiktif dalam rangka perolehan cashback digunakan uji digit pertama, uji dua digit pertama dan uji duplikasi angka. Sedangkan untuk mendeteksi transaksi fiktif dalam rangka peningkatan performa toko uji yang dapat digunakan yaitu uji penjumlahan.

Kata Kunci : Benford Law, Transaksi Fiktif, *Electronic Marketplace (EM)*, Pandemi Covid-19

## 1.1 Pendahuluan/Latar Belakang

Digitalisasi selalu menjadi topik menarik dan terdepan saat ini di mana kita hidup di era revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi. Berbagai penemuan dan pengembangan teknologi canggih terjadi di era ini seperti robotik, *augmented and virtual reality (AR/VR)* dan internet. Pada era ini, internet berkembang dengan luar biasa cepat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, dimana kemudian terciptalah istilah “*internet of things*” yang juga menjadi tanda pada era revolusi industri 4.0. Penemuan internet sendiri merupakan penemuan yang sangat penting karena internet menjadi dasar bagi penemuan dan pengembangan teknologi lainnya yang semakin mempermudah kehidupan kita seperti contohnya *big data, cloud computing, artificial intelligence (AI)* dan *electronic marketplace*.

*Electronic marketplace (EM)* merupakan wadah yang mempertemukan penjual dengan konsumen untuk melakukan transaksi melalui sarana internet. Wadah ini dapat berupa virtual [1], [2], infrastruktur [3], portal [4], dll. Ketergantungan yang erat dengan teknologi menjadikan EM menjadi salah satu industri yang paling cepat berubah karena industri ini harus selalu mengadopsi dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Beberapa tahun belakangan EM menjadi tren bagi masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat dari jumlah transaksi EM yang mengalami peningkatan secara signifikan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Perkembangan EM di Indonesia Berdasarkan Jumlah Transaksi

Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di Indonesia sejak 1,5 tahun yang lalu hingga saat ini semakin mendorong percepatan adopsi digital di seluruh lapisan masyarakat yang kemudian mempercepat penyebaran tren mendasar EM yang sudah ada. Layanan pembelian kebutuhan secara online dengan metode pembayaran *cashless* dan pengiriman barang mempermudah masyarakat dalam melaksanakan protokol dan peraturan pemerintah setempat untuk tidak sering berpergian keluar dan selalu menjaga jarak. Pada tahun 2020, BPS [5] mencatat adanya peningkatan transaksi belanja di EM mencapai 30% dan diproyeksi akan mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun ini.

Namun *fraud* atau kejahatan baru (*cybercrime*) terus meningkat bersamaan dengan berkembangnya industri teknologi [6]. Pernyataan ini terbukti benar melihat kondisi saat ini di mana sejalan dengan perkembangan EM di Indonesia. Kasus penipuan yang terjadi di EM pun mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari data pelaporan EM. Beberapa contoh penipuan yang terjadi pada EM adalah seperti adanya transaksi fiktif, menjual barang palsu, tidak mengirim barang yang telah dibayar oleh pembeli, *auction fraud*, dll [7]. Pada bahasan kali ini akan diperdalam bentuk transaksi fiktif.

Transaksi fiktif merupakan kegiatan jual-beli barang yang sengaja dilakukan/direncanakan untuk memenuhi tujuan tertentu yang bersifat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya. Tujuan ini dapat berupa peningkatan performa toko, mendapatkan cashback, dll.

Tingginya tingkat persaingan di sebuah platform EM seringkali membuat penjual kesulitan dalam mengembangkan usahanya terutama bagi para pemain baru di dalam EM. Pembeli cenderung membeli pada penjual yang sudah menjual banyak barang dan/atau memiliki skor review yang tinggi [8] di mana hampir seluruhnya merupakan penjual yang telah lama terjun ke dalam EM tersebut. Oleh karena itu, dengan tujuan untuk menarik lebih banyak pembeli sehingga penjualan dapat meningkat, penjual berusaha untuk meningkatkan rewiu dan histori penjualan barang di tokonya (performa toko) dengan melakukan transaksi fiktif.

Survei yang dilakukan oleh iPrice Group menunjukkan bahwa saat ini terdapat 39 platform EM lokal dengan 5 pemain besar yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Sociolla dan Zalora. Selain EM lokal terdapat juga beberapa EM International yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti Amazon, Ebay dan Alibaba. Banyaknya pilihan platform EM di pasar Indonesia menyebabkan perlunya strategi inovatif untuk mengembangkan dan memperkuat posisi bersaing antar platform EM. Salah satu strategi marketing yang cukup sukses adalah strategi *cashback* yang dilakukan oleh Tokopedia. Meskipun strategi ini sukses untuk meningkatkan pengguna Tokopedia, tetapi secara bersamaan juga meningkatkan terjadinya transaksi fiktif dengan tujuan mendapatkan *cashback*.

Salah satu kasus nya seperti yang terjadi pada Oktober 2019 lalu dimana terdapat sekelompok orang asal Surabaya yang terdiri dari 3 orang yaitu Ramses, Hansel dan Kenno. Mereka melakukan transaksi fiktif untuk mendapatkan cashback dengan berperan sebagai penjual dan pembeli secara bergantian yang kemudian membagi keuntungan dari perolehan *cashback* yang didapat. Keuntungan yang diraup tercatat mencapai Rp 32jt dalam jangka waktu 5 bulan [9].

Pembahasan mengenai penipuan di EM telah banyak dibahas beberapa tahun belakangan ini. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penipuan yang terjadi di EM seperti menggunakan *acoustic analysis* [10], *prudential multiple consensus model* [11], *Microsoft fraud management system* [12], *Adversial Machine Learning Approach* [13], dll. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya penipuan di EM khususnya transaksi fiktif selama masa pandemik Covid-19 dengan menggunakan analisis Hukum Benford. Penulisan ini menggunakan Hukum Benford dikarenakan kemudahan penerapan analisis Hukum Benford untuk mendeteksi adanya transaksi fiktif di EM sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh semua kalangan tanpa membutuhkan keahlian khusus di suatu bidang, seperti IT misalnya. Analisis Hukum Benford dapat dilakukan hanya dengan menggunakan Ms Excel.

## 1.2 Isi dan pembahasan

### Hukum Benford

Hukum Benford atau yang juga dikenal sebagai Hukum Digit Pertama merupakan hukum bilangan anomali yang menyatakan bahwa dalam suatu kumpulan data angka “1” merupakan angka yang paling banyak muncul, kemudian diikuti angka “2”, “3”, dan seterusnya secara urut hingga ke angka “9” [14]. Hal ini akan terjadi untuk data yang bersifat natural dan terjadinya tidak diatur. Misalnya kedalaman laut di dunia ini akan lebih banyak diawali dengan kedalaman yang depannya angka “1” misalnya 1.250 meter, dibandingkan kedalaman laut yang diawali angka “2”, dst. Contoh lain dalam bidang ekonomi adalah transaksi penjualan di satu kasir di outlet akan lebih banyak diawali dengan angka “1” (misal 1.250.000, 156.200, 12.000 rupiah) dibandingkan penjualan yang diawali dengan angka “2” (misal 2.100.000, 278.000, 25.000 rupiah).

Pada tahun 2002, Mark J. Nigrini kemudian menerapkan penggunaan Hukum Benford untuk membantu mendeteksi terjadinya *fraud* dalam suatu pencatatan akuntansi [15] dan metode ini terbukti efektif digunakan untuk mendeteksi *fraud* [16]. Sehingga dalam tulisan ini penggunaan analisis Hukum Benford direkomendasikan untuk membantu mendeteksi adanya transaksi fiktif pada EM.

### Penggunaan Uji Hukum Benford untuk Mendeteksi Transaksi Fiktif

Analisis Hukum Benford dapat dibedakan menjadi beberapa macam uji. Uji Hukum Benford sendiri dapat dikategorikan lagi kedalam beberapa kelompok. Uji Hukum Benford sesuai urutannya adalah (a) uji primer (*primary tests*), (b) uji lanjutan (*advanced tests*), dan (c) uji terkait (*associated tests*).

Uji primer adalah uji paling utama pada Hukum Benford, uji ini terdiri dari : (a) uji digit pertama, (b) uji digit kedua, dan (c) uji dua digit pertama. Uji primer biasanya dijalankan pada angka positif atau angka negatif. Bilangan positif dan negatif dianalisis secara terpisah karena insentif untuk memanipulasi berlawanan untuk jenis bilangan ini.

Uji lanjutan dapat dijalankan pada data dengan atau tanpa uji primer. Pengujian lanjutan dapat dijalankan bahkan ketika data tidak diharapkan sesuai dengan Hukum Benford atau, dengan beberapa tinjauan, ternyata tidak sesuai dengan Hukum Benford. Uji lanjutan dapat digunakan pada (hampir) semua kumpulan data. Uji ini terdiri dari (a) uji penjumlahan dan (b) uji orde kedua

Uji ketiga disebut uji terkait karena uji ini bukan uji langsung dari Hukum Benford melainkan uji pelengkap yang dilakukan dalam hubungannya dengan uji Hukum Benford. Uji terkait dibagi menjadi 3 uji : (a) Uji duplikasi angka (*number duplication test*), (b) Uji dua digit terakhir (*last- two digit test*), dan (c) Model faktor distorsi (*model distortion factor*).

Penggunaan uji pada Hukum Benford harus disesuaikan dengan tujuan, jenis dan tipe data seperti apa yang ingin kita analisa. Tidak semua uji Hukum Benford tepat dijalankan untuk semua tipe data sehingga, uji yang akan kita lakukan untuk menganalisa terjadinya transaksi fiktif pada EM berbeda antara pengujian transaksi fiktif untuk mendapatkan *cashback* dan transaksi fiktif untuk meningkatkan performa toko. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya.

### Transaksi Fiktif untuk Mendapatkan *Cashback*

Data yang digunakan untuk menganalisis terjadinya transaksi fiktif dengan motif mendapatkan *cashback* adalah data transaksi selama periode *cashback* pada EM yang melakukan strategi *cashback* seperti Tokopedia dan Bukalapak. Beberapa uji yang disarankan dalam penulisan ini untuk mendeteksi adanya transaksi fiktif dengan tujuan mendapatkan *cashback* adalah uji digit pertama, uji dua digit pertama dan uji duplikasi angka. Semuanya ini memakai data visualisasi saja, bukan data riil. Pengolahan menggunakan Microsoft Excel.

#### a. Uji Digit Pertama

Uji digit pertama dapat digunakan sebagai test dasar untuk melihat kenormalan data secara general. Perhitungan frekuensi aktual digit pertama dapat dihitung dengan rumus:

$$=VALUE(LEFT(DATA;1)) \quad (1)$$

$$=COUNTIF(ALL DATA WITH FIRST DIGIT; D_1) \quad d_1 \in \{1, 2, \dots, 9\} \quad (2)$$

Di mana pada rumus kedua, perhitungan dilakukan sebanyak 9x untuk setiap angka dengan digit pertama 1 sampai dengan 9. Perhitungan frekuensi digit pertama Hukum Benford dirumuskan sebagai berikut:

$$1 \quad \text{Prob}(D = d) = \log\left(1 + \frac{1}{d}\right); \quad d \in \{1, 2, \dots, 9\} \quad (3)$$

Setelah itu hasil perhitungan aktual dan Benford divisualisasikan menjadi sebuah grafik seperti gambar 1.2. Gambar 1.2 menunjukkan adanya anomali dimana terdapat lonjakan besar pada digit pertama 3. Ketidaksesuaian data aktual dan Benford untuk digit pertama 3 mengindikasikan (*red flight*) adanya

transaksi fiktif pada data, tetapi dari uji ini memiliki tingkatan yang terlalu tinggi untuk digunakan di mana hasilnya memberikan uji sampel audit yang terlalu besar. Tidak efisien untuk melakukan pengecekan pada setiap transaksi dengan digit pertama angka 3, dengan ini diperlukan uji lanjutan untuk memperkecil sampel penelitian audit yang nantinya akan kita teliti.



Gambar 1.2 Contoh Hasil Uji Digit Pertama Hukum Benford

b. Uji Dua Digit Pertama

Uji dua digit pertama adalah uji yang lebih terfokus daripada uji digit pertama dan uji digit kedua. Uji ini ada untuk mendeteksi duplikasi digit yang tidak normal dan kemungkinan bias dalam data. Grafik dua digit pertama berisi semua informasi dalam grafik digit pertama dan kedua. Grafik dua digit pertama memberi kita lebih banyak informasi daripada kedua grafik tersebut (grafik uji digit pertama dan uji digit kedua). Rumus untuk menghitung frekuensi aktual dua digit pertama pada sebuah data adalah:

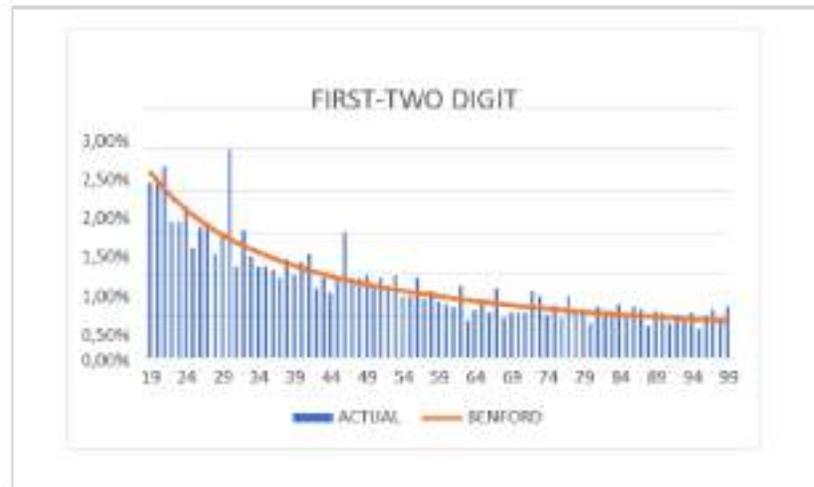
$$=VALUE(LEFT(DATA;2)) \quad (4)$$

$$=COUNTIF(ALL FIRST DIGIT;1.....9) \quad (5)$$

Perhitungan frekuensi dua digit pertama Hukum Benford dirumuskan sebagai berikut:

$$(6) \quad \text{Prob}(\text{1 1} = i j) = \log\left(1 + \frac{1}{i j}\right); \quad i j \in \{10, 11, \dots, 99\}$$

Gambar 1.3 menunjukkan adanya anomali dimana terdapat lonjakan besar pada dua digit pertama angka 30 dan 46. Hasil uji ini menghasilkan sampel audit yang lebih sedikit dibandingkan dengan uji digit, dari yang sebelumnya 30% dari keseluruhan data (frekuensi aktual digit pertama 3) menjadi hanya 2.5% (frekuensi aktual dua digit pertama 30). Uji dua digit pertama juga memberikan hasil analisis yang lebih mendetail dibandingkan hasil uji digit pertama, di mana pada uji digit pertama tidak terlihat anomali pada angka digit pertama 4 sedangkan setelah dilakukan uji dua digit pertama ditemukan bahwa terdapat anomali pada dua digit angka pertama 46. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nigrini bahwa pengujian digit pertama mungkin menunjukkan pola yang sesuai meskipun data memiliki beberapa masalah serius yang menunjukkan bahwa itu tidak sesuai dengan Hukum Benford [15].



Gambar 1.3 Contoh Hasil Uji Dua Digit Pertama Hukum Benford

c. Uji Duplikasi Angka

Uji duplikasi angka adalah uji yang mengidentifikasi nomor tertentu yang menyebabkan lonjakan pada grafik uji primer (uji orde-pertama) dan uji penjumlahan. Lonjakan pada grafik uji pertama biasanya disebabkan oleh beberapa angka tertentu yang sering muncul secara tidak normal, sedangkan lonjakan pada grafik penjumlahan biasanya dikaitkan dengan jumlah yang tidak normal atau kelompok angka berukuran sedang yang berulang.

Dalam melakukan uji ini kita dapat menggunakan kapabilitas tabel pivot untuk penghitungan duplikasi angka tetapi, penggunaan variabel indikator lebih disarankan karena hasilnya lebih mudah untuk diformat dan disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Ada dua variabel indikator yang digunakan. Indikator pertama menghitung jumlah yang sama dan indikator kedua menunjukkan kapan penghitungan tertinggi untuk nomor tertentu telah tercapai.

Nominal	COUNT	RANK
3,000,000	213	1
46,500	103	2
53,900	64	3
371,200	47	4
25,000	42	5
209,000	31	6
110,000	28	7

Tabel 1.1 Contoh Hasil Uji Duplikasi Angka Hukum Benford

Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel 1.4 adalah bahwa terdapat pengulangan transaksi dengan nominal sebesar Rp 3jt sebanyak 213 kali. Jika diperhatikan, tingginya tingkat persaingan pasar di EM menyebabkan penjual bermain dalam hal harga untuk meningkatkan posisi bersaing sehingga menyebabkan nominal barang yang dijual di Tokopedia memiliki tingkat diversifikasi yang tinggi sehingga kecil kemungkinan suatu barang memiliki tingkat pengulangan transaksi dalam jangka waktu sebentar (periode *cashback*), meskipun mungkin terjadi karena beberapa alasan seperti barang tersebut sedang menjadi trend saat ini sehingga banyak yang membeli. Kim Youngsoo [17] mengatakan bahwa konsumen online enggan membeli produk mahal hanya melalui informasi yang ditransfer secara digital sehingga mereka cenderung membeli produk murah, sehingga kecil kemungkinan terjadi pengulangan transaksi yang sama sebanyak 213 kali dengan nominal besar mencapai Rp 3jt. Terlebih jika diperhatikan *cashback* yang dibagikan oleh Tokopedia sebesar 10% dari total transaksi dengan maksimum *cashback* sebesar Rp 300rb sehingga, dengan melihat hasil uji duplikasi angka dapat disimpulkan bahwa mungkin telah terjadi transaksi fiktif untuk mendapatkan *cashback*. Hal inilah yang terjadi pada kasus Ramses, Hansel dan Kenno [9].

### **Transaksi Fiktif untuk Meningkatkan Performa Toko**

Data yang digunakan untuk melakukan uji Hukum Benford terhadap transaksi fiktif yang dilakukan untuk meningkatkan performa toko sedikit berbeda dengan data untuk menguji adanya transaksi fiktif untuk mendapatkan *cashback*. Jika di uji sebelumnya kita menggunakan data transaksi EM secara keseluruhan pada periode *cashback*, pada uji kali data yang akan digunakan adalah data transaksi setiap penjual di EM. Data yang digunakan juga harus mengikuti beberapa persyaratan seperti : a) Penjual harus menjual banyak produk yang memiliki disersifikasi harga yang tinggi. Jika seller hanya menjual beberapa produk, misalnya 6 macam produk maka hanya akan terdapat 6 harga sedangkan dalam uji Hukum Benford yang paling general, uji digit pertama dan uji digit kedua, terdapat 9 angka, b) Penjual setidaknya telah melakukan minimal 300 transaksi. Nigrini menyatakan bahwa uji Hukum Benford dapat dilakukan jika sebuah data memiliki setidaknya 300 pencatatan meskipun jika kita mengharapkan kesesuaian yang baik dengan Hukum Benford setidaknya dibutuhkan 1.000 catatan [15], c) Data yang dipakai adalah total 1x transaksi, misalkan dalam 1x pembelian terdiri dari 5 barang dengan nominal per barang Rp 50rb sehingga total transaksi menjadi Rp 250rb.

Uji penjumlahan merupakan uji yang sesuai yang dapat digunakan untuk melihat apakah telah terjadi transaksi fiktif dalam rangka peningkatan performa toko. Uji penjumlahan bertujuan untuk mencari angka yang terlalu besar di suatu kumpulan data. Uji ini mengidentifikasi angka- angka yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kenormalan untuk data tersebut. Uji penjumlahan mendeteksi transaksi besar yang tidak normal di mana “besar yang tidak normal” berarti relatif besar terhadap data lainnya. Oleh karena itu, definisi “besar” itu sendiri tergantung pada data yang dianalisis. Uji penjumlahan menganalisis penjumlahan

angka dengan berbagai digit (10, 11, 12,..., 99). Uji orde pertama (*first-order test*) biasa didasarkan pada hitungan angka dengan berbagai digit. Misal, jika angkanya adalah 1103, 1964, 116, 505, dan 22.04, maka hitungan bilangan dengan digit pertama 1 adalah 3 (1103, 1964, dan 116) sedangkan penjumlahan dari angka-angka dengan digit pertama 1 adalah 3.183 (1103+1964+116). Jumlah untuk berbagai digit diharapkan sama, dan lonjakan pada suatu digit memberi tahu kita bahwa ada beberapa angka tunggal yang besar (misalnya, 1964 merupakan angka besar jika dibandingkan 116)

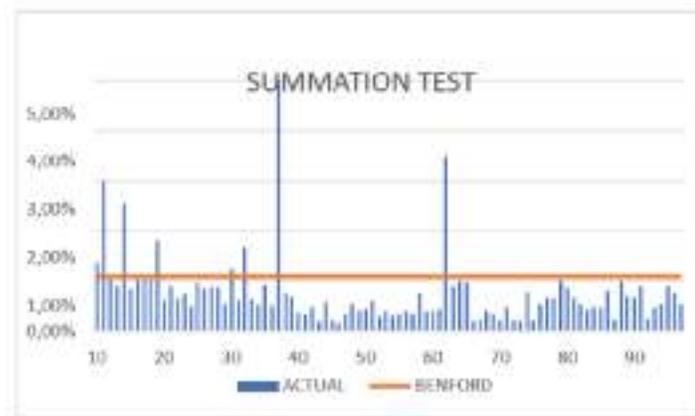
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan dua digit pertama pada data dengan menggunakan rumus

$$=VALUE(LEFT(DATA;2)) \tag{7}$$

Setelah itu kita perlu menjumlahkan seluruh data yang memiliki dua digit pertama yang sama untuk mendapatkan frekuensi data aktual. Perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Aktual } f_i = \frac{\sum \text{nominal } x_1 x_2}{\text{Total nominal data}} \tag{8}$$

Frekuensi digit Hukum Benford untuk uji penjumlahan sama untuk setiap dua digit angka pertama yaitu sebesar 1,1.



Gambar 1.4 Contoh Hasil Uji Penjumlahan Hukum Benford

Hasil penjumlahan untuk data pada Gambar 1.4 menunjukkan lonjakan besar pada dua digit pertama 13, 16, 39 dan 64 serta lima lonjakan kecil pada dua digit pertama 45, 47, 48 dan 75. Data dengan lonjakan kecil dapat kita abaikan karena besar kemungkinan hasil ini disebabkan oleh kurangnya diserfisikasi harga pada produk

yang dijual seller sehingga tidak terdapat transaksi dengan dua digit pertama tersebut. Fokus kita pada gambar diatas adalah lonjakan besar yang terjadi. Dalam data ini, ada kemungkinan bahwa lonjakan dapat terjadi karena disebabkan oleh 1 transaksi besar (katakanlah) Rp 3.9jt atau 10 transaksi yang masing-masing bernilai Rp 390rb.

Kita tidak dapat mengetahui hanya dengan melihat pada hasil gambar 1.5 apakah lonjakan disebabkan oleh (katakanlah) 1 transaksi besar Rp 3.9jt atau 10 transaksi yang masing-masing bernilai Rp 390rb sehingga diperlukan pengamatan lebih lanjut pada data. Pengamatan dapat dilakukan dengan mensortir data dari nominal terbesar ke nominal terkecil seperti pada tabel 1.

Tgl Pemesanan	No Pesanan	Pesanan			
		Deskripsi Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
03/06/2020	475683FGK78TV	Earphone JBL	10	Rp 390,000	Rp 3,900,000
17/03/2021	65089YGH67FDE	Speaker Bluetooth	1	Rp 1,600,000	Rp 1,600,000
16/08/2020	327180GT34CF0	Earphone Samsung	2	Rp 650,000	Rp 1,300,000
07/07/2021	549008HYTL56G	Kabel Konektor	1	Rp 640,000	Rp 640,000
05/09/2020	6580HTE4BG6JI	Earphone JBL	1	Rp 390,000	Rp 390,000
27/08/2020	79100GTHI0DF9	Earphone JBL	1	Rp 390,000	Rp 390,000

Tabel 1.2 Sortir Data Transaksi Seller di EM

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa lonjakan besar pada 39 dapat dikaitkan dengan pesanan bernilai Rp 3,9jt dan 2 faktur yang masing-masing bernilai Rp 390rb. Tiga pesanan berikutnya yaitu sebesar Rp 1,6jt; Rp 1,3jt dan Rp 640rb merupakan penyebab lonjakan dua digit pertama 16, 13 dan 64.

Transaksi dengan total sebesar Rp 3,9jt perlu menjadi perhatian lebih lanjut karena transaksi ini dapat menunjukkan indikasi terjadinya transaksi fiktif. Jika seorang penjual melakukan transaksi fiktif untuk meningkatkan performa tokonya mereka tentunya akan melakukan order dalam jumlah yang cukup banyak sehingga dapat meningkatkan histori pembelian yang kemudian akan meningkatkan performa toko tersebut. Meskipun memang ada kemungkinan lain seperti terdapat *reseller* yang membeli dari toko tersebut.

### **1.3 Penutup**

Tulisan ini dibuat untuk memberikan kontribusi terhadap permasalahan terkini yaitu meningkatnya transaksi fiktif di EM terutama dimasa pandemi Covid-19. Penggunaan analisis Hukum Benford dianjurkan dengan alasan utama karena analisis Hukum Benford cenderung lebih mudah diterapkan oleh siapapun dan media yang digunakan sangat umum yaitu Ms.Excel yang tentunya dimiliki oleh setiap orang.

Penggunaan uji Hukum Benford yang berbeda pada pengujian data transaksi untuk menemukan adanya transaksi fiktif dengan 2 tujuan yang berbeda yaitu mendapatkan cashback dan meningkatkan performa toko sangat dibutuhkan. Uji yang sesuai akan meningkatkan ketepatan analisis. Untuk mendeteksi adanya transaksi fiktif dalam rangka menerima cashback, dianjurkan untuk menggunakan uji digit pertama, uji dua digit pertama dan uji duplikasi angka sedangkan untuk mendeteksi adanya transaksi fiktif dengan tujuan meningkatkan performa toko uji yang disarankan adalah uji penjumlahan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa penggunaan analisis Hukum Benford hanya berfungsi sebagai alarm (red flight) yang mengidentifikasi adanya kemungkinan terjadinya fraud, bukan keterpastian terjadinya fraud. Sehingga analisis lebih lanjut harus dilakukan seperti yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan.

## Referensi

- [1] I. Istijanto, "Kampus Merdeka: Peluang dan Tantangannya." pp. 12-16.: *overview and management consideration* (Idea Group Publishing: Hershey, PA).
- [2] Gulledge, T., 2002 *Computers Industry* **49**-1-47.
- [3] Zhu, K., 2002 *Electronic Markets* **12**-2-92
- [4] Ratnasingam, P., 2005 *Decision Support System* **39**-3-525.
- [5] BPS, 2020, *Statistik E-Commerce 2020* (Badan Pusat Statistik Publishing)
- [6] Pasaribu, A. M. F., Syahrin, A., Hasibuan, S., 2017 *Jurnal Hukum*
- [7] ICCS, 2009, *2009 Internet Crime Report* (The National White Collar Crime Center NX3C Publishing) [8] Kemendikbud, "Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi," *Kepala Biro Hukum Kemendikbud RI*, 2020.
- [8] Chung-Hoon, P. dan Young-Gul, K., 2003 *International Journal of Retail & Distribution Management* **31**-1-16.
- [9] Hasiholan, C. T. A. dan Samudra, A. H., 2020 *Jurnal Yustika Media Hukum & Keadilan* **23**-2-119
- [10] Nascimento, D. C., Barbosa, B., Perez, A. M., dkk., 2019 *Entropy Journal* **21**-11-1087
- [12] Carta, S., Fenu, G., Recupero, D. R., Saia, R., 2019 *Journal of Information Security and Application* **13**-22-2214.
- [13] Guo, Q., Li, Z., An, B., dkk., 2019 *World Wide Web Conference* **19**-1-616.
- [14] Benford, F., 1938., *Proceeding of the American Philosophical Society* **78**-4-551.
- [15] Nigrini, M., 2012 *Benford's Law : Application for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection* (John Wiley & Sons, Inc. Hoboken Publishing: New Jersey).
- [16] Durtschi, C., Hillison, W., Pacini, C., 2004 *Journal of Forensic Accounting* **5**-17-34.
- [17] Kim, Y., Krishnan, R., 2015 *Journal of Management Science* **61**-10-1

### **Profil Penulis**

## **Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.**



Elsa Imelda menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara dan S2 Magister Sains di Universitas Gajah Mada. Saat ini berprofesi sebagai dosen dan kaprodi di S1 Akuntansi FEB Universitas Tarumanagara. Penelitian dan bidang pengajaran terkonsentrasi pada bidang akuntansi keuangan dan pasar modal serta audit. Aktif mengikuti kegiatan asosiasi profesi, berwirausaha, dan merupakan pembina sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

## **Elizabeth Inge Pratiwi**

Elizabeth Inge Pratiwi saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tarumanagara dan merupakan seorang Asisten Mahasiswa di Prodi S1 Akuntansi. Pernah mengikuti pelatihan brevet AB dan telah mendapatkan sertifikasi accurate. Memiliki 1 penelitian yang diterbitkan di prosiding dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepercayaan Diri Manajer Terhadap Risiko Kejatuhan

## **BAB 3**

# **Pengaruh Covid-19 terhadap *Return Saham Perusahaan Transportasi***

Rousilita Suhendah

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Covid-19, volume perdagangan, *market to book value* dan kapitalisasi pasar pada *return* saham perusahaan transportasi di BEI tahun 2020. Penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan Covid-19 berpengaruh negatif terhadap *return saham*, namun volume perdagangan, dan kapitalisasi pasar berpengaruh positif terhadap *return* saham. *Market to book value* tidak berpengaruh terhadap *return* saham. Implikasi penelitian ini menjelaskan berlakunya *signaling theory* dan bentuk pasar modal Indonesia yang semi strong sesuai dengan teori hipotesis pasar modal efisien yaitu suatu kondisi pasar dimana investor tidak memperoleh keuntungan abnormal pada saat ada publikasi informasi tentang perusahaan emiten.

Kata kunci: Covid-19, *Return* , Transportasi

## 1.1 Pendahuluan/Latar Belakang

Kondisi makroekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang terjadi di dunia. Hal ini berdampak juga pada pasar modal dunia, tidak terkecuali pasar modal di Indonesia. Pasar modal Indonesia yang berada dalam kelompok pasar modal yang berkembang juga dipengaruhi oleh perubahan ekonomi global yang terjadi saat ini. Pasar modal Indonesia merupakan salah satu tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dengan pihak yang memiliki modal. Pihak yang membutuhkan dana disebut emiten, sedangkan pihak yang memiliki modal disebut juga dengan pemegang saham atau investor. Emiten menggunakan dana yang diperoleh dari pasar modal untuk mempertahankan kelangsungan usaha di masa depan. Investor menanamkan dananya di perusahaan emiten untuk mendapatkan *return* atau *capital gain* dan bagian laba yang diperoleh perusahaan emiten dalam bentuk deviden.

Kinerja perusahaan emiten yang terdaftar di pasar modal Indonesia tidak dipengaruhi secara langsung oleh perubahan kondisi makroekonomi yang terjadi di Indonesia seketika, namun berpengaruh dalam interval waktu yang panjang dan lambat. Namun perubahan kondisi makroekonomi ini secara cepat mempengaruhi harga saham dari perusahaan emiten. Menurut [1] “*stock price represents the corporate value of public companies.*” Dari kalimat tersebut menunjukkan arti bahwa harga saham mencerminkan nilai perusahaan, yang menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Hal ini yang menyebabkan investor akan bertindak cepat seketika bila terjadi perubahan harga pada perusahaan emiten.

[2] menjelaskan dalam *signalling theory* bahwa perubahan harga saham emiten menjadi suatu sinyal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh

investor. Sinyal berupa informasi mengenai perubahan harga saham perusahaan emiten itu dapat berupa sinyal positif atau negatif yang ditangkap dan diterima oleh investor. Investor yang menerima sinyal tersebut akan merefleksikannya pada aktivitas pengambilan keputusan selanjutnya untuk membeli saham emiten atau menarik sahamnya. Jika sinyal yang diberikan perusahaan emiten berupa sinyal positif atau kabar baik maka investor akan menanamkan uangnya di perusahaan emiten. Namun jika sinyal yang diberikan perusahaan emiten berupa sinyal negatif atau kabar buruk, maka investor akan menarik kembali dananya di perusahaan emiten tersebut untuk ditanamkan kembali pada perusahaan emiten lain yang lebih menguntungkan.

Investor selalu mempertimbangkan sinyal yang diberikan oleh emiten baik itu sinyal positif maupun negatif terhadap kinerja perusahaan emiten. Investor akan melihat kecenderungan dampak sinyal tersebut untuk tahun-tahun mendatang. Dampak sinyal yang diberikan oleh emiten tersebut akan membentuk suatu pola trend tertentu yang menentukan keputusan investor untuk membeli, menjual atau mempertahankan saham emiten.

Perubahan makroekonomi yang terjadi di suatu negara akan berimbas pada penyesuaian harga saham perusahaan emiten daripada berimbas pada kinerja perusahaan emiten. Pergerakan yang terjadi pada harga saham perusahaan emiten akan menjadi perhatian dari investor pada saat melakukan investasi di pasar modal. Apabila harga saham perusahaan emiten mengalami kenaikan berarti kinerja perusahaan emiten menunjukkan hasil yang menguntungkan dan memiliki prospek yang baik. Namun jika harga saham perusahaan emiten menurun, ini berarti kinerja perusahaan emiten memburuk dan tidak menghasilkan laba atau keuntungan.

Ada beberapa analisis yang dapat digunakan untuk melihat pergerakan saham yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah analisis yang dibuat dengan memperhatikan dan menggunakan data –data yang berasal dari laporan keuangan emiten. Analisis fundamental memperhitungkan risiko dan harga saham perusahaan emiten yang terjadi saat ini. “*The main task of fundamental analysis is to determine the true value of a share*”[3]. Analisis teknikal adalah analisis yang mengidentifikasi tren harga saham emiten dalam pasar modal untuk mendapatkan pola pergerakan harga saham. Kedua analisis tersebut sering digunakan oleh para analis dan investor dalam mengambil keputusan investasi. Data-data dari laporan keuangan itu akan menunjukkan kinerja perusahaan emiten yang tercermin dalam harga saham perusahaan emiten. [4] menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan investor untuk memperoleh informasi dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal.

Pasar modal saat ini di manapun terkena dampak adanya virus corona yang menyebar ke seluruh dunia. Dampak adanya virus corona ini berimbas pada indeks harga saham dan arus dana dari investor asing ke pasar modal. Arus dana dari investor asing saat ini menjadi bervariasi karena indeks harga saham yang melemah atau menurun dan juga karena *risk appetite* yang menurun. Hal ini akan berdampak pada perekonomian di negara tersebut termasuk Indonesia. Perusahaan emiten maupun investor akan menganalisis pengaruh dampak pandemi corona ini terhadap harga saham agar dapat mengatur dana asing dan perekonomian tetap stabil. Pandemi yang diakibatkan karena virus corona ini menjadi suatu ancaman bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi global mengalami resesi sejumlah -4,2% pada tahun 2020[5]. Ini juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak lambat , termasuk

pada sektor investasi. Aktivitas masyarakat yang dibatasi karena diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar menyebabkan pertumbuhan domestik bruto (PDB)

Indonesia sebesar -3,9% pada triwulan ketiga tahun 2020[6]. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tanggal 30 Maret 2020 melemah sebesar 2,88% yaitu berada pada angka sebesar Rp. 4.414,5. Ini berakibat Bursa Efek Indonesia membekukan sementara perdagangan maupun *trading halt* dikarenakan IHSG yang semakin melemah dan turun drastis sebesar 5% menjadi Rp 4.318,29[7]. Informasi ekonomi dan non ekonomi serta peristiwa yang terjadi di pasar modal memiliki kandungan muatan informasi yang dapat digunakan oleh investor. Informasi ini berguna bagi investor untuk pengambilan keputusan. Informasi mengenai pandemi covid 19 yang melanda pasar modal Indonesia menyebabkan terjadinya fluktuasi harga saham.

Pandemi virus corona yang melanda Indonesia berdampak di berbagai sektor. Investor cemas terhadap risiko terjadinya krisis ekonomi karena perlambatan kegiatan ekonomi. Salah satu usaha yang terpukul karena pandemi virus corona ini adalah sektor riil. Aktivitas di sektor riil ini mengalami gangguan dalam kegiatan usahanya dan sebagian perusahaan memutuskan karyawannya untuk berhenti bekerja. Ini menimbulkan terjadi lonjakan pemutusan hubungan kerja pada perusahaan-perusahaan. Salah satu sektor industri yang berdampak karena pandemi Covid 19 ini adalah sektor transportasi. Terlebih lagi pada saat diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi mobilitas masyarakat. Ini berakibat penurunan pendapatan dan laba pada sektor transportasi. PT Garuda Indonesia Tbk mencatat kerugian sebesar Rp10,47 triliun pada semester pertama tahun 2020. Ini disebabkan terjadi penurunan pendapatan yang signifikan sebesar 58,18% dan membukukan

pendapatan sebesar Rp 13,48 triliun. PT Blue Bird tbk juga mengalami hal yang sama dengan PT Garuda Indonesia tbk. Dari data yang diperoleh PT Blue Bird tbk mencatat kerugian sebesar Rp 93,67 miliar pada semester pertama tahun 2020. Ini disebabkan terjadinya penurunan pendapatan sebesar 39,86% yaitu pendapatan pada semester pertama tahun 2019 sebesar Rp 1,91 triliun menjadi pendapatan pada semester pertama tahun 2020 sebesar Rp 1,15 triliun pada semester 1 2020 [8]

Sektor transportasi adalah bagian dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor transportasi dibagi menjadi transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut, dan jasa penunjang angkutan. Sektor transportasi yang terdiri dari perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kegiatan operasionalnya membutuhkan biaya modal yang besar untuk pengadaan alat transportasi sebagai aset utama perusahaan. Oleh karena itu perusahaan transportasi membutuhkan dana yang tidak sedikit agar perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun ditengah krisis ekonomi yang disebabkan pandemi virus covid 19 ini menyebabkan hampir sebagian besar perusahaan terancam kelangsungan hidupnya. [9] melakukan penelitian pada tahun 2020 mengenai *The COVID-19 Outbreak and Affected Countries Stock Markets Response*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi covid 19 memiliki pengaruh negatif terhadap pasar modal di Asia seperti pasar modal Hongkong, Malaysia, Jepang, Thailand dan China, namun untuk negara diluar Asia tidak ada penurunan yang terlihat.

Investor dapat melakukan analisis terhadap volume perdagangan saham pada saat mengambil keputusan investasi selain mempertimbangkan masalah pandemi covid 19 yang menyebabkan perubahan yang melemah pada harga saham

perusahaan transportasi, Volume perdagangan saham menggambarkan kondisi saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Apabila volume perdagangan saham besar berarti saham tersebut merupakan saham yang aktif diperdagangkan di pasar modal. Ini menjadi daya tarik investor untuk membeli saham tersebut. Volume perdagangan saham yang tinggi menunjukkan kegiatan perdagangan saham di pasar modal dianggap sebagai sinyal positif yang berarti kondisi pasar dalam keadaan baik. [10]melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif signifikan volume perdagangan terhadap return saham.

Ada beberapa variabel lainnya yang digunakan oleh investor pada saat mengambil keputusan untuk investasi yaitu *market to book ratio (MTB)* dan kapitalisasi pasar. *Market to book ratio (MTB)* adalah perbandingan nilai pasar saham perlembar dengan nilai buku saham perlembar. Kapitalisasi pasar adalah nilai pasar saham suatu perusahaan yang mampu memprediksi prospek perusahaan di masa depan. *Market to book ratio* dapat melihat hubungan antara nilai pasar saham dengan nilai buku saham terhadap *stock return*. Investor dapat melihat *market to book ratio* ini untuk mendapatkan *capital gain/capital loss* atas investasi saham [11]. [12] menjelaskan bahwa *market to book ratio* digunakan untuk memprediksi *stock return* karena rasio tersebut menggunakan proksi harga pasar saham. [13]menjelaskan bahwa *market to book ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *return* saham. *Market to book ratio* yang tinggi menunjukkan ekspektasi return saham yang tinggi. Kapitalisasi pasar adalah total nilai pasar saham perusahaan atas semua saham perusahaan yang beredar. Apabila nilai kapitalisasi pasar suatu perusahaan tinggi menunjukkan harga jual saham perusahaan yang tinggi. Kapitalisasi pasar juga digunakan untuk memprediksi nilai *return* saham yang diterima investor di masa depan.

Penelitian ini dilakukan karena masih minimnya penelitian tentang dampak Covid-19, volume perdagangan saham, *market to book ratio* dan kapitalisasi pasar terhadap return saham pada saham sektor transportasi. Penelitian ini belum banyak dilakukan di Indonesia sehingga penelitian memiliki nilai kebaruan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh [14] yang menganalisis dampak Covid-19 terhadap *return* saham perusahaan di China, namun dengan sektor industri yang berbeda. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah apakah pandemi Covid 19, volume perdagangan, *market to book ratio*, dan kapitalisasi pasar berpengaruh terhadap *return* saham perusahaan transportasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid 19, volume perdagangan, *market to book ratio*, dan kapitalisasi pasar terhadap return saham perusahaan transportasi. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah memberikan informasi bagi investor berkaitan dengan pandemi covid 19, volume perdagangan, *market to book ratio*, dan kapitalisasi pasar terhadap return saham perusahaan transportasi untuk mengambil keputusan investasi.

## **1.2 Isi dan Pembahasan**

### **Teori Sinyal (*Signaling Theory*)**

*Signaling theory* yang dikemukakan oleh [2] menjelaskan mengenai sinyal yang diberikan perusahaan kepada pihak eksternal yaitu investor mengenai kondisi perusahaan. Sinyal tersebut dapat berupa sinyal positif maupun sinyal negatif. Sinyal positif memberikan kabar baik bagi investor bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik yang ditandai dengan adanya peningkatan laba perusahaan. Sinyal negatif memberikan kabar negatif bahwa perusahaan memiliki kinerja yang kurang baik, sehingga investor akan menarik kembali investasinya di perusahaan. Teori sinyal adalah suatu teori yang juga membahas tentang

pergerakan harga saham. Pergerakan harga saham yang mengakibatkan perubahan harga saham secara drastis akan berdampak pada pengambilan keputusan investor. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai segala sesuatu yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka memaksimalkan kepentingan *stakeholders*.

Teori sinyal (*signaling theory*) menjembatani asimetri informasi yang terjadi antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan. Investor membutuhkan informasi yang relevan, lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan investasi. Teori sinyal (*signaling theory*) menerangkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang tinggi akan memberikan sinyal positif pada pasar modal. Pelaku pasar modal yaitu investor dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan berkualitas buruk. Pengumuman mengenai suatu informasi yang berasal dari publikasi perusahaan emiten adalah suatu sinyal bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi. Jika sinyal yang diumumkan perusahaan emiten merupakan sinyal positif, maka pasar modal bereaksi pada saat publikasi pengumuman tersebut [15].

Menurut [16] *signalling theory* menekankan mengenai pentingnya suatu informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi bagi pihak eksternal perusahaan. Informasi yang dikeluarkan perusahaan menyajikan keterangan, catatan atau gambaran mengenai kondisi perusahaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang. Informasi perusahaan emiten yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu digunakan investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan tersebut adalah suatu pengumuman yang memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham

### **Teori Pasar Modal Efisien (*Efficient Market Hypothesis Theory*)**

[2] adalah orang yang pertama kali mengemukakan tentang teori hipotesis pasar modal efisien (*Efficient Market Hypothesis Theory*). Pasar modal efisien adalah pasar modal di mana harga sahamnya mencerminkan segala informasi yang ada baik informasi masa lalu, sekarang dan informasi dari perusahaan itu sendiri (*insider information*). Harga saham yang terbentuk di pasar merupakan hasil refleksi dari seluruh informasi yang tersedia.

*Efficient Market Hypothesis Theory* membagi efisiensi pasar ke dalam tiga bentuk, yaitu *the weak efficient market hypothesis (weak-form)*, *the semistrong efficient market hypothesis (semistrong-form)*, dan *the strong efficient market hypothesis (strong-form)*. Pasar disebut memiliki efisiensi lemah (*weak-form*) jika investor dalam mengambil keputusan menjual atau membeli saham menggunakan data harga dan volume perdagangan saham yang telah terjadi atau masa lalu. Data tentang harga dan volume saham masa lalu itu digunakan sebagai analisis teknikal untuk menentukan trend pergerakan harga saham apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Asumsi yang mendasari hipotesis ini adalah bahwa harga pasar perusahaan telah mencerminkan semua informasi keuangan yang telah terjadi atau masa lalu berupa data harga saham dan volume perdagangan saham yang terjadi masa lalu. Pada bentuk pasar modal yang lemah ini investor tidak dapat memperoleh sedikit keuntungan dengan menggunakan *trading rules* berdasarkan pada informasi harga saham dan volume perdagangan saham masa lalu yang terdapat di pasar modal. *The semistrong efficient market hypothesis (semistrong-form)* adalah bentuk pasar yang memiliki efisiensi pasar setengah kuat (*semistrong-form*). Ini berarti bahwa investor dalam mengambil keputusan investasi atau divestasi selain menggunakan data harga saham masa lalu, dan volume perdagangan masa lalu, namun juga menggunakan informasi yang

dipublikasikan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, pengumuman bursa, informasi keuangan internasional, peraturan perundang-undangan, peristiwa politik, peristiwa hukum, peristiwa sosial, dan lain-lain yang dapat memengaruhi perekonomian nasional. Asumsi yang mendasari bentuk efisiensi pasar setengah kuat ini adalah bahwa pada saat investor mengambil keputusan setelah informasi baru dipublikasikan perusahaan, investor seharusnya tidak memperoleh keuntungan abnormal karena harga saham telah mencerminkan seluruh informasi yang telah dipublikasikan. Harga saham perusahaan emiten akan bereaksi cepat dan akurat menyesuaikan ke tingkat harga saham yang baru ketika informasi publik diumumkan.

*The Strong Efficient Market Hypothesis (strong-form)* menjelaskan bahwa investor pada saat mengambil keputusan menggunakan data-data yang lebih lengkap meliputi harga saham masa lalu, volume perdagangan saham masa lalu, informasi yang dipublikasikan berupa informasi laporan keuangan dan laporan tahunan, dan informasi privat yang tidak dipublikasikan secara umum. Pada bentuk pasar yang memiliki efisiensi kuat ini harga saham tidak hanya mencerminkan informasi yang dipublikasikan saja, tetapi juga mencerminkan informasi yang tidak dipublikasikan (*insider information*). *Insider information* adalah informasi yang dimiliki oleh pihak yang berada dalam perusahaan (internal perusahaan). Pada bentuk pasar yang kuat ini tidak ada investor yang memperoleh abnormal *return*, karena antara investor dan pihak perusahaan memiliki informasi yang sama.

Ada tiga asumsi yang mendasari teori hipotesis pasar modal efisien (*Efficient Market Hypothesis Theory*) yaitu investor yang berperilaku rasional dalam menilai saham, investor yang berperilaku tidak rasional dan melakukan transaksi secara acak yang tidak berpengaruh terhadap harga, investor arbiter yang berperilaku rasional yang mengurangi pengaruh dari perilaku investor yang tidak

rasional pada harga di pasar modal [17]. [18] menyatakan bahwa harga saham jauh lebih tidak stabil daripada harga saham yang diamati. Ini disebabkan ada asumsi yang tidak realistis yang menyatakan bahwa investor bersikap netral terhadap risiko. Investor yang menghindari risiko menyebabkan prediksi volatilitas harga saham lebih tinggi. Investor yang menghindari risiko dapat menjelaskan volatilitas riil harga saham berada di bawah tingkat risiko yang tidak realistis.

[19] berasumsi bahwa adanya ketidakpastian merupakan kondisi dasar bagi investor dalam memilih portofolio investasi yang optimal. Investor menghadapi risiko aset saat menyiapkan portofolio dengan pengembalian optimal. Ini berarti semakin tinggi pengembalian yang diharapkan, semakin tinggi risiko. [20],[21],[22],[23],[24] menyatakan bahwa risiko dan return memiliki korelasi positif. Fenomena terjadinya pandemi Covid 19 menyebabkan *return* saham berpengaruh positif dengan risiko sistematis. Pandemi Covid-19 yang terjadi dan melanda pasar modal menunjukkan bahwa adanya risiko sistematis. Risiko sistematis menyebabkan investor berperilaku menghindari risiko (*risk averse*).

### ***Return Saham***

Saham menunjukkan tanda kepemilikan seseorang di perusahaan. Seseorang yang menanamkan investasinya di perusahaan disebut investor. Investor yang memiliki investasi di perusahaan ingin mendapatkan *return* saham. *Return* saham terdiri dari dividen dan *capital gain*. Dividen adalah bagian dari laba emiten yang dibagikan kepada investor. *Capital gain* ialah selisih nilai saham dengan nilai jual saham. Investasi saham juga memiliki risiko yang disebut risiko likuidasi serta *capital loss*. Risiko likuidasi terjadi karena investor memiliki saham perusahaan yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau dibubarkan. *Capital loss* adalah selisih harga jual saham dengan harga beli saham, dimana harga jual saham lebih rendah dari harga beli saham. Oleh karena itu investor

akan memperhatikan pergerakan harga saham perusahaan yang dimilikinya.

Pergerakan saham menunjukkan kinerja perusahaan emiten. Kinerja perusahaan emiten yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan emiten memperoleh laba dari kegiatan operasional yang berdampak pada harga saham emiten yang mengalami kenaikan. Namun jika kinerja emiten rendah atau memburuk berarti perusahaan emiten memperoleh laba yang sedikit atau kemungkinan terjadinya kerugian. Ini mengakibatkan harga saham emiten akan menurun. Investor harus memiliki kemampuan analisis tentang pergerakan saham yang baik agar investor dapat memperoleh keuntungan.

Pergerakan harga saham emiten dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal [25]. Faktor internal terdiri dari pengumuman pemasaran, produksi, penjualan, pendanaan, dewan direksi, pengambilalihan diverifikasi, investasi, ketenagakerjaan, laporan keuangan perusahaan. Faktor eksternal meliputi pengumuman yang berasal dari pemerintah seperti perubahan suku bunga, kurs valuta asing, inflasi, dan regulasi- regulasi ekonomi lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, hukum, industri sekuritas, seperti laporan pertemuan tahunan *insider trading*, volume atau harga saham perdagangan pembatasan atau penundaan *trading*.

### **Covid-19, Volume Perdagangan Saham, dan *Market To Book Ratio***

Virus covid-19 pertama kali muncul di Wuhan Cina yang menular lewat droplet atau tetesan yang keluar dari hidung manusia yang terinfeksi pada saat batuk atau bersin. [26] menjelaskan bahwa covid-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan corona virus jenis baru SARS-CoV-2. Jumlah kasus yang terpapar virus covid-19 ini semakin hari bertambah sehingga WHO (*World Health Organisation*) menetapkan status menjadi pandemi.

Salah satu bidang yang terkena dampak dari covid-19 adalah sektor ekonomi. Negara- negara di dunia mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh covid- 19. Krisis ekonomi akibat covid-19 ini berbeda dengan krisis ekonomi yang pernah terjadi sebelumnya [27]. Oleh karena virus covid-19 ini melanda ekonomi di berbagai negara, maka menjadi daya tarik para peneliti untuk melakukan penelitian ini di pasar modal. Ini disebabkan pasar modal merupakan tempat pertemuan antara emiten yang membutuhkan dana untuk kelangsungan hidup perusahaan dan investor yang memiliki dana untuk diinvestasikan ke perusahaan emiten.

[28] melakukan penelitian tentang covid-19 pada *return* saham di industri teknologi informasi dan obat-obatan di pasar modal Cina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa selamacovid 19, *return* saham perusahaan teknologi informasi dan obat-obatan memiliki kinerja yang signifikan lebih tinggi dibandingkan return pasar. Namun *return* saham pada perusahaan minuman, transportasi air, udara, serta jalan raya menunjukkan kinerja yang kurang baik dibandingkan dengan *return* pasar selama pandemi covid-19. [26] melakukan penelitian dampak kasus yang terkena covid-19 pada *return* saham di 64 negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa covid-19 berpengaruh negatif terhadap *return* saham. Penelitian yang dilakukan oleh [29], [28], [26], dan [30] menjelaskan bahwa perkembangan jumlah kasus Covid-19 berpengaruh negatif terhadap *return* saham. Semakin tinggi jumlah kasus covid-19, semakin rendah *return* saham emiten. [31] dan [32] dalam penelitiannya menemukan bahwa kasus Covid-19 berdampak negatif terhadap pasar saham dalam jangka pendek. Kasus kematian Covid-19 juga menjadi sorotan dunia. Angka kematian yang tinggi menunjukkan bahwa pandemi covid-menimbulkan sentimen negatif jika negara tidak dapat mengendalikan angka kasus kematian yang berdampak

pada perekonomian, khususnya pasar saham.

Volume perdagangan saham merupakan jumlah lembar saham yang diperdagangkan yang terjadi di pasar modal pada tingkat harga saham yang telah disepakati penjual dan pembeli. Volume perdagangan saham adalah indikator likuiditas suatu saham di pasar modal. Volume perdagangan saham yang meningkat menunjukkan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan. Ini berarti saham tersebut menghasilkan *return* yang tinggi. Namun jika saham tidak aktif diperdagangkan menandakan bahwa kinerja saham yaitu *return* saham emiten menurun. Ini berarti saham tersebut tidak aktif diperdagangkan. Volume perdagangan saham yang rendah berarti variabilitas harga saham tinggi sehingga pasar modal tidak likuid. Volume perdagangan saham yang tinggi menunjukkan variabilitas harga saham rendah dan pasar likuid. Investor lebih tertarik pada saham yang memiliki *return* yang tinggi yang disertai dengan risiko yang tinggi. [33] melakukan penelitian mengenai pengaruh volume perdagangan terhadap *return* saham yang menunjukkan hasil bahwa volume perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap *return* saham. Penelitian yang dilakukan oleh [34] menunjukkan bahwa volume perdagangan berpengaruh terhadap *return* saham.

Beberapa prinsip mengenai penafsiran volume perdagangan saham [35] dibagi menjadi dua yaitu bahwa volume perdagangan sejalan dengan trend dan aktivitas penjual dan pembeli di pasar modal. Apabila pasar modal sedang uptrend berarti aktivitas perdagangan saham meningkat, namun jika pasar sedang downtrend berarti aktivitas perdagangan akan menurun. Ini berarti trend dapat diprediksi dengan mempertimbangkan volume perdagangan saham. Aktivitas perdagangan saham dapat mengukur antusiasme pembeli dan penjual. Antusiasme pembeli yang lebih besar jumlahnya dibandingkan penjual menyebabkan kondisi pasar berada pada tahap uptrend, namun volume perdagangan saham rendah. Ini

membuat pasar modal akan mencapai harga keseimbangan tertentu sehingga penjual menjual sahamnya.

Harga saham dipengaruhi oleh adanya aktivitas pembeli dan penjual di pasar modal. Jika informasi yang berupa kabar buruk mendapatkan reaksi dari penjual untuk menjual sahamnya maka harga saham turun. Ini berarti *return* saham juga mengalami penurunan. Kondisi tidak normal terjadi jika harga saham meningkat dan volume perdagangan menurun. Ini berarti ada indikasi trend yang terjadi tidak kuat dan akan mengalami perubahan yang menyebabkan trend menurun (*bearish*). Volume perdagangan saham yang semakin besar menunjukkan bahwa kondisi pasar saham membaik. Peningkatan volume perdagangan yang diikuti dengan peningkatan harga saham merupakan gejala yang makin kuat akan kondisi *bullish*.

*Market to book ratio* adalah rasio yang membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku saham suatu perusahaan [36]. *Market to book ratio* merupakan indikator yang mengukur kinerja perusahaan melalui harga pasar. *Market to book ratio* meningkat menunjukkan bahwa harga pasar perusahaan melampaui nilai buku saham. Ini berarti nilai perusahaan meningkat di mata investor. Semakin tinggi nilai perusahaan akan menyebabkan harga pasar saham mengalami kenaikan. Ini membuat *return* saham mengalami peningkatan. *Market to book ratio* menurun, berarti terjadi penurunan harga pasar saham perusahaan dibawah nilai buku saham. Ini menunjukkan harga saham perusahaan dinilai terlalu rendah (*undervalued*). Ini membuat investor melakukan pembelian saham. Penelitian [37] menunjukkan bahwa *book to market ratio* dan *rate of return* memiliki kekuatan prediksi yang signifikan terhadap *return* saham di masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh [12] menunjukkan bahwa *market to book ratio* memiliki pengaruh terhadap *return* saham.

## **Kapitalisasi Pasar**

Kapitalisasi pasar memiliki peran yang sangat besar dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi [38] terutama pada pasar modal. Kapitalisasi pasar adalah jumlah harga pasar saham dari saham yang diterbitkan dan dicatatkan oleh perusahaan. Jumlah kapitalisasi pasar perusahaan yang terdaftar di pasar modal sama dengan nilai kapitalisasi total pasar keuangan. Kapitalisasi pasar merupakan indikator pasar yang penting dari nilai saham dan nilai perusahaan secara umum [39],[40].

Salah satu daya tarik investor dalam memilih saham adalah nilai kapitalisasi pasar. Investor lebih menyukai kapitalisasi pasar saham yang besar. Semakin besar kapitalisasi pasar suatu saham, maka investor akan mempertahankan kepemilikan sahamnya semakin lama. Ini disebabkan nilai kapitalisasi pasar saham yang besar menunjukkan ukuran perusahaan yang besar. Perusahaan yang berukuran besar memiliki keuangan yang relatif lebih stabil, risiko yang lebih kecil dan prospek masa depan yang lebih baik. Ini membuat investor berekspektasi untuk memperoleh *return* yang besar. Oleh karena itu kapitalisasi pasar berpengaruh signifikan terhadap *return* saham. [41] menjelaskan bahwa nilai kapitalisasi pasar emiten dapat digunakan oleh investor untuk melihat nilai perusahaan. Nilai kapitalisasi pasar dapat menentukan investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi. Investor mengincar perusahaan emiten yang memiliki prospek yang bagus dan risiko yang lebih kecil di masa depan. Ini dikarenakan investor ingin mendapatkan *return* yang besar.

### **Covid-19 dan *Return Saham***

Teori sinyal menjelaskan bahwa pandemi covid-19 yang menyebabkan kinerja perusahaan semakin menurun, membuat harga saham perusahaan semakin rendah. Ini merupakan sinyal buruk bagi investor, karena investor akan memperoleh *return* yang kecil atau *return* negatif. Apabila pandemi covid -19 ini terjadi dalam waktu yang lama maka terjadi *crash* dalam keuangan global. Ini ditunjukkan dengan penurunan harga saham yang terjadi di negara-negara besar [42]

Penelitian yang dilakukan oleh [28] dan [26] menyatakan bahwa pertumbuhan harian kasus COVID-19 telah menyebabkan penurunan *return* saham. Pasar modal yang ada di seluruh dunia terkena dampak dari covid-19 ini. Volatilitas kasus covid -19 yang tinggi di suatu negara menyebabkan tingkat *return* perusahaan semakin menurun [42] [ [43],[44], [45]. Penelitian yang dilakukan oleh [46] pada pasar ekuitas di Amerika Serikat menunjukkan bahwa covid-19 memiliki dampak pada likuiditas dan volatilitas pasar. [47] menyatakan bahwa ada dampak positif antara COVID-19 dan cryptocurrency. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh [48] menerangkan bahwa risiko pasar keuangan dan ketidakpastian meningkat setelah merebaknya COVID-19

### **Volume Perdagangan Saham dan *Return Saham***

Volume perdagangan saham menunjukkan aktivitas perdagangan saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Volume perdagangan saham adalah indikator teknis untuk mengukur kekuatan pasar. Semakin besar volume perdagangan saham menjadi indikator ketertarikan investor untuk membeli saham. Ini berarti semakin besar volume perdagangan saham maka semakin banyak jumlah saham yang diperdagangkan [49] Manifestasi perilaku investor yang digambarkan dengan kekuatan *supply* dan *demand* dapat mencerminkan volume perdagangan

saham. Volume perdagangan saham yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki likuiditas yang tinggi. Ini berarti perusahaan memberikan sinyal *good news* kepada investor di pasar modal dan sebuah tanda bahwa kondisi pasar sudah mulai bagus [50]. Investor cenderung tertarik pada saham yang memberikan *return* tinggi, meskipun *return* yang tinggi akan diikuti dengan risiko yang tinggi.

Penelitian tentang pengaruh volume perdagangan saham terhadap *return* saham telah menghasilkan penemuan yang beragam dengan model ekonometrik yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh [51], [52], [53], [54] menerangkan bahwa ada pengaruh volume perdagangan saham terhadap *return* saham. Namun penelitian yang dilakukan oleh [55], [56], [57] menunjukkan hasil yang berbeda dan bertentangan.

### ***Market to Book Ratio dan Return Saham***

Investor melakukan analisis *return* saham emiten dengan menggunakan *market to book ratio*. Ini berarti *book value* menjadi *benchmark* untuk membandingkannya dengan *market value*. *Market to book ratio* dapat digunakan investor dan analis keuangan untuk

membandingkan perusahaan emiten dengan industrinya, dan menilai apakah perusahaan *overvalue* atau *undervalue*.

Perusahaan yang memiliki *market to book ratio* rendah berarti pasar menghargai perusahaan lebih rendah daripada *book value*. Harga pasar yang rendah memberi indikasi bahwa investor memperoleh *return* yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh [58] menjelaskan bahwa *market to book ratio* berpengaruh negatif terhadap *return* saham, namun penelitian yang dilakukan oleh [59]

menunjukkan bahwa *market to book ratio* berpengaruh positif terhadap *return* saham.

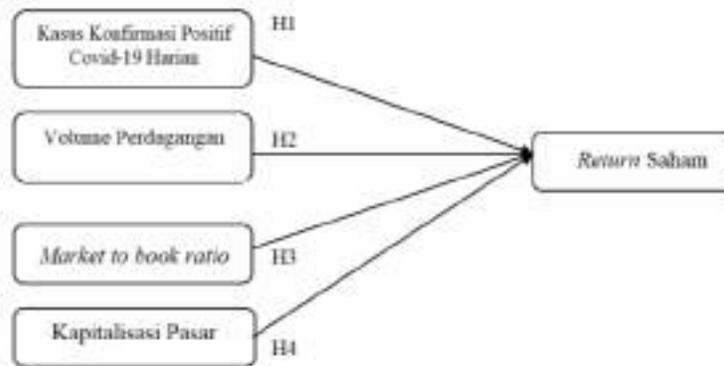
### **Kapitalisasi Pasar dan *Return* Saham**

Investor melakukan pemilihan saham berkaitan dengan keputusan investasi akan mencari saham yang memiliki nilai kapitalisasi yang besar. Semakin besar nilai kapitalisasi pasar suatu saham semakin tinggi minat investor untuk menanamkan investasinya di perusahaan tersebut. Semakin besar nilai kapitalisasi saham, semakin lama investor mempertahankan kepemilikannya pada perusahaan tersebut. Ini karena nilai kapitalisasi pasar saham yang besar menunjukkan ukuran perusahaan yang besar. Perusahaan besar cenderung lebih stabil menurut investor jika dilihat dari sudut finansialnya dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar yang memiliki keuangan yang stabil akan memiliki risiko lebih kecil dan mempunyai prospek masa depan yang lebih bagus untuk jangka panjang. Ini berarti harapan investor untuk mendapatkan *return* yang besar akan tercapai.

Kapitalisasi pasar dapat digunakan untuk memprediksi *return* saham. Kapitalisasi pasar yang tinggi berarti prospek perusahaan bagus dan memiliki kinerja yang tinggi. Ini membuat harga saham mengalami kenaikan. Apabila investor telah memiliki saham tersebut dan membelinya di waktu tertentu pada masa lalu, berarti investor akan mendapatkan *capital gain* yang besar.

### **Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

Covid-19, volume perdagangan saham, *market to book ratio* dan kapitalisasi pasar merupakan variabel independen dan *return* saham sebagai variabel dependen dalam penelitian. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Gambar kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini ada pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Kerangka Pikiran

Teori sinyal menjelaskan bahwa terjadinya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia yang berdampak pada pasar modal memberikan sinyal negatif terhadap harga saham. Harga saham emiten di pasar modal menurun. Ini terjadi karena pandemi covid- 19 ini menyebabkan kegiatan operasional perusahaan terganggu. Kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan tidak dapat berjalan seperti kondisi normal dahulu. Ini mengakibatkan produktivitas perusahaan menurun. Produktivitas perusahaan yang menunjukkan gejala penurunan ini berimbas pada kinerja perusahaan yang semakin rendah. Kinerja perusahaan yang dipublikasikan perusahaan memberi sinyal negatif terhadap investor yang ditandai dengan penurunan nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham yang makin menurun.

Informasi yang dipublikasikan setiap hari mengenai jumlah yang terpapar covid-19 yang semakin meningkat pada tahun 2020, mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemberlakuan PSBB ini mengatur pembatasan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Adanya PSBB ini menyebabkan perusahaan transportasi juga tidak dapat melakukan aktivitas kegiatan usaha sehingga terjadi penurunan penjualan.

Adanya *social distancing* ini menyebabkan perusahaan transportasi membatasi armada transporasinya dalam berkegiatan. Ini berakibat pada penurunan pendapatan yang berimbas pada penurunan laba.

Laba perusahaan transportasi yang menurun ini memberi indikasi adanya penurunan bagian laba yang dibagikan kepada para investor. Laba yang menurun ini memberi sinyal negatif pada investor untuk menunda mengambil keputusan investasi. Sinyal ini ditangkap oleh pasar modal, sehingga pasar modal akan melakukan penyesuaian terhadap harga saham perusahaan transportasi. Semakin tinggi kasus pandemi covid-19, semakin rendah *return* saham karena harga saham telah terkoreksi. Oleh karena itu hipotesis penelitian adalah :

Ha1: Pandemi Covid 19 berpengaruh negatif terhadap *return* saham

Volume perdagangan saham menunjukkan aktivitas saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Investor tertarik untuk membeli saham dengan melakukan pengamatan pada volume perdagangan saham harian untuk menentukan saham yang aktif dan tidak aktif atau saham tidur. Volume perdagangan saham menjadi indikator teknis mengukur kekuatan pasar. Semakin besar volume perdagangan saham, semakin banyak jumlah saham yang diperdagangkan. Volume perdagangan saham yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi. Likuiditas yang tinggi menjadi suatu *good news* bagi investor bahwa perusahaan memiliki asset yang besar. Ini membuat investor melakukan pembelian saham di pasar modal saat itu juga, karena kondisi pasar yang bagus dan memperoleh return yang tinggi.

Perusahaan yang memiliki volume perdagangan yang rendah akan berdampak pada penurunan *return* saham yang diterima oleh investor. Saham yang memiliki volume perdagangan yang tinggi menunjukkan angka penjualan saham yang

tinggi perharinya sehingga para investor akan tertarik berinvestasi pada saham tersebut. Tingginya minat investor terhadap suatu saham akan berakibat pada kenaikan *return* saham perusahaan. Oleh karena itu hipotesis penelitian adalah :  
Ha<sub>2</sub>: Volume perdagangan berpengaruh positif terhadap *return* saham di Indonesia

*Market to book ratio* merupakan indikator yang mengukur kinerja perusahaan melalui harga pasar. *Market to book ratio* meningkat berarti harga pasar perusahaan melampaui nilai buku saham perusahaan. Ini berarti nilai perusahaan meningkat di mata investor. Semakin tinggi nilai perusahaan akan menyebabkan harga pasar saham mengalami kenaikan. Ini membuat *return* saham mengalami peningkatan. *Market to book ratio* menurun, berarti terjadi penurunan harga pasar saham perusahaan dibawah nilai buku saham. Ini menunjukkan harga saham perusahaan dinilai terlalu rendah (*undervalued*). Harga pasar rendah menunjukkan bahwa investor memperoleh *return* yang rendah. Investor melakukan analisis *return* saham emiten dengan menggunakan *market to book ratio*. *Book value* menjadi *benchmark* untuk membandingkannya dengan *market value*. *Market to book ratio* dapat digunakan investor dan analis keuangan untuk membandingkan perusahaan emiten dengan industrinya, dan menilai apakah perusahaan *overvalue* atau *undervalue*. Semakin tinggi *market to book ratio*, makin besar *return saham*. Oleh karena itu hipotesis penelitian adalah  
Ha<sub>3</sub>: *Market to book ratio* berpengaruh positif terhadap *return* saham

Investor cenderung mencari saham yang mempunyai nilai kapitalisasi yang besar dalam melakukan investasi. Semakin besar nilai kapitalisasi pasar saham semakin tinggi minat investor untuk menanamkan investasinya pada perusahaan. Semakin besar nilai kapitalisasi saham, semakin lama investor mempertahankan kepemilikannya pada perusahaan. Ini karena nilai kapitalisasi pasar saham yang besar menunjukkan ukuran perusahaan yang besar. Perusahaan besar cenderung

lebih stabil menurut investor jika dilihat dari sudut finansialnya dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar yang memiliki keuangan yang stabil akan memiliki risiko lebih kecil dan mempunyai prospek masa depan yang lebih bagus untuk jangka panjang. Ini berarti harapan investor untuk mendapatkan *return* yang besar akan tercapai.

Kapitalisasi pasar dapat digunakan untuk memprediksi *return* saham. Kapitalisasi pasar yang tinggi berarti prospek perusahaan bagus dan memiliki kinerja yang tinggi. Ini membuat harga saham mengalami kenaikan. Apabila investor telah memiliki saham tersebut dan membelinya di waktu tertentu pada masa lalu, berarti investor akan mendapatkan *capital gain* yang besar. Oleh karena itu hipotesis penelitian adalah:

Ha4: kapitalisasi pasar berpengaruh positif terhadap *return* saham

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menjelaskan obyek penelitian yang digunakan untuk menjawab peristiwa atau fenomena. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperjelas gejala yang terjadi melalui variabel-variabel penelitian yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019. Pengambilan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah : 1)Perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2019; 2) Perusahaan transportasi yang memiliki laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap tahun 2019; 3)Perusahaan transportasi, yang menyajikan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember; 4) Perusahaan transportasi yang memiliki data lengkap 28 Februari 2020-30 Desember 2020.

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan cara melakukan observasi pada laporan keuangan dan data saham harian. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 dan data harga historis saham dari tanggal 28 Februari -30 Desember 2020. Data tersebut diperoleh dari website pasar modal Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs resmi Yahoo! Finance ([finance.yahoo.com](http://finance.yahoo.com)). Data panel diolah dengan *eviews* untuk menguji hipotesis yang ada dalam penelitian ini. Uji Data panel digunakan untuk menentukan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel

### **Hasil Analisis Data**

Hasil pengolahan data panel menggunakan *eviews* diperoleh hasil uji statistik deskriptif seperti pada Tabel 1.2 di bawah ini. Tabel 1.2 menunjukkan Y adalah *return* saham,  $X_1$  =*covid-19*,  $X_2$ = *volume perdagangan*,  $X_3$ =*market to book ratio*, $X_4$ =*kapitalisasi pasar*. Jumlah sampel perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 23 perusahaan, dengan jumlah hari pengamatan dari tanggal 28 Februari-31 desember sebanyak 201 hari pengamatan. Jumlah observasi sebanyak 4.623 data.

	Y	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>
Mean	0,000721	2.384,124	0,002978	0,001989	40,18683
Median	0,000000	1.815,000	0,006810	0,059100	39,94491
Maximum	0,298220	8.369,000	0,385841	0,035309	43,92807
Minimum	-0,239582	0,000000	0,000000	-0,008890	37,47496
Std. Dev.	0,042680	2.039,475	0,016722	0,007234	1,40812
Observations	4623	4623	4623	4623	4623

Tabel 1.2 Hasil Uji statistik deskriptif

Tabel 1.3 menunjukkan uji multikolinearitas. Dari Tabel 1.3 terlihat tidak terjadi masalah multikolinearitas pada penelitian ini. Korelasi antar tiap variabel tidak melebihi nilai 0,8.

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>
Y	1,000000	0,123384	0,000677	0,057095
X <sub>2</sub>	0,123384	1,000000	-0,035514	-0,051754
X <sub>3</sub>	0,000677	-0,035514	1,000000	0,200834
X <sub>4</sub>	0,057095	-0,051754	0,200834	1,000000

Tabel 1.3 Uji Multikolinearitas

Pengolahan data panel dalam penelitian ini menghasilkan *fixed effect model* seperti tampak pada Tabel 1.4

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,486327	0,133842	-3,633588	0,0003
X <sub>1</sub>	-0,004203	0,003287	-1,280838	0,0003
X <sub>2</sub>	0,575496	0,041743	13,78655	0,0000
X <sub>3</sub>	6,577127	18,38278	0,357787	
	0,7205			X <sub>4</sub>
	0,011776	0,003419	3,444495	0,0006

Sumber data diolah

Tabel 1.4 Hasil uji *Fixed Effect Model*

Tabel 1.4 menunjukkan persamaan model penelitian yang dapat disusun dengan rumus persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -0,486327 - 0,004203X_1 + 0,575496X_2 + 6,577127X_3 + 0,011776X_4 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

(Keterangan Y=return saham, X<sub>1</sub>= Covid-19, X<sub>2</sub> =Volume perdagangan saham, X<sub>3</sub> = *Market to book value*, X<sub>4</sub> = Kapitalisasi pasar)

Pada Tabel 1.4 Hasil uji *Fixed Effect Model*, Covid-19 (X<sub>1</sub>) memiliki nilai koefisien regresi - 0,004203 dengan nilai probabilitas t sebesar 0,0003. Ini berarti bahwa Covid- 19 mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *return* saham. Semakin tinggi kasus covid-19, maka *return* saham perusahaan transportasi semakin rendah.

Volume perdagangan saham (X<sub>2</sub>) memiliki nilai koefisien regresi 0,575496 dengan nilai probabilitas t sebesar 0,0000. Ini berarti bahwa volume perdagangan saham mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *return* saham. Semakin tinggi volume perdagangan saham, maka *return* saham perusahaan transportasi semakin tinggi. *Market to book value* (X<sub>3</sub>) memiliki nilai koefisien regresi 6,577127 dengan nilai probabilitas t sebesar

0,7205. Ini berarti bahwa *market to book value* memiliki arah positif terhadap *return*

saham, namun pengaruhnya tidak signifikan. Kapitalisasi pasar (X<sub>4</sub>) memiliki nilai koefisien regresi 0,011776 dengan nilai probabilitas t sebesar 0,0006. Ini berarti bahwa kapitalisasi pasar mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *return* saham. Semakin tinggi kapitalisasi pasar, semakin tinggi *return* saham perusahaan transportasi

Tabel 1.5 Uji koefisien determinasi dan Uji F menunjukkan nilai *adjusted R-Squared* sebesar 4,64%. Ini berarti variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Covid-19, volume perdagangan saham, *market to book ratio* dan kapitalisasi pasar dapat menjelaskan *return* saham sebesar 4,64 %. Sisanya sebesar 95,36% menunjukkan bahwa ada faktor lain yang dapat mempengaruhi *return* saham selain dari empat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Uji F menunjukkan nilai Prob(F- statistic) sebesar 0. Ini berarti bahwa Covid-19, volume perdagangan saham, *market to book ratio* dan kapitalisasi pasar secara bersama-sama mempengaruhi *return* pasar.

R-squared	0,051779	Mean dependent var	0,000721
Adjusted R-squared	0,046415	S.D. dependent var	0,042680
S.E. of regression	0,041678	Akaike info criterion	-3,511880
Sum squared resid	7,983372	Schwarz criterion	-3,474276
Log likelihood	8144,712	Hannan-Quinn criter.	-3,498648
F-statistic	9,652821	Durbin-Watson stat	
	1,928545		
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber data diolah

Tabel 1.5 Uji Koefisien determinasi dan Uji F

## Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis yang ada dalam penelitian ini yang ingin menguji pengaruh covid-19, volume perdagangan saham, *market to book ratio* dan kapitalisasi pasar terhadap *return* saham pada perusahaan transportasi ada pada Tabel 1.6 berikut:

Hipotesis	Coefficient	Prob	Kesimpulan
Ha1: Covid-19 berpengaruh negatif terhadap <i>return</i> saham	-0,004203	0,0003	Hipotesis Diterima
Ha2 :Volume perdagangan saham berpengaruh positif terhadap <i>return</i> saham	0,575496	0,0000	Hipotesis Diterima
Ha3 : <i>Market to book ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>return</i> saham	6,577127	0,7205	Hipotesis Ditolak

Ha4 : Kapitalisasi pasar berpengaruh positif terhadap <i>return</i> saham	0,011776	0,0006	Hipotesis Diterima
Sumber data diolah			

Tabel 1.6 Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji Hipotesis pada Tabel 1.6 menunjukkan hipotesis pertama yaitu covid-19 berpengaruh negatif terhadap *return* saham (Ha1) diterima. Ini menunjukkan bahwa Covid-19 memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *return* saham pada perusahaan transportasi. Adanya peningkatan kasus covid -19 yang mulai terjadi di Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020, membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah covid-19 ini dengan memberlakukan kebijakan yang dikenal dengan nama PSBB. PSBB yang merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar mengharuskan perusahaan-perusahaan dan sekolah-sekolah untuk menerapkan *work from home (wfh)* dan *school from home(sfh)*. Kegiatan *work from home (wfh)* dan *school from home(sfh)* menyebabkan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi terkena dampaknya. Perusahaan transportasi melakukan pembatasan kapasitas pelayanan transportasi yang menyebabkan penerimaan pendapatan semakin menurun. Ini mengakibatkan performa produktivitas perusahaan transportasi semakin menurun.

Adanya kebijakan larangan untuk pergi keluar kota dengan menggunakan moda transportasi untuk mengendalikan kasus covid-19 ini menyebabkan penurunan performa saham perusahaan transportasi yang memiliki kegiatan di luar ruangan. Jumlah penumpang yang melakukan mobilitas ke suatu tempat tertentu mengalami lonjakan penurunan yang cukup signifikan. Semua moda transportasi yang meliputi darat, laut dan udara terkena dampaknya akibat kebijakan itu. Pada saat sebelum terjadinya pandemi covid-19 ini perusahaan transportasi

memperoleh pendapatan yang besar karena mobilitas masyarakat yang bepergian cukup banyak. Namun akibat pandemi covid-19 ini hampir semua perusahaan transportasi kehilangan sebagian pendapatan yang mempengaruhi kinerja perusahaan transportasi. Perspektif adanya kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan PSBB yang mengharuskan masyarakat untuk aktivitas bekerja dari rumah dan sekolah dari rumah ini merupakan sebuah sinyal bagi investor bahwa kondisi ini berakibat buruk pada keputusan investasi. Sinyal negatif akibat pemberlakuan kebijakan PSBB ini membuat investor berpikir ulang untuk melakukan investasi pada perusahaan transportasi. Investor cenderung menjual saham yang dimilikinya untuk meminimalisasi kerugian yang akan berdampak pada keputusan investor.

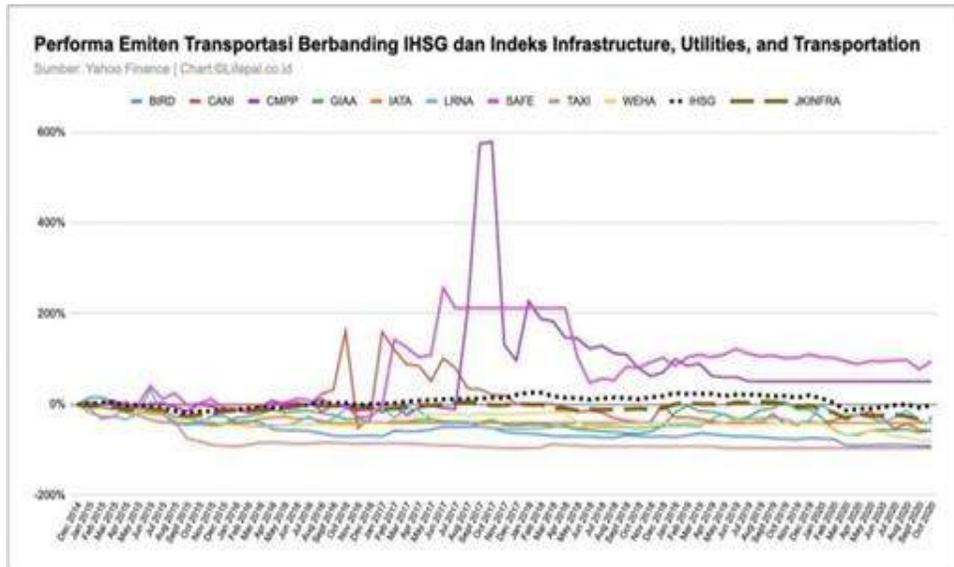
Menurut teori sinyal perusahaan akan memberikan sinyal positif atau sinyal negatif kepada pihak eksternal untuk mengambil keputusan. Untuk masa pandemi covid-19 ini kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan PSBB merupakan sinyal negatif yang diterima oleh investor untuk bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Investor akan bertindak hati-hati pada setiap langkah keputusan yang diambil berkaitan dengan kasus pandemi covid-19 dan pemberlakuan kebijakan PSBB. Investor lebih menyukai untuk memegang sejumlah uang saat ini untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan pada masa pandemi covid-19. Keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan manapun akan dipikirkan secara ketat oleh investor.

Penurunan minat masyarakat untuk bepergian karena pandemi covid-19 ini menyebabkan penurunan omzet usaha di bidang transportasi. Data yang diperoleh dari BPS menunjukkan terjadi penurunan PDB pada Triwulan II dan Triwulan III tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -30,84% dan -16,70% (Gambar 1.2).



Gambar 1.2 Pergerakan Masyarakat Di Pusat Transportasi dan Pertumbuhan PDB Sektor Transportasi dan Perdagangan.

Pasar modal juga merespon peristiwa covid-19 dan pemberlakuan kebijakan PSBB dengan melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). Pada saat terjadinya kasus pandemi covid-19 ini indeks harga saham gabungan mengalami penurunan (Gambar 1.3). Sebagian besar perusahaan transportasi mengalami penurunan harga saham dibawah IHSG seperti tampak pada Gambar 1.3, kecuali untuk PT Air Asia Indonesia Tbk (CMPP) dan PT Steady Safe Tbk. (SAFE) yang menunjukkan harga saham di atas IHSG.



Gambar 1.3 Performa Emiten Transportasi Berbanding  
IHSG dan Indeks Infrastuktur, Utilitas dan  
Transportasi

Ini sesuai dengan teori hipotesis pasar modal efisien yang menyatakan bahwa pada saat investor mengambil keputusan setelah publikasi informasi baru yang diumumkan oleh pemerintah mengenai kebijakan PSBB ini, investor tidak memperoleh keuntungan abnormal karena harga saham telah mencerminkan seluruh informasi yang telah dipublikasikan. Harga saham perusahaan transportasi bereaksi cepat untuk menyesuaikan ke tingkat harga saham yang baru. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia berada dalam bentuk pasar yang memiliki efisiensi pasar setengah kuat (*semistrong-form*). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh [14] yang menyatakan bahwa covid-19 berpengaruh secara negatif terhadap *return* saham di China. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [60] yang menyatakan covid-19 berpengaruh positif pada pasar saham di China dan Amerika Serikat.

Hipotesis kedua yaitu volume perdagangan saham berpengaruh positif terhadap *return* saham diterima (H2). Ini menunjukkan bahwa volume perdagangan saham mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *return* saham pada perusahaan transportasi. Pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk membatasi penularan covid-19 ini dengan menetapkan PSBB, menyebabkan sebagian besar pekerja dan pelajar melakukan kegiatan aktivitas kantor di rumah. Ini membuat pekerja akan berpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup. Ini yang memunculkan adanya investor dadakan yang ingin mendapatkan *return* saham dengan membeli investasi.

Pembelian investasi saham dapat dilakukan secara online oleh siapa saja dan dalam jumlah nominal yang tidak terlalu besar mengakibatkan munculnya pemain baru atau investor baru dalam pasar modal. Jumlah investor baru ini tidak begitu besar mengingat investor baru tersebut hanya bertujuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan di saat masa pandemi covid-19. Kenaikan jumlah investor di pasar modal yang mencoba peruntungan dalam investasi saham seperti membeli saham PT CMPP dan PT SAFE mengakibatkan transaksi perdagangan saham meningkat. Kenaikan jumlah saham yang diperdagangkan oleh perusahaan, karena investor membeli saham kembali menyebabkan pasar modal bereaksi. Investor menginginkan *return* yang besar dan bersedia menanggung risiko. Ini mengakibatkan investor memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.

Volume perdagangan saham merupakan satu indikator teknis untuk mengukur kekuatan pasar. Semakin besar volume perdagangan saham, menyebabkan investor tertarik untuk membeli saham. Ini berarti semakin besar volume perdagangan saham maka semakin banyak jumlah saham yang diperdagangkan.

Manifestasi perilaku investor yang digambarkan dengan kekuatan *supply* dan *demand* dapat mencerminkan volume perdagangan saham. Volume perdagangan saham yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki likuiditas yang tinggi. Ini berarti perusahaan memberikan sinyal *good news* kepada investor di pasar modal dan sebuah tanda bahwa kondisi pasar sudah mulai bagus [50] Ini berarti semakin tinggi volume perdagangan saham menyebabkan *return* saham semakin tinggi.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang membahas tentang volume perdagangan saham terhadap *return* saham seperti : [51], [52],[53],[54] menerangkan bahwa ada pengaruh volume perdagangan saham terhadap *return* saham. Penelitian yang dilakukan oleh [61] mengenai volume perdagangan dan *return* saham menunjukkan bahwa ada pengaruh positif volume perdagangan saham dan *return* saham. Namun penelitian yang dilakukan oleh [55],[56], [57] menunjukkan hasil yang berbeda.

Hipotesis ketiga yaitu *market to book ratio* berpengaruh positif terhadap *return* saham ditolak. Ini berarti *market to book ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return* saham perusahaan transportasi. Pada tahun 2020 dimana pada saat itu seluruh negara terkena covid-19 menyebabkan kondisi perekonomian berubah dengan sangat cepat. Perubahan ekonomi yang cepat dan menimbulkan resesi global ini membuat perusahaan transportasi menunjukkan kinerja yang belum cukup baik. Ketidakpastian ekonomi dan kapan berakhirnya covid-19 ini membuat perusahaan transportasi belum dapat menunjukkan kinerja yang baik dan pasar langsung bereaksi terhadap pandemi covid-19. Penilaian pasar terhadap perusahaan menjadi rendah. Ketidakpastian ekonomi ini membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan terdampak covid-19 menyebabkan penurunan *return*

saham perusahaan. Investor tidak menyukai investasi pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Investor melakukan analisis *return* saham emiten dengan menggunakan *market to book ratio*. Ini berarti *book value* menjadi benchmark untuk membandingkannya dengan *market value*. *Market to book ratio* dapat digunakan investor dan analis keuangan untuk membandingkan perusahaan emiten dengan industrinya, dan menilai apakah perusahaan *overvalue* atau *undervalue*. Perusahaan yang memiliki *market to book ratio* rendah berarti pasar menghargai perusahaan lebih rendah daripada *book value*. Harga pasar yang rendah memberi indikasi bahwa investor memperoleh return yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh [58] menjelaskan bahwa *market to book ratio* berpengaruh positif terhadap *return* saham.

Hipotesis keempat yaitu kapitalisasi pasar berpengaruh positif terhadap *return* saham diterima. Ini berarti kapitalisasi pasar berpengaruh positif signifikan terhadap *return* saham. Nilai kapitalisasi pasar yang semakin tinggi menunjukkan bahwa saham memiliki kualitas yang tinggi. Investor tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan yang sahamnya memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Ini dikarenakan kapitalisasi pasar yang besar menunjukkan posisi perusahaan berada dalam fase pertumbuhan atau *growth*. Perusahaan yang bertumbuh akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membeli aset perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan. Semakin besar nilai kapitalisasi saham, semakin lama investor mempertahankan kepemilikannya pada perusahaan tersebut. Ini karena nilai kapitalisasi pasar saham yang besar menunjukkan ukuran perusahaan yang besar. Perusahaan besar cenderung lebih stabil menurut investor jika dilihat dari sudut finansialnya dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar yang memiliki keuangan yang

stabil akan memiliki risiko lebih kecil dan mempunyai prospek masa depan yang lebih bagus untuk jangka panjang. Ini berarti harapan investor untuk mendapatkan *return* yang besar akan tercapai.

Kapitalisasi pasar yang tinggi berarti prospek perusahaan bagus dan memiliki kinerja yang tinggi. Ini membuat harga saham mengalami kenaikan. Apabila investor telah memiliki saham tersebut dan membelinya di waktu tertentu pada masa lalu, berarti investor akan mendapatkan *capital gain* yang besar. Perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar besar banyak diminati oleh investor untuk mengambil keputusan investasi. Pertimbangan yang mendasari investor menganalisis kapitalisasi pasar adalah bahwa perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar saham yang besar lebih stabil daripada perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar kecil. Investor mengharapkan akan mendapatkan return dan *capital gain* yang besar apabila investor berinvestasi saham pada perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar saham yang besar. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan [62] yang menyatakan bahwa kapitalisasi pasar memiliki pengaruh positif terhadap *return* saham.

### 1.3 Penutup

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa covid-19 memiliki pengaruh negatif terhadap pada *return* saham di perusahaan transportasi. Investor cenderung lebih reaktif terhadap pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pandemi covid-19. Ini berarti pasar modal akan mengoreksi indeks harga saham gabungan yang terbentuk di pasar. Pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB untuk mengurangi peningkatan pandemi covid-19 yang mengharuskan kegiatan dilakukan dirumah. Ini membuat kegiatan operasional perusahaan transportasi akan terganggu akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat di luar ruangan. Investor akan bertindak hati-hati pada setiap langkah keputusan yang diambil berkaitan dengan kasus pandemi covid-19 dan pemberlakuan kebijakan PSBB. Investor lebih menyukai untuk memegang sejumlah uang saat ini untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan pada masa pandemi covid-19. Keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan manapun akan dipikirkan secara ketat oleh investor.

Volume perdagangan saham berpengaruh positif terhadap *return* saham. Ini karena kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 ini, membuat perusahaan transportasi membatasi mobilitas aktivitas operasionalnya. Sebagian besar pekerja dan pelajar melakukan kegiatan aktivitas di rumah. Ini membuat pekerja akan berpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup. Ini yang memunculkan adanya investor dadakan yang ingin mendapatkan *return* saham dengan membeli investasi. Pembelian investasi saham yang dapat dilakukan secara online dan jumlah nominal yang tidak terlalu besar mengakibatkan munculnya pemain baru atau investor baru dalam pasar modal. Jumlah investor baru ini tidak begitu besar mengingat investor baru tersebut hanya bertujuan

untuk mendapatkan tambahan penghasilan di saat masa pandemi covid-19. Ini yang membuat volume perdagangan saham naik sehingga pasar bereaksi. Investor menginginkan *return* yang besar dan bersedia menanggung risiko. Ini mengakibatkan investor memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.

*Market to book ratio* tidak berpengaruh terhadap *return* saham. Pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi covid-19, kondisi perekonomian berubah dengan sangat cepat. Perubahan ekonomi yang cepat dan menimbulkan resesi global ini membuat perusahaan transportasi menunjukkan kinerja yang belum cukup baik. Ketidakpastian ekonomi dan kapan berakhirnya covid-19 ini membuat perusahaan transportasi belum dapat menunjukkan kinerja yang baik dan pasar langsung bereaksi terhadap pandemi covid-19. Penilaian pasar terhadap perusahaan menjadi rendah. Ketidakpastian ekonomi ini membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan terdampak covid-19 menyebabkan penurunan *return* saham perusahaan. Investor tidak menyukai investasi pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Kapitalisasi pasar berpengaruh positif terhadap *return* saham. Nilai kapitalisasi pasar yang semakin tinggi menunjukkan bahwa saham memiliki kualitas yang tinggi. Investor tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan yang sahamnya memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Ini dikarenakan kapitalisasi pasar yang besar menunjukkan posisi perusahaan berada dalam fase pertumbuhan atau *growth*. Perusahaan yang bertumbuh akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membeli aset perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan. Semakin besar nilai kapitalisasi saham, semakin lama investor mempertahankan kepemilikannya pada perusahaan. Nilai kapitalisasi pasar saham yang besar menunjukkan ukuran perusahaan yang besar. Perusahaan

besar cenderung lebih stabil dari sudut finansialnya dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar yang memiliki keuangan yang stabil akan memiliki risiko lebih kecil dan mempunyai prospek masa depan yang lebih bagus untuk jangka panjang. Ini berarti harapan investor untuk mendapatkan *return* yang besar akan tercapai.

Penelitian ini hanya memfokuskan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan komunikasi, farmasi, property dan real estate, perusahaan pertambangan, perusahaan industri makanan dan minuman, dan lain lain agar dapat diketahui pengaruh covid-19 pada *return* saham lainnya. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik *purposive sampling*, diharapkan untuk penelitian selanjutnya pengambilan sampel dapat menggunakan *cluster* atau *stratified sampling*. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi periode yang dimulai dari tgl 2 Maret -31 Desember 2020. Untuk penelitian selanjutnya dapat membagi periode pengamatan berdasarkan *event windows* yang berbeda. Pengukuran variabel independen dan variabel dependen dapat menggunakan model pengukuran dan skala pengukuran yang berbeda seperti pengukuran *return* saham dapat menggunakan *Abnormal return*, *Cumulative Abnormal Return*, atau model *Capital Asset Pricing Models (CAPM)*

Implikasi penelitian ini adalah memberikan informasi bagi investor untuk mempertimbangkan keputusan investasi saham pada perusahaan tertentu dengan memperhatikan sinyal-sinyal berupa sinyal positif atau negatif. Sinyal tersebut dapat berasal dan dikeluarkan oleh perusahaan maupun pihak lain seperti Pemerintah yang mengumumkan aturan atau kebijakan ekonomi, sosial maupun budaya yang berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Pada penelitian ini berlaku teori sinyal dimana pihak internal perusahaan sebagai pihak yang memiliki

informasi lebih banyak daripada pihak eksternal perusahaan akan memberikan sinyal kepada pihak eksternal. Pihak eksternal akan bereaksi terhadap sinyal yang diberikan oleh internal perusahaan untuk melakukan investasi atau divestasi saham. Implikasi lain dari penelitian ini adalah bahwa pasar modal Indonesia masih memiliki bentuk pasar yang *semi strong* sesuai dengan teori hipotesis pasar modal efisien. Bentuk pasar modal *semi strong* adalah suatu kondisi pasar dimana investor tidak memperoleh keuntungan abnormal pada saat ada publikasi informasi tentang perusahaan emiten. Pasar akan bereaksi cepat sehingga harga saham terkoreksi ke tingkat harga saham yang baru pada saat publikasi informasi pada public.

## Referensi

- [1] Suhadak, Kurniaty, Handayani, S. R. dan Rahayu, S. M. 2019. Stock Return and Financial Performance as Moderation Variable in Influence of Good Corporate Governance Towards Corporate Value. *Asian Journal of Accounting Research* 4(1) 18-34
- [2] Michael, Spence. 1973. Job Market Signaling. *Quarterly Journal of Economics* 87 (3): 355–374.
- [3] Petrusheva, N. dan Jordanorski, I. 2016. Comparative Analysis between The Fundamental and Technical Analysis of Stocks. *Journal of Process Management New Technologies* 4(2) 26-31
- [4] Vishani, S. dan Shah, B. K. 2008. Value Relevance of Published Financial Statements with Special Emphasis on Impact of Cash Flow Reporting. *Research Journal of Finance and Economics* 17(17) 84-90
- [5] CNN Indonesia. 2020. OECD Proyeksi Ekonomi Global Minus 4,2 Persen Tahun Ini. [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201201171958-532-576736/oecd-proyeksi-ekonomi-global-minus-42-persen-tahun-ini](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201201171958-532-576736/oecd-proyeksi-ekonomi-global-minus-42-persen-tahun-ini)
- [6] Fauzia, M. 2020. Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III-2020 Minus 3,49 Persen. [Kompas.com. https:// money.kompas.com/ read/2020 /11/05/111828826 /indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all](https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all)
- [7] Suryahadi, A. 2020. Sepanjang 2020 BEI telah lakukan 7 kali trading halt, ini rinciannya. [Kontan.co.id 10 September 2020. https://investasi.kontan.co.id /news /sepanjang - 2020-bei-telah-lakukan-7-kali- trading-halt-ini-rinciannya](https://investasi.kontan.co.id/news/sepanjang-2020-bei-telah-lakukan-7-kali-trading-halt-ini-rinciannya)
- [8] Aldin, I. ulum. 2020. Imbas Pandemi, Kinerja Lima Perusahaan Transportasi Semester I Anjlok. [Katadata.co.id. https://katadata.co.id /agungjatmiko / finansial/ 5f3505138f061/imbaspandemic- kinerja-lima-perusahaan-transportasi-semester-i-anjlok](https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5f3505138f061/imbaspandemic-kinerja-lima-perusahaan-transportasi-semester-i-anjlok)
- [9] Liu, H.Y., Aqsa Manzoor, Wang, C.Y., Zhang, Lei., dan Zaira Manzoor. 2020. The COVID-19 Outbreak and Affected Countries Stock Markets Response. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, 2800; pp. 1-19 doi:10.3390/ijerph17082800 <https://www.mdpi.com/journal/ijerph>

- [10] Widayanti, P. dan Haryanto, A., M. 2013. Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Volume Perdagangan Terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Real Estate and Property yang Terdaftar di BEI periode 2007-2010). *Diponegoro Journal Of Management* 2 (3) 1-11
- [11] Pontiff, J. dan Schall, L. D. 1998. Book to Market Ratios as Predictors of Market Returns. *Journal of Financial Economics* 49 141-160
- [12] Istiningrum, A.A., dan Suryati. 2014. Pengaruh Residual Income dan Market to Book Ratio terhadap Stock Return pada Industri Manufaktur. *Jurnal Ilmu Manajemen* 11(3) 42-62
- [13] Fama, E. F. 1969. Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work. *Journal of Finance* 25 (2) 383-417
- [14] Al- Awadhi, A. M., Alsaiifi, K., Al- Awadhi, A., dan Alhammadi, S. 2020. Death and Contagious Infectious Diseases: Impact of the Covid-19 Virus on Stock Market Returns. *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 27 : 100326 1-5
- [15] Choriliyah, S., Sutanto, H. A., & Hidayat, D. S. 2016. Reaksi pasar modal terhadap penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atas saham Sektor Industri Transportasi di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic Education*, 5(1), 1-10. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec/article/view/13011>
- [16] Jogiyanto, Hartono. 2013. Teori Portofolio dan Analisa Investasi. Yogyakarta: Edisi 8. BPFE
- [17] Shleifer, Andrei. 2000. Inefficient Markets: An Introduction to Behavioural Finance, Oxford University Press UK
- [18] LeRoy, Stephen F. 2013. Can Risk Aversion Explain Stock Price Volatility? *Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter* April 8, 2013
- [19] Lintner, J. 1965. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. *The Review of Economics and Statistics* 47(1), 13-37. <https://doi.org/10.2307/1924119>
- [20] Aliu, F., Pavelkova, D., & Dehning, B. 2017. Portfolio Risk-Return Analysis: The case of the Automotive Industry in the Czech Republic. *Journal of International*

- Studies* 10(4), 72-83. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-4/5>
- [21] Wolski, R. 2017. Risk and Return in The Real Estate, Bond and Stock Markets. *Real Estate Management and Valuation*, 25(3), 15-22. <https://doi.org/10.1515/remav-2017-0018>
- [22] Stålnacke, O. 2019. Individual Investors' Information Use, Subjective Expectations, and Portfolio Risk and Return. *The European Journal of Finance* 25(15), 1351-1376. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2019.1592769>
- [23] Budiarmo, N., & Pontoh, W. 2019. Does Maturity Signals High Risk and High Return? *Indonesia Accounting Journal* 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.32400/iaj.25404>
- [24] Vo, D. H., Pham, T. N., Pham, T. T. V., Truong, L. M., & Nguyen, T. C. 2019. Risk, Return and Portfolio Optimization for Various Industries in the ASEAN Region. *Borsa Istanbul Review* 19(2), 132-138. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.09.003>
- [25] Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, Novietha Indra Sallama, Febriany Kusumastuti, Masykur, M. 2018. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi 14*, Penerbitan Jakarta: Salemba Empat
- [26] Ashraf, B. N. 2020. Stock Markets' Reaction to COVID-19: Cases or Fatalities? *Research in International Business and Finance* 54: 101249. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101249>
- [27] Mahammed, M. A. 2020. Analysis of Covid19 Lockdown Policy Impact By The Government of The Country On The Economic Sector And Signing of Working Relationships (Layoffs). *International Journal of Law Reconstruction* 4(1): 44-5
- [28] Al-Awadhi, A. M., Alsaifi, K., Al-Awadhi, A., dan Alhammedi, S. 2020. Death and Contagious Infectious Diseases: Impact of the Covid-19 Virus on Stock Market Returns. *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 27 : 100326 1-5
- [29] Salisu, A. A., & Vo, X. V. 2020. Predicting Stock Returns in the Presence of COVID19 Pandemic: The Role of Health News. *International Review of Financial Analysis* 71(June), 1-29. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101546>
- [30] Xu, Libo. 2021. Stock Return and the COVID-19 Pandemic: Evidence from Canada and the US. *Finance Research Letters*, 38, 2-14.
- [31] Yan, B., Stuart, L., Tu, A., & Zhang, Q. 2020. Analysis of the Effect of COVID-19 on the Stock Market and Investing Strategies. *SSRN Electronic Journal* 1-17.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.3563380>.

- [32] He, P., Sun, Y., Zhang, Y., & Li, T. 2020. COVID-19's Impact on Stock Prices Across Different Sectors—an Event Study Based on the Chinese Stock Market. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(10), 2198–2212. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1785865>. Indonesia Stock Exchange. (2020). IDX statistics 2020. Indonesia Stock Exchange Data Services Division. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
- [33] Widayanti, P. dan Haryanto, A., M. 2013. Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Volume Perdagangan Terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Real Estate and Property yang Terdaftar di BEI Periode 2007 2010). *Diponegoro Journal Of Management* 2 (3) 1-11
- [34] Tapa, A. dan Hussin, M. 2016. The Relationship BETWEEN Stock Return and trading Volume in Malaysian ACE Market. *International Journal of Economics and Financial Issues suppl. Special Issue* 6 (7) 271-278
- [35] Umam, K., & Sutanto, H. 2017. Manajemen Investasi. Bandung: Pustaka Setia. [36] Gitman, Lawrence J.; Zutter, Chad J. 2015. Principles of Managerial Finance, 14th ed. USA Pearson Education.
- [37] Zhang, X. J. 2013. Book to Market Ratio and Skewness of Stock Returns. *The Accounting Review* 88(6) 2213-2240
- [38] Odogunde, A. O., Elumilade, D. O. and Asaolu, T. O. 2006. Stock Market Capitalization and Interest Rate in Nigeria: A Time Series Analysis. *International Research Journal of Finance and Economics* 4, 154-166.
- [39] Oraman, C., Aydemir O. and Demirhan, E. 2009. The Long Run Relationship Between Stock Market Capitalization Rate and Interest Rate: Co-integration Approach, *International Research Journal of Finance and Economics*, 23, 208-215.
- [40] Dias, A. 2013. Market Capitalization and Value-at-Risk. *Journal of Banking & Finance* 37(12), 5248- 5260
- [41] Kumar, M. P. dan Kumara, N. V. M. 2020 Market Capitalization: Pre and Post Covid- 19 Analysis. *Materials Today: Proceedings* 1-5

- [42] Aslam, F., Mohmand, T., Ferraire, Y., Memon, P., Khan M, A. B., & Khan, M. 2020 Network Analysis of Global Stock Markets at the Beginning of the Corona Virus Disease (COVID19) Outbreak. *Borsa Istanbul Review*, 49–61
- [43] Just, M., & Echaust, K. 2020. Stock Market Returns, Volatility, Correlation and Liquidity During the COVID-19 crisis: Evidence from the Markov switching approach. *Finance Research Letters* 37. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101775>
- [44] Rahman, M. L., Amin, A., & AlMamun, M. A. 2021. The COVID-19 Outbreak and Stock Market Reactions: Evidence from Australia. *Finance Research Letters* 38 <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101832>
- [45] Zaremba, A., Kizys, R., Aharon, Y. D., & Damir, E. 2020. Infected Markets: Novel Coronavirus, Government Interventions, and Stock Return Volatility Around the Globe. *Finance Research Letters*, 35.
- [46] Baig, A., Hassan, A.B., Haroon, O., Rizvi, S.A.R. 2020. Deaths, Panic , Lockdowns and US Equity Markets: The Case of COVID-19 Pandemic. Available from: <https://www.ssrn.com/abstract=3584947>. [Last accessed on 2020 Apr 21]
- [47] Demir, E., Bilgin, M.H., Karabulut, G., Doker, A.C. 2020. The Relationship Between Cryptocurrencies and COVID-19 Pandemic. Available from: <https://www.ssrn.com/abstract=3585147>. [Last accessed on 2020 Apr 25]
- [48] Zhang, D., Hu, M., Ji, Q. 2020. Financial Markets Under the Global Pandemic of COVID-19. *Finance Research Letters*, (in-press).
- [49] Hamdan, Firmansyah dan Sri Hadijono. 2016. Analisis pengaruh Volume Perdagangan Saham Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Peraih Penghargaan Annual Reporting Award (ARA) TAHUN 2014. *Jurnal Ekonomi Akuntansi* Hal 83 – 96 Volume 1, Nomor 1, April
- [50] Ariyani, Indriastuti dan Zumrotun, Nafiah. 2017. Pengaruh Volume Perdagangan, Kurs dan risiko Pasar Terhadap return Saham *Jurnal STIE Semarang* Vol 9 No 1 Edisi Februari (Edisi Elektronik)
- [51] Osborne, M. F. M. (1959). Brownian Motion in The Stock Market. *Operations Research*, 7(2), 145-173. <http://dx.doi.org/10.1287/opre.7.2.145>
- [52] Ying, C. C. 1966. Stock Market Prices and Volumes of Sales. *Econometrica*, 34(3), 676-686. <http://dx.doi.org/10.2307/1909776>

- [53] Morgan, I. G. 1976. Stock Price and Heteroscedasticity. *Journal of Business*, 49(4), 496-508. <http://dx.doi.org/10.1086/295881>
- [54] Mahajan, S. & Singh, B. 2009. The Empirical Investigation of Relationship between Return, Volume, and Volatility Dynamics in Indian Stock Market. *Eurasian Journal of Business and Economics* 2(4), 113-137.
- [55] Granger, C. W., & Morgenstern, O. 1963. Spectral Analysis of New York Stock Market Prices. *Kyklos*, 16(1), 1-27. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6435.1963.tb00270.x>
- [56] James, C., & Edmister, R. O. 1983. The Relation Between Common Stock Returns Trading Activity and Market Value. *Journal of Finance* 38(4), 1075-1086. <http://dx.doi.org/10.2307/2328012>
- [57] Harris, M., & Raviv, A. 1993. Differences of Opinions Make a Horse Race. *The Review of Financial Studies*, 6(3), 473-506. <http://dx.doi.org/10.1093/rfs/6.3.473>
- [58] Justina, D. 2017. Pengaruh Firm Size dan Market to Book Ratio Terhadap Return Portofolio. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 15(2) 138-145
- [59] Araujo, R. C. C. dan Machado, M. A. V. 2018. Book to Market Ratio, Return on Equity and Brazilian Stock Returns. *RAUSP Management Journal*, 53(3) 324-344
- [60] Sansa, N. A. 2020. The Correlation Between Covid-19 Confirmed and Recovered Cases in China : Simple Regression Linear Model Evidence. *Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1) 121-129
- [61] Omran, M & Eric, G. 2009. On the Relationship between Trading Volume and Stock Price Volatility in CASE. *International Journal of Managerial Finance*. New York. Vol. 5 Iss 1 pp. 110 - 134
- [62] Lukacs, P. 2002. Stock Return Distribution and Market Capitalisation. *Journal of finance*. Hungarian: University of Sciences Pécs. *Statistical Review, Special number*

## **Profil Penulis**

### **Rousilita Suhendah, S.E., M.Si., Ak., CA.**



Rousilita Suhendah menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan S2 Magister Sains Akuntansi di Universitas Trisakti Jakarta. Saat ini berprofesi sebagai dosen dan Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Penelitian dan bidang pengajaran terkonsentrasi pada bidang akuntansi keuangan dan pasar modal. Aktif mengikuti kegiatan asosiasi profesi, pencinta wastra Indonesia, dan menulis tentang kain-kain wastra Indonesia.

## **BAB 4**

### **Analisis Penerimaan Pajak Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Pajak Daerah DKI Jakarta)**

Agustin Ekadjaja

Dwi Egalita Novia Maharani

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

#### **Abstrak**

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang berfungsi guna membiayai pengeluaran. Namun, keberadaan pandemi Covid-19 berdampak besar bagi pola hidup masyarakat termasuk pada sektor ekonomi. Hal ini secara langsung berdampak terhadap penerimaan negara. Salah satu pendapatan pemerintah DKI berasal dari pajak Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang diperoleh dari BPS DKI Jakarta serta [data.jakarta.go.id](http://data.jakarta.go.id). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pendapatan Pajak dan Retribusi, serta pungutan lain terhadap alokasi anggaran belanja langsung dan peningkatan pembangunan DKI Jakarta. Dalam meresponse hal tersebut, pemerintah terus melakukan serta memperbaiki kebijakan untuk meningkatkan kembali pendapatan DKI akibat pandemi Covid-19.

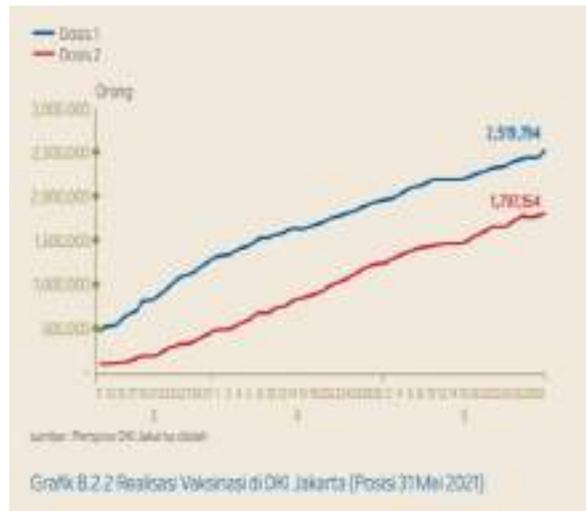
Kata Kunci: Covid 19, Pajak Daerah, Ekonomi

## 1.1 Pendahuluan/Latar Belakang

Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19, mulai menyebar di Indonesia sejak awal Maret 2020. Ekonomi mengalami dampak kemerosotan, banyak dana yang diperlukan pemerintah untuk mengatasi pandemi, sementara kemampuan ekonomi masyarakat semakin terpuruk karena banyak warga negara yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar pada kondisi kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Data menyebutkan bahwa per September 2021 jumlah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 851.686 orang.



Gambar 1.1 Data Kasus Terkonfirmasi Covid-19 DKI Jakarta[1]



Gambar 1.2 Data Realisasi Vaksinasi DKI Jakarta (Per 31 Mei 2021)[2]

Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan termasuk melakukan program vaksinasi, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang).[3] Kebijakan ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.

Pemerintah menurunkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2020 sebanyak dua kali melalui Perpres No 54 dan 72 Tahun 2020 yang menggantikan UU No 20 Tahun 2019 tentang APBN. Total penurunan anggaran pendapatan negara melalui dua Perpres tersebut ialah sebesar Rp 533,25 triliun. Penurunan anggaran pendapatan negara sebanyak dua kali menunjukkan sinyal awal menurunnya kinerja pendapatan negara pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Tantangan lain yang akan dihadapi Indonesia pasca pandemi Covid-19 adalah meningkatkan penerimaan pajak yang banyak menurun selama pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia banyak memberikan relaksasi pajak sehingga penerimaan pajak mengalami penurunan. Kebijakan pemerintah dalam memberikan relaksasi pajak akan menambah beban utang negara, oleh karena itu harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara supaya tidak menimbulkan masalah baru.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah Covid-19. Beberapa insentif pajak yang diberikan seperti: (1) Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, (2) Insentif PPh Pasal 22 Impor, (3) Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan (4) Insentif Pajak Pertambahan Nilai. menghasilkan laba atau keuntungan.

1) Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah untuk masa pajak Januari 2021 sampai Juni 2021. Insentif ini hanya berlaku untuk pegawai dengan kriteria tertentu, di antaranya yaitu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta.[4]

- 2) Insentif PPh Pasal 22 Impor Pemerintah membebaskan PPh Pasal 22 Impor pada wajib pajak yang:[5]
- [1] Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai yang tercantum dalam Lampiran PMK 9/2021;
  - [2] Telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau
  - [3] Telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat (“PDKB”) pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

Adapun pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.[6] Pembebasan ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan berlaku sejak tanggal surat tersebut diterbitkan.[7] Untuk memperoleh surat keterangan tersebut, wajib pajak mengajukan permohonan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). [8]

Apabila sudah mendapatkan pembebasan, wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan setiap bulan menggunakan formulir yang tersedia paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.[9]

1) Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya, yang diberikan untuk masa pajak dari Januari 2021 sampai Juni 2021.[10] Wajib pajak yang memanfaatkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ini harus menyampaikan laporan realisasi setiap bulan menggunakan formulir yang tersedia paling

lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.[\[11\]](#)

## 2) Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah, yang diberikan untuk masa pajak dari Januari 2021 sampai Juni 2021.[\[12\]](#) PKP yang memenuhi kriteria dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan ketentuan:[\[13\]](#)

- a. PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
- b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai dengan lampiran yang tercantum dalam Lampiran PMK 9/2021, fasilitas KITE atau izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian surat pemberitahuan lebih bayar restitusi.

Selain itu, PKP harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar rupiah,[\[14\]](#) yang meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang disampaikan paling lama akhir bulan setelah masa pajak pemberian insentif berakhir.[\[15\]](#)

Selain itu, pemerintah juga menetapkan beberapa relaksasi pajak di antaranya:

### 1) Penurunan Tarif PPh Badan

Pemerintah turut menurunkan tarif umum PPh Badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. [\[16\]](#) Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan

di Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan.[\[17\]](#) Sehingga, tarif PPh Badan *Go Public* sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022.

## 2) Perpanjangan Waktu dalam Administrasi Perpajakan

- a. Jangka waktu pengajuan keberatan oleh wajib pajak sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) diperpanjang paling lama 6 bulan [\[18\]](#)
- b. Jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dalam Pasal 113 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 6/1983) diperpanjang paling lama 6 bulan.[\[19\]](#)
- c. Jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) UU 28/2007 diperpanjang paling lama 6 bulan.[\[20\]](#)
- d. Jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU 28/2007, diperpanjang paling lama 6 bulan.[\[21\]](#)
- e. Jangka waktu pengembalian kelebihan bayar pajak sebagaimana dalam Pasal 113 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 11 ayat (2) UU 6/1983, diperpanjang paling lama 1 bulan.[\[22\]](#)

### 3) Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan perubahannya.[23]

### 4) Pajak atas Transaksi Elektronik

Pemerintah akan memungut PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh *platform* luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).[24] Selain PPN, pemerintah turut memungut PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia. [25]

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta langsung masyarakat yang secara bersama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak

dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Dalam rangka memaksimalkan pemerataan pembangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Asas ini memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,<sup>[26]</sup> definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan kebijakan ini dikarenakan masing-masing pemerintah daerah lebih memahami potensi dan kebutuhan rakyat di daerahnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerahnya.

Dalam mengoptimalkan tujuan tersebut, pemerintah daerah mendapatkan bantuan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>[27]</sup> Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bantuan dana ini diberikan guna menghindari ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akan tetapi, selain pembiayaan yang berasal dari Dana Perimbangan seperti Bagian Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dan memiliki penerimaan yang berasal atau dipungut dari daerahnya sendiri.

Untuk mengurangi ketergantungan, pemerintah daerah perlu menganalisis dan mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sumber penerimaan terbesar daerah didapatkan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2 Isi dan Pembahasan**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dipaparkan adalah:

- 1) Bagaimana pendapatan Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja langsung DKI Jakarta ?
- 2) Bagaimana peranan pajak retribusi dan pungutan lain dalam peningkatan pembangunan di DKI Jakarta?

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran pendapatan Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja langsung DKI Jakarta.
- 2) Untuk mengetahui peran Pajak, Retribusi dan pungutan lain dalam peningkatan pembangunan di DKI Jakarta.
- 3) Untuk mengetahui dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak dan menentukan langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk mengatasinya.

Manfaat bagi masyarakat dan pemerintah:

- 1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai peranan pajak dalam peningkatan pembangunan.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan dana

pajak termasuk retribusi dan pungutan lain di daerah masing-masing, khususnya di Jakarta.

- 3) Untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi atau pungutan lain dalam peningkatan pembangunan di daerahnya masing-masing, khususnya daerah DKI Jakarta.
- 4) Untuk membantu pihak pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kembali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya melalui pajak daerah.

## **Pajak**

### Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo (2019 : 9)).[\[28\]](#)

Pajak merupakan juga prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019: 11) terbagi atas fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dalam fungsi pajak yaitu sebagai fungsi anggaran yang dimana pajak yang dibayarkan masyarakat berguna untuk pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan kegiatan pemerintahan.

Menurut pemungut dan pengelolanya, pajak dibagi atas:

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi Bangunan, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan masih banyak lainnya.

### **Pajak Daerah**

a. Definisi Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, RI, 2009).[\[29\]](#) Sesuai Undang-Undang ini pajak daerah terdiri atas dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

b. Objek Pajak Daerah

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 2 dan 3, jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut.[\[30\]](#)

a) Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari:

- Pajak kendaraan bermotor
- Bea balik nama kendaraan bermotor
- Pajak air permukaan

Jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri dari:

- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak rokok
- 

b) Pajak Kabupaten/kota

Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari:

- Pajak reklame
- Pajak air tanah
- PBB-2

Jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak terdiri dari:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak penerangan jalan
- Pajak mineral bukan logam dan batuan
- Pajak parkir
- Pajak sarang burung walet
- Bea perolehan hak tanah

### **Retribusi Daerah**

Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi adalah iuran atau pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Retribusi dapat dipaksakan, berdasarkan sifat ekonomis dimana siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah dia tidak dikenakan iuran itu.

Retribusi daerah pada umumnya merupakan salah satu sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yakni retribusi jasa umum; retribusi jenis usaha dan retribusi perijinan.

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di jalan umum, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2. Retribusi jenis usaha, terdiri dari retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan.
3. Retribusi perijinan, terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pemindahan kendaraan bermotor, dan retribusi izin pencari kerja.

Karena retribusi ini terkait dengan pelayanan tertentu, maka prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan tersebut. Tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah, seperti perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi, dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sumber penerimaan daerah berasal dari 4 (empat) sumber yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berasal dari:
  - Hasil pajak daerah
  - Hasil retribusi daerah
  - Hasil perusahaan milik daerah
  - Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain bagian laba dari BUMD, dan jasa kerja sama dengan pihak ketiga)
  - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (jasa giro, dan hasil penjualan aset daerah).
- 2) Dana Perimbangan, yang sesuai pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004, terdiri dari 3 (tiga) bagian yang merupakan satu kesatuan elemen sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan oleh daerah, yaitu:
  - Dana Alokasi Umum (DAU), yang pendistribusiannya didasarkan pada suatu rumus, yang mempunyai tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah (seperti luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah) sehingga diharapkan perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

- Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan khusus daerah dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, dan
  - Bagian Daerah (Bagi Hasil) dari Penerimaan PBB, BPHTB, PPh Perseorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), merupakan komponen dana perimbangan yang pendistribusiannya dilakukan berdasarkan potensi daerah penghasil.
- 3) Dana pinjaman daerah, yaitu dana yang dapat diperoleh dari pinjaman baik dalam maupun luar negeri untuk membiayai sebagian anggaran pembangunan daerah.
  - 4) Lain-lain penerimaan yang sah (lain-lain pendapatan yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah).

Pentingnya PAD disebutkan secara tegas dalam ketentuan Undang-undang tersebut bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui APBD. Daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, di samping didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan pengertian di atas, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang perlu dioptimalkan penerimaannya dikarenakan PAD merupakan penerimaan daerah yang dimiliki dan diperoleh sendiri oleh masing-masing daerah. Dengan meningkatkan penerimaan PAD suatu daerah maka akan mencerminkan sistem pemerintahan daerah yang berhasil dalam mengatur dan mengurus daerahnya.

Data sekunder yang diteliti untuk penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta serta *website* [data.jakarta.go.id](http://data.jakarta.go.id).<sup>[31]</sup>

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal-hal yang menarik yang diinginkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Sampel adalah bagian dari populasi atau dapat dikatakan sampel terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Penggunaan sampel dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga untuk meneliti keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Reklame dalam Laporan Penerimaan PAD di DKI Jakarta dalam tahun 2018-2020 (3 tahun).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta serta *website* [data.jakarta.go.id](http://data.jakarta.go.id).

### **Teknik Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen, informasi, data-

data mengenai penerimaan PAD DKI Jakarta.

### **Obyek Penelitian**

Objek penelitian adalah karakteristik subjek yang menjadi perhatian pada suatu penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta selama pandemi Covid-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari laporan penerimaan dan kontribusi Pajak di DKI Jakarta.

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hotel termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pajak Hotel Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 1,420,442,713,844.

b. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan, reklame megatron, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pajak Reklame Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 975,657,600,900.

c. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa tersedia penerangan jalan pada wilayah atau daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pajak Penerangan Jalan Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 793,284,311,663.

d. Pajak Parkir

adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar

NO	JENIS PENERIMAAN PAJAK	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Pajak Hotel	IDR 1.700.000	IDR 1.740.000	IDR 1.800.000	IDR 1.768.198	IDR 675.000	IDR 753.130
2	Pajak Reklame	IDR 1.150.000	IDR 1.020.000	IDR 1.050.000	IDR 1.079.495	IDR 775.000	IDR 827.480
3	Pajak Penerangan Jalan	IDR 825.000	IDR 787.000	IDR 810.000	IDR 834.113	IDR 775.000	IDR 778.740
4	Pajak Parkir	IDR 550.000	IDR 513.000	IDR 525.000	IDR 537.128	IDR 325.000	IDR 337.690
5	Pajak Air Tanah	IDR 145.000	IDR 106.000	IDR 110.000	IDR 125.441	IDR 75.000	IDR 78.580

suatu usaha. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pajak Parkir Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 462,606,024,085.

e. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pajak Air Tanah Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 103,340,816,665.

f. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 8,421,392,994,907.

g. Pendapatan Asli Daerah

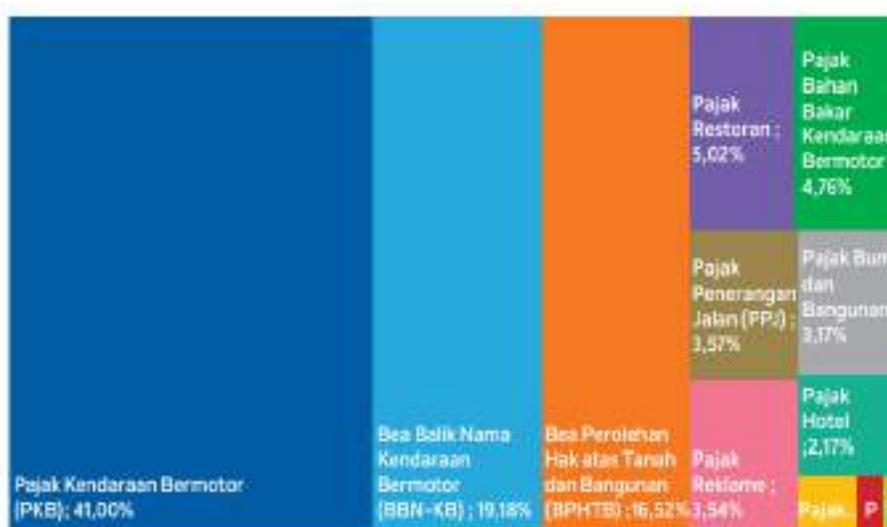
Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 48,865,000,000,000.

Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	Realisasi Triwulan I 2020			Realisasi Triwulan IV 2020			Realisasi Triwulan I 2021		
	Rp. Miliar	% APBD-P	% 2019	Rp. Miliar	% APBD-P	% 2019	Rp. Miliar	% APBD	% 2020
<b>PONDASI</b>	9.492,36	9,89%	-3,88%	9.308,00	29,84%	1,49%	11.392,00	16,30%	16,88%
<b>PENDAYANAN ASU DAERAH</b>	8.284,21	21,67%	5,83%	7.084,00	29,05%	-8,89%	6.880,80	9,89%	-8,52%
Pajak Daerah :	5.473,18	9,57%	5,88%	5.381,21	28,07%	-10,47%	5.927,07	13,80%	-10,24%
Pajak Kendaraan Bermotor	1.018,52	25,38%	1,00%	2.058,00	25,36%	-14,27%	2.757,85	9,85%	4,30%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.360,94	36,29%	5,07%	964,00	36,24%	-26,11%	902,80	9,19%	-24,44%
Pajak Darat Lokal Kendaraan Bermotor	211,20	22,88%	1,95%	245,41	22,98%	-25,21%	246,25	9,30%	-21,52%
Pajak Hotel	380,81	58,64%	3,36%	368,00	58,64%	-71,34%	71,83	6,17%	-71,80%
Pajak Restoran	281,25	40,23%	6,08%	421,78	40,23%	-54,78%	298,88	8,29%	-70,65%
Pajak Hiburan	78,63	60,88%	1,27%	85,00	88,09%	-96,68%	4,00	1,25%	-86,60%
Pajak Reklame	421,48	26,57%	5,08%	258,01	28,57%	-25,44%	382,58	13,80%	-15,50%
Pajak Penerangan Jalan	210,84	27,22%	4,29%	56,29	27,03%	-8,36%	94,01	9,89%	-12,40%
Pajak Air Tanah	21,00	38,88%	-10,47%	21,00	36,00%	-53,80%	15,34	6,30%	-28,84%
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	194,08	41,57%	-1,94%	71,21	41,58%	-48,17%	10,70	4,27%	-80,25%
Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan	572,34	11,52%	-16,86%	1.014,08	11,65%	-24,71%	460,81	10,89%	-62,71%
Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan	257,01	2,37%	40,23%	1.942,19	2,07%	188,57%	88,87	5,89%	-10,39%
Pajak Bekerja	-	0,00%	0,00%	295,00	0,00%	410,0%	-	0,00%	0,00%
Retribusi Daerah	88,26	45,13%	22,34%	168,00	23,20%	-40,85%	90,00	0,18%	-52,66%
Hati-hati Pengambilan Keputusan Daerah yang Diwajibkan	45,75	4,30%	0,00%	188,48	16,52%	-1,34%	4,04	6,29%	3,55%
Lain-Lain PAD	1.312,04	39,58%	25,00%	1.005,50	28,34%	7,09%	1.294,40	10,94%	8,27%
<b>PENDAYANAN TRANSFER</b>	1.283,99	14,00%	-12,87%	4.293,84	29,88%	83,46%	6.288,64	21,87%	69,88%
<b>LAIN-LAIN PENDAYANAN DAERAH YANG SAMA</b>	-	0,00%	-100,00%	1.452,40	71,54%	-10,41%	5,33	6,24%	0,00%

Tabel 1.2 Data Realisasi Penerimaan APBD DKI Jakarta Triwulan I 2021

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah [33]



Tabel 1.3 Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I 2021

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah [34]

### **1.3 Penutup**

Peningkatan Pajak Daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi merupakan peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui: (1) Penyempurnaan administrasi pajak, (2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut, dan (3) Penyempurnaan Undang-Undang pajak. Sedangkan upaya ekstensifikasi merupakan upaya memperluas subjek dan objek

## Referensi

- [1] <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>
- [2] <https://jakarta.bps.go.id/indicator/101/730/1/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-dki-jakarta-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah.html>
- [3] Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perpu 1/2020”)
- [4] Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) huruf b dan c PMK 9/2021
- [5] Pasal 10 ayat (3) PMK 9/2021
- [6] Pasal 18 ayat (2) PMK 9/2021
- [7] Pasal 10 ayat (7) huruf a dan (8) PMK 9/2021
- [8] Pasal 10 ayat (6) PMK 9/2021
- [9] Pasal 10 ayat (9) dan (10) PMK 9/2021
- [10] Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) PMK 9/2021
- [11] Pasal 14 PMK 9/2021
- [12] Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) PMK 9/2021
- [13] Pasal 15 ayat (12) dan (13) PMK 9/2021
- [14] Pasal 15 ayat (4) PMK 9/2021 [15] Pasal 15 ayat (9) PMK 9/2021
- [16] Pasal 5 ayat (2) UU 2/2020
- [17] UU No. 1 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020
- [18] Huruf E angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020”)

- [19] Huruf E angka 4 huruf c SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020
- [20] Huruf E angka 5 huruf c SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020
- [21] Huruf E angka 6 huruf g SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020
- [22] Huruf E angka 3 huruf c SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020
- [23] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan perubahannya.
- [24] Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu 1/2020
- [25] Pasal 6 ayat (1) huruf b Perpu 1/2020
- [26] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- [27] Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- [28] Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [29] Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [30] Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan Pajak Daerah
- [31] <https://data.jakarta.go.id/>
- [32] <https://data.jakarta.go.id/>
- [33] <https://bpkd.jakarta.go.id/>
- [34] <https://bpkd.jakarta.go.id/>

## **Profil Penulis**

### **Agustin Ekadjaja, S.E., M.Si., Ak., CA.**



Agustin Ekadjaja menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara, Jakarta dan S2 Magister Sains Akuntansi di Universitas Indonesia, Jakarta. Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap Program Studi S1 Akuntansi Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Penelitian dan bidang pengajaran terkonsentrasi pada bidang akuntansi keuangan dan pajak. Aktif mengikuti kegiatan asosiasi profesi, anggota komite audit dan mengikuti berbagai seminar dan webinar akuntansi serta

kegiatan organisasi tingkat internasional, nasional dan lingkungan universitas.

### **Dwi Egalita Novia Maharani**

Dwi Egalita Novia Maharani saat ini sedang menempuh pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara, Jakarta. Saat ini berprofesi sebagai mahasiswi Program Studi S1 Akuntansi Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Aktif mengikuti berbagai seminar dan webinar akuntansi serta kegiatan organisasi di lingkungan universitas.

## **BAB 5**

# **Relaksasi Pajak Sebagai Stimulus Pemerintah Mempercepat Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19**

Andreas Bambang Daryatno

Linda Santioso

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Media sosial pun dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sebagai sarana unjuk karya mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan memaparkan proses yang sudah dilaksanakan di kelas. Pembahasan penelitian terdahulu ditujukan untuk menunjukkan kebaruan, maupun sebagai teori yang dikuatkan pernyataannya. Kesimpulannya adalah bahwa unjuk karya di media sosial termasuk strategi *role play* yang menempatkan mahasiswa sebagai pihak subjek, karya sebagai objek, dan pengamat sebagai orang ketiga yang memberikan respon. Ketiga sudut pandang dalam penilaian karya ini disebut sebagai trikonomi estetika yang harus dilihat sebagai kesatuan dalam penilaian estetik yang holistik.

Kata kunci: mahasiswa, media sosial, pembelajaran, unjuk karya

## 1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang

Pandemic covid-19 dirasakan oleh seluruh dunia, negara-negara di seluruh belahan dunia dihadapkan kepada sesuatu yang tidak tampak atau terlihat tetapi mempunyai dampak sangat luar biasa. Korban jiwa berjatuhan, memaksa manusia merubah pola hidup dan tata cara bersosialisasi di masyarakat. Perubahan gaya hidup dan bersosialisasi berdampak sangat besar di sektor ekonomi. Perusahaan-perusahaan mulai berjatuhan dan tidak tahan menghadapi pandemic covid-19. Perusahaan yang masih bisa bertahan melakukan efisiensi besar-besaran, mulai dari pengurangan target penjualan, penurunan jumlah produksi, pemangkasan biaya-biaya bahkan pengurangan jumlah tenaga kerja. Keadaan ekonomi menjadi kacau, tingkat pertumbuhan ekonomi menurun dratis bahkan sampai terjadi resesi di banyak negara termasuk di Indonesia. Dalam upaya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, pemerintah melakukan sejumlah kebijakan melalui kementerian keuangan dengan mengeluarkan beberapa insentif dan relaksasi di bidang perpajakan. Pemerintah berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan Insentif dan relaksasi kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 [1]

Insentif dan relaksasi pajak adalah kebijakan pemerintah yang mengacu pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini juga menjadikan kompetisi antarnegara untuk meyakinkan investor masuk dan menanamkan modal di negaranya serta tidak berpindah ke negara lain. Adapun insentif pajak yang pemerintah berlakukan sementara selama pandemi Covid-19 berlangsung, antara lain [2]:

- a) Insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.(PPh) Pasal 21 ditanggung

pemerintah)

- b) Insentif pajak UMKM PPh final tarif 0,5% (PPh Final PP 23 tahun 2018) yang ditanggung pemerintah.
- c) Insentif PPh Final Jasa Konstruksi khusus jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
- d) Insentif PPh Pasal 22 Impor (SP-05/2021721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat
- e) Insentif angsuran PPh Pasal 25 bagi perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran
- f) Insentif PPN, di mana pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar.

Disamping insentif-insentif diatas, pemerintah masih menetapkan beberapa relaksasi antara lain :

- 1) Penurunan tarif PPh Badan
- 2) Perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan.
- 3) Pemberian fasilitas kepabeanan
- 4) Pajak atas transaksi elektronik

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud membuat penelitian descriptive dengan judul “Relaksana Pajak Sebagai Stimulus Pemerintah Mempercepat Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19”.

Disamping insentif-insentif diatas, pemerintah masih menetapkan beberapa relaksasi antara lain :

- 1. Penurunan tarif PPh Badan

2. Perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan.
3. Pemberian fasilitas kepabeanan
4. Pajak atas transaksi elektronik

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud membuat penelitian descriptive dengan judul “Relaksana Pajak Sebagai Stimulus Pemerintah Mempercepat Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19”.

## **1.2 Isi dan Pembahasan**

Di tengah wabah pandemic covid 19, dengan sigap dan cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan peraturan pemberian insentif pajak untuk meredam dampak wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai landasan hukum atas pemberian insentif pajak maka terbitlah [3] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

1. PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan atau pegawai dengan kriteria sebagai berikut (440 KLU)
  - a) Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 23/PMK.03/2020
  - b) Memiliki NPWP
  - c) Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - d) Atas Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 akan ditanggung Pemerintah dan harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai (diberikan mulai Masa Pajak April 2020 sampai

- dengan Masa Pajak September 2020)
- e) Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi kerja kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar secara langsung dan bisa secara online (DJP online melalui layanan di KSWP)
  - f) Atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" oleh pemberi kerja.
  - g) Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dapat disampaikan paling lambat: tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020
2. Insentif PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.(102 KLU)
- a) Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020.
  - b) Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
  - c) Pembebasan dari pemungutan PPh 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
  - d) Permohonan Surat Keterangan Bebas diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf G dan bisa secara online (DJP online melalui layanan di KSWP)
  - e) Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak

tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

- f) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP.
  - g) Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor disampaikan paling lambat: tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak dengan Masa Pajak September 2020
3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (102 KLU)
- a) Wajib Pajak diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang
  - b) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung dan bisa secara online (DJP online melalui layanan di KSWP
  - c) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
  - d) Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP
  - e) Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25

disampaikan paling lambat: a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 September 2020. sampai dengan Masa Pajak

4. Insentif PPN bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020 (102 KLU)
  - a) Menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
  - b) SPT Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.
  - c) PKP berisiko rendah akan diberikan pengembalian pendahuluan

Melihat perkembangan kondisi ekonomi saat itu, dampak pandemi covid-19 semakin meluas. Kondisi perekonomian semakin memburuk di hampir seluruh sektor dunia usaha, tidak terkecuali pelaku usaha kecil dan menengah maka pemerintah melalui Menteri keuangan memperbaharui kebijakan pemberian insentif. Menteri keuangan menerbitkan [4] pada tanggal 27 April 2020 mengantikan PMK-23/PMK.03.2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pemerintah memperbaharui kebijakan pemberian insentif antara lain:

- 1) Memperluas Insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan atau pegawai dengan yang sebelumnya hanya 440 KLU menjadi 1062 KLU
- 2) Memperluas Insentif PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan

impor barang. Dari 102 KLU menjadi 431 KLU

- 3) Memperluas Insentif Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dari 102 KLU menjadi 846 KLU
- 4) Memperluas Insentif PPN bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020 dari 102 KLU menjadi 431 KLU
- 5) Memberikan Insentif PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
  - a) PPh final dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak, menyerahkan fotokopi Surat Keterangan pada saat melakukan transaksi
  - b) Melakukan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 Impor
  - c) PPh final ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020
  - d) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah dapat diperoleh Wajib

Pajak termasuk yang telah memiliki Surat Keterangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

- e) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- f) Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh
- g) Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pemerintah melihat bahwa kondisi Pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Hal itu menyebabkan keadaan ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Pemerintah Indonesia melakukan Tindakan-tindakan yang harus segera dijalankan agar dapat bertahan di tengah masa pandemi ini. Secara resmi Pemerintah menerbitkan [5] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019". Untuk menggantikan PMK Nomor 44 tahun 2020 dicabut. Dalam Peraturan nomor 86/PMK.03/2020 dijelaskan bahwa Pemberian insentif pajak yang sebelumnya telah direncanakan sampai September 2020 kini diperpanjang sampai dengan Desember 2020 [6]. Pemerintah juga memperluas sektor penerima fasilitas insentif pajak, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada sektor industri manufaktur kini mulai merangkul hampir semua sektor seperti: sektor pendidikan, industri agrikultura, logistik, transportasi, konstruksi, telekomunikasi, jasa kesehatan, dan pertambangan [7]. Insentif Pajak yang diperpanjang sampai dengan Desember 2020 diantaranya:

- a) Memperluas Insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan atau pegawai dengan yang sebelumnya hanya 1062 KLU menjadi 1089 KLU
- b) Memperluas Insentif PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. Dari 431 KLU menjadi 721 KLU
- c) Memperluas Insentif Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dari 846 KLU menjadi 1013 KLU
- d) Memperluas Insentif PPN bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020 dari 431 KLU menjadi 716 KLU.
- e) Tetap memberikan Insentif PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Aturan terkait insentif pajak ini terus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terbukti dengan adanya perubahan lagi pada 14 Agustus 2020. Pemerintah merubah lagi aturan mengenai insentif pajak melalui [8] tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona*. Pemerintah tidak hanya menambah jumlah perusahaan yang mendapatkan incentive melalui KLU tetapi melakukan perluasan sebagai berikut :

- 1) Insentif PPh Final Jasa Konstruksi Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
  - a) Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat

final. dilunasi dengan cara. dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan Pemotong Pajak; atau disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan Pemotong Pajak

- b) PPh final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung Pemerintah.
  - c) Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAJ tidak melakukan pemotongan PPh final.
  - d) PPh final ditanggung Pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
  - e) PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020
  - f) Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan formulir sesuai contoh
  - g) Pemotong Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ../PMK.03/2020" atas PPh final ditanggung Pemerintah
  - h) Pemotong Pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- 2) Besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebelumnya hanya 30%.
- a. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak Juli 2020 bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan

- pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25
- b. Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

Kondisi pandemic covid 19 belum mereda juga sampai akhir tahun 2020, sehingga Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperpanjang pemberian insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021 melalui [9].

Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020 [10] Melalui PMK-9/PMK.03/2021 pemerintah menambahkan Kembali jumlah KLU artinya memperluas Kembali pemberian incentive kepada perusahaan-perusahaan terdampak pandemic covid 19 menjadi:

- 1) Memperluas Insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan atau pegawai dengan yang sebelumnya hanya 1089 KLU menjadi 1189 KLU
- 2) Memperluas Insentif PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. Dari 721 KLU menjadi 730 KLU.
- 3) Memperluas Insentif Angsuran PPh Pasal 25 50% dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dari 1013 KLU menjadi 1018 KLU
- 4) Memperluas Insentif PPN bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020 dari 716 KLU menjadi 725 KLU.
- 5) Tetap memberikan Insentif PPh Final atas penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

- 6) Tetap memberikan Insentif PPh Final Jasa Konstruksi wajib pajak P3-TGAI Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II - 2021 melesit hingga 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dengan demikian, Indonesia berhasil kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi, setelah beberapa triwulan terakhir berada dalam tekanan resesi akibat dampak pandemi Covid -19 [11]. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memperpanjang masa pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 sampai dengan Desember 2021. Perpanjangan masa pemberlakuan pemberian insentif pajak ini tercantum dalam [12]. Aturan ini merevisi PMK Nomor 9 Tahun 2021. Perpanjangan insentif pajak dibutuhkan untuk meringankan beban wajib pajak dan menangani dampak pandemi Covid-19. Namun, kriteria sektor yang menerima insentif pajak kini disesuaikan. "Pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif [13]

Melalui PMK-82/PMK.03/2021 pemerintah mengurangi jumlah KLU artinya mempersempit pemberian insentif kepada perusahaan-perusahaan terdampak pandemic covid-19 menjadi:

- 1) Tetap mempertahankan Insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan atau pegawai dengan yang sebelumnya hanya 1189 KLU menjadi 1189 KLU

- 2) Mengurangi Insentif PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. Dari 730 KLU menjadi 132 KLU.
- 3) Mengurangi Insentif Angsuran PPh Pasal 25 50% dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dari 1018 KLU menjadi 216 KLU
- 4) Mengurangi Insentif PPN bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020 dari 725 KLU menjadi 132 KLU.
- 5) Tetap memberikan Insentif PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
- 6) Tetap memberikan Insentif PPh Final Jasa Konstruksi wajib pajak P3-TGAI Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah

Dalam upaya pemerintah meningkatkan pemulihan ekonomi, disamping pemerintah memberikan insentif pajak diatas maka pemerintah juga menetapkan beberapa relaksasi di pajak antara lain :

- 1) Penurunan Tarif PPh Badan. Berdasarkan [14] bahwa tarif PPh Badan adalah 25% Pemerintah memberikan relaksasi dengan menurunkan tarif umum PPh Badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, selanjutnya akan menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Khusus untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat

tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Jadi, tarif PPh Badan Go Public sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022.

- 2) Perpanjangan Waktu dalam Administrasi Perpajakan
  - a) Jangka waktu pengajuan keberatan oleh wajib pajak diperpanjang paling lama 6 bulan, berdasarkan Pasal 25 ayat (3) [15].
  - b) Jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak berkaitan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperpanjang paling lama 6 bulan Berdasarkan Pasal 113 angka 8 [16]
  - c) Jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan diperpanjang paling lama 6 bulan Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) [15]
  - d) Jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan hasil pemeriksaan, diperpanjang paling lama 6 bulan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) [15].
  - e) Jangka waktu pengembalian kelebihan bayar pajak diperpanjang paling lama 1

- 3) Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional [18].

- 4) Pemberian Fasilitas Kepabeanan Pajak atas Transaksi Elektronik Pemerintah akan memungut PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh *platform* luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) [19]. Selain

PPN, pemerintah turut memungut PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia.

### 1.3 Penutup

Pemerintah melalui kebijakan fiskal, melakukan beberapa kebijakan untuk mengangkat, mempercepat, memulihkan kegiatan ekonomi atau dunia usaha.

- 1) Dampak pandemic covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi minus atau resesi.
- 2) Dengan sigap pemerintah melalui Menteri keuangan mengeluarkan kebijakan Insentif pajak dalam upaya membantu dunia usaha dan pegawai yang terdampak pendemu covid-19.
- 3) Saat keadaan ekonomi memburuk pemerintah memperluas insentif pajak, saat keadaan membaik maka pemerintah mengurangi insentif pajak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan dibawah ini.

	PMK 23 Tahun	PMK 44 Tahun 2020	PMK 86 tahun 2020 jo PMK 110	PMK 9 tahun 2021	PMK 82 tahun 2021
Insentif	2020	Tahun 2020	tahun 2020	tahun 2021	tahun 2021
PPh Pasal 21 DTP	440 KLU	1.062 KLU	1.089 KLU	1189	1189
PPh Pasal 22 Impor	102 KLU	431 KLU	721 KLU	730	132
PPh Pasal 25	102 KLU	846 KLU	1.013 KLU	1018	216
Restitusi PPN	102 KLU	431 KLU	716 KLU	725	132
PPh Final UMKM	-	Wajib Pajak UMKM	Wajib Pajak UMKM	Wajib Pajak UMKM	Wajib Pajak UMKM
PPh Final Kontruksi			Wajib Pajak Kontruksi	Wajib Pajak Kontruksi	Wajib Pajak Kontruksi

Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I 2021

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah[34]

- 4) Pemerintah memberikan beberapa relaksasi untuk mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi yaitu Penurunan tarif PPh Badan, Perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan, Pemberian fasilitas kebebeanan, Pajak atas transaksi elektronik
- 5) Melalui kebijakan fiscal yang telah berjalan saat ini, terbukti memberikan dampak yang baik bagi dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2021 mezejit hingga 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy)

## Referensi

- [1] <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2965/melihat-kembali-relaksasi-pajak>
- [2] <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/survei-dan-analisis-insentif-perpajakan-program-pen-2020-tunjukkan-dampak-positif/>
- [3] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- [4] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- [5] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- [6] <https://mucglobal.com/id/news/2200/relaksasi-pajak-bagi-terdampak-covid-19-diperpanjang-hingga-desember-2020>
- [7] <https://hsiconsulting.co.id/kabar-baik-insentif-pajak-di-indonesia-diperpanjang/>
- [8] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/Pmk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- [9] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/Pmk.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- [10] <https://www.pajakonline.com/pmk-9-2021-insentif-pajak-diperpanjang-sampai-30-juni-2021/>
- [11] <https://nasional.tempo.co/read/1491810/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-kuartal-ii-2021-tertinggi-sejak-17-tahun/full&view=ok>
- [12] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/Pmk.03/2021 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/Pmk.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

- [13] <https://www.pajakonline.com/pmk-82-2021-masa-berlaku-insentif-pajak-diperpanjang-hingga-desember-2021/>
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Tarif Pajak Penghasilan [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- [16] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,.
- [17] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983,
- [18] Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/Pmk.4/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- [19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## **Profil Penulis**

### **Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak.**



Andreas Bambang Daryatno adalah seorang dosen tetap di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara. Beliau menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntan di Universitas Tarumanagara. Beliau juga telah menyelesaikan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan memperoleh gelar BKP. Saat ini juga berprofesi dan berperan aktif sebagai praktisi dalam bidang perpajakan dengan menjadi konsultan pajak bagi beberapa perusahaan dan orang pribadi. Beliau juga banyak melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Perpajakan, Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Akuntansi.

### **Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA.**



Linda Santioso adalah seorang dosen tetap di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara dan pendidikan S2 Program Studi Ilmu Akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau juga telah menempuh Ujian Negara Akuntansi dan memperoleh gelar Ak. Saat ini juga telah banyak melakukan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen.

## **BAB 6**

### **Kepatuhan WPOP Selama Pandemi Covid-19**

Syanti Dewi

Widyasari

Nathaherwin

Anastasya

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi keuangan wajib pajak, preferensi risiko dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian dengan isu yang terbaru, dan ditujukan kepada seluruh wajib pajak perorangan dan badan khusus daerah DKI Jakarta. Jumlah responden sebanyak 75 orang. Penelitian yang menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak, pelayanan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, kondisi keuangan, preferensi risiko dan lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: WPOP, Insentif Pajak, Covid 19

## **1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang**

Sejak awal tahun 2020, pandemi covid -19 telah memberikan banyak tekanan kepada dunia usaha khususnya di sektor ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah dan kebijakan khusus untuk meningkatkan jalannya roda perekonomian. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang beberapa diantaranya mengatur bidang perpajakan. Selama pandemi ini, pemerintah mengalami peningkatan belanja publik yang begitu tinggi untuk menanggulangi Covid-19, hal ini memberikan tuntutan besar akan tercapainya target pendapatan. Di sisi lain, rasa kemanusiaan terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat, juga menuntut pemungut pajak membuka ruang bagi relaksasi kewajiban perpajakan. Hal ini sebagai empati atas beban masyarakat selama masa pandemik, sekaligus sebagai stimulus bagi percepatan pemulihan ekonomi.

Tujuan utama diberikan insentif perpajakan selama pandemi agar adalah untuk mendukung belanja masyarakat, dukungan cashflow serta untuk membiayai pembelian obat-obatan serta alat kesehatan dan vaksin covid -19. Berdasarkan tujuan dari insentif perpajakan bisa dikelompokkan menjadi tiga [1]. Pertama, insentif pajak untuk mendukung sisi demand dengan menjaga kemampuan masyarakat untuk tetap melakukan belanja. Kedua, insetif untuk mendukung cashflow bagi sektor usaha terdampak pandemi dengan memberikan kemudahan tambahan berupa keringanan pajak dalam bentuk penurunan tarif PPh Badan, pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 Impor, restitusi PPN dipercepat, dan PPh Final UMKM DTP. Ketiga, insentif pajak untuk pembelian alat kesehatan dan vaksin Covid-19. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian fasilitas perpajakan dalam proses pengadaan alat kesehatan dan vaksin dengan relaksasi pajak impor, BM dan Cukai, PPh 23, hingga PPN DTP.

Ada beberapa sisi negatif pemberian insentif pajak [2]. Sisi negatif itu ialah hilangnya pendapatan pemerintah yang mungkin akan sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, apalagi mengingat fungsi pajak yang utama yakni fungsi budgetair. Selain itu, insentif pajak dapat disalahgunakan untuk penghindaran pembayaran pajak, Belum lagi ditambah dengan biaya pengadministrasian pajak yang juga meningkat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan dari individu atau wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagai dimensi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa diantaranya antara lain adanya kewajiban seluruh wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan mengungkapkan jumlah penghasilan yang dilaporkan. Sejalan dengan implementasi self assessment diharapkan wajib pajak dapat mencapai suatu tingkat kepatuhan pajak sukarela (voluntary compliance) [3]. Dampak kebijakan insentif penurunan tarif pajak bagi UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku usaha dan penerimaan Negara [4]. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan [5]. Sehingga sanksi pajak yang dirancang oleh regulator harus mampu memberikan edukasi, kepastian hukum, serta keadilan kepada wajib pajak sehingga terciptanya lingkungan pajak yang berkepastian dan berkeadilan yang meningkatkan keyakinan wajib pajak untuk taat membayar pajak.

Selama masa pandemi, pelayanan pajak secara online sangat dituntut untuk memberikan kualitas yang terbaik buat wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak serta pelaporan. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan selama

masa pandemi *covid-19*, dimana banyak perusahaan yang mengalami rugi akibat pandemi ini. Kepercayaan kepada pemerintah akan tumbuh lagi, apabila pemerintah memberikan insentif dan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku [6].

Kondisi keuangan wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak, sehingga ini merupakan faktor penentu dimana si pembayar pajak melunasi pajaknya secara tepat waktu ataupun tidak. Apalagi selama pandemi ini, banyak perusahaan mengalami kerugian, sehingga gaji yang mereka terima tidak diberikan secara semestinya. Hal ini pula yang mendorong mereka tidak membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap resiko [7]. Risiko dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor risiko keuangan, kesehatan, sosial dan pekerjaan wajib pajak, terutama risiko kesehatan sangat berpengaruh selama pandemi berlangsung.

Lingkungan yang mendukung adanya pelaksanaan pajak berpengaruh terhadap peningkatan perilaku patuh pajak. Jika masyarakat di lingkungan wajib pajak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak, hal tersebut akan mendorong masyarakat lain untuk ikut patuh dalam membayar pajak. Lingkungan wajib pajak dapat terjalin melalui hubungan yang paling dekat yaitu dengan keluarga, teman, masyarakat setempat, serta lingkungan tempat wajib pajak bekerja. Hubungan antar wajib pajak yang terjalin melalui interaksi di lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap pandangan dan perilaku masing-masing wajib pajak dalam melakukan suatu tindakan, termasuk perilaku patuh atau tidak

patuhnya WP terhadap kewajiban perpajakannya [8}

## 1.2 Isi/Pembahasan

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan [9]. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 pasal 2, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah: 1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3. laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan [10]. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Sedangkan selama pandemi ini, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu *corporate income tax* (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Pemberian ini diberikan di tengah wabah corona yang

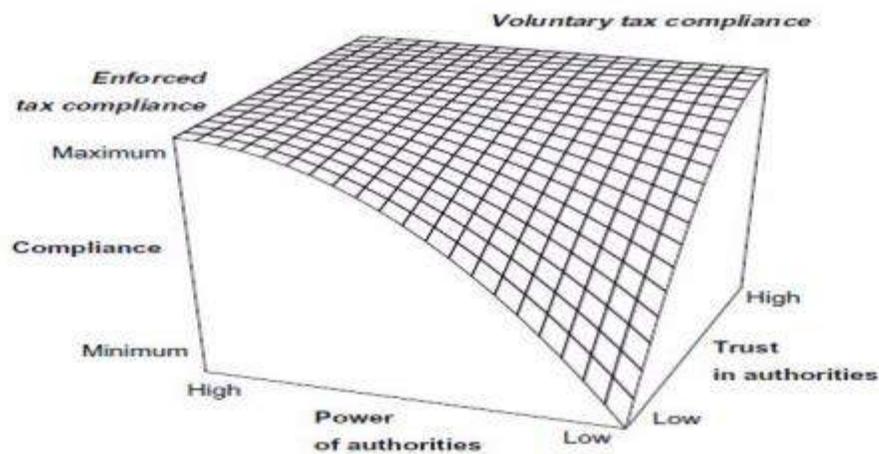
kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak. Keringanan pajak di Arkansas berpotensi membuat negara lebih makmur [6]. Argumen ini mengasumsikan bahwa insentif keuangan benar-benar menjadi faktor penentu untuk semua perusahaan. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan.

Tarif pajak adalah ukuran standar dalam pelaksanaan standar pemungutan pajak. Pada pajak penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%. Walaupun tarif pajak digunakan sebagai tolak ukur jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak namun harus tetap memperhatikan fungsinya secara hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Indikator untuk mengukur tarif pajak yaitu prinsip kemampuan dalam membayar pajak, kemampuan dalam membayar pajak dan Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia [11].

Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa kurungan [12]. Ada dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan

[13]. Berdasarkan jumlah pendapatan, sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil, persepsi penggunaan uang pajak secara transparansi dan akuntabilitas, serta *database* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [12].

Kualitas layanan pajak dapat didefinisikan sebagai persepsi atau evaluasi seluruh pembayar pajak yang terkait dengan koneksi layanan elektronik dengan pasar Internet [14]. Berbagai kebijakan pemerintah banyak dikeluarkan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Saat pandemi ini, banyak kebijakan pemerintah berupa insentif pajak yang diperuntukan untuk seluruh wajib pajak yang terkena dampak tersebut. Sehingga dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, sehingga dalam penelitian ini diperlukan penilaian dari responden wajib pajak di seluruh Jakarta. Berdasarkan teori slippery slope ini maka kebijakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi pengaruh dari sanksi perpajakan dan kebijakan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak [15]. Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan [6].



Gambar 1 Teori slippery slope [15]

Seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak [7]. Tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya, maka wajib pajak akan mendahulukan pengeluarannya dari pada membayar pajak.

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi [7]. Preferensi umum wajib pajak yang digunakan adalah risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, dan risiko pekerjaan [16]. Fenomena yang terjadi dalam dunia perpajakan ada wajib pajak yang kemungkinan menghadapi risiko yang ada dan ada juga wajib pajak yang menghindari risiko yang timbul dalam perpajakan. Ini memiliki andil yang besar dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan, namun tidak sedikit wajib pajak yang cenderung menghindari risiko yang berdampak terhadap penerimaan Negara [17].

Kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks dengan implikasi yang luas dan yang mempengaruhi kepatuhan tersebut ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan perilaku. Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman, sanksi-sanksi yang di berikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar wajib pajak. Lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya [8].

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 responden yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari Pengusaha, Tenaga Ahli, Direktur, Manager dan Supervisor, dengan Pendidikan terakhir mereka Sarjana, Magister dan Doktor yang bertempat tinggal di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey kuesioner selama bulan Januari-April 2021. Dari 75 responden yang memenuhi kriteria penelitian, diperoleh mayoritas yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah para responden yang berjenis kelamin wanita dengan jumlah sebanyak 41 orang (54,67%). Kemudian sisanya diikuti oleh para responden yang berjenis kelamin pria dengan jumlah sebanyak 34 orang (45,33%). Kelompok responden berdasarkan usia yaitu diantara (30-40 tahun) dengan jumlah sebanyak 32 orang (42,67%). Kemudian diikuti dengan responden yang memiliki usia diantara (40-50 tahun) sebanyak 23 orang (30,67%) dan usia di antara (20-30 tahun) dengan jumlah sebanyak 19 orang (25,33%). Selanjutnya diikuti dengan responden yang memiliki usia (> 50 tahun) dengan jumlah sebanyak 1 orang (1,33%).

Untuk uji analisis validitas ditinjau dari dua kriteria, yakni: validitas konvergen dan validitas diskriminan. Berdasarkan hasil kalkulasi, disimpulkan bahwa seluruh indikator/ Pernyataan yang digunakan oleh variabel laten penelitian:

insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, kondisi keuangan wajib pajak, preferensi risiko, lingkungan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah valid secara validitas konvergen karena tiap nilai AVE pada masing-masing variabel memiliki nilai  $> 0,5$ . Sedangkan untuk validitas diskriminan disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan oleh seluruh variabel adalah valid karena tiap indikator yang digunakan menghasilkan nilai *outer loading* tertinggi pada variabel nya sendiri dibandingkan *outer loading* pada variabel lain.

Reliabilitas penelitian ini diukur menggunakan program olah data SmartPLS versi 3 yang beracuan pada nilai yang dihasilkan oleh cronbach's alpha dan composite reliability. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan oleh variabel laten penelitian adalah reliabel karena menghasilkan nilai composite reliability  $> 0,6$ . Seluruh data yang terdapat pada penelitian ini adalah lolos uji validitas dan reliabilitas, di mana seluruh indikator yang digunakan dapat mengukur variabel latennya masing-masing, maka pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni: hasil nilai koefisien determinasi, q-square, f-square, Goodness of Fit (GoF), Path Coefficients, dan Hasil Uji hipotesis. Besarnya Goodness of Fit (GoF) adalah sebesar  $0,5761 > 0,36$  maka tingkat kesesuaian / kelayakan diantara model pengukuran dan model struktural pada penelitian ini adalah “besar”.

Variabel Independen		Variabel Dependen	Path Coefficients
Insentif pajak (X1)	Terhadap	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,267
Tarif pajak (X2)			0,120
Sanksi pajak (X3)			0,053
Pelayanan pajak (X4)			0,244
Kepercayaan kepada pemerintah (X5)			0,262
Kondisi keuangan wajib pajak (X6)			-0,310
Preferensi risiko (X7)			0,101
Lingkungan wajib pajak (X8)			0,257

Tabel 1.1 Hasil *Path Coefficient*

Nilai *path coefficient* pada variabel independen, yakni: insentif pajak (X1), tarif pajak (X2), sanksi pajak (X3), pelayanan pajak (X4), kepercayaan terhadap pemerintah (X5), preferensi risiko (X7) dan lingkungan wajib pajak (X8) adalah positif terhadap variabel dependen. Sedangkan kondisi keuangan wajib pajak (X6) adalah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar  $-0,310 < 0$ .

Penelitian yang menggunakan metode PLS-SEM maka dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai yang terdapat pada t-statistik pada analisis jalur untuk setiap variabel (path analysis), dimana nilai pada t-statistik ini diperoleh dengan melalui kalkulasi bootstrapping yang menggunakan software SmartPLS 3.3.2. Menggunakan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 atau 5% dan menggunakan pengujian 1 arah, dimana memakai prosedur *one-tailed* karena hipotesis sudah diberikan arah positif dan negatif. Oleh karena itu, batas minimum (*cut-off value*) yang digunakan di dalam pengujian hipotesis ini adalah sebesar 1,645.

Hasil hipotesis pertama, menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi adalah diterima

karena menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,267 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, nilai t-statistik  $2,003 > 1,645$  serta nilai p-values  $0,023 < 0,05$  yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat hal membayar dan menyetor pajak meningkat selama masa pandemi. Insentif yang diberikan yaitu pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan. Hal ini menyatakan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hipotesis kedua adalah tarif pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi, karena meskipun menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,120 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, tetapi nilai t-statistik  $0,792 < 1,645$  serta nilai p-values  $0,214 > 0,05$  yang artinya prediksi bersifat tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan tidak signifikan. Selama masa pandemi, adanya penurunan tarif pajak untuk pajak penghasilan badan, sedangkan tarif pajak penghasilan orang pribadi tidak mengalami penurunan. Jadi tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis ketiga adalah sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan positif dan ditolak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi, karena meskipun menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,053 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, tetapi nilai t-statistik  $0,417 < 1,645$  serta nilai p-values  $0,338 > 0,05$  yang

artinya prediksi bersifat tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan tidak signifikan. Sanksi pajak adalah merupakan alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan [18]. Persepsi WP atas adanya sanksi merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap patuhnya wajib pajak [19]. Sedangkan dalam kondisi saat ini selama pandemi, sanksi pajak berpengaruh tidak signifikan, penyebabnya banyak perusahaan atau usaha yang mengalami kerugian karena ada pembatasan sosial berskala besar. Usaha baik perorangan atau badan, banyak karyawan mereka yang dirumahkan atau bekerja di rumah (*work from home*).

Hipotesis keempat berisi Pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemik, karena menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,244 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, nilai t-statistik  $2,286 > 1,645$  serta nilai p-values  $0,011 < 0,05$  yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Maka dinotasikan hipotesis keempat tidak ditolak. Kualitas pelayanan pajak sangat penting bagi wajib pajak, sehingga dapat membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu dalam kondisi saat ini terutama di saat pandemi ini. Pelayanan pajak secara online yang baik diperlukan supaya kepatuhan WP menjadi tinggi.

Hipotesis kelima berisi “Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah diterima karena menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,262 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, nilai t-statistik  $2,518 > 1,645$  serta nilai p-values  $0,006 < 0,05$

yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Maka dinotasikan hipotesis kelima tidak ditolak. Bahwa kepercayaan kepada masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, jadi semakin meningkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, maka kepatuhan WP akan semakin meningkat. Teori slippery slope ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan *deterrence* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sedangkan variabel *deterrence* cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan/*enforced tax compliance*). Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (*trust in authorities*) [15]. Kepercayaan kepada pemerintah sangat dibutuhkan oleh wajib pajak, dalam kondisi saat ini. Kalau tidak ada kepercayaan, maka sektor pemasukan pajak untuk membiayai pengeluaran umum akan semakin menurun. Sedangkan saat ini, negara sangat butuh biaya yang besar dalam bidang kesehatan.

Hipotesis keenam berisi “Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah ditolak karena menghasilkan nilai *original sample* negatif  $-0,310 > 0$  yang menyatakan prediksi negatif, nilai t-statistik  $2,074 > 1,645$  serta nilai p-values  $0,019 < 0,05$  yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat negatif dan signifikan. Maka dinotasikan hipotesis keenam ditolak. Kondisi keuangan saat ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, hal ini disebabkan adanya kesadaran dari masyarakat dalam

membayar dan melaporkan pajak masih rendah, meskipun pemerintah sudah memberikan insentif pajak selama pandemi ini.

Hipotesis ketujuh berisi “Preferensi risiko berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah ditolak karena meskipun menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,101 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, tetapi nilai t-statistik  $0,572 < 1,645$  serta nilai p-values  $0,284 > 0,05$  yang artinya prediksi bersifat tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan tidak signifikan. Maka dinotasikan hipotesis ketujuh ditolak. Jadi berdasarkan penelitian, preferensi risiko mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan, oleh karena itu faktor ini bukan penentu meningkatnya kepatuhan wajib pajak selama pandemi *covid-19* berlangsung. Ada faktor-faktor risiko tertentu yang menjadi pengaruh kepatuhan tersebut, selain risiko keuangan, kesehatan, sosial dan pekerjaan.

Hipotesis kedelapan berisi “Lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah tidak ditolak karena menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,257 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, nilai t-statistik  $2,192 > 1,645$  serta nilai p-values  $0,014 < 0,05$  yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Maka dinotasikan hipotesis kedelapan diterima. Sedangkan selama masa pandemi, lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengaruh dari keluarga, teman dan masyarakat.

### 1.3 Penutup

Kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, diberikan selama pandemi berlangsung, sampai dengan akhir tahun 2021. dan untuk tahun ke depannya belum ada rancangan atau peraturan baru mengenai pemberian fasilitas perpajakan lagi. Hal inilah yang membuat variabel insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan. Adanya insentif pajak, daya beli masyarakat juga berkurang, karena penghasilan warganya juga berkurang, banyak pula pengganguran karena adanya pemutusan hubungan kerja serta pengurangan pegawai yang bekerja dari rumah. Sehingga penghasilan yang mereka terima banyak yang dipotong dari perusahaan tempat mereka bekerja. Sedangkan untuk variabel tarif pajak dan sanksi pajak dapat berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan, Hal ini disebabkan adanya penurunan tarif pajak dari pemerintah dan adanya penghapusan sanksi administrasi selama pandemi, belum dapat meningkatkan kepatuhan pajak setiap bulannya. Variabel pelayanan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Kepercayaan terhadap pemerintah sangat faktor penting dalam menghadapi pandemi ini, karena dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa program vaksinasi, pemberian sembako bagi penderita *covid-19*. Pelayanan pajak online yang bagus dan puas bagi wajib pajak, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Untuk variabel kondisi keuangan dan preferensi resiko bukan menjadi faktor penentu dalam kepatuhan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Variabel lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan, karena lingkungan dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku wajib pajak dalam melakukan suatu tindakan, termasuk dalam berperilaku untuk mematuhi ataupun tidak mematuhi.

## Referensi

- [1] Saputra. Dani, 2021, Kemenkue Klaim Insentif Perpajakan Bermanfaat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19, ,[www.ekonomi.bisnis.com](http://www.ekonomi.bisnis.com).
- [2] Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- [3] N. Heriyah, 2020, Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandung Tahun 2016), *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Volume 05 Nomor 2.
- [4] Khairiyah dan Akhmadi (2019) Khairiyah, Yotasa Raidah dan Akhmadi, Muhammad Heru, 2019, Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara, *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 3 No. 2.
- [5] Zulma, 2020, Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia, *Journal of Economics and Business*, 4(2), September 2020, 288-294, ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i2.170.
- [6] Latief, Zakaria dan Mapparenta, 2020, Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Center of Economic Student Journal*, Vol. 3 No. 3 (2020): Juli.
- [7] Julianti, M. and Zulaikha, Z., 2014, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Candisari, *Diponegoro Journal of Accounting*, vol 3 no 2 pp 793-807.
- [8] Fatima A dan Adi, H. P., 2019, Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *FRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 98–106. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3172>.

- [9] Salman, Kautzar Rizal, 2011, Studi Kepatuhan Wajib Pajak Dari Aspek Pengetahuan, Persepsi, Dan Sistem Administrasi, *The Indonesian Accounting Review*, Vol 1(01):45
- [10] Winardi, 2011, *Motivasi Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: Grafindo Persada. [11] Permatasari, I., dan Laksito. H., 2013, Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan), *Diponegoro Journal of Accounting*, vol.0, pp. 455-464.
- [12] Paramaduhita dan Mustikasari, 2018, Non-employee individual taxpayer compliance (Relationship with income and perception of taxpayer), *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 3 No. 1, 2018, pp. 112-122, Emerald Publishing Limited, 2443-4175, DOI 10.1108/AJAR-06-2018-0007.
- [13] Moravec, L. and Radvan, M., 2016, Surcharges and penalties in tax law, In book: *Surcharges and Penalties in Tax Law* (pp.24) Edition: 1. Chapter: Chapter 14: Czech Republic Publisher: Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation.
- [14] Zemblyto, Jurgita., 2015, The Instrument for Evaluating E-Service Quality, *Social and Behavioral Sciences* 213 ( 2015 ) 801 – 806.
- [15] Ratmono, Dwi., 2014, Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak, *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol 18, No 1.
- [16] Irawati, Wiwit., dan Sari. Arum Kumla., 2019, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi Bareleng*, vol 3(2):104
- [17] Adiasa, N., 2013, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko, *Accounting*

Analysis Journal, vol 2 (3), hal.345 – 352.

- [18] Mardiasmo, 2016, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi. [19] Wulandari , Retno., 2020, Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi, Journal of Business and Banking, Volume 10 Number 1 Mei - Oktober 2020 pp. 169-179.

## **Profil Penulis**

### **Syanti Dewi, S.E., MSi., Ak., CPA., CA.**



Syanti Dewi menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, S2 Akuntansi Universitas Trisakti, dengan bidang keahlian Audit, Pajak, dan Akuntansi Keuangan. Saat ini sebagai dosen di Universitas Tarumanaga prodi S1 Akuntansi. Penelitian 5 tahun terakhir dalam bidang Audit, Pajak, dan Akuntansi Keuangan, dan banyak melakukan kegiatan PKM bidang pajak dan akuntansi.

### **Widyasari, S.E., M.Si., Ak., CPA., CA.**



Widyasari menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, S2 Akuntansi, dengan bidang keahlian Auditing saat ini sebagai dosen di prodi S1 Akuntansi. Penelitian 5 tahun terakhir dalam bidang perpajakan dan akuntansi keuangan. Banyak melakukan kegiatan PKM bidang perpajakan dan akuntansi.

## **Nataherwin, S.E., M.M.**



Nataherwin, SE, MM menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, S2 Manajemen Universitas Tarumanagara, dengan bidang keahlian perpajakan saat ini sebagai dosen di prodi S1 Akuntansi. Penelitian 5 tahun terakhir dalam bidang perpajakan dan akuntansi dan banyak melakukan kegiatan PKM bidang perpajakan.

## **BAB 7**

### **CSR di Masa Pandemi Covid-19**

Dr. Verawati

Sriwati

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

#### **Abstrak**

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di Indonesia. Banyak perubahan yang terjadi dan berbagai penyesuaian perlu dilakukan akibat pandemi. Kegiatan CSR yang selama ini telah dijalankan oleh perusahaan pun akan mengalami perubahan. Kajian literatur, penelitian deskriptif, dan analisis konten dilakukan untuk mengetahui bagaimana perusahaan melaksanakan CSR di masa pandemi, khususnya CSR kepada masyarakat sekitar. Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan CSR masih tetap dijalankan oleh perusahaan dengan lebih menekankan pada APD, masker, alat dan fasilitas kesehatan sehingga memiliki manfaat tepat guna bagi masyarakat di sekitar perusahaan.

Kata kunci: CSR, Laporan Keberlanjutan, Pandemi, Covid-19, Keberlanjutan

## 1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang

Pandemi Covid-19 merupakan suatu kondisi wabah penyakit yang terjadi dengan sangat cepat hingga menyebar ke seluruh negara di dunia sejak Desember 2019. Dalam rangka mengendalikan laju penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Maret 2020. Kemudian, sejak Januari 2021 menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pembatasan kegiatan operasional di hampir semua sektor mengakibatkan banyak aktivitas terganggu. Setiap sektor yang terkena pembatasan harus dapat melakukan penyesuaian kegiatannya dengan segera. Selain itu, kebijakan pembatasan juga mempengaruhi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, dan lembaga lainnya.

Dampak yang dihasilkan pandemi Covid-19 merupakan suatu efek domino dan saling mempengaruhi. Ketika pembatasan diberlakukan, banyak perkantoran melakukan kegiatan *Work From Home* (WFH) bagi para karyawannya. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya penjualan pada rumah makan, restoran, dan warung yang berada di sekitar area perkantoran. Sekolah dan perguruan tinggi melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah secara daring. Kondisi ini berdampak pada penjualan kantin dan rumah makan di sekitar sekolah dan perguruan tinggi. Pusat perbelanjaan seperti mal yang ditutup sementara, mengakibatkan para *tenant* tidak dapat beroperasi sehingga kehilangan penjualan dan para karyawan harian tidak mendapatkan penghasilan. Para pelaku usaha lainnya, baik besar maupun kecil, juga mengalami penjualan yang menurun sehingga arus kas operasionalnya menjadi terhambat. Sektor bisnis yang mengalami penurunan selama pandemi Covid-19 adalah transportasi, pariwisata, pusat perbelanjaan, dan perdagangan yang mengandalkan kunjungan langsung konsumen [1]. Menurunnya penghasilan, baik yang dialami oleh perusahaan

maupun individu, akan berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi dan pengeluaran sehingga pada akhirnya menyebabkan roda perekonomian negara terganggu. Perekonomian yang terganggu dapat mengakibatkan terjadinya masalah dalam sosial masyarakat.

Selain itu, penurunan kegiatan usaha memiliki potensi dalam meningkatkan pengurangan jam kerja dan pemutusan hubungan kerja [2]. Peningkatan dalam hal pengurangan jam kerja dan pemutusan hubungan kerja mengakibatkan karyawan perusahaan kehilangan sumber penghasilan. Karyawan yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan perusahaan menjadi terabaikan kebutuhan dan kepentingannya. Karyawan yang tidak terpenuhi kebutuhannya oleh perusahaan menunjukkan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan menjadi terganggu. Selain karyawan, pemangku kepentingan lainnya juga terkena dampak pandemi Covid-19. Misalnya, pelanggan terkena dampak berupa respon yang lebih lambat akibat kegiatan operasional dilakukan secara WFH, pemasok terkena dampak berupa penurunan pembelian akibat penjualan yang menurun, pemegang saham terkena dampak berupa penurunan nilai saham akibat kinerja keuangan perusahaan yang tidak baik, dan komunitas terkena dampak berupa penurunan kegiatan pembangunan di wilayah sekitar perusahaan.

Tanggung jawab sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah konsep dimana organisasi mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan semua pemangku kepentingan, antara lain pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, komunitas, dan lingkungan [3]. CSR seringkali dikaitkan dengan keberlangsungan suatu perusahaan. Perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlangsungan usahanya akan memiliki perencanaan strategis dan kebijakan

tertulis mengenai langkah-langkah yang akan dijalankan supaya dapat meningkatkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan [4], [5]. Pandemi Covid-19 dapat menurunkan kegiatan CSR perusahaan. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa pada masa pandemi Covid-19, kegiatan CSR perusahaan justru mengalami peningkatan, seperti pemberian vaksinasi bagi para karyawan dan pemberian masker kepada masyarakat sekitar.

Krisis yang dihadapi akibat pandemi Covid-19 harus dapat disikapi secara positif sebagai masa pembelajaran bagi semua pihak. Karyawan dapat belajar bagaimana menyelesaikan pekerjaannya secara WFH dengan hasil yang baik. Pelajar dan mahasiswa dapat belajar bagaimana menimba ilmu dengan sumber daya terbatas. Perusahaan dapat belajar bagaimana menyesuaikan perencanaan dan ekspektasi yang telah dibuat sebelumnya, terutama terkait rencana kegiatan CSR yang pelaksanaannya terhambat akibat pembatasan. Melalui kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pada masa pandemi Covid-19, akademisi dan praktisi dapat mengetahui bagaimana penyesuaian kegiatan CSR perusahaan dalam menyikapi dampak dari pandemi bagi masyarakat sekitar perusahaan. Apa saja kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pada masa pandemi Covid-19? Apakah ada perbedaan dengan kegiatan CSR yang dilakukan sebelum pandemi? Berapakah biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan pada masa pandemi? Apakah terjadi peningkatan atau penurunan biaya CSR perusahaan? Dengan melakukan kajian literatur, penelitian deskriptif, dan analisis konten, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

## 1.2 Isi/Pembahasan

### 1 Teori dan Konsep CSR

Teori *stakeholder* menjelaskan mengenai kewajiban perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya, baik internal maupun eksternal [6]. Pada awalnya, perusahaan didirikan supaya dapat memaksimalkan keuntungan bagi pemiliknya. Pemilik dari perseroan terbatas adalah pemegang saham atau yang disebut juga dengan istilah investor. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk meningkatkan laba sehingga nilai perusahaan juga meningkat. Namun, pada perkembangannya, muncul isu dan pemahaman baru bahwa perusahaan harus dapat menciptakan dan memberikan nilai (*value*) bagi semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Seperti manusia yang merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan dan berinteraksi dengan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya, demikian pula perusahaan. Perusahaan terdiri dari struktur dan proses yang mencakup prosedur, budaya, hak, kewajiban, dan orang yang terus menerus berinteraksi dengan lingkungannya [7]. Keberadaan dan keberlangsungan perusahaan dipengaruhi oleh dukungan dari semua pemangku kepentingan [8], [9], yang terdiri dari pemegang saham, pelanggan, pemasok, karyawan, komunitas, serta lingkungan dan hak asasi manusia [10]. Setiap pemangku kepentingan tersebut merupakan pihak yang berinteraksi dengan perusahaan. Keberadaan perusahaan mempengaruhi pemangku kepentingan, dan sebaliknya, pemangku kepentingan mempengaruhi perusahaan. Dengan demikian, akan terbentuk suatu hubungan yang dinamis antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Setiap pihak akan saling bekerja sama guna mencapai tujuan bersama dan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Konsep yang mendasari CSR adalah *triple bottom line* atau yang lebih dikenal dengan istilah 3P, yaitu *people*, *planet*, dan *profit*. Konsep ini dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1994, dimana *people* digunakan untuk mengukur

kinerja perusahaan terkait aspek sosial, *planet* untuk mengukur kinerja perusahaan terkait aspek lingkungan, dan *profit* untuk mengukur kinerja perusahaan terkait aspek ekonomi [11]. *Profit* merupakan *bottom line* dari laporan laba rugi perusahaan, dimana laba merupakan tolok ukur atas kinerja keuangan perusahaan sehingga menjadi perhatian utama investor. Kemudian, muncul isu mengenai perubahan iklim sehingga perusahaan dalam menjalankan kegiatannya tidak boleh merusak lingkungan. Selain itu, perkembangan pengetahuan dan kesadaran atas pentingnya hak asasi manusia mengakibatkan perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan dari para karyawan yang bekerja untuk perusahaan. Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatannya dapat menyeimbangkan ketiga elemen tersebut akan lebih dipercaya oleh masyarakat sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan CSR memiliki banyak bentuk sesuai dengan bidang usaha perusahaan dan tempat dimana perusahaan berada. Akibatnya, pelaksanaan CSR dapat berbeda antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Misalnya, perusahaan di sekitar sungai dapat melakukan kegiatan CSR berupa pembangunan bendungan. Perusahaan di wilayah pedalaman dapat melakukan kegiatan CSR berupa pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dengan keahlian dan keterampilan khusus dapat melakukan kegiatan CSR berupa pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan dengan merekrut dan memberikan pelatihan kepada mereka. Perusahaan yang memerlukan bahan baku produksi berupa hasil pertanian dapat melakukan kegiatan CSR berupa membeli bahan baku dari petani lokal di sekitar perusahaan. Dengan demikian, kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat di sekitar perusahaan. Berdasarkan beberapa contoh di atas, dapat disimpulkan pula bahwa kegiatan CSR harus dapat disesuaikan dengan penerimanya, dalam hal ini penerima CSR adalah pemangku kepentingan perusahaan. Contoh kegiatan CSR berdasarkan

pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 1.1

Pemangku Kepentingan	Kegiatan CSR
Pelanggan	Produk berkualitas dengan harga yang wajar
	Pengungkapan mengenai risiko terkait penggunaan produk
	Produk yang aman
	Pengiriman produk yang cepat
Pemasok	Pembayaran tepat waktu
	Syarat kontrak pembelian yang wajar
	Jangka waktu persiapan pesanan yang wajar
	Tidak melakukan tindakan sepihak
Pemegang Saham	Akses yang mudah atas informasi keuangan
	Manajemen yang kompeten
	Jawaban yang jujur atas pertanyaan
	Informasi keuangan yang lengkap dan akurat
Karyawan	Lingkungan kerja yang aman
	Rekrutmen yang adil
	Kesempatan mendapatkan pelatihan dan promosi
	Kompensasi yang wajar
Komunitas	Pembayaran pajak yang tepat
	Informasi yang jujur
	Donasi
	Sumber daya yang mendukung kegiatan masyarakat sekitar
Lingkungan dan Hak Asasi Manusia	Daur ulang
	Konservasi
	Tidak mempekerjakan tenaga kerja anak
	Data emisi gas rumah kaca

Tabel 1.1 Contoh CSR Berdasarkan Pemangku Kepentingan [10]

## 2 Dasar Hukum CSR di Indonesia

Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai penerapan CSR dan laporan keberlanjutan di Indonesia. UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau terkait dengan sumber daya alam. Biaya terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan biaya yang ditanggung oleh perusahaan. PP Nomor 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung

jawab sosial dan lingkungan (Pasal 2) dan pelaksanaannya dimuat dalam laporan tahunan (Pasal 6). POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mengatur mengenai penerapan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha (Pasal 2) dan penyusunan laporan keberlanjutan (Pasal 10).

### **Pengungkapan Informasi CSR**

Informasi kegiatan CSR yang telah dilakukan perusahaan harus dapat dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi ini diperlukan karena masyarakat tidak hanya peduli terkait laba perusahaan saja, tetapi perlu mengetahui apakah perusahaan melakukan kegiatan yang berdampak pada sosial dan lingkungan, khususnya di sekitar perusahaan berada. Salah satu alat yang dapat digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan kegiatan CSR yang telah mereka lakukan adalah laporan keberlanjutan. Definisi dari laporan keberlanjutan adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal yang memberikan suatu gambaran mengenai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan, yaitu kegiatan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial [12].

Berdasarkan aturan yang berlaku, laporan keberlanjutan dapat dibuat dengan cara membuat laporan terpisah ataupun dapat digabungkan dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam penyusunannya, perusahaan dapat mengacu pada pedoman pelaporan keberlanjutan. Salah satu pedoman penyusunan laporan keberlanjutan yang umum digunakan adalah *Global Reporting Initiative (GRI)*, mulai dari GRI 2, GRI 3, GRI 3.1, GRI 4, hingga yang terbaru Standar GRI. Selain GRI, masih terdapat pedoman lainnya, seperti *ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility* yang kemudian diadopsi di Indonesia menjadi SNI ISO 26000: 2013.

Oleh karena laporan keberlanjutan dibuat setiap tahun, maka kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan sejak laporan keberlanjutan terdahulu hingga laporan berikutnya akan disampaikan di situs resmi perusahaan. Selain itu, informasi mengenai kegiatan CSR perusahaan dapat juga diperoleh dari media massa. Pengungkapan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Dalam rangka mendorong kegiatan CSR perusahaan, banyak ajang penghargaan CSR yang diselenggarakan, seperti *TOP CSR Awards* yang diselenggarakan oleh Majalah *TopBusiness*, *Indonesia CSR Brand Equity Awards* yang diselenggarakan oleh *The Economics*, *Indonesian CSR Awards (ICA)* yang diselenggarakan oleh *Corporate Forum for Community Development (CFCD)*, dan *Indonesia Sustainability Reporting Awards* (yang kemudian berganti nama menjadi *Asia Sustainability Reporting Rating*) yang diselenggarakan oleh *National Center for Sustainability Reporting*.

### **CSR di Masa Pandemi Covid-19**

Pemilihan perusahaan yang akan di analisis lebih lanjut mengenai kegiatan CSR yang telah dilakukan akan didasarkan pada pemenang penghargaan CSR. Ajang penghargaan yang dipilih adalah *Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)* yang diselenggarakan oleh *National Center for Sustainability Reporting (NCSR)*. Hal ini dikarenakan, NCSR merupakan organisasi pertama yang memperkenalkan istilah laporan keberlanjutan di Indonesia yang didirikan pada tahun 2005 oleh Institut Akuntan Manajemen Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia, *Indonesia-Netherlands Association*, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia*. Kemudian, pada tahun 2011 ditunjuk

sebagai Mitra Pelatihan GRI Resmi untuk Asia Tenggara oleh GRI [13].

Pada ASRRAT 2020, terdapat 4 kategori pemenang, yaitu *Platinum* sebanyak 5 perusahaan, *Gold* sebanyak 29 perusahaan, *Silver* sebanyak 3 perusahaan, dan *Bronze* sebanyak 4 perusahaan. Analisis akan dilakukan terhadap 1 perusahaan dari setiap kategori, sehingga terdapat 4 perusahaan yang akan dianalisis. Untuk memudahkan perolehan data mengenai kegiatan CSR perusahaan, maka perusahaan yang akan dianalisis adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (pemenang kategori *Platinum*), PT ABM Investama Tbk (pemenang kategori *Gold*), PT Astra Internasional Tbk (pemenang kategori *Silver*), dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (pemenang kategori *Bronze*). Selain itu, analisis kegiatan CSR akan difokuskan pada komunitas (masyarakat sekitar), karena masyarakat sekitar merupakan pemangku kepentingan eksternal perusahaan.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk yang didirikan pada 16 April 1993 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, dan operasi terkait PT ABM Investama Tbk yang didirikan pada 1 Juni 2006 merupakan perusahaan investasi strategis di bidang pertambangan terintegrasi yang mengelola keseluruhan rantai nilai pertambangan. Kegiatan CSR bagi masyarakat sekitar yang dilakukan perusahaan pada tahun 2020, antara lain: (1) Bantuan berupa penyediaan alat kesehatan, sosialisasi pencegahan, dan bantuan logistik kepada satuan tugas penanganan Covid-19 di wilayah operasi pertambangan; (2) Pemberian multivitamin dan APD berupa setelan lengkap *hazmat suit*, sarung tangan medis, masker, dan *hand sanitizer* kepada fasilitas kesehatan di Balikpapan, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin, dan Tangerang; (3) Pelaksanaan OVOP (*One Village One Program*) yang bertujuan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama sebagai mitigasi dampak pandemi di Gampong Paya Baro,

Gampong Buloh, Gampong Bukit Jaya, Gampong Pucok Redeup, Gampong Balee, Gampong Peunaga Cut Ujong, Gampong Redeup yang hingga akhir tahun 2020 terdapat 18 gampong yang telah bergabung; (4) Program beasiswa Desa Pintar, Program Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Program Kejar Paket A, B, dan C bagi siswa/i di Desa Mangkalapi, 2 SMK di daerah lingkaran tambang Kalimantan, 4 SMA di daerah lingkaran tambang Aceh Barat, dan mahasiswa di PTN Aceh; (5) Merekrut pekerja lokal di sekitar perusahaan; dan (6) Pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan, dan pembinaan kader posyandu bagi ibu dan anak di desa sekitar daerah operasi perusahaan.

PT Astra Internasional Tbk yang didirikan pada 1957 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Kegiatan CSR bagi masyarakat sekitar yang dilakukan perusahaan pada tahun 2020, antara lain: (1) Program Nurani Astra Berbagi untuk Negeri dengan total bantuan sebesar Rp151,8 miliar, yang terdiri dari sarana transportasi 110 unit, sembako 136.432 paket, APD 1.800.000 unit, ventilator 80 unit, dan *Intensive Care Unit* 2 unit; (2) Program CSR pada pilar Astra Untuk Indonesia Sehat, Astra Untuk Indonesia Cerdas, Astra Untuk Indonesia Hijau, dan Astra Untuk Indonesia Kreatif tetap berlangsung dengan penyesuaian; (3) Gerakan #SemangatSalingBantu dan #KitaSATUIndonesia memberikan 3.659 masker kain untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat; (4) Donasi Rp30 miliar untuk mendukung pembangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang; (5) Melanjutkan komitmen untuk mengembangkan 105 desa lainnya, sehingga mencapai 750 desa pada saat dilakukan *Kick-Off* Desa Sejahtera Astra 2020; dan (6) Program GrebeKBADSA (Gerakan Basmi Pandemi COVID-19 di Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra) yang bertujuan untuk meningkatkan semangat pemberdayaan, kesadaran dan kreativitas

penggerak dan pemerintah lokal KBADSA, serta memberikan pendampingan jarak jauh kepada KBA atau DSA terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19

PT Bank CIMB Niaga Tbk yang didirikan pada 26 September 1955 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan. Kegiatan CSR bagi masyarakat sekitar yang dilakukan perusahaan pada tahun 2020, antara lain: (1) Gerakan sosial #SolidLawanCovid yang berhasil menyalurkan dana sebesar Rp7,04 miliar yang dialokasikan untuk pembelian alat kesehatan dan kebersihan, serta makanan dan vitamin bagi para tenaga medis dan kesehatan; (2) Program Ayo Menabung dan Berbagi (AMDB) yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan, dimana pada tahun 2020 telah menjangkau 31 kota yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Samarinda, Blitar, dan Manado; (3) Program Tour de Bank (TDB) yang bertujuan memperkenalkan anak-anak SD tentang aktivitas dunia perbankan, dimana pada tahun 2020 telah menjangkau 23 kota yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Bandar Lampung, Blitar, Pekalongan, DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Surabaya, dan Tulungagung; dan (4) Program #KejarMimpi yang tetap berjalan dengan penyesuaian transisi dari tema *Goes to School* menjadi *Goes to Orphanage* dilaksanakan di panti asuhan di 7 kota, yaitu Jakarta, Solo, Makassar, Banda Aceh, Palembang, Mandalika, dan Ambon.

Setiap kegiatan pasti memerlukan dana supaya dapat berjalan. Begitu pula dengan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. Semakin banyak kegiatan CSR yang dilakukan, maka akan semakin besar dana yang diperlukan. Sesuai aturan yang berlaku, dana yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR merupakan biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan perencanaan keuangan yang baik, apalagi dalam kondisi pandemi

seperti ini. Total dana perusahaan yang disalurkan untuk membiayai kegiatan CSR dapat dilihat pada Tabel 1.2

Perusahaan	2018	2019	2020
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	N/A	US\$7,509,000	US\$6,151,000
PT ABM Investama Tbk	Rp21,52 miliar	Rp24,53 miliar	Rp28,8 miliar
PT Astra Internasional Tbk	N/A	N/A	N/A
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Rp19,089 miliar	Rp28,951 miliar	Rp28,046 miliar

Tabel 1.2 1 Total Penyaluran Dana CSR

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa jumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR tidak berubah terlalu jauh, malah ada yang mengalami peningkatan. Walaupun ada perusahaan yang tidak mengungkapkan mengenai biaya CSR mereka, namun kegiatan CSR tetap berjalan.

Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik harus memperhatikan keberlanjutan para pemangku kepentingannya [9], salah satunya dengan melakukan CSR. Namun, kegiatan CSR juga dapat dilakukan pada masa krisis, seperti pandemi Covid-19 yang saat ini sedang dihadapi. Pandemi Covid-19 memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan CSR [14]. Berdasarkan analisis terhadap 4 perusahaan di atas, dapat dilihat bahwa pada masa pandemi Covid-19, perusahaan tetap melakukan kegiatan CSR. Selain itu, terdapat penyesuaian kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dalam rangka menanggapi dampak pandemi.

Berdasarkan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT ABM Investama Tbk, PT Astra Internasional Tbk, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk dapat disimpulkan penyesuaian yang dilakukan antara lain: (1) Memberikan donasi, APD, alat- alat kesehatan, serta vitamin dan obat-obatan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar perusahaan; (2) Membangun fasilitas kesehatan di sekitar perusahaan; (3) Membuat program yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar perusahaan; dan (4) Tetap menjalankan program CSR yang berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan ini tentunya memberikan manfaat langsung bagi para penerimanya. Namun, juga memberikan manfaat tidak langsung bagi Pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa perusahaan tetap berkomitmen dalam melakukan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi untuk mengurangi kegiatan CSR. Walaupun pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial di seluruh wilayah Indonesia [15], kegiatan CSR dan upaya saling membantu di masa krisis akibat pandemi dapat mempercepat masyarakat untuk keluar dari krisis dan meminimalkan dampak negatif dari pandemi Covid-19.

### **1.3 Penutup**

CSR merupakan wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dan memiliki semangat untuk berkontribusi dalam masyarakat guna bersama-sama mengatasi dampak negatif dari pandemi Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan CSR perusahaan disesuaikan supaya dapat memberikan manfaat langsung dan tepat guna bagi penerimanya. Selain itu, program CSR berkelanjutan yang telah dijalankan dari tahun-tahun sebelumnya, tetap dijalankan oleh perusahaan karena menunjukkan hasil yang

baik dan dapat memberikan manfaat tidak langsung bagi penerimanya pada masa pandemi. Melalui pelaksanaan CSR, diharapkan dampak negatif dari pandemi Covid-19 dapat diminimalkan, masyarakat sekitar perusahaan mendapatkan alat dan fasilitas kesehatan yang memadai, dan kondisi perekonomian dapat berangsur-angsur pulih kembali. Dengan demikian, pandemi Covid-19 harus disikapi secara positif oleh semua pihak karena sikap positif dapat menimbulkan semangat kebersamaan dan gotong royong supaya dapat keluar dari krisis dengan cepat. Pada akhirnya, keberlanjutan dari semua pihak akan terjaga.

## Referensi

- [1] A. D. Kusumastuti, “Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Eksistensi Bisnis UMKM dalam mempertahankan Business Continuity Management ( BCM ),” *eJournal Adm. Bisnis*, vol. 8, no. 3, pp. 224–232, 2020.
- [2] Muhyiddin, “Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia,” *J. Perenc. Pembang. Indones. J. Dev. Plan.*, vol. 4, no. 2, pp. 240–252, 2020, doi:10.36574/jpp.v4i2.118.
- [3] R. H. Garrison, E. W. Noreen, P. C. Brewer, N. S. Cheng, and K. C. K. Yuen, *Managerial Accounting*, Second Edi. Mc Graw Hill, 2015.
- [4] R. Ameer and R. Othman, “Sustainability Practices and Corporate Financial Performance: A Study Based on the Top Global Corporations,” *J. Bus. Ethics*, vol.108, no. 1, pp. 61–79, 2012, doi: 10.1007/s10551-011-1063-y.
- [5] C. Searcy and R. Buslovich, “Corporate Perspectives on the Development and Use of Sustainability Reports,” *J. Bus. Ethics*, vol. 121, no. 2, pp. 149–169, 2014, doi:10.1007/s10551-013-1701-7.
- [6] T. Donaldson and L. E. Preston, “The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications,” *Acad. Manag. Rev.*, vol. 20, no. 1, pp. 65–91, 1995, doi: 10.2307/258887.
- [7] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, Sixteenth. New York: Pearson, 2020.
- [8] R. Natalia and J. Tarigan, “Pengaruh Sustainability Reporting terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik dari Sisi Profitability Ratio,” *Bus. Account. Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 111–120, 2014.
- [9] Verawati, “The Effect of Financial Conditions, Growth, and Debt to Equity Ratio on Company Sustainability with Corporate Governance as a Moderating Variable,” *Int. J. Contemp. Account.*, vol. 1, no. 2, pp. 149–162, 2020, doi: 10.25105/ijca.v1i2.6131.
- [10] R. H. Garrison, E. W. Noreen, and P. C. Brewer, *Managerial Accounting*, Seventeenth. McGraw-Hill Education, 2021.

- [11] W. Kenton, “Triple Bottom Line (TBL),” 2021. [Online]. Available: <https://www.investopedia.com/terms/t/triple-bottom-line.asp>. [Accessed: 07-Sep-2021].
- [12] B. Heemskerk, P. Pistorio, and M. Scicluna, “Striking the Balance: Sustainable Development Reporting,” *World Bus. Counc. Sustain. Dev.*, p. 62, 2002.
- [13] “NCSR – Secara Ringkas.” [Online]. Available: <https://ncsr.id/id/about-ncsr/>. [Accessed: 08-Sep-2021].
- [14] Y. Hendrayani and Uljanatunnisa, “CSR di Era Pandemi Berbasis Nilai-Nilai Bela Negara: Analisis Konten pada Situs Website Resmi Lima Badan Usaha Milik Negara,” *Society*, vol. 9, no. 1, pp. 1–19, 2021, doi: 10.33019/society.v9i1.260.
- [15] E. D. Sihaloho, Wiksadana, and C. D. T. Siregar, “Impacts of Regional Economic Factors on the Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia,” *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 397–403, 2020, doi: 10.33087/ekonomis.v4i2.180.

### **Profil Penulis**

#### **Dr. Verawati, S.E., M.Ak., Ak., CA.**



Verawati menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Tarumanagara dalam bidang akuntansi dan telah menyelesaikan S3 di Universitas Trisakti dalam bidang akuntansi. Saat ini sebagai dosen di Program Studi S1 Akuntansi. Penelitian yang pernah dilakukan merupakan penelitian dalam bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Kegiatan PKM yang pernah dilakukan merupakan kegiatan dalam bidang sistem informasi akuntansi.

#### **Sriwati, S.E., M.Ak., Ak., CA.**



Sriwati menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Tarumanagara dalam bidang akuntansi dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Trisakti dalam bidang akuntansi. Saat ini sebagai dosen di Program Studi S1 Akuntansi. Penelitian yang pernah dilakukan merupakan penelitian dalam bidang akuntansi keuangan, audit, dan akuntansi manajemen.

## **BAB 8**

# **Peranan Strategi Pengelolaan Biaya dalam Akuntansi Manajemen pada Masa Covid-19**

Rosmita Rasyid

Elizabeth Inge Pratiwi

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Akuntansi manajemen berperan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen dalam mengelola perusahaan. Pada masa covid 19 saat ini, banyak perusahaan melakukan tindakan pemotongan biaya untuk menurunkan biaya operasinya, merumahkan sebagian karyawannya dalam rangka mengurangi dampak covid-19. Untuk itu akuntansi manajemen perlu memberikan informasi mengenai biaya relevan, strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif, dan rantai nilai perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan perlu didasarkan atas informasi pengelolaan biaya yang tepat agar mencapai hasil yang diinginkan manajemen sehingga dapat bertahan dalam masa covid-19 dan dalam jangka panjang.

Kata kunci: Akuntansi Manajemen, Biaya Relevan, Keunggulan Kompetitif, Rantai Nilai

## 1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang

Pandemi covid-19 yang masih melanda dunia hingga saat ini telah membawa dampak pada kehidupan diseluruh dunia. Covid-19 yang berawal dari Wuhan, China pada November 2019 itu telah diakui keberadaannya di Indonesia pada bulan Maret 2020. WHO bersama International Labour Organization (ILO), Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) pada Oktober 2020 menyatakan bahwa disrupsi sosial ekonomi akibat Covid-19 amat besar. Puluhan juta orang dapat jatuh menjadi amat miskin. Jumlah orang kurang gizi di dunia yang pada Oktober 2020 diperkirakan 690 juta orang akan bertambah 132 juta lagi sampai akhir 2020. <https://analisis.kontan.co.id/news/dampak-ekonomi-pandemi-covid-19>, Jumat 22 Januari 2020.

Dampak pandemi covid-19 sangat besar pada perekonomian Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi merosot, banyak perusahaan yang bankrut, terjadi PHK yang masiv, dan berbagai dampak sosial dan ekonomi lainnya. Industri yang sangat terpukul dengan adanya pandemi covid 19 adalah industri penerbangan, perhotelan dan lainnya meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa perusahaan yang justru memperoleh keuntungan akibat pandemi covid-19, namun jumlahnya tidak banyak.

Pemerintah telah memberikan berbagai paket kebijakan yang memberi kelonggaran kepada perusahaan dengan harapan agar dampak covid-19 dapat diminimalkan. Berbagai paket kebijakan dibidang kesehatan, sosial, ekonomi, perpajakan dan upaya lainnya juga telah dilakukan oleh pemerintah termasuk tindakan pencegahan agar dampak covid-19 tidak menjadi masalah yang sangat besar. Hasil penelitian Rashwan dan Alhelou (2020) menunjukkan bahwa ada pengaruh tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari pandemi

Covid-19 terhadap kelangsungan industri yang terdaftar di Bursa Efek Palestina.

Dalam merespon dan mengurangi dampak covid-19 banyak perusahaan yang masih beroperasi merumahkan Sebagian karyawannya, melakukan tindakan pemotongan gaji karyawan, bahkan tindakan itu dimulai dari pemotongan gaji manajemen puncak sampai kepada karyawan pada level terbawah.

Disamping itu perusahaan-perusahaan melakukan berbagai upaya pembenahan internal agar perusahaan tetap eksis meskipun terdampak pandemi covid-19. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang akuntansi yang tujuan utama pemberian informasinya ditujukan kepada manajemen perusahaan. Ketika manajemen perusahaan menghadapi masalah terutama dimasa pandemi covid 19, maka sudah seharusnya informasi yang berasal dari akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimana akuntansi manajemen dapat memberikan bantuan kepada manajemen pada masa pandemi covid-19? Maka inilah yang menjadikan tulisan ini menarik untuk dibahas.

## **1.2 Isi/Pembahasan**

### **Akuntansi Manajemen**

Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang dalam akuntansi yang melakukan proses atau kegiatan yang menghasilkan informasi akuntansi bagi manajemen. Pemberian informasi ini dimaksudkan agar manajemen dalam melaksanakan tugasnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan atas fungsi-fungsi yang diembannya menjadi lebih mudah.

Terdapat tiga tujuan dari akuntansi manajemen (Hansen dan Mowen, 2007), yakni: a. Menyediakan informasi mengenai penghitungan harga pokok produk atau jasa, b. Menyediakan informasi untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dan yang terakhir c. Menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan. Ketiga tujuan ini mengharuskan bahwa manajer dan pengguna lain perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui cara menggunakannya. Dengan demikian, akuntansi manajemen dapat membantu manajer dan pengguna lain dalam mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja.

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pada saat sekarang yakni dimasa pandemi covid-19 belum berakhir membuat perusahaan harus mampu melaksanakan kegiatan operasinya secara efisien dan efektif. Untuk itu perusahaan haruslah melakukan pembenahan internal. Perusahaan dalam melakukan pembenahan internal, membutuhkan dukungan informasi akuntansi, khususnya informasi yang berasal akuntansi manajemen agar upaya pembenahan internal tersebut dapat berlangsung dengan efisien dan efektif. Salah satu upaya yang dapat diberikan oleh akuntansi manajemen dalam membantu perusahaan menghadapi tantangan tersebut adalah dengan memberikan informasi yang relevan yang dalam hal ini adalah informasi biaya relevan kepada manajemen agar dapat menerapkan strategi pengelolaan biaya yang tepat.

## **Biaya Relevan**

Biaya relevan adalah biaya dimasa mendatang yang berbeda diantara alternatif (Hansen Mowen, 2007). Dari defenisi tersebut terdapat dua kriteria biaya relevan yakni biayanya belum terjadi atau disebut sebagai biaya masa datang dan kriteria kedua adalah biaya tersebut haruslah berbeda diantara berbagai alternatif pilihan pengambilan keputusan.

Manajemen haruslah memahami biaya masa datang, karena hanya biaya masa datangnya yang relevan bagi pengambilan keputusan. Disamping itu biaya masa datang ini haruslah berbeda diantara alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Contoh sederhana penerapan biaya relevan dapat digambarkan dari kejadian berikut ini. Kevin, seorang mahasiswa Untar berasal dari Semarang selama ini kos di dekat Untar dengan membayar sewa kos Rp 1.000.000 rupiah perbulan. Sewa kosan untuk bulan Juni sudah dibayar oleh Kevin (asumsi belum ada pandemi Covid-19). Setelah menjalani Ujian Akhir Semester (UAS) pada bulan Juni, Kevin bermaksud pulang ke Semarang, karena perkuliahan pada semester berikutnya baru akan dimulai pada bulan Agustus. Kevin sedang mempertimbangkan apakah naik kereta api ataukah naik bus atau naik pesawat. Harga tiket kereta api adalah Rp 350.000 dan bus Rp 400.00. Kereta api dan bus berangkat ke Semarang dipagi hari dan sampai di Semarang di sore hari. Pesawat berangkat jam tiga disore hari dengan harga tiket sebesar Rp 500.000 dan sampai di Semarang di sore hari. Asumsi ongkos taxi dari kosan ke stasiun kereta, atau ke terminal bus maupun ke bandara adalah sama sebesar Rp 100.000.

Dari contoh di atas manakah yang termasuk biaya relevan? Kita kembali kepada pengertian biaya relevanyang memiliki dua kriteria yakni pertama adalah biaya masa datang dan yang kedua adalah berbeda diantara alternatif. Sewa kos Rp 1.000.000 yang dibayar Kevin bulan Juni bukanlah biaya relevan karena sewa

yang telah dibayar itu adalah biaya masa lalu, maka tidak memenuhi kriteria yang pertama.

Harga tiket kereta api sebesar Rp 350.000, bus sejumlah Rp 400.000 dan pesawat seharga Rp 500.000, adalah biaya relevan. Mengapa demikian? Karena biaya ini memenuhi kriteria biaya relevan yakni biayanya belum terjadi atau merupakan biaya masa datang, hal ini memenuhi kriteria pertama. Adapun kriteria kedua juga terpenuhi dengan berbedanya harga tiket kereta api, bus dan pesawat.

Ongkos taxi dari kosan ke stasiun kereta, atau ke terminal bus maupun ke bandara sebesar Rp 100.000 bukanlah termasuk biaya relevan. Penyebabnya adalah meskipun biaya tersebut belum terjadi atau merupakan biaya masa datang, yang berarti telah memenuhi kriteria pertama, namun tidak memenuhi kriteria kedua. Kriteria kedua yang mengharuskan biaya itu harus berbeda diantara alternatif-alternatif, sementara ongkos taxi dari kosan ke stasiun kereta, atau ke terminal bus maupun ke bandara adalah sama besarnya.

Pemahaman mengenai biaya relevan sangat diperlukan manajemen dalam rangka menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam masa covid-19 dan bahkan dalam jangka panjang. Pemahaman ini bahkan berguna pula bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif.

### **Keunggulan Kompetitif**

Keunggulan kompetitif merupakan faktor-faktor atau kemampuan yang melebihi pesaing secara berkelanjutan. Menurut Dambozo dalam Vattikoti and Razak (2018), perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan menciptakan nilai bagi pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang sama atau lebih rendah dari pesaing atau nilai yang sama dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing. Disamping itu, perusahaan harus memastikan apa yang diinginkan

atau diharapkan pelanggan dari perusahaan dan kemudian perusahaan memuaskan kebutuhan pelanggan tersebut bahkan melebihi apa yang diharapkan pelanggan.

Menurut Porter dalam Blocher et all (2010) keunggulan kompetitif secara generik dapat diperoleh melalui dua strategi bersaing yakni cost leadership atau differentiation. Cost leadership atau kepemimpinan biaya atau biaya rendah adalah strategi melebihi pesaing dalam memproduksi produk atau jasa pada biaya terendah. Dengan kata lain perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya atau biaya rendah biasanya membuat produk dengan kualitas standar namun menjual produk itu lebih murah dari pesaingnya. Hal ini membuat produk perusahaan lebih disukai dan konsumen banyak membeli produk tersebut sehingga perusahaan tersebut menjadi lebih unggul dari pesaingnya. Biaya rendah dapat muncul dari proses produksi yang lebih efisien. biaya tenaga kerja dan material yang lebih rendah, sistem distribusi yang efektif biaya.

Differentiation adalah strategi yang menciptakan persepsi pelanggan bahwa produk atau jasa adalah unik dalam beberapa cara penting, biasanya dengan kualitas yang lebih tinggi. *High Differentiation* berarti menciptakan produk atau jasa yang dipandang bernilai oleh pelanggan dapat diperoleh melalui *product features* atau penampilan produk, harga dan jasa pelayanan.

Perusahaan dalam konteks saat ini membutuhkan informasi biaya yang jauh lebih luas daripada hanya sekedar biaya produk agar dapat mencapai keunggulan kompetitif. Informasi biaya tersebut dapat berupa informasi biaya tentang pelanggan, pemasok dan desain produk yang berbeda yang dibutuhkan agar eksistensi perusahaan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan harus mampu menganalisis apa yang dianggap bernilai bagi pelanggan agar memperoleh loyalitas pelanggan. Untuk itu manajemen harus memahami rantai nilai perusahaan. Manajemen harus memahami tentang proses atau aktivitas apa yang penting atau bernilai bagi pelanggan misalnya kualitas produk, kinerja lingkungan, pengembangan produk baru, dan kinerja pengiriman. Pelanggan saat ini menganggap bahwa pengiriman produk atau layanan sebagai bagian dari produk. Perusahaan harus bersaing tidak hanya dalam hal teknologi dan manufaktur tapi juga dari segi kecepatan pengiriman dan respon.

### **Analisis Rantai Nilai**

Perusahaan selalu berupaya untuk memberikan sesuatu yang bernilai bagi pelanggannya agar dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Nilai bagi pelanggan merupakan selisih antara apa yang diterima pelanggan dengan apa yang dikorbankan pelanggan.

Apa yang diterima pelanggan adalah apa yang diperoleh pelanggan dengan membeli produk dan jasa tersebut termasuk rasa percaya diri mereka yang bertambah dengan memakai produk atau jasa tersebut. Apa yang pelanggan korbankan meliputi biaya pembelian produk, waktu dan usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan mempelajari cara menggunakan produk, dan biaya pasca pembelian yakni biaya penggunaan, pemeliharaan dan menjual kembali produk tersebut. Meningkatkan nilai bagi pelanggan berarti meningkatkan realisasi untuk pelanggan, menurunkan pengorbanan pelanggan atau keduanya. Hasil penelitian Kumar dan Rajev (2016) menunjukkan bahwa tidak ada cara khusus untuk menambah nilai barang atau jasa melainkan dengan cara-cara yang meminimalkan biaya dan waktu tanpa mengorbankan kualitas produk dengan cara efektif dan efisien.

Analisis rantai nilai adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk lebih memahami keunggulan kompetitif perusahaan, untuk mengidentifikasi di mana nilai bagi pelanggan dapat ditingkatkan atau biaya dikurangi, dan untuk lebih memahami hubungan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan perusahaan lain dalam industri tersebut. Analisis rantai nilai pada sebuah perusahaan adalah juga berarti proses memisahkan kegiatan utama perusahaan dengan kegiatan pendukung yang menambah nilai produk dan selanjutnya dianalisis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan diferensiasi. Analisis rantai nilai pada sebuah perusahaan adalah proses memisahkan kegiatan utama perusahaan dengan kegiatan pendukung yang menambah nilai produk dan selanjutnya dianalisis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan diferensiasi. Kegiatan utama dalam rantai nilai Porter dalam Anthony dan Vijay (2007) adalah pengembangan produk, produksi, pemasaran dan distribusi serta jasa logistic. Namun berbeda dengan Porter kegiatan utama di Pertamina adalah kegiatan purchasing dan kegiatan riset and development (Sutarmin, et all, 2016).

Rantai nilai yang perlu dipahami manajemen adalah rantai nilai ditingkat internal perusahaan maupun rantai nilai ditingkat industri. Penerapan rantai nilai telah memberikan hasil positif bagi industri susu di Sudan (Abdelhadi, 2016). Rantai nilai internal adalah rangkaian aktivitas yang dibutuhkan untuk mendisain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan produk dan jasa kepada pelanggan. Rantai nilai industri adalah rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan mulai dari bahan baku mentah hingga pembuangan produk jadi oleh pengguna akhir (Hansen, Mowen, dan Guan 2009).

Setiap perusahaan akan terlibat dalam segmen yang berbeda dalam rantai nilai industri. Perusahaan minyak yang besar terlibat dalam sebagian besar rantai nilai industri yakni dari eksplorasi sampai ke pom-pom bensin, seperti perusahaan

Pertamina. Meskipun demikian ada banyak perusahaan minyak yang terlibat secara eksklusif dalam segmen rantai yang lebih kecil seperti eksplorasi dan produksi atau pemurnian dan distribusi. Dengan memecah rantai nilai menjadi aktivitas yang relevan secara strategis adalah dasar untuk keberhasilan implementasi strategi kepemimpinan biaya dan diferensiasi.

Rantai nilai pada sebuah perusahaan merupakan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan produk dan layanan kepada pelanggan. Analisis rantai nilai mengidentifikasi dan memanfaatkan hubungan internal dan eksternal dengan tujuan memperkuat posisi strategis perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa dasar kerangka kerja rantai nilai adalah pemahaman akan pertalian (linkage) yang kompleks dan hubungan antar aktivitas-aktivitas baik di dalam (internal linkage) maupun luar perusahaan (external linkage). Apabila perusahaan dapat mengelola pertalian ini lebih baik dari para pesaingnya, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif.

### **Strategi Pengelolaan Biaya Pada Masa Covid-19**

Strategi pengelolaan biaya pada masa covid-19 sangatlah perlu mempertimbangkan rantai nilai perusahaan baik rantai nilai internal yang terjadi di dalam perusahaan, maupun rantai nilai eksternal. Rantai nilai eksternal yang dalam hal ini adalah merupakan rantai nilai perusahaan dengan pemasoknya dan dengan pelanggannya. Analisis rantai nilai adalah merupakan analisis strategis yang digunakan untuk lebih memahami keunggulan kompetitif perusahaan, untuk mengidentifikasi di mana nilai bagi pelanggan dapat ditingkatkan atau biaya dikurangi, dan untuk lebih memahami hubungan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan perusahaan lain dalam industri.

Rantai nilai internal adalah rangkaian aktivitas yang dibutuhkan untuk mendisain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan produk dan jasa ke pelanggan. Aktivitas rantai nilai internal untuk sebuah organisasi perlu dieksploitasi dalam rangka menurunkan biaya. Kegiatan sebelum dan sesudah produksi harus diidentifikasi dan keterkaitannya diakui dan dimanfaatkan.

Mengeksploitasi keterkaitan internal berarti bahwa hubungan antara aktivitas dinilai dan digunakan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan nilai. Misalnya, aktivitas desain dan pengembangan produk terjadi sebelum produksi dan terkait dengan kegiatan produksi. Cara produk dirancang mempengaruhi biaya produksi. Bagaimana biaya produksi terpengaruh membutuhkan pengetahuan dari penggerak biaya. Dengan demikian, mengetahui pemicu biaya kegiatan sangat penting untuk memahami dan memanfaatkan keterkaitan.

Apabila insinyur desain tahu bahwa jumlah suku cadang adalah pemicu biaya untuk berbagai kegiatan produksi (penggunaan material, penggunaan tenaga kerja langsung, perakitan, inspeksi, penanganan bahan, dan pembelian adalah contoh kegiatan di mana biaya dapat terpengaruh, kemudian mendesain ulang produk sehingga memiliki bagian standar, banyak sumber pengadaan, waktu tunggu yang singkat, dan kualitas tinggi dapat secara signifikan mengurangi biaya keseluruhan dari produk.

Aktivitas desain juga terkait dengan aktivitas layanan dalam rantai nilai perusahaan. Oleh sebab itu, memproduksi produk dengan bagian yang lebih sedikit, kemungkinan kegagalan produk lebih kecil dan, dengan demikian, lebih sedikit biaya yang terkait dengan perjanjian garansi (layanan pelanggan yang penting). Selanjutnya, biaya perbaikan produk dalam garansi juga harus turun karena bagian yang lebih sedikit biasanya berarti prosedur perbaikan yang lebih

sederhana.

Contoh penerapan analisis kertekaitan internal dalam rantai nilai dapat dijelaskan sebagai berikut: Sebuah perusahaan memproduksi berbagai produk peralatan medis berteknologi tinggi. Salah satu produk memiliki 20 bagian. Insinyur desain telah diberitahu bahwajumlah suku cadang adalah pemicu biaya yang signifikan (penggerak biaya operasional) dan bila mengurangijumlah suku cadang akan mengurangi permintaan untuk berbagai kegiatan hilir dalam rantai nilai.

Berdasarkan masukan ini, rekayasa desain telah menghasilkan konfigurasi baru untukproduk yang hanya membutuhkan delapan bagian. Manajemen ingin mengetahui pengurangan biayadihasilkan oleh desain baru. Mereka berencana untuk mengurangi harga per unit dengan penghematan per unit.

Saat ini, 10.000 unit produk diproduksi. Efek dari desain baru pada permintaan untuk empat kegiatan berikut. Kapasitas aktivitas, permintaan aktivitas saat ini(berdasarkan konfigurasi 20-bagian), dan permintaan aktivitas yang diharapkan (berdasarkan 8- bagian konfigurasi) sebagai berikut:

		Current	Expected		
Activities	Activity Driver	Activity Capacity	Activity Demand	Activity Demand	Activity Demand
Material usage	Number of parts		200.000	200.000	80.000
Assembling parts	Direct labor		10.000	10.000	5.000
Purchasing parts	Number of orders		15.000	12.500	6.500
Warranty repair	Number of defective products		1.000	800	500

Sumber : : Hansen, Mowen, Guan, 2009

Tabel 1.1 1 Total Penyaluran Dana CSR

Data tambahan sebagai berikut:

*Material usage:* \$3 per part ; tidak ada fixed activity cost.

*Assembling parts:* \$12 per direct labor hour; tidak ada fixed activity cost

*Purchasing parts:* Tiga orang klerk dengan gaji \$30,000 per orang per tahun. Seorang klerk dapat memproses 5,000 purchase orders. Variable activity costs: \$0.50 per purchase order yang diproses.

*Warranty repair:* Dua repair agents, masing-masing digaji \$28,000 per year; masing-masing dari mereka dapat mereparasi 500 units per year. Variable activity costs: \$20 per produk yang direparasi.

Material usage		\$360,000 <sup>a</sup>
Labor usage		60,000 <sup>b</sup>
Purchasing		33,000 <sup>c</sup>
Warranty repair		34,000 <sup>d</sup>
Total		\$487,000
Units	<u>10,000</u>	
Unit savings	<u>\$48.70</u>	
	<sup>a</sup> (200,000	
	-80,000)\$3.	
	<sup>b</sup> (10,000	
	-5,000)\$12.	
	<sup>c</sup> [\$30,000 + \$0.50(12,500	
	-6,500)].	
	<sup>d</sup> [\$28,000 + \$20(800 -500)].	

Tabel 1.2 Penghematan Biaya Internal Linkage

Dari analisis keterkaitan internal dapat diperoleh penghematan yang signifikan. Desain produk dan desain proses memberikan banyak peluang untuk pengurangan biaya dengan merancang untuk mengurangi: (1) biaya produksi, (2) biaya dukungan logistik, dan (3) biaya pasca pembelian. Agar pendekatan ini

berhasil, manajer perusahaan harus memiliki pemahaman yang baik tentang aktivitas dan pemicu biaya serta mengetahui bagaimana aktivitas tersebut berinteraksi.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa keterkaitan internal dapat mengupayakan strategi penurunan biaya. Penurunan biaya tersebut dimulai dari aktivitas desain, pengembangan, produksi dan distribusi.. Dengan mendesain ulang jumlah dan jenis suku cadang yang adalah merupakan pemicu biaya untuk berbagai kegiatan produksi (penggunaan material, penggunaan tenaga kerja langsung, perakitan, inspeksi, penanganan bahan, dan pembelian) adalah contoh kegiatan di mana biaya dapat terpengaruh, Dengan demikian mendesain ulang produk sehingga memiliki bagian standar, banyak sumber pengadaan, waktu tunggu yang singkat, dan kualitas tinggi dapat secara signifikan mengurangi biaya keseluruhan dari produk.

Namun strategi pengelolaan biaya yang dalam hal ini bertujuan menurunkan biaya juga perlu mengupayakan perbaikan pada keterkaitan eksternal. Aktivitas eksternal terkait membina hubungan dengan pemasok dan juga dengan konsumen. Hubungan dengan pemasok ditujukan untuk mengupayakan diperolehnya bahan baku yang murah dengan kualitas bagus. Hubungan dengan pelanggan ditujukan agar perusahaan memperoleh informasi mengenai hal-hal apa saja dari produk dan jasa yang dianggap penting yang perlu dipertahankan dan yang kurang penting dihilangkan untuk menghasilkan penurunan biaya.

### **Pembahasan**

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti situasi yang dihadapi manajemen dalam kondisi pandemic covid-19 adalah lebih sulit dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengurangi dampak covid-19 bagi perusahaan yang masih beroperasi, merumahkan sebagian karyawannya, melakukan tindakan

pemotongan gaji karyawan, bahkan tindakan itu dimulai dari pemotongan gaji manajemen puncak sampai kepada karyawan pada level terbawah, memberi diskon atas produknya dan berbagai tindakan lainnya.

Akuntansi Manajemen menyediakan informasi kepada manajemen mengenai penghitungan harga pokok produk atau jasa, dan menyediakan informasi untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dan yang terakhir serta. menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan Informasi dari akuntansi manajemen dapat memberi bantuan kepada manajemen perusahaan dalam mengelola biaya perusahaan khususnya untuk menurunkan biaya.

Dalam kondisi covid-19, kebanyakan manajemen terus berupaya untuk menurunkan biaya operasinya. Penyediaan informasi biaya relevan membuat manajemen mampu mengambil keputusan dengan biaya-biaya yang relevan dengan keputusan yang diambil. Hanya biaya yang relevanlah yang dibutuhkan oleh manajemen dalam mengambil keputusan. Biaya terdapat haruslah bersifat masa datang atau belum terjadi dan biaya tersebut berbeda diantara alternatif-alternatif pilihan pengambilan keputusan. Manajemen dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan biaya-biaya apa saja yang relevan dengan pengambilan keputusan yang akan diambilnya.

Penyediaan informasi akuntansi manajemen mengenai strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif terutama melalui strategi biaya rendah akan memudahkan manajemen untuk membuat produk dengan kualitas standar namun menjual produk itu lebih murah dari pesaingnya. Dengan kata lain, Informasi mengenai strategi keunggulan kompetitif baik dengan strategi kepemimpinan biaya atau biaya rendah maupun strategi diferensiasi akan didukung oleh perhitungan kuantitatif dari akuntansi manajemen. Hal ini tentunya akan membuat perusahaan

mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya.

Analisis rantai nilai dirasakan sangat dibutuhkan oleh manajemen agar dapat mengatasi situasi sulit akibat pandemic covid-19. Dengan melakukan analisis rantai nilai manajemen dapat memahami keunggulan kompetitif perusahaan, dan kemudian mengidentifikasi di mana nilai bagi pelanggan dapat ditingkatkan atau biaya dikurangi. Disamping itu analisis rantai nilai juga bermanfaat untuk lebih memahami hubungan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan perusahaan lain dalam industri tersebut. Dalam rantai nilai dibutuhkan pemahaman mengenai keterkaitan internal maupun eksternal.

Keterkaitan internal bermakna bahwa kegiatan sebelum dan sesudah produksi harus diidentifikasi dan keterkaitannya diakui dan dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan penurunan biaya. Perbaikan desain produk dengan memperkecil variasi dan jumlah suku cadang yang digunakan maupun tenaga kerja yang dibutuhkan. Perbaikan desain produk juga dapat menurunkan biaya pembelian dan biaya garansi, sehingga secara total dapat menurunkan biaya operasi secara signifikan. Disamping mengkaji keterkaitan internal, pengkajian atas keterkaitan eksternal juga berpotensi dalam menurunkan biaya perusahaan. Keterkaitan eksternal terkait membina hubungan dengan pemasok dan juga dengan konsumen. Hubungan dengan pemasok ditujukan untuk mengupayakan diperolehnya bahan baku yang murah dengan kualitas bagus. Hubungan dengan pelanggan ditujukan agar perusahaan memperoleh informasi mengenai hal-hal apa saja dari produk dan jasa yang dianggap penting oleh pelanggan sehingga perlu dipertahankan dan yang kurang penting dihilangkan untuk dapat menghasilkan penurunan biaya.

### 1.3 Penutup

Dampak pandemi covid-19 sangat besar pada perekonomian Indonesia sangat mempengaruhi perusahaan. Perusahaan harus berjuang agar tetap eksis pada masa covid-19 ini. Untuk itu akuntansi manajemen sebagai sumber utama pemberi informasi manajemen harus dapat memberikan informasi yang memudahkan manajemen dalam melaksanakan fungsinya.

Akuntansi manajemen harus memberikan informasi biaya yang relevan bagi manajemen. Biaya dikatakan sebagai biaya relevan apabila biaya tersebut merupakan biaya masa datang artinya biaya tersebut belum terjadi. Selain itu biaya tersebut haruslah berbeda diantara alternatif-alternatif pengambilan keputusan.

Akuntansi manajemen terkait dengan pengelolaan biaya yang dalam hal ini ditekankan pada penurunan biaya, juga harus menyediakan informasi tentang rantai nilai dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Untuk dapat mencapai keunggulan kompetitif perusahaan berkonsentrasi pada pengiriman nilai kepada pelanggan dengan tujuan: membangun loyalitas pelanggan.

Dasar kerangka kerja rantai nilai adalah pemahaman akan pertalian (linkage) yang kompleks dan hubungan antar aktivitas-aktivitas baik di dalam (internal) maupun luar perusahaan (external). Untuk itu manajemen perlu memahami dan menggali keterkaitan internal dan keterkaitan dengan eksternal perusahaan serta biaya yang relevan sehubungan dengan keterkaitan tersebut agar perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif secara berkelanjutan termasuk pada masa covid-19 ini.

## Referensi

- [1] Abdelhadi, Shihabeldin Elawad, 2016. The Impact of Value Chain on the Global Competitiveness of Sudan Dairy Industry. *Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management, Vol.16 Issue 9*
- [2] Anthony, Robert N., Vijay Govindarajan, 2007, *Management Control Systems, 12<sup>th</sup> edition* (Mc Graw Hill).
- [3] Blocher, Edward J., David E. Stout, Gary Cokins 2010, *Cost Management A Strategic Emphasis, 5<sup>th</sup> edition*, Mc Graw-Hill Irwin
- [4] Hansen, Don R., Maryanne M. Mowen, 2007. *Management Accounting, 8<sup>th</sup> edition* (Thomson)
- [5] \_\_\_\_\_, Guan, 2009, *Cost Management Accounting and Control, 6<sup>th</sup> edition* (South Western Cenage Learning)
- [6] Kumar, Dilip, Rajeev P.V., 2016. Value Chain: A Conceptual Framework, *International Journal of Engineering and Management Sciences, Vol. 7 (1)*
- [7] Rashwan, Abdul Rahman M.S., Eitedal M.S. Alhelou, 2020, The Effect of the Covid- 19 Pandemic on the Company's Sustainability under International Accounting Standards, *International Journal of Academic Accounting, Finance & Management Research, Vol.4, Issue7*
- [8] Saragih, Maulana Majied Sumatrani et al, 2021, The Impact of the Covid-19 Pandemic on Stock Performance: Evidence from Indonesia, *Management Research and Behaviour Journal, Vol. 1, Number 1*
- [9] Sutarmin, Dadang Prasetyo Jatmiko, 2016, Value Chain Analysis to Improve Corporate Performance a case study of Essential Oil Export Company in Indonesia, *Investment Management and Financial Innovations, Volume 13, Issue 3*

- [10] Vattikoti, Kishore, Abdul Razak2018, Critical Evaluation of Value Chain Analysis for Assessing Competitive Advantage a Study on Select Companies of E-TailingIndustryAcademy of Strategic Management
- [11] <https://analisis.kontan.co.id/news/dampak-ekonomi-pandemi-covid-19>,  
Jumat 22 Januari 2020.

## **Profil Penulis**

### **Dra. Rosmita Rasyid, M.M., Ak., CA.**



Rosmita Rasyid menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Andalas, Padang dan S2 Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta. Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap Program Studi S1 Akuntansi Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Penelitian dan bidang pengajaran terkonsentrasi pada bidang akuntansi keuangan dan manajemen. Aktif mengikuti kegiatan asosiasi profesi, dan mengikuti berbagai seminar dan webinar akuntansi serta kegiatan organisasi tingkat internasional, nasional dan lingkungan universitas.

### **Elizabeth Inge Pratiwi**

Elizabeth Inge Pratiwi saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tarumanagara dan merupakan seorang Asisten Mahasiswa di Prodi S1 Akuntansi. Pernah mengikuti pelatihan brevet AB dan telah mendapatkan sertifikasi accurate. Memiliki 1 penelitian yang diterbitkan di prosiding dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepercayaan Diri Manajer Terhadap Risiko Kejatuhan

## **BAB 9**

# **Implementasi Pembelajaran Online yang Digunakan oleh Dosen Akuntansi selama Pandemi Covid-19**

Amin Wijoyo

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan dunia menyebabkan terjadinya perubahan dalam dunia pendidikan terutama mengenai kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan bagaimana implementasi pembelajaran online yang digunakan oleh dosen akuntansi selama pandemi. Penelitian ini berdasarkan data kuesioner yang disebarkan kepada dosen akuntansi yang mengajar di UNTAR, UKRIDA, dan TSM. Media pembelajaran online yang paling banyak digunakan oleh dosen akuntansi adalah Microsoft Teams dibantu WhatsApp Group.

Kata kunci: Pandemi, Online, Teams, WhatsApp Group,.

## **1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang**

Dalam era sekarang ini teknologi menjadi penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari kegiatan untuk berkomunikasi sehari-hari dengan orang lain ataupun mengakses media sosial. Teknologi yang berkembang juga sekarang digunakan untuk pendidikan dikarenakan negara Indonesia sedang dilanda pandemi covid 19 yang berkepanjangan yang memaksa kegiatan belajar mengajar diharuskan dilakukan dari rumah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2013 pasal 3 [1] menyebutkan Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada era pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia mengubah proses pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan tatap muka berubah menjadi online, khususnya perguruan tinggi membutuhkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen. Adapun media pembelajaran online yang sudah diterapkan oleh dosen prodi pendidikan akuntansi adalah media Microsoft Teams, Zoom, dan Google Meet. Adapun media pembelajaran online tambahan yang disarankan seperti WhatsApp, Google Classroom, dan Line. Kita ketahui bersama bahwa media pembelajaran memegang peran dalam proses pembelajaran, dengan penggunaan media online yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran maka akan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Selain mampu menggunakan berbagai media online yang sesuai dengan kemajuan zaman, hendaknya dosen mampu mengerti dan memahami karakteristik dan keefektifan dari media yang berbeda-beda dalam

mendukung penyampaian materi. Pembelajaran oleh mahasiswa dan dosen dilakukan komunikasi 2 arah sehingga walaupun dilakukan dari rumah baik mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi menggunakan teknologi dan internet. Pada tenaga pendidik bertujuan untuk membuat mahasiswa menjadi lebih baik dalam pengetahuan serta etika. Semakin banyak interaksi antara mahasiswa dan dosen maka akan semakin tercapai tujuan belajar mengajar. Menurut [2] menyatakan bahwa media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal. jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sementara menurut Briggs dalam sadiman [3] menyatakan bahwa media merupakan alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta dapat merangsang siswa untuk belajar. Dapat disimpulkan berarti media dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar tersebut.

[4] serta [5] menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kemampuan dan peningkatan penyerapan terhadap materi kuliah dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pilihan yang bisa dimanfaatkan dalam situasi pandemi saat ini [6]. Internet menjadi media untuk menyalurkan ilmu pengetahuan. Bentuk pembelajaran yang tidak harus tatap muka, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat waktu. Keunggulan ini perlu dikelola oleh dosen dalam menyiapkan pembelajarannya dengan memanfaatkan aplikasi dan fitur yang memudahkan dosen dan mahasiswa seperti Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Whatsapp, Line, dan Google Classroom. *Social distancing* merupakan anjuran pemerintah yang menuntut semua sektor kehidupan harus beradaptasi pada perubahan. Kesiapan setiap individu dalam beradaptasi terhadap perubahan akan mempengaruhi tercapainya tujuan dengan ditetapkannya perubahan tersebut. Setiap orang bertanggungjawab untuk keberhasilan perubahan agar adaptasi menjadi efektif dan melakukan antisipasi secara proaktif terhadap kondisi yang

berubah. Kesiapan perubahan sebagai keyakinan dan sikap individu untuk menerima perubahan sebagai bagian dari cara dia mencapai tujuannya. Penerimaan atas perubahan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan cara untuk berhasil menyelesaikan perubahan. Ketika seseorang memiliki kesiapan untuk berubah maka diperlukan peran proaktif. [7] menjelaskan bahwa setiap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus mempunyai konteks kerja yang dinamis. Tidak hanya menyesuaikan perilaku mereka untuk mengakomodasi perubahan, tetapi juga bertindak dan memulai perubahan itu sendiri secara proaktif. Perilaku proaktif adalah suatu tindakan yang diarahkan untuk memulai perubahan dengan kemauan sendiri.

Dosen perlu memberi perhatian pada kepentingan mahasiswa yang memiliki berbagai macam kebutuhan. [8] menjelaskan bahwa terpenuhinya kebutuhan akan mempengaruhi motivasi kerja yang ada pada setiap individu untuk melakukan segala sesuatu yang lebih baik dari lainnya didalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya. Pada masa pandemi Covid 19 dengan diterapkan peraturan untuk melakukan pembelajaran dari rumah, maka dibutuhkan kesiapan untuk berubah baik dari mahasiswa, dosen maupun pendukung yang lainnya. Manajemen perubahan diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui media apa saja yang dipakai oleh dosen akuntansi dalam melakukan proses belajar mengajar. Seperti yang kita ketahui bahwa media pembelajaran online yang digunakan oleh dosen akuntansi penting dalam proses belajar mengajar agar mahasiswa mendapatkan hasil yang optimal. Semakin tinggi perkembangan teknologi yang digunakan maka mahasiswa tidak akan mengalami kendala dalam proses belajar mengajar.

Tujuan dalam penelitian ini:

- 1) Untuk mengetahui media online apa yang digunakan dosen akuntansi selama pandemi covid 19 untuk kegiatan belajar mengajar.
- 2) Untuk menganalisis implementasi pelaksanaan pembelajaran dengan media online yang sudah digunakan oleh dosen akuntansi selama pandemi covid 19.

## **1.2 Isi/Pembahasan**

Kesiapan individu untuk berubah mencerminkan pikiran, perasaan dan niat dari individu, yang mungkin atau tidak mungkin menyebabkan perilaku tertentu yang terkait dengan sikapnya. Volume tugas dengan jumlah yang banyak dan tingkat kesulitan dari tiap beban tugas tersebut, menuntut mahasiswa untuk menggunakan waktu dengan efisien dan efektif. [9] juga menjelaskan bahwa orang tua dan sarana prasarana adalah faktor pendukung tercapainya tujuan *school empowering program*. Kinerja merupakan suatu hasil fungsi yang digunakan untuk menilai kegiatan seseorang atau sekelompok individu dalam suatu organisasi yang terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap prestasi kerja seseorang. Perubahan strategi pembelajaran dari reguler menjadi Daring tentunya perlu didukung oleh lingkungan si pembelajar (internal, eksternal) dan sarana dan prasarana yang memadai. Kemampuan finansial orang tua si pembelajar, dan lokasi atau daerah asal mahasiswa mempengaruhi efektifitas penggunaan media pembelajaran daring.

Kesiapan untuk berubah menurut [10] dan [11] diawali dengan mempersiapkan diri untuk menerima perubahan karena pada hakikatnya manusia menjadi subjek dan objek perubahan serta mempunyai sifat resisten terhadap perubahan. Keyakinan dan sikap mahasiswa dalam menyikapi perubahan dalam strategi pembelajaran online dan kemampuan mahasiswa untuk berhasil menyelesaikan perubahan mempengaruhi kesiapan mahasiswa. Faktor terpenting dalam keberhasilan perubahan adalah sumber daya manusianya. Media Whatsapp grup menurut [12] dan [13] dapat dimanfaatkan dalam menyampaikan informasi untuk sarana diskusi dan mendidik serta, memberikan pengaruh. Strategi pembelajaran daring dengan memanfaatkan platform yang ada diharapkan dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Karenanya dibutuhkan kesiapan untuk perubahan di tingkat individu dipengaruhi oleh keyakinan bahwa: (a) mereka mampu menerapkan perubahan yang diusulkan, (b) usulan perubahan sesuai untuk dosen dan mahasiswa, (c) para pemimpin berkomitmen untuk perubahan yang diusulkan/dukungan manajemen, dan (d) perubahan membawa kebermanfaatan bagi civitas akademika. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa keyakinan individu akan manfaat perubahan dan komitmen dari mahasiswa, dosen dan pendukung lainnya, berdampak pada kesiapan individu dalam menghadapi perubahan. Kesiapan merupakan salah satu faktor terpenting untuk mendukung inisiatif perubahan dengan melibatkan semua komponen yang ada dalam sistem pendidikan. [14] antara lain menjelaskan bahwa kesiapan untuk berubah dapat dideteksi dari beberapa variabel seperti variabel motivasional, ketersediaan sumber daya, nilai-nilai dan sikap positif yang dikembangkan, serta iklim organisasi yang mendukung perubahan. Kesiapan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran selama perubahan berlangsung diartikan sebagai kesiapan individu untuk berubah.

*Learning Technology Standards* adalah salah satu standart yang terkait dengan sistem Pembelajaran daring yang memiliki tiga klasifikasi yaitu: (1) *Quality Standart*, (2) *learning technology Standards*, dan *Related Standards* [15]. Standart kualitas, mendukung pengembangan kualitas untuk kebutuhan yang spesifik. Sedangkan untuk klasifikasi standart teknologi dalam pembelajaran berkaitan dengan *Learning Management Systems* (LMS) dan materi pembelajaran daring. *Related Standards* terkait dengan kualifikasi standart teknologi, proses atau legalitas. Standart kualitas dari pembelajaran daring akan mempengaruhi kepuasan mahasiswa. [16] menjelaskan bahwa kepuasan mahasiswa mempengaruhi loyalitas mahasiswa. Sedangkan indikator yang paling dominan mempengaruhi kepuasan mahasiswa adalah profesionalisme dosen [17]. Manajemen pembelajaran daring tercapai dengan efektif apabila dosen menjalankan profesinya secara professional agar mahasiswa memperoleh kepuasan dan loyal pada kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan efisien dan efektif.

[18] Pembelajaran *online* memiliki beberapa ciri-ciri secara umum. Ciri-ciri tersebut didasarkan atas gabungan dari beberapa teori dan pendekatan yang mendukung pembelajaran *online*. Apakah Anda tahu, apa saja ciri-ciri dari pembelajaran *online*?. Sebenarnya jika anda coba selidiki dari beberapa bahan sumber pustaka, dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari pembelajaran *online* sangat luas, tetapi secara garis besar didapatkan bahwa ciri-ciri dari pembelajaran *online* menurut Flinders University, yaitu *personal, structurd, active dan Connective*.

Salah satu keuntungan dari pembelajaran online yaitu, siswa dapat menciptakan sendiri suasana belajar yang nyaman dan sesuai keinginan. Anda tidak perlu sibuk-sibuk berangkat ke sekolah, memakai seragam, dan waktu yang telah ditentukan. Semua proses belajar Anda yang menentukan, mulai dari waktu,

tempat, suasana, dan lain-lain. Siswa dalam proses pembelajaran online akan belajar secara sendiri dan mandiri. Ada beberapa faktor internal maupun eksternal yang akan memengaruhi keberhasilan dari pembelajaran online yang dilakukan oleh siswa. Faktor internal yang dapat mempengaruhi yaitu kecerdasan, rasa ingin tahu yang tinggi, motivasi, kepribadian, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembelajaran online yaitu teknologi yang dipakai, lingkungan sekitar, kecepatan akses internet dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran online setiap siswa perlu untuk menciptakan kehadiran guru, yang dapat digunakan sebagai kontrol untuk dirinya. Ketika siswa telah menciptakan kehadiran guru, siswa akan mampu mengontrol kecepatan belajarnya sendiri. Ketika peran guru tidak ada, maka dapat memungkinkan adanya kemalasan siswa yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya pembelajaran online sesuai jadwal.

Sama seperti pembelajaran konvensional, pembelajaran online dilakukan secara terstruktur. Sebelum diadakannya kegiatan belajar mengajar secara online, terlebih dahulu guru menyiapkan silabus, materi pelajaran, media dan sumber belajar. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara terstruktur. Selain terstruktur secara teknis, materi pelajaran pun diatur sedemikian rupa agar dapat terstruktur sesuai tingkatan kemampuan. Materi yang lebih mudah akan diberikan di awal pertemuan, dan materi yang sulit akan diberikan di akhir pertemuan. Selain itu materi-materi yang dirasa sulit akan diberikan penjelasan dan contoh.

Proses belajar terjadi akibat adanya proses aktif dari siswa. Proses aktif ini sangat diperlukan dalam pembelajaran konvensional maupun pembelajaran online. Pada pembelajaran online memerlukan kegiatan aktif dari siswa. Apakah Anda merasa kebingungan, bagaimana cara mengaktifkan siswa pada pembelajaran online?. Di zaman yang secanggih ini, dan dengan perkembangan IPTEK yang semakin maju, akan ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan siswa. Dalam

pembelajaran online, cara mengaktifkan siswa dapat menggunakan teknologi. Teknologi dipilih, karena dapat memfasilitasi dan menyediakan berbagai hal yang dapat mengaktifkan siswa. Dengan menggunakan teknologi, guru dapat merancang beberapa aktifitas yang dapat membuat siswa aktif, baik dalam aktif berpikir, aktif bersosialisasi maupun aktif dalam hal lainnya

Pembelajaran online dikenal sebagai pembelajaran mandiri. Apakah ketika siswa melakukan pembelajaran online, siswa tidak dapat berinteraksi dengan siswa lainnya?. Pasti pertanyaan seperti itu akan terbesit dibenak Anda. Perlu diketahui bahwa pembelajaran online masih memungkinkan adanya pertemuan antar siswa, bedanya pertemuan dilakukan secara online. Pembelajaran online tidak merubah kebiasaan- kebiasaan yang terjadi pada pembelajaran konvensional seperti adanya pertemanan, ataupun interaksi dengan guru. Salah satu karakteristik dari pembelajaran online yaitu adanya konektivitas. Aktivitas pembelajaran online menghubungkan antara siswa dan guru, siswa yang satu dan lainnya, menghubungkan antara tim pengajar ataupun siswa dengan staf pendidik lainnya. Pembelajaran konektif didasarkan pada pembelajaran sosial dan teori pembelajaran konstruktivis, seperti yang dijelaskan oleh George Siemens. Menurutnya bahwa belajar tidak harus dipandang sebagai suatu peristiwa, tetapi merupakan sebuah proses yang melibatkan antara memori, kognisi, emosi, keyakinan, dan persepsi. Selain itu belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengirim e-mail, melihat blog, melakukan percakapan online dan lain-lain. Melalui pembelajaran online siswa akan terkoneksi dengan dunia maya. Siswa akan lebih banyak menemukan banyak sumber belajar yang tidak terbatas. Dalam pembelajaran online tidak adanya batasan ruang dan waktu sehingga siswa dapat belajar secara terkoneksi.

Siswa dalam pembelajaran harus memiliki semangat yang kuat untuk

pembelajaran secara mandiri. Dalam pembelajaran online ketuntasan belajar dan pemahaman materi ditentukan oleh siswa itu sendiri. Siswa dituntut untuk mandiri dan menemukan sendiri pengetahuannya. Keberhasilan dari setiap siswa akan berbeda-beda, tergantung pada bagaimana kemandirian belajar siswa.

Selain dari kemandirian belajar, keberhasilan dari pembelajaran *online* ditentukan dari sejauh mana siswa memahami teknologi yang dipakai untuk pembelajaran *online*. Sebelum melakukan pembelajaran *online*, siswa harus terlebih dahulu menguasai atau memahami mengenai teknologi yang akan dipakai sebagai alat untuk pembelajaran *online*. Salah satu alat yang sering dipakai untuk pembelajaran online yaitu komputer. Pasti Anda telah mahir dalam mengoperasikan komputer maupun gadget yang lainnya. Semakin berkembangnya IPTEK komputer yang digunakan pun semakin canggih dengan vitur-vitur yang dapat mendukung pembelajaran *online*.

Siswa yang ingin berhasil dalam pembelajaran *online* harus memiliki kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan interpersonal diperlukan untuk tetap menjalin interaksi atau hubungan dengan siswa yang lainnya. Walaupun pembelajaran *online* dilakukan secara mandiri, tetapi tetap saja manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Oleh karena itu kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi harus tetap dilatih untuk digunakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Memahami dan menggunakan pembelajaran interaksi dan kolaborasi. Pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh siswa, maka siswa harus pandai berinteraksi dengan siswa lainnya ataupun dengan guru di dalam forum yang telah disediakan. Interaksi tersebut sangat diperlukan, terutama ketika siswa mengalami kesulitan mengenai satu materi pelajaran. Selain itu siswa dengan pembelajaran

*online* perlu tetap menjalani interaksi untuk melatih jiwa sosial yang ada. Jangan sampai, dengan pembelajaran *online* siswa akan terbentuk menjadi manusia yang lebih individualisme dan anti sosial. Selain itu, siswa dengan pembelajaran *online* akan memahami pembelajaran secara berkolaborasi. Siswa akan dilatih untuk dapat berkolaborasi baik dengan lingkungannya maupun dengan berbagai sistem yang mendukung pembelajaran *online*.

Salah satu dari karakteristik pembelajar *online* adalah memiliki kemampuan belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri sangat diperlukan dalam pembelajaran *online*. Karena dalam proses belajar, siswa akan mencari, menemukan dan menyimpulkan dari apa yang dipelajarinya secara mandiri. [19] pembelajaran mandiri merupakan proses dimana siswa dilibatkan secara langsung dalam mengidentifikasi apa yang perlu untuk dipelajari menjadi pemegang kendali dalam proses pembelajaran. Pada belajar mandiri, faktor motivasi menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran.

Dalam pembelajaran online, guru menyiapkan materi pelajaran untuk dapat diakses oleh siswa. Selain itu guru juga merancang pembelajaran online dari awal proses pembelajaran seperti membuat silabus, RPP, mempersiapkan materi, penilaian, diskusi dan lain-lain. Pada pembelajaran *online* guru tetap dapat berperan sebagai guru pada umumnya, yaitu berinteraksi dengan siswa, hanya saja caranya yang berbeda. Pada pembelajaran *online*, semua interaksi dilakukan secara tidak langsung atau tidak tatap muka. Biasanya guru pada pembelajaran online akan membuat forum diskusi dimana siswa dan guru dapat berinteraksi. Dalam forum diskusi, guru dapat menilai semua aktifitas dan keaktifan siswa. Selain itu guru dalam pembelajaran *online* memiliki tugas untuk tetap meluruskan semua pengetahuan siswa, menyamakan persepsi antara setiap siswa, dan meluruskan setiap pengetahuan yang diperoleh oleh siswa.

Dalam hal ini guru harus dapat memanfaatkan setiap teknologi yang dapat mendukung proses belajar siswa. Selain itu guru harus paham dan menguasai setiap teknologi dan internet. Jangan sampai siswa lebih mengerti mengenai teknologi dan internet daripada gurunya. Maka jika hal tersebut terjadi, tentunya akan menyulitkan guru ketika ada siswa yang bertanya. Penguasaan teknologi dan internet pada pembelajaran *online* dapat dikatakan hal penting untuk seorang guru dikarenakan guru dituntut untuk menguasai dan mengoperasikan *software* dan *hardware* yang merupakan *basic* dalam pembelajaran *online*.

Seorang guru tentunya harus menguasai materi yang akan disampaikan, maupun materi yang dituliskan dalam pembelajaran online. Penguasaan materi ini sangat penting untuk menyamakan setiap persepsi yang dimiliki siswa. Selain itu penguasaan materi diperlukan ketika adanya permasalahan dalam proses belajar, agar dapat diselesaikan dengan logika dan pengetahuan yang dimiliki guru. Selain pengetahuan pokok, diperlukan juga pengetahuan lainnya atau pengetahuan pendamping. Pengetahuan pendamping ini untuk diperlukan untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan diluar konteks materi pelajaran.

Guru diharapkan memiliki sifat kreatif dan inovatif. Hal ini diperlukan dalam membuat materi pelajaran agar materi yang dibuat dapat menarik perhatian siswa dan bermakna untuk siswa. Selain itu guru perlu memunculkan inovasi-inovasi baru untuk meminimalisir kebosanan yang sering dialami oleh siswa. Dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif akan lebih menarik perhatian siswa, ketika ketertarikan siswa tinggi maka rasa ingin tahu siswa pun tinggi.

Pembelajaran online merupakan pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh

siswa. Tetapi sebagai seorang guru perlu terus memotivasi siswa untuk terus belajar. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk memotivasi siswa yaitu dapat dengan memberikan poin atau nilai tambahan kepada siswa yang lebih aktif dalam pengerjaan tugas ataupun kepada siswa yang aktif dalam forum diskusi.

Desain pembelajaran merupakan salah satu tahapan yang dinilai penting dalam proses pembelajaran. Guru harus dapat memilih dan memilih desain pembelajaran yang cocok untuk semua siswa. Desain pembelajaran yang dipilih harus dapat mengaktifkan siswa dan memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan begitu siswa akan termotivasi untuk belajar dan melakukan proses pembelajaran online dengan senang hati.

Dalam pembelajaran online, guru mampu mengelola sistem yang dipakai dalam pembelajaran *online*. Hal ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh kerusakan sistem. Jangan sampai siswa terlambat belajar dikarenakan adanya *system error*.

Pemilihan bahan ajar dan sistem penilaian pun menjadi hal penting dalam pembelajaran *online*. Setiap bahan ajar dan penilaian yang ada harus sesuai dengan segala macam karakteristik siswa.

Guru perlu mengontrol jalannya proses pembelajaran. Guru harus bisa memosisikan dirinya sebaik mungkin. Pada saat apa guru harus membantu siswa, dan pada bagaimana guru harus memotivasi siswa. Dalam pembelajaran *online* guru harus bisa mengendalikan siswa untuk tetap menjalankan aktifitas seperti siswa biasanya. Guru harus melatih siswa untuk tetap terus berinteraksi dengan siswa lainnya. Hal ini dilakukan agar sifat individualisme siswa tidak terlalu menonjol,

karena manusia sebagai makhluk sosial. Maka guru harus tetap melatih sifat-sifat naluriah siswa seperti bersosialisasi, berempati, kepedulian, bekerja sama, dan lain sebagainya.

Selama pandemi covid 19 kegiatan proses belajar mengajar dilakukan di rumah masing- masing baik oleh dosen dan mahasiswa. Hal ini berarti diperlukan internet dan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi covid 19 ini universitas memberikan tunjangan untuk kuota internet untuk para dosen dan mahasiswa serta memberikan lisensi untuk beberapa media pembelajaran *online*.

Media pembelajaran online yang disarankan oleh prodi akuntansi untuk masing-masing kampus yaitu Microsoft Teams, Google Meet, dan Zoom. Ditambah dengan media lainnya seperti Google Classroom, WhatsApp, dan Line. Alasan prodi menyarankan media ini dikarenakan media ini sudah terintegasi dengan fitur-fitur yang update seperti bisa menggambar, menulis seperti di papan tulis, menampilkan fitur kamera untuk berinteraksi, memberikan tugas dan kuis serta adanya fitur *chat* dan *share screen* untuk mendukung pembelajaran. Media-media yang disarankan juga mudah digunakan dan kebanyakan mahasiswa dan dosen juga bisa memakainya.

Microsoft Teams adalah sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat video, penyimpanan berkas (termasuk kolaborasi pada berkas), dan integrasi aplikasi. Aplikasi ini terintegasi dengan langganan dan juga dapat diintegrasikan dengan produk selain buatan Microsoft. Microsoft Teams adalah kompetitor Slack, serta merupakan hasil evolusi dan peningkatan dari Microsoft *Skype for Business*. [20]

Google Meet (sebelumnya dikenal Hangouts Meet) adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google [21]

Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) adalah sebuah perusahaan teknologi komunikasi Amerika Serikat yang berkantor pusat di San Jose, California. Perusahaan ini menyediakan layanan perangkat videoteleponi dan obrolan daring berbasis P2P komputasi awan yang digunakan untuk telekonferensi, bekerja jarak jauh, belajar jarak jauh, dan berhubungan sosial [22]

Beberapa karakteristik media pembelajaran *offline* menurut [23] adalah : (1) materi pembelajaran terpadu, (2) waktu pembelajaran tetap / waktu yang pasti, (3) di kontrol oleh guru / instruktur, (4) pembelajaran searah / linier, (5) sumber informasi yang dipilih telah di edit, (6) sumber informasi yang sudah tetap, (7) teknologi yang dipergunakan telah di kenal. Semua karakteristik media pembelajaran *offline* ini bisa diterapkan dalam media pembelajaran online seperti waktu yang tetap setiap minggu dalam memberikan perkuliahan.

Lokasi penelitian kali ini adalah Universitas Tarumanagara, Universitas Kristen Krida Wacana, dan Trisakti School of Management. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah dosen akuntansi yang mengajar di salah satu dari 3 Universitas tersebut. Teknik pengumpulan data berasal dari kuesioner yang diedarkan kepada dosen akuntansi. Terdapat 43 jumlah dosen yang mengisi kuesioner.

Berikut adalah hasil dari sampel tersebut:

N	Media yang digunakan	Jumlah
1	Microsoft Teams	36
2	Google Meet	0
3	Zoom	7

Tabel 1.1 Media utama yang digunakan dalam pembelajaran *online* oleh dosen CSR

N	Media yang digunakan	Jumlah
1	WhatsApp Group	25
2	Line	5
3	Tidak menggunakan media tambahan	13

Tabel 1.2 Media tambahan yang digunakan dalam pembelajaran *online* oleh dosen

Dari data di atas menunjukkan bahwa media pembelajaran yang paling banyak digunakan di ketiga kampus tersebut adalah 1) Microsoft Teams digunakan oleh 36 dosen. Sehingga dapat diperoleh prosentase sebesar 83,72% yang menggunakan Microsoft Teams sebagai media pembelajaran. 2) Google Meet tidak digunakan oleh dosen untuk mengajar. Sehingga dapat diperoleh prosentase sebesar 0% yang menggunakan Google Meet sebagai media pembelajaran. 3) Zoom digunakan oleh 7 dosen. Sehingga dapat diperoleh prosentase sebesar 16,28% yang menggunakan Zoom sebagai media pembelajaran

Selain menggunakan media pembelajaran utama dengan fitur *live/meet now* beberapa dosen juga menggunakan media tambahan lain untuk berkomunikasi dengan mahasiswa di luar jam pelajaran. Berdasarkan data di atas bahwa media pembelajaran tambahan yang paling banyak digunakan di ketiga kampus tersebut

adalah 1) WhatsApp Group digunakan oleh 25 dosen. Sehingga dapat diperoleh prosentase sebesar 58,14% yang menggunakan WhatsApp Group sebagai media pembelajaran tambahan. 2) Line digunakan oleh 5 dosen. Sehingga dapat diperoleh prosentase sebesar 11,63% yang menggunakan Line sebagai media pembelajaran tambahan. 3) Tidak menggunakan media tambahan diterapkan oleh 13 dosen. Sehingga dapat diperoleh prosentase sebesar 30,23% yang tidak menggunakan media pembelajaran tambahan selain media pembelajaran utama.

Penggunaan media ini sangat sesuai dengan teori [24] memberikan kriteria untuk mereviu media pembelajaran yang dibuat berdasarkan kualitas, diantaranya:

- 1) Kualitas Isi dan Tujuan
  - a. Ketepatan
  - b. Kepentingan
  - c. Kelengkapan
  - d. Keseimbangan
  - e. Minat/pelatihan
  - f. Keadilan
  - g. Kesesuaian dengan situasi siswa
- 2) Kualitas Instruksional
  - a. Memberikan kesempatan belajar
  - b. Memberikan bantuan untuk belajar
  - c. Kualitas memotivasi
  - d. Fleksibilitas instruksionalnya
  - e. Kualitas tes dan penilaiannya
  - f. Dapat memberi dampak kepada siswa
  - g. Dampak membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya
3. Kualitas Teknis
  - a. Keterbacaan

- b. Mudah digunakan
- c. Kualitas tampilan/tayangan
- d. Kualitas penanganan jawaban
- e. Kualitas pengelolaan programnya
- f. Kualitas pendokumentasiannya

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa media pembelajaran yang paling banyak digunakan oleh dosen akuntansi adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams menyediakan banyak fitur yang bisa digunakan baik oleh mahasiswa/dosen seperti fitur *meet now* yang dipergunakan untuk bertemunya mahasiswa dan dosen secara virtual pada waktu yang sama dan selain itu juga Microsoft Teams mempunyai fitur untuk menaruh *file* yang berupa materi pelajaran serta pembahasan soal dalam kegiatan belajar mengajar. Dosen dan mahasiswa bisa mengunggah dan mengunduh materi serta soal- soal yang digunakan. Dalam menghadapi memberikan tugas, kuis, dan ujian di Microsoft Teams mempunyai fitur *Assignment* yang dapat digunakan. Dalam fitur tersebut bisa digunakan ditetapkan kapan ujian akan dimulai dan diakhiri serta batas pengumpulan terakhir. Menurut [25] 75% mahasiswa menganggap Zoom metode yang efektif untuk pembelajaran daring.

Untuk media pembelajaran tambahan yang paling banyak digunakan oleh dosen akuntansi adalah WhatsApp Group. WhatsApp Group digunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa di luar jam pelajaran. Jika mahasiswa mungkin kurang paham dengan materi yang dibahas pada saat *meet now* di Microsoft Teams atau bertanya mengenai tugas yang diberikan maka mahasiswa bisa berkomunikasi dengan dosen melalui WhatsApp Group. Begitu juga dengan info-info yang akan disampaikan bisa lebih cepat kepada mahasiswa di WhatsApp Group. Hasil penelitian menurut [26] juga mengatakan WhatsApp Group merupakan media yang paling banyak digunakan oleh dosen. Hal ini juga

didukung oleh penelitian [27] yang menyatakan bahwa Whatsapp merupakan media komunikasi efektif masa kini yang banyak digunakan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh [28] yang menyatakan bahwa Pemanfaatan media whatsapp grup sebagai sarana komunikasi yang efektif. Menurut [25] 76% mahasiswa menganggap WhatsApp metode efektif untuk kegiatan pembelajaran.

Dengan pandemi covid 19 yang sampai sekarang masih melanda Indonesia dan dunia serta dengan majunya teknologi di Indonesia maka jaringan internet juga semakin memadai maka mahasiswa dan dosen menggunakan media pembelajaran Microsoft Teams dengan dibantu WhatsApp Group agar kegiatan pembelajaran tidak terganggu meskipun dilakukan secara daring.

### **1.3 Penutup**

Kesimpulan untuk penelitian ini berarti media pembelajaran online yang digunakan oleh dosen selama pandemi covid 19 untuk kegiatan belajar mengajar yaitu Microsoft Teams dan Zoom. Selain itu terdapat media tambahan pembelajaran online yang digunakan oleh dosen untuk berkomunikasi dengan mahasiswa yaitu WhatsApp Group dan Line.

Saran untuk para dosen memaksimalkan penggunaan fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams maupun Zoom yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Para dosen diharapkan juga untuk lebih sering berkomunikasi dengan mahasiswa baik melalui WhatsApp Group dan Line. Dosen juga memantau apa yang dikerjakan oleh mahasiswa di WhatsApp Group dan Line sehingga terjadi interaksi yang dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar.

## Referensi

- [1] UU No 20/2013
- [2] Sudjana, Nana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- [3] Arief S, Sadiman, (dkk). 2010. Media Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [4] Kuntarto, E. 2017. Keefektifan Model Pembelajaran Daring dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Indonesian Language Education and Literature, 3(1), 99-110
- [5] Khusniyah, N. L., & Hakim, L. 2019. Efektivitas Pembelajaran Berbasis Daring: Sebuah Bukti pada Pembelajaran Bahasa Inggris. Jurnal Tatsqif, 17(1), 19-33
- [6] Syarifudin, A. S. 2020. Impelementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sebagai Dampak Diterapkannya Social Distancing. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua, 5(1), 31-34.
- [7] Grant, A. M., & Ashford, S. J. 2008. The dynamics of proactivity at work. Research in organizational behavior, 28, 3-34.
- [8] Hasibuan, M. S. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia: Jakarta, Indonesia: PT. Bumi Aksara
- [9] Salamah, Chuswatul Nur., Supriyanto., Gunawan, , Imam. 2020. Pengelolaan School Empowering Program dalam Mengembangkan Keahlian Khusus Siswa Sekolah Menengah Atas. Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan, Volume 3 Nomor 1 Maret 2020, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/> ISSN 2615-8574 (online) h.: 1-10

- [10] Armenakis, A., Harris, S., & Mossholder, K. 1993. "Creating Readiness for Organizational Change," *Human Relations*, vol. 46, no. 6, pp. 681-703, 1993
- [11] Holt, Daniel., Armenakis, Field,S.,& Haris, G. 2007. "Readiness for Organizational Change the Systematic Development of a Scale," *The Journal of Applied Behavioral Science*, vol. 43, no. 2, pp. 232-255, 2007.
- [12] Pratama, H., & Yusro, A. C. 2016. Implementasi WhatsApp mobile learning untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pokok bahasan Pengenalan Komponen Elektronika. *Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK)*, 2(2), 65-69
- [13] Sukrillah, A., Ratnamulyani, I. A., & Kusumadinata, A. A. 2018. Pemanfaatan Media Sosial Melalui Whatsapp Group Fei Sebagai Sarana Komunikasi. *Jurnal Komunikatio*, 3(2)
- [14] Lehman, W. E., Simpson, D. D., Knight, D. K., & Flynn, P. M. 2011. "Integration of treatment innovation planning and implementation: Strategic process models and organizational challenges," *Psychology of Addictive Behaviors*, vol. 25, No. 2, p. 252
- [15] Ehlers, U. D., & Pawlowski, J. M. (Eds.). (2006). *Handbook on quality and standardisation in e-learning*. Springer Science & Business Media.
- [16] Prasetyaningrum, I. D. 2009. Analisis Pengaruh Pembelajaran dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Mahasiswa dan Loyalitas Mahasiswa (Studi Kasus pada Undaris Ungaran) (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro)
- [17] Rahmawati, D. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi kepuasan mahasiswa. *Jurnal Economia*, 9(1), 52-65.
- [18] <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/TPEN4401-M1.pdf>
- [19] Kirkman, S., Coughin., & Kromrey, J. 2007. Correlates of satisfaction

and success in self-directed learning:relationship with school experience, course format, and internet use. *International Journal of Self-Directed Learning*. 4(1). Halaman 39 s/d 52

- [20] [https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft\\_Teams](https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams)
- [21] [https://id.wikipedia.org/wiki/Google\\_Meet](https://id.wikipedia.org/wiki/Google_Meet)
- [22] [https://id.wikipedia.org/wiki/Zoom\\_Video\\_Communications](https://id.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications)
- [23] Dabbagh, N. and Ritland. B. B. (2005). *Online Learning, Concepts, Strategies And Application*. Ohio: Pearson
- [24] Arsyad, Azhar. 2014. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. [25] Swasti, Ika Korika. 2020. Implementasi Manajemen Pembelajaran Daring dengan Platform WA, CR, M-Z, dan Kepuasan Mahasiswa
- [26] Rochmawati, et al, 2020. Implementasi Media Pembelajaran Online yang Digunakan oleh Dosen Selama Pandemi Covid 19. Prosiding Seminar Nasional 2020 Universitas Negeri Surabaya: 399-402.
- [27] Rahartri. 2019. VISI PUSTAKA Vol. 21, No. 2, Agustus 2019
- [28] Sukrillah. 2018. *Jurnal Komunikatio* Volume 3 Nomor 2, Oktober 2017

## **Profil Penulis**

### **Amin Wijoyo, S.E., M.Ak.**



Amin Wijoyo menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Tarumanagara Jurusan Akuntansi, Pendidikan S2 di Univeristas Tarumanagara Magister Akuntansi dengan bidang keahlian Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi. Saat ini sebagai dosen di prodi akuntansi. Penelitian dalam bidang keuangan dan pasar modal. Melakukan kegiatan PKM dalam bidang pendidikan.

## **BAB 10**

### **Perkuliahan Akuntansi Masa Covid-19**

Henryanto Wijaya

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

#### **Abstrak**

Kegiatan pembelajaran di UNTAR dipaksa menjadi *online* karena wabah COVID-19 pada Maret 2020. Perubahan drastis dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran *online* yang memanfaatkan teknologi. Kendala yang dialami dengan kegiatan pembelajaran *online* dan apakah *platform* Microsoft Teams dapat memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran *online* di UNTAR. Penyebaran kuesioner dengan responden mahasiswa Jurusan Akuntansi UNTAR dan menghasilkan jawaban mengenai lokasi tempat tinggal, perangkat elektronik dan spesifikasi yang digunakan, jenis internet yang digunakan, dan kendala yang terjadi. Kemudian dianalisis perbandingan antara *platform online* yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran *online* di Indonesia. Hasilnya adalah terdapat kendala yang harus ditangani dan Microsoft Teams telah dapat mendukung kebutuhan kegiatan pembelajaran *online* di UNTAR.

Kata kunci: pembelajaran *online*, UNTAR, COVID-19, kendala, Microsoft Teams

## 1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang

Selama ini pelaksanaan kegiatan belajar mengajar telah dilakukan oleh manusia dengan melakukan tatap muka antara pendidik dan peserta didik. Peserta didik akan datang ke tempat pengajaran yang disebut juga sebagai sekolah. Di Indonesia sendiri, sekolah terbagi menjadi beberapa tingkatan yaitu: (1) Pra-TK, yaitu pada usia 1-3 tahun; (2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu pada usia 3-5 tahun; (3) Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), yaitu pada usia 5-6 tahun; (4) Sekolah Dasar (SD), pada minimal usia 7 tahun; (5) Sekolah Menengah Pertama (SMP); (5) Sekolah Menengah Atas (SMA); dan (6) Perguruan Tinggi [1], [2].

Dinamika pembelajaran semakin beragam, misalnya dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih banyak peluang dan tantangan. Peserta didik dapat memperoleh beragam informasi pendidikan yang tersebar di internet dengan mudahnya namun di sisi lain juga menimbulkan ancaman bahwa informasi yang diperoleh tersebut mungkin membawa dampak buruk bagi peserta didik. Dampak buruk tersebut antara lain adalah: (1) Peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV daripada belajar atau olahraga; (2) Peserta didik kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan *online*; (3) Adanya pelanggaran hak cipta; (4) Kejahatan di internet; (5) Penyebaran virus komputer; dan (6) Pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan [3].

Demikian juga yang terjadi di Perguruan Tinggi. Mahasiswa, yaitu peserta didik di tingkat pendidikan tinggi, yang terbagi menjadi program sarjana, program magister dan program doktoral, juga mengalami tantangan besar dengan kemajuan teknologi. Mahasiswa harus mampu memanfaatkan teknologi secara positif sehingga memperoleh manfaat dalam proses pembelajaran. Tentu hasil yang

dicapai akan memberikan kemajuan dan keterbukaan pola berpikir dan logika, selain meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan itu sendiri [4] Pada tahun 2020, tantangan terbesar kegiatan pembelajaran adalah munculnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dimana merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dipercaya bermula penyebarannya di Wuhan, Tiongkok.

Penyakit ini merupakan penyakit yang penyebarannya adalah manusia, sehingga untuk mencegah penyebarannya adalah dengan membatasi interaksi satu manusia dengan manusia lain. Hal ini berdampak pada kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan secara tatap muka di kelas antara pendidik dan peserta didik. Tentunya hal ini memberikan tantangan yang besar [5].

Berdasarkan peraturan dari pemerintah, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) maka kegiatan pembelajaran untuk Perguruan Tinggi tidak diijinkan untuk dilakukan secara tatap muka di Semester Gasal 2020/2021 [6],[7] karena berpotensi menyebarkan penyakit COVID-19. Namun kemudian dimulai pada Semester Genap 2020/2021, Kementerian Pendidikan dan Kemendikbud RI mengeluarkan aturan bahwa perkuliahan mulai Bulan Januari 2021 dapat diselenggarakan secara campuran (*hybrid learning*), dalam jaringan dan tatap muka namun dengan persyaratan tertentu [8].

Beruntung dengan kemajuan teknologi yang dicapai, yaitu semakin kencangnya koneksi internet di dunia dan semakin canggihnya perangkat elektronik maka kegiatan pembelajaran baik dari PAUD sampai Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara dalam jaringan (*daring* atau *online*). Dengan memanfaatkan beberapa *platform* yang mendukung pertemuan tatap muka secara daring, seperti *Google Meet*, *Microsoft Teams* dan *Zoom* maka kegiatan

pembelajaran dapat dilakukan seperti tatap muka biasa di sekolah atau kampus namun sekaligus dapat mencegah menyebarnya penyakit COVID-19 [9]

Memang terlihat solusi telah ditemukan. Ada *platform*, perangkat elektronik dan teknologi koneksi internet sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan daring dan dapat mengamankan pendidik dan peserta didik. Namun apakah semudah dan sesederhana itulah penyelesaiannya?

Ternyata dalam praktiknya terdapat banyak kendala-kendala yang terjadi. Misalnya adalah koneksi internet yang tidak stabil dan merata di seluruh wilayah di Indonesia, spesifikasi perangkat elektronik yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan spesifikasi aplikasi pertemuan online, keterbatasan dana mahasiswa untuk menyediakan koneksi internet atau perangkat elektronik yang memadai, mahalnya biaya internet dan kondisi sosial mahasiswa. Termasuk juga apakah Perguruan Tinggi telah siap untuk melakukan kuliah secara daring? Mengingat kuliah secara daring ini merupakan kegiatan yang “terpaksa” dilakukan karena keadaan, bukan karena Perguruan Tinggi telah siap melaksanakannya dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Prof Mohamad Nasir, mantan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Webinar Komunitas SEVIMA pada Selasa, 27 April 2021 yang bertajuk “Strategi Perguruan Tinggi Menghadapi Kuliah Tatap Muka”, memaparkan bahwa metode *blended learning*, atau kombinasi kuliah tatap muka dan daring, dapat menjadi solusi untuk menciptakan *outcome* Pendidikan Indonesia yang lebih unggul. Dengan cara mengkombinasikan keunggulan dari pembelajaran *online*, serta menutup kekurangannya dengan cara menggelar kuliah tatap muka sesuai dengan kebutuhan [10]

Melihat dari permasalahan-permasalahan kegiatan pembelajaran *online* maka dirasakan perlu untuk membuat sebuah analisis untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan kegiatan pembelajaran *online* di lingkungan UNTAR. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran *online* sehingga kedepannya menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan transfer ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik, terutama dalam keadaan pandemik COVID-19 yang masih belum jelas kapan akan berakhir.

## **1.2 Isi/Pembahasan**

### **Permasalahan Kegiatan Pembelajaran *Online* di Universitas Tarumanagara**

Pada Bulan Maret 2020 merebaklah pandemik COVID-19 di Indonesia dengan pulangnya tiga orang Warga Negara Indonesia (WNI) dari Malaysia yang terinfeksi dengan Virus COVID-19 tanpa mereka sadari. Dikarenakan penyebar COVID-19 adalah manusia dan ketiga wanita tersebut tidak menyadarinya maka mereka melakukan interaksi dengan manusia lain sehingga menyebarkan COVID-19 di Indonesia [11].

Menyikapi hal tersebut, Rektor Universitas Tarumanagara (UNTAR) segera mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu memberlakukan Kegiatan Pembelajaran Online di UNTAR dan tatap muka dilakukan dari rumah masing-masing melalui aplikasi online yang ada. Hal ini dilakukan demi mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus untuk melindungi seluruh civitas akademika, yang terdiri dari dosen, karyawan dan mahasiswa, juga termasuk melindungi orang tua mahasiswa yang kesemuanya merupakan stakeholders dari UNTAR. Komitmen UNTAR adalah menjaga keselamatan seluruh civitas akademika UNTAR [12].

Pada awalnya, yaitu Bulan Maret 2020 sampai dengan akhir Semester Genap 2019/2020, Rektor UNTAR belum menetapkan aplikasi online di lingkungan UNTAR sehingga kegiatan pembelajaran online tidak dilakukan secara seragam. Setiap kelas perkuliahan dilaksanakan dengan kesepakatan antara pendidik (dosen) dengan peserta didik (mahasiswa). Ada kelas yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Whatsapp yaitu dengan diskusi antara dosen dengan mahasiswa melalui Whatsapp Group, ada yang melaksanakan kelas perkuliahan dengan diskusi melalui surat elektronik (*electronic mail*) atau e-mail, ada yang melaksanakan perkuliahan dengan aplikasi Google Classroom.

Pelaksanaan Ujian Semester yang terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) juga mendadak “terpaksa” dilakukan secara daring (online). Setiap dosen “terpaksa” melakukan improvisasi untuk mengatur pelaksanaan UTS maupun UAS sehingga tujuan pelaksanaan UTS dan UAS dapat tercapai walaupun pelaksanaannya tentu menjadi terkendala akibat pelaksanaan kegiatan pembelajaran online di UNTAR.

Kemudian selanjutnya dalam mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Semester Ganjil 2020/2021, Rektor UNTAR telah mempersiapkan aplikasi online yang dapat dimanfaatkan sebagai media kegiatan pembelajaran di UNTAR. Aplikasi tersebut adalah Microsoft Teams yang merupakan aplikasi pembelajaran online dari Microsoft. Dalam Microsoft Teams terdapat fitur-fitur yang sangat bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran online.

Fitur-fitur tersebut antara lain adalah: (1) Fitur kelas kuliah (Teams) secara virtual yang dapat dibentuk oleh dosen sesuai dengan kelas perkuliahan yang diampu masing-masing dan dapat memasukkan mahasiswa yang menjadi peserta kuliah; (2) Fitur tatap muka online (Meet Now) untuk interaksi secara virtual antara dosen

dan mahasiswa secara real-time dan tatap muka; (3) Fitur penyimpanan materi ajar (Files) sehingga dosen dapat mengunggah materi ajar yang akan diajarkan dan mahasiswa dapat mengunduh materi ajar tersebut; (4) Fitur penugasan tugas dan ujian (Assignments) yang dapat berupa tugas atau kuis, sesuai kebutuhan, dimana dosen dapat menugaskan tugas dan Ujian Semester kepada mahasiswa dan mahasiswa dapat mengumpulkan jawaban dengan cara mengunggah jawaban langsung dimana dosen dapat memeriksa jawaban tersebut secara real-time. Fitur ini juga menyediakan opsi batas waktu pengumpulan tugas atau Ujian Semester dan berguna sekali untuk mengatur kedisiplinan dan kejujuran mahasiswa mengerjakan tugas atau Ujian Semester; dan (5) Fitur penilaian (Grades) dimana dosen dapat memberikan nilai kepada setiap mahasiswa dan secara real-time mahasiswa dapat mengetahui nilai dari tugas atau Ujian Semester yang telah dikumpulkannya.

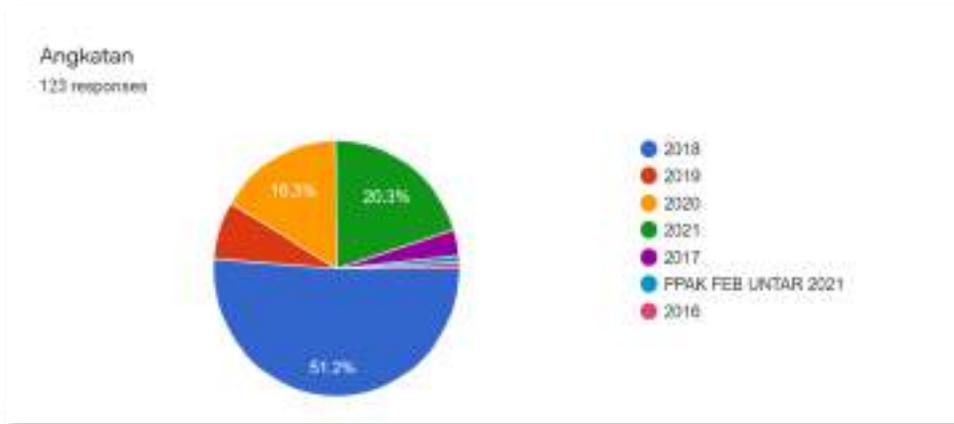
Dari fitur-fitur tersebut, terlihat bahwa Microsoft Teams amat mendukung kegiatan pembelajaran online di lingkungan UNTAR. Namun dalam pelaksanaannya selama tiga semester, terdapat banyak kendala yang dialami seperti misalnya, spesifikasi perangkat keras yang disyaratkan cukup tinggi karena membutuhkan perangkat elektronik terbaru, spesifikasi sistem operasi yang dibutuhkan cukup tinggi, koneksi internet yang cepat dan hal lain yang dibutuhkan.

Oleh karena itu dapat dirumuskan pemasalahan sebagai berikut: (1) Apa kendala pelaksanaan kegiatan pembelajaran *online* di UNTAR?; dan (2) Apakah Microsoft Teams bisa memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran online di UNTAR?

### **Survey Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran *Online* di UNTAR**

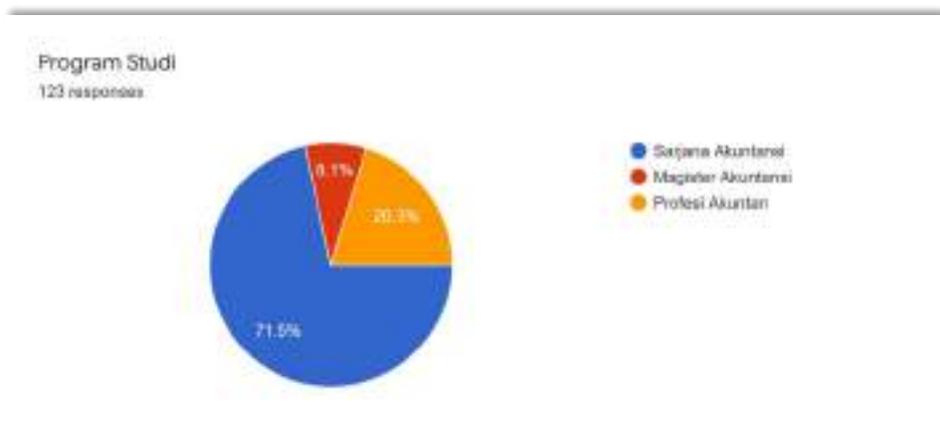
Untuk menganalisis kendala pelaksanaan kegiatan pembelajaran *online* di UNTAR maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada 123 mahasiswa Jurusan Akuntansi UNTAR yang terdiri dari 88 mahasiswa Sarjana Akuntansi, 25 mahasiswa Profesi Akuntan dan 10 mahasiswa Magister Akuntansi dengan 9 pertanyaan yaitu: (1) Mana yang lebih disukai antara perkuliahan *offline* (tatap muka) atau *online* (daring); (2) Lokasi tempat tinggal; (3) *Platform online* yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran *online*; (4) Perangkat elektronik yang digunakan; (5) Sistem operasi perangkat elektronik laptop/PC; (6) Sistem operasi perangkat elektronik *smartphone/tablet* yang digunakan; (7) Versi sistem operasi perangkat elektronik *smartphone/tablet* yang digunakan; (8) Jumlah RAM perangkat elektronik yang digunakan; (9) Penyedia internet yang digunakan (bukan merk); dan (10) Kendala perkuliahan online yang dialami.

Adapun hasil kuesioner responden yang mengisi kuesioner dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kuesioner tersebut diisi oleh responden mahasiswa yang dibagi menjadi 7 kelompok angkatan responden yaitu angkatan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Dari gambar tersebut responden yang paling banyak mengisi kuesioner adalah angkatan 2018 sebanyak 51,2% pada peringkat pertama jumlah responden yang terbanyak mengisi kuesioner. Disusul kemudian oleh angkatan 2021 dan 2020 masing – masing sebesar 20,3% dan 16,3%



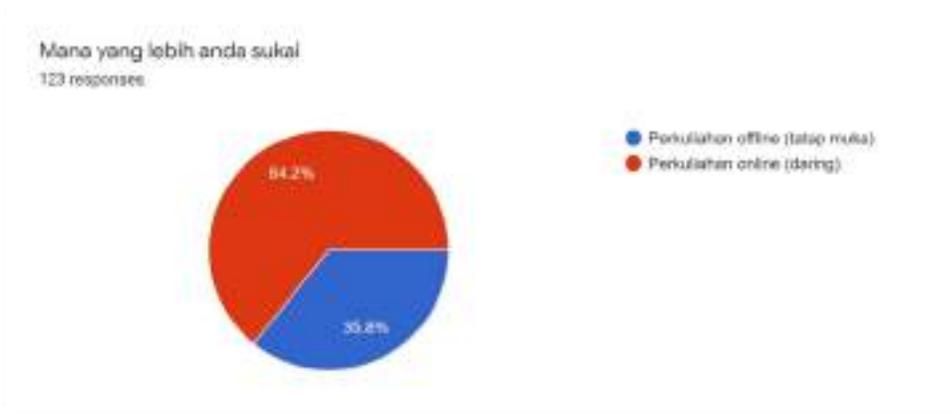
Gambar 1.1 Angkatan Responden

Pada Gambar 1.2 dapat terlihat bahwa responden mahasiswa yang mengisi kuesioner merupakan mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi sebanyak 71,5%, mahasiswa Program Studi Profesi Akuntan sebanyak 20,3% dan mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi sebanyak 8,1%.



Gambar 1.2 Program Studi Responden

Pada Gambar 1.3 terlihat bahwa jawaban responden mahasiswa adalah lebih menyukai perkuliahan *online* dibandingkan perkuliahan *offline*. Hal ini terlihat dari jumlah yang menjawab lebih menyukai perkuliahan *online* sebanyak 64,2%.



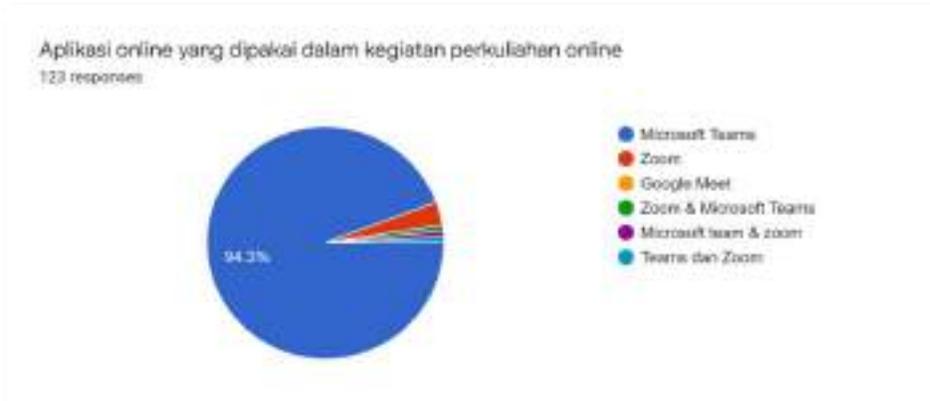
Gambar 1.3 Tipe Perkuliahan yang Lebih Disukai

Pada Gambar 1.4 diketahui bahwa responden mahasiswa yang mengisi kuesioner berlokasi tempat tinggal di DKI Jakarta sebanyak 69,1%, di Jawa & Bali sebanyak 15,4% dan sisanya tersebar di luar Jawa & Bali.



Gambar 1.4 Lokasi Tempat Tinggal Responden

Pada Gambar 1.5 menunjukkan bahwa hasil kuesioner menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran *online* menggunakan *platform* Microsoft Teams selama pelaksanaan perkuliahan secara *online*. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perkuliahan secara *online* di Jurusan Akuntansi FEB UNTAR telah mengikuti kebijakan Rektor UNTAR untuk menggunakan *platform* Microsoft Teams.



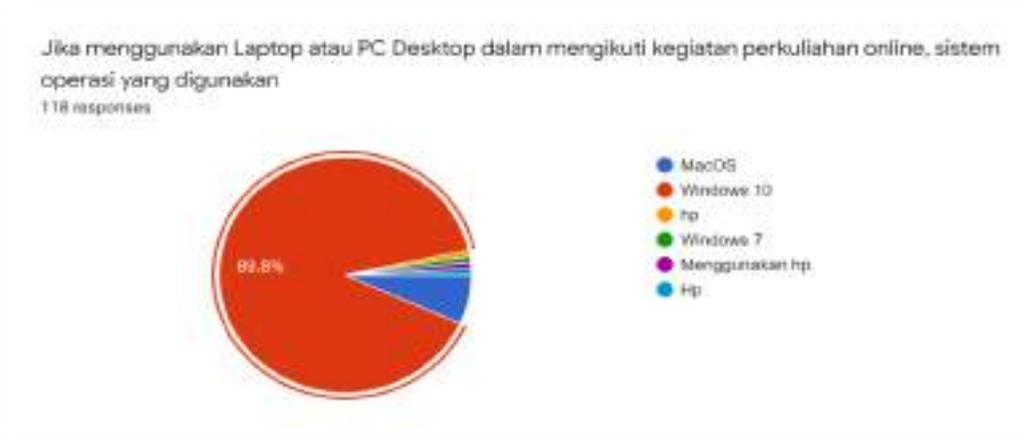
Gambar 1.5 Platform Online Kegiatan Perkuliahan Online

Pada Gambar 1.6 hasil responden mahasiswa yang mengisi kuesioner menunjukkan bahwa mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UNTAR mengikuti kegiatan pembelajaran *online* dengan menggunakan perangkat elektronik Laptop sebanyak 79,7%, perangkat elektronik *Smartphone* sebanyak 14,6% dan sisanya menggunakan perangkat elektronik PC Desktop dan Tablet.



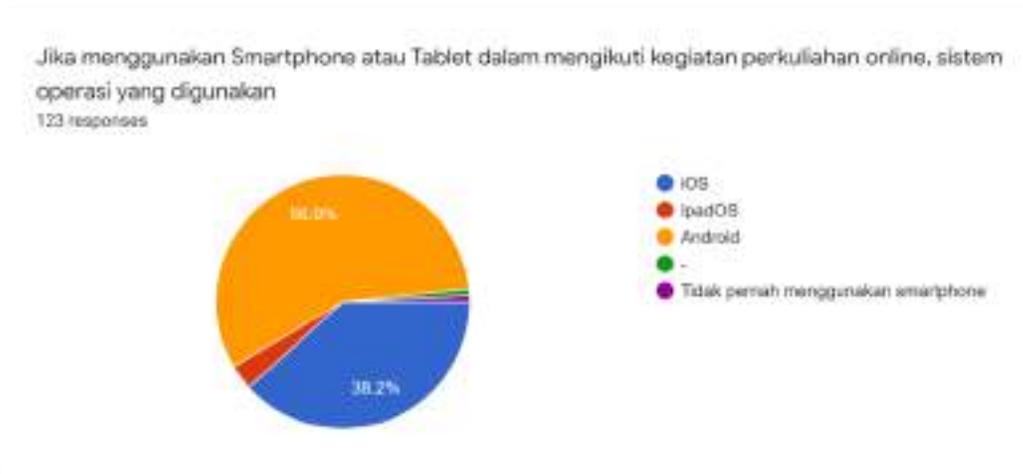
Gambar 1.6 Perangkat Elektronik yang Digunakan

Gambar 1.7 menunjukkan bahwa dari responden mahasiswa yang menjawab bahwa mereka menggunakan perangkat elektronik Laptop atau PC Desktop ketika mengikuti kegiatan pembelajaran *online*, maka sistem operasi yang paling banyak digunakan adalah Windows 10 (89,8%).



Gambar 1.7 Sistem Operasi Laptop/PC yang Digunakan

Pada Gambar 1.8 yang merupakan pertanyaan kuesioner untuk mengetahui sistem operasi yang digunakan apabila mahasiswa menggunakan *smartphone/tablet* ketika mengikuti kegiatan pembelajaran *online*, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UNTAR lebih banyak menggunakan *smartphone/tablet* berbasis Android (Google) dan di urutan kedua menggunakan *smartphone/tabloid* berbasis iOS (Apple)



Gambar 1.8 Sistem Operasi *Smartphone/Tablet* yang Digunakan

Untuk pertanyaan Versi Sistem Operasi *Smartphone/Tablet* yang digunakan maka responden menjawab: (1) iOS Versi 14 dan (2) Android Versi 8 – 11. Yang berarti

telah menggunakan versi terbaru untuk sistem iOS (Apple) dan Android.

Pada Gambar 1.9 diketahui bahwa perangkat elektronik yang digunakan oleh mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UNTAR dalam mengikuti kegiatan pembelajaran *online* memiliki jumlah RAM 4GB sebanyak 37,4%, 8GB sebanyak 30,1%, 6GB sebanyak 18,7%, 2GB sebanyak 8,9% dan sisanya menggunakan 12GB.



Gambar 1.9 Jumlah RAM Perangkat Elektronik yang Digunakan

Untuk pertanyaan tentang penyedia internet yang digunakan maka hasil responden adalah sebanyak 37 mahasiswa atau 30,1% menjawab menggunakan kuota operator seluler (tanpa menyebutkan merk) dan sebanyak 104 mahasiswa atau 84,6% menjawab menggunakan internet rumah (*wifi*).

Untuk pertanyaan terakhir yaitu kendala dalam perkuliahan online maka jawaban responden adalah: (1) 76 mahasiswa atau 61,8% menjawab kendala koneksi internet; (2) 58 mahasiswa atau 47,2% menjawab terlalu banyak tugas; (3) 32

mahasiswa atau 26% menjawab dosen tidak mengajar dengan jelas; (4) 25 mahasiswa atau 20,3% menjawab kuota internet yang tidak mencukupi; (5) 10 mahasiswa atau 8,1% menjawab perangkat elektronik yang kurang memadai; dan (6) sisanya menjawab lain-lain hal.

### Spesifikasi yang Diperlukan untuk *Platform* Microsoft Teams, Google Meet dan Zoom

Berdasarkan data yang diamati, terdapat tiga aplikasi kegiatan pembelajaran online yang paling banyak digunakan oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran online adalah Microsoft Teams yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation, Google Meet yang dikembangkan oleh Google LLC. dan Zoom yang dikembangkan oleh Zoom Video Communication Online, Inc.

Berikut ini adalah data-data terkait dengan spesifikasi yang diperlukan oleh ketiga *platform*:

Perangkat	Platform		
	Microsoft Teams	Google Meet	Zoom
PC	Minimal Dual-core processor untuk video call	Dual-core Processor	Minimal Single-Core
	-Windows 10 untuk virtual background (kecuali windows 10 LTSC) -Windows 10 di ARM -Windows 8.1 -Windows Server 2019 -Windows Server 2016	3 versi terbaru Microsoft Windows	-Windows 10 (Windows 10 Home, Pro, atau Enterprise. Mode S tidak dapat digunakan) -Windows 8 atau 8.1 -Windows 7
	Minimal 1.1 GHz	Minimal 1 GHz	Minimal 1 GHz
	4.0 GB RAM	2.0 GB RAM	-
	3.0 GB ruang disk yang tersedia	2.0 GB ruang disk yang tersedia	-
MAC	3 versi terbaru macOS	3 versi terbaru macOS	macOS X dengan minimal macOS
	Intel Core Duo processor	Dual Core Processor	Minimal Single-Core
	4.0 GB RAM	2.0 GB RAM	-
	1.5 GB ruang disk yang tersedia	2.0 GB ruang disk yang tersedia	-

Linux	Ubuntu 18.04 LTS 20.04 LTS Stasiun Kerja Fedora 30 Stasiun Kerja RHEL 8 CentOS8	Ubuntu dan Debian-based Linux distribusi	Minimal Ubuntu 12.04 Minimal Mint 17.1 Minimal Red Hat Enterprise Linux 6.4 Minimal Oracle Linux 6.4 Minimal CentOS 6.4 Minimal Fedora 21 Minimal OpenSUSE 13.2
	1.6 GHz	Minimal 1 GHz	Minimal 1 GHz
	Minimal Dual-core processor untuk video call	Dual Core Processor	Minimal Single-Core
	3.0 GB ruang disk yang tersedia	2.0 GB ruang disk yang tersedia	-
	Server tampilan yang didukung:	Mampu mendukung OpenGL2.0	-
	4.0 GB RAM	2.0 GB RAM	-
Mampu menginstal DEB atau RPM	-	-	
Browser	Dapat melakukan meetings-audio, video, sharing, 1:1 calls: -Microsoft Edge -Google Chrome (3 versi terbaru)	Direkomendasikan menggunakan versi terkini: -Chrome Browser -Mozilla Firefox -Microsoft Edge -Apple Safari	-Internet Explorer 11+ -Edge 12+ -Firefox27+ -Chrome 30+ -Safari 7+
	Dapat melakukan meetings-audio, video, sharing, tapi tidak dapat melakukan 1:1 calls: -Safari 14+ -Safari 13.1+	-	-
	Hanya dapat melakukan meetings-audio apabila terdapat koordinat PSTN dalam meeting: -Internet Explorer 11 -Firefox -Safari versi sebelum 13	-	-
Ponsel dan Tablet	Empat versi terbaru utama Android	-Minimal Android 5.0 -Untuk yang terhubung di Gmail minimal	Minimal Android 5.0
Android iOS	Dua versi terbaru iOS	Minimal iOS 12.0	Minimal iOS 8.0

Sumber: [13]–[15]

Tabel 1.1 Jumlah RAM Perangkat Elektronik yang Digunakan

Dari Tabel 1.1. dapat disimpulkan bahwa Microsoft Teams, Google Meet dan Zoom memerlukan spesifikasi termutakhir untuk sistem operasi, RAM minimal 4GB, *processor* yang cukup tinggi. Hal ini karena ketiga *platform* merupakan aplikasi termutakhir sehingga membutuhkan perangkat elektronik dengan spesifikasi termutakhir agar dapat berjalan dengan baik.

## Kelebihan dan Kekurangan Platform Microsoft Teams, Google Meet dan Zoom

Dari analisis yang dilakukan pada [13]–[15], maka dapat diambil kesimpulan kelebihan dan kekurangan ketiga platform sebagai berikut:

Tipe	Platform		
	Microsoft Teams	Google Meet	Zoom
Kelebihan	Terdapat fitur untuk menjadwalkan pertemuan (dapat diberikan nama pertemuan sesuai keinginan), dan linknya dapat diberikan setelah pertemuan	Terdapat fitur untuk menjadwalkan pertemuan yang dapat terhubung langsung dengan Google Calender, dan linknya dapat diberikan setelah	Terdapat fitur untuk menjadwalkan pertemuan (dapat diberikan nama pertemuan sesuai keinginan), dan linknya dapat diberikan setelah pertemuan
	Untuk paket gratis, maksimal 300 peserta dalam ruang pertemuan tanpa batasan waktu	Untuk paket gratis, maksimal 30 peserta dalam ruang pertemuan tanpa batasan waktu	Memungkinkan untuk share audio tanpa video
	Terdapat fitur waiting room untuk pertemuan tertentu	Terdapat fitur waiting room	Terdapat fitur waiting room
	Terdapat fitur merekam, dan rekaman dapat dilihat oleh seluruh peserta yang bergabung	Terhubung dengan layanan Google lainnya	Terdapat fitur untuk merekam, dan rekaman dapat disimpan di cloud, yang dapat dibagikan via
	Dapat mengunduh daftar	Keamanan data dijamin oleh	Dapat mengunduh daftar
	Terdapat fitur raise hand (angkat tangan), serta memberikan reaction (reaksi)		Terdapat fitur raise hand (angkat tangan), serta memberikan reaction (reaksi)
	Terdapat fitur obrolan, baik pribadi maupun Team		Terdapat fitur obrolan pribadi saat melakukan pertemuan
	Terdapat fitur white board (papan)		Terdapat fitur white board (papan)
	Terdapat fitur Team, di mana seluruh anggota Team dapat melihat file serta text yang ada		Terdapat fitur Breakout Room, yang dapat membagi peserta ke beberapa ruangan
	Terdapat fitur assignment (tugas)		Terdapat fitur Co-host
Kekurangan	Untuk mendapatkan fitur yang lebih lengkap, perlu membeli	Untuk mendapatkan fitur yang lebih lengkap, perlu membeli	Untuk mendapatkan fitur yang lebih lengkap, perlu membeli
	Penggunaan cukup rumit	Fitur kurang lengkap	Rawan kebocoran data
	Untuk peserta lebih dari 300 peserta, hanya dapat melakukan pertemuan selama 60 menit	Untuk peserta lebih dari 6 peserta, hanya dapat melakukan pertemuan selama 60 menit	Untuk peserta lebih dari 3 peserta, hanya dapat melakukan pertemuan selama 40 menit
	Perlu membuat akun terlebih dahulu agar dapat masuk ke		

Sumber: [16]–[20]

Tabel 1.2 Kelebihan dan Kekurangan Platform Microsoft Teams, Google Meet dan Zoom

Dari Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa ketiga platform Microsoft Teams, Google Meet dan Zoom memiliki persamaan fitur sebagai berikut: (1) Dapat menjadwalkan pertemuan secara virtual; (2) Terdapat paket premium yang

membutuhkan biaya untuk berlangganan; (3) Memiliki fitur *waiting room* sebelum mengizinkan peserta masuk ke ruang *meeting* virtual; dan (4) Memiliki fitur *raise hand* dan *chatting* untuk interaksi ketika *meeting* virtual. Sedangkan dari Tabel 1.2. juga dapat disimpulkan bahwa kelebihan Microsoft Teams dibandingkan Google Meet dan Zoom adalah Microsoft Teams terintegrasi antara fitur *meeting* virtual dan *Assignments* sehingga lebih memudahkan kegiatan pembelajaran *online*, sedangkan Google Meet terpisah, karena untuk penugasan tugas dan ujian membutuhkan Google Classroom yang merupakan *platform* terpisah, sedangkan Zoom tidak memiliki fitur *Assignment* sehingga tidak cocok dipakai untuk kegiatan perkuliahan.

### 1.3 Penutup

#### **Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran *Online* di UNTAR**

Dari jawaban kuesioner terhadap 123 responden mahasiswa Jurusan Akuntansi UNTAR maka dapat diambil kesimpulan bahwa kendala pelaksanaan kegiatan pembelajaran *online* di UNTAR adalah: (1) Koneksi internet yang kurang memadai; (2) Terlalu banyak tugas yang diberikan dosen; (3) Dosen tidak mengajar dengan jelas; (4) Kuota internet yang tidak mencukupi; (5) Perangkat elektronik yang tidak memadai; (6) Kurang fokus dalam pembelajaran; (7) Tidak bisa bertemu teman secara langsung; (8) Sulit berdiskusi dengan teman kelompok; (9) Dosen tidak percaya terhadap kesulitan koneksi mahasiswa; (10) Dosen selalu memberikan tugas baru dan presentasi; (10) Dosen suka memindahkan jadwal seenaknya; (11) Waktu kuliah yang terlalu padat dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore; (12) Miskomunikasi antara dosen dengan mahasiswa akibat koneksi internet yang tidak memadai; (13) Tidak ada interaksi nyata antara dosen dan mahasiswa; (14) Microsoft Teams sering error; dan (15) Tidak dilakukannya *on camera* ketika kegiatan pembelajaran *online*.

Microsoft Teams Dapat Memenuhi Kebutuhan Kegiatan Pembelajaran *Online* di UNTAR Berdasarkan analisis mengenai kelebihan dan kekurangan ketiga *platform*, yaitu Microsoft Teams, Google Meet dan Zoom, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga *platform* memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tergantung dari kebijakan pimpinan perguruan tinggi untuk memilihnya. Sehingga apabila UNTAR merasa cocok dengan Microsoft Teams maka hal itu juga merupakan pilihan yang tepat.

Namun jika menganalisis dari sisi perangkat keras dan sistem operasi perangkat elektronik yang digunakan mahasiswa UNTAR dalam kegiatan pembelajaran *online* maka penggunaan Microsoft Teams untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran *online* di UNTAR dapat disimpulkan sebagai berikut.

Secara umum, untuk segala tipe perangkat elektronik yang digunakan, maka persyaratan spesifikasi untuk Microsoft Teams adalah: (1) Berfungsi baik dengan laptop/PC yang menggunakan sistem operasi Windows 10; (2) Minimal perangkat elektronik memiliki 4GB RAM; (3) Berfungsi baik dengan *smartphone/PC* yang menggunakan sistem operasi iOS atau Android terbaru; dan (4) Memiliki koneksi internet yang cepat.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 123 mahasiswa Jurusan Akuntansi UNTAR maka disimpulkan bahwa Microsoft Teams dapat memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran *online* di UNTAR dengan alasan: (1) Lokasi tempat tinggal mahasiswa Jurusan Akuntansi UNTAR mayoritas berada di DKI Jakarta, Jawa dan Bali, Sumatera, Kepulauan Riau dan Kalimantan dimana telah terdapat jaringan internet yang cepat; (2) Mayoritas menggunakan Laptop dengan sistem operasi Windows 10; (3) Kalaupun menggunakan *smartphone/tablet* maka mayoritas menggunakan Android dan iOS dengan versi terbaru; (4) Mayoritas mahasiswa menggunakan perangkat elektronik dengan RAM 4GB sebanyak

37,4%, RAM 8GB sebanyak 30,1%, RAM 6GB sebanyak 18,7% dan RAM 2GB sebanyak 8,9%; dan (5) Mayoritas menggunakan internet rumah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran *online*.

### **Keterbatasan**

Tentu saja tulisan ini masih jauh dari sempurna dengan keterbatasan bahwa responden yang mengisi kuesioner hanya 123 mahasiswa Jurusan Akuntansi UNTAR, jumlah yang sangat kecil dibanding jumlah keseluruhan mahasiswa Jurusan Akuntansi UNTAR. Kemudian pertanyaan kuesioner yang tidak terlalu terinci dan waktu analisis yang cukup singkat.

Karena itu dapat disarankan agar menambah lebih banyak responden dan pertanyaan kuesioner yang lebih rinci, sehingga data yang dikumpulkan dapat lebih mencerminkan kondisi kegiatan perkuliahan *online* di UNTAR selama masa pandemik COVID-19 ini

## Referensi

- [1] dr. V. V. Handayani, “Inilah 5 Jenjang Pendidikan Anak yang Harus Ibu Tahu,” *Www.Halodoc.Com*. 2020, [Online] Available: <https://www.halodoc.com/artikel/jenjang-pendidikan-anak-yang-harus-ibu-tahu>.
- [2] K. Pendidikan, D. A. N. Teknologi, B. Penelitian, D. A. N. Pengembangan, and D. A.N. Perbukuan, “Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.” p. 10270, 2021.
- [3] I. G. Ratnaya, “Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Cara Antisifasinya,” *J. Pendidik. Teknol. dan Kejuru.*, vol. 8, no. 1, pp. 17–28, 2011, doi: 10.23887/jptk.v8i1.2890.
- [4] Puryanto, “Teknologi Pendidikan Era Digital Dan Tantangan Indonesia Menghadapi Dinamika Peradaban Milenium Sebagai Era Robotic,” *BDK Jakarta Kementerian Agama RI*, no. 021. p. bdkjakarta.kemenag.go.id, 2020, [Online]. Available: <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/teknologi-pendidikan-eradigital-dan-tantangan-indonesia-menghadapi-dinamika-peradaban-milenium-sebagai-era-robotic>.
- [5] H. K. N. Sumartiningtyas, “4 Skenario Asal Mula Virus Corona di Wuhan Menurut WHO,” *Kompas.com*. 2021, [Online]. Available: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/11/070300223/4-skenario-asal-mula-virus-corona-di-wuhan-menurut-who?page=all>.
- [6] Dirjen-Dikti, “Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi,” pp. 1–2, 2020.
- [7] A. P. Kasih, “Mendikbud: Perguruan Tinggi di Semua Zona Dilarang Kuliah Tatap Muka,” *Www.Kompas.Com/Edu/Read/2020/06/16/103917571/Mendikbud-Perguruan-Tinggi-Di-Semua-Zona-Dilarang-Kuliah-Tatap-Muka*. 2020, [Online]. Available: mendikbud: Perguruan Tinggi di Semua Zona Dilarang Kuliah Tatap Muka%0AArtikel ini telah tayang di Kompas.com dengan

- judul %22Mendikbud: Perguruan Tinggi di Semua Zona Dilarang Kuliah Tatap Muka%22, Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/edu/read/2020/0>.
- [8] D. Dikti, “Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021,” *Http://Kemdikbud.Go.Id/*, no. Mei, p., 2020, [Online]. Available: <http://kemdikbud.go.id/main/?lang=id>.
- [9] S. Nalurita, “Pemanfaatan Aplikasi Google Meet pada Mata Kuliah Teknik Proyeksi Bisnis Semester Gasal Tahun Pelajaran 2020/2021 di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) (Studi pada Mahasiswa Prodi Manajemen Kelas G),” *J. Ilm. Manaj. Surya Pasca Sci.*, vol. 10, no. 1, pp. 22–30, 2021, [Online]. Available: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jimspc/article/download/593/564>
- [10] T. J. Sepuh, “Prof. Mohamad Nasir Bahas Strategi Kuliah Tatap Muka dalam Webinar SEVIMA.” 2021, [Online]. Available: <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kampus-kita/prof-mohamad-nasir-bahas-strategi-kuliah-tatap-muka-dalam-webinar-sevima/>.
- [11] Kompas, “Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia,” *Kompas.com*. 2021, [Online]. Available: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all>.
- [12] “SE REKTOR UNTAR NOMOR 744-R/2314/UNTAR/III/2020 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran dan Mencegah Risiko Dampak Pandemi COVID-19.pdf.” .
- [13] “Hardware requirements for Microsoft Teams - Microsoft Teams | Microsoft Docs,” *Microsoft*. p. 1, 2020, [Online]. Available: <https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements->

- for-the-teams-app.
- [14] “Requirements for using Google Meet - Google Meet Help.” [Online]. Available:<https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=en#zippy=%2Cuse-a-supported-operating-system%2Cuse-a-supported-web-browser%2Callow-meet-to-use-your-camera-and-microphone>.
- [15] “System requirements for Windows, macOS, and Linux – Zoom Help Center,” *Zoom*. p. 1, 2020, [Online]. Available: <https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux>.
- [16] “Kelebihan dan Kekurangan Antara Zoom vs Google Meet – Les Privat – Bimbel Online BATASA.” .
- [17] Amel, “Kelebihan Dan Kekurangan Aplikasi Google Meet,” *Studylibid.Com*. 2020, [Online]. Available: <https://studylibid.com/doc/4309731/kelebihan-dan-kekurangan-aplikasi-office>.
- [18] ”Ahli IT Ungkap Potensi Kebocoran Data pada Aplikasi Zoom - Katadata.co.id.” [Online]. Available: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a41f70007d/ahli-it-ungkap-potensi-kebocoran-data-pada-aplikasi-zoom>.
- [19] R. A. Siswanto, “Microsoft Teams, Tetap Bisa Kerja Bareng Tim Selama WFH,” *Pricebook.com*. 2020, [Online]. Available: [https://www.pricebook.co.id/article/tips\\_tricks/2020/06/04/10027/cara-menggunakan-microsoft-team-selama-wfh](https://www.pricebook.co.id/article/tips_tricks/2020/06/04/10027/cara-menggunakan-microsoft-team-selama-wfh).
- [20] “(2) (PDF) Penggunaan Kelas Online Dengan Google Meet dan Zoom Meeting.” [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/publication/350513027\\_Penggunaan\\_Kelas\\_Online\\_Dengan\\_Google\\_Meet\\_dan\\_Zoom\\_Meeting](https://www.researchgate.net/publication/350513027_Penggunaan_Kelas_Online_Dengan_Google_Meet_dan_Zoom_Meeting).

## Profil Penulis

### **Henryanto Wijaya, S.E., M.M., Ak., CA.**



Henryanto Wijaya menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Tarumanagara, Magister Manajemen di Universitas Tarumanagara, Profesi Akuntan di Universitas Tarumanagara dengan bidang keahlian Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik. Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap di Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara. Penelitian yang dilakukan dalam lima tahun terakhir adalah dalam bidang Akuntansi Keuangan dan banyak melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang Akuntansi Keuangan. Memiliki gelar profesi Akuntan (Ak) dan Chartered Accountant (CA) serta merupakan anggota utama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Henryanto juga pernah menjadi penterjemah IAI dalam proyek Penerbitan Standar Akuntansi Indonesia Berbasis IFRS (International Financial Reporting Standards) selama 2019 sampai dengan 2020.

## **BAB 11**

### **Analisis Kinerja Perbankan Kappitalisasi Saham Besar Selama dan Masa Pandemi Covid-19**

I Cenik Ardana

Jessica Metta Lumanau

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

#### **Abstrak**

Masuknya virus *Corona Diseases -19* (COVID-19) di Indonesia sejak Maret 2020 membawa dampak pada turunya aktivitas ekonomi dan bisnis, dan juga mempengaruhi kinerja industri perbankan. Hal ini hampir terjadi disemua kelas perbankan. Tujuan penelitian ini dampak pada bank dengan kapitalisasi besar. Dengan membandingkan tahun 2019 dan 2020 pada empat bank kapitalisasi besar. Model penelitian menggunakan uji *paired sample t test* menunjukkan hasil bahwa terjadi perbedaan (penurunan) signifikan dari aspek profitabilitas atau laba, sedangkan pada aspek kecukupan modal dan kualitas pinjaman, tidak terdapat perbedaan sesudah pandemi (2020) dibandingkan dengan sebelum pandemi (2019). Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peranan pemerintah untuk menjadi daya beli masyarakat agar perekonomian tetap berjalan dan dapat memperlambat kemerosotan kinerja perbankan.

Kata kunci: Virus Covid-19, Profitabilitas, Kecukupan Modal, Kualitas Pinjaman

## 1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang

Wuhan propinsi Hubei, Tiongkok. Virus yang berkemabng biak dengan cepat diparu- paru dan slauran pernapasan ini sanagt mematikan. Merebaknya wabah ini sangat cepat ke beberapa negara karena virus ini mengikuti terbawa pada cairan yang pada tubuh manusia yang saat itu sangat tinggi tingkat mobilitasnya. Virus yang hanya hidup jika ada media atau sering disebut “inang” daat ditularkan melalui cairan yang keluar (*droplet*) dari manusia umumnya akan mati dalam beberapa detik jika terkena udara atau panas dalam waktu relatif singkat, namun jenis COVID-19 dapat beberapa jam, hal ini yang menyebabkan penyebaran virus ini dengan cepat. Penyebaran COVID dari epedemi dan telah menajdi pandemi selama tahun 2020, bahkan sampai hari ini status sebagian besar negara di dunia ini berstatus pandemi.

Wabah ini dimulai di Indonesia ketika ditemukan dua kasus warga Jakarta yang terinfeksi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan pada tanggal 9 Maret 2020 [1] virus ini sudah tersebar di 34 propinsi di Indonesia setelah diumumkannya oleh Presiden Joko Widodo tanggal 3 Maret 2020 [2]. Saat itu perekonomian Indonesia cukup berjalan baik menjelang akhir kuartal I tahun 2020. Perkembangan COVID-19 di Indonesia yang begitu cepat dalam waktu kurang dari dari 1 minggu, maka pemerintah menetapkan Pebatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atu dikenal dengan *lock down* pada minggu kedua Maret 2020, sejak PSBB ini prekonomia mulai melambat dengan cepat sehingga membawa turunya perekonomian Indonesia.

Usaha yang paling berdampak dengan kebijakan PSBB adalah pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Turunnya bisnis UMKM ini berdampak pada usaha jasa pengiriman barang dan orang. Oleh karena pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang keuangang untuk menjaga usaha atau terpurukanya

usaha jenis ini dengan memberi stimulus dengan pembebasan cicilan bagi “pengusaha” ojek online, dan bagi UMKM yang mempunyai utang tidak lebih dari 10 Milyar Rupiah dari bank atau lembaga pembiayaan [3]. Kondisi ini dimulai industri keuangan, khususnya lembaga pembiayaan dan perbankan mulai berdampak secara langsung.

Lemahnya perdagangan seluruh sektor membawa dampak pada bisnis perbankan. Sektor pertambangan runtuh drastis karena berhenti atau berkurangnya aktivitas produksi dan pergerakan manusia menyebabkan turunya permintaan atau konsumsi produk dari sumber daya alam seperti pertambangan. Untuk sektor riil, dampak turunnya lebih berdampak turunya aktivitas ekonomi. Jadi dapat dikatakan turunya bisnis semua sektor memukul bisnis perbankan. Perbankan mulai melakukan efisiensi, dengan pengurangan atau penutupan kantor cabang dan perbankan harus mengeluarkan biaya investasi untuk transaksi virtual atau digital, kedua hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan tenaga kerja. Usaha perbankan tersebut adalah untuk menjaga bisnis tetap berjalan dan tetap menghasilkan laba atau memenuhi rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti rasio kecukupan modal (*CAR*), *Non Performing Loan* (*NPL*), dan *Loan to Deposit Ratio* [4] atau rasio masalah kredit bermasalah, selain masalah likuiditas, dan tingkat laba atau profitabilitas. Akibat permasalahan di atas, kinerja keuangan sektor perbankan diduga kuat juga akan mengalami pelemahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis dampak pandemi Covid-19 selama tahun 2020 terhadap bank-bank yang berkapitalisasi besar dalam pasar modal. Dipilihnya kategori bank ini adalah bank dengan kapitalisasi besar mempunyai total harta atau (*assets*) yang besar, kredit yang besar dan diberikan untuk produksi, bisnis (termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya bank-bank pemerintah), dan konsumsi, likuiditas kadang terbatas (karena karena

perlunya investasi untuk transaksi virtual dan setiap pemberian pinjaman sebagai besar dana dari Bank Indonesia), dan beban operasi yang sudah terlanjur besar. Pertimbangan ini yang menjadi alasan pemilihan kriteria dan subyek penelitian. Bagaimana usaha manajemen bank untuk mempertahankan pertumbuhan bisnisnya untuk memenuhi keinginan pemegang saham dan memenuhi persyaratan Bank Indonesia. Penelitian ini mengambil indikator nilai kinerja keuangan bank, antara lain *Return on Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Non Performing Loan Ratio (NPL)*. Subyek dalam penelitian ini adalah empat bank dengan kapitalisasi terbesar, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Central Asia (BBCA), Bank Mandiri (BMRI), dan Bank Negara Indonesia (BBNI).

Penelitian tentang dampak Covid-19 terhadap kinerja perbankan di Indonesia telah dilakukan [5] yang melakukan penelitian terhadap kinerja perbankan Syariah di Indonesia yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa pandemi COVID-19 mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a) Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan dengan proxy ROA sebelum dan pada masa pandemic COVID-19 ?
- b) Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan dengan proxy CAR sebelum dan pada masa pandemic COVID-19 ?
- c) Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan dengan proxy NPL sebelum dan pada masa pandemic COVID-19 ?

## 1.2 Isi/Pembahasan

### Kajian Teori

#### a. Teori Sinyal.

Teori ini merupakan teori yang memberikan informasi yang dapat dilihat dari laporan keuangan maupun laporan non keuangan yang diberikan kepada pihak eksternal. Teori ini timbul karena adanya asimetri informasi yang diterima oleh pihak internal perusahaan perusahaan dan pihak eksternal manajemen atau organisasi. Informasi asimetri ini terjadi antara perusahaan dengan pihak investor di mana perusahaan mengetahui informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan, dengan berbagai kemungkinan peluang yang akan didapatkan nantinya, dibandingkan pihak investor maupun kreditor [6]. Informasi yang dipublikasikan oleh manajemen perusahaan dapat menjadi sinyal bagi para pemangku kepentingan terkait sehingga bisa menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

#### b. Kinerja Keuangan.

Kinerja perusahaan dasarnya diukur seberapa besar efisiensi dari operasi yang dilakukan perusahaan, semakin efektif operasi perusahaan maka semakin positif kinerja perusahaan, sedangkan semakin rendah efisiensi operasi perusahaan maka kinerja perusahaan lemah [7]. Kinerja keuangan merupakan cermin dari kondisi keuangan di dalam suatu perusahaan pada periode tertentu [8]. Kinerja perusahaan yang dilihat dari sudut pandang keuangan menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan mengelolah keuangan perusahaan yang dinilai dengan sudut pandang informasi laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna, sedangkan sudut pandang non keuangan dapat diukur dari kepuasan pelanggan/nasabah dan pekerja, serta dinilai dari perkembangan aktivitas bisnis perusahaan [9], Kinerja keuangan dapat juga dikatakan merupakan pencapaian hasil kerja perusahaan dalam periode

tertentu. Dengan demikian, kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan cerminan pencapaian hasil kerja suatu perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu yang diinformasikan atau disajikan untuk pengguna atau pihak yang berkepentingan.

c. Rasio Keuangan.

Pengukuran untuk melihat capaian dari suatu perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan, baik dengan data atau informasi periode sebelumnya, faktor atau komponen lain atau dengan acuan eksternal lainnya. Perbandingan ini sering disebut sebagai rasio. Tidak terkecuali dalam melakukan atau menilai capaian operasi perusahaan yang tercermin pada laporan keuangan. Rasio keuangan merupakan acuan untuk mengetahui posisi keuangan dan keberhasilan perusahaan [10], dan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menganalisis keuangan perusahaan dengan cara dengan membandingkan data yang terdapat pada laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi [11]. Jika rasio ini digabungkan atau dibandingkan dengan periode sebelumnya dapat membentuk suatu tren atau pola kecenderungan. Jika demikian, rasio laporan keuangan yang berdirisi sendiri dapat menjadi bahan evaluasi atau analisis pencapaian suatu perusahaan, tetapi kalau digabungkan dengan membandingkan beberapa periode dapat menganalisis suatu proyeksi atau pola untuk menentukan perilaku dari perusahaan atau bisnis dari laporan keuangan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan perbandingan angka-angka keuangan yang ada dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk menganalisis tingkat pencapaian waktu lalu, serta memungkinkan untuk membuat prediksi di masa depan.

d. Profitabilitas.

Profitabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari total harta atau modal yang dimiliki [12]. Rasio ini bagi bank sangat penting. Hal ini disebabkan bank dinyatakan besar dilihat besarnya harta yang dimiliki dan penghasilan yang diperoleh dari harta yang dimilikinya, sehingga profitabilitas berguna untuk mengukur kemampuan bank menggunakan segala sumber daya yang ada secara efisien untuk menghasilkan pendapatan bank. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan dalam keadaan yang baik, yaitu menghasilkan laba sesuai ekspektasi, yang secara tidak langsung akan menjadi daya tarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya ke perusahaan [13], dan masyarakat untuk menempatkan atau menyimpang uang mereka atau meminjam uang pada bank tersebut. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan perusahaan dalam mewujudkan suatu keuntungan yang merupakan salah satu acuan bagi investor untuk menanamkan uang mereka, dan menjadi pertimbangan masyarakat untuk menyimpan atau meminjam uang dari bank tersebut, karena dianggap bank tersebut dapat mengelola bisnis atau hartanya dengan baik.

e. *Capital Adequacy Ratio*.

Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ialah bagian indikator dari kesehatan dari sudut pandang permodalan suatu bank [14]. CAR merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal untuk menunjang asset yang menghasilkan risiko. Berdasarkan peraturan BI No 6/10/PBI/2004 standar untuk rasio CAR ini adalah 8% [15]. Rasio ini menunjukkan bahwa semua harta dari suatu bank memiliki risiko seperti penyertaan, tagihan pada bank lain, kredit dan surat berharga, serta pembiayaan yang berasal dari dana modal sendiri, selain memperoleh berbagai dana yang bersumber dari luar bank

[16]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CAR merupakan rasio modal yang dipersyaratkan untuk melindungi resiko-resiko kerugian yang ada saat ini maupun yang akan datang, dan juga untuk melindungi para deposan dan menjaga stabilitas dan efektivitas sistem keuangan, oleh karena perlu Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengawasi operasi perbankan menetapkan standar minimal yang harus dipatuhi agar bank dapat dinyatakan sehat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Non Performing Loan.

*Non Performing Loan* (NPL) adalah pengukuran yang hanya diperuntukan untuk industri perbankan. NPL digunakan dalam manajemen bank sebagai indikator bahwa perusahaan dalam mengelola risiko kredit dan menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola pinjaman yang telah diberikan [17]. Rumusan NPL adalah kredit yang memiliki dikelompokkan menjadi kredit kurang lancar, kredit macet, dan kredit yang diragukan [19], sehingga dengan NPL dapat diketahui tingkat kredit bermasalah yang terjadi pada bank umum. Hasil penelitian [18] mengatakan bahwa terdapat kaitan erat antara antara tingkat kelangsungan suatu bank dengan aktiva produktif yang dimiliki, maka manajemen diminta untuk selalu mengamati dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimilikinya. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas harta yang dimiliki yang dihubungkan dengan risiko kredit yang mungkin dihadapi bank sebagai akibat dari pemberian kredit dan investasi dana. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa NPL merupakan alat ukur atau acuan untuk menilai tingkat kualitas atau kesehatan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya.

### **Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19**

Profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam penelitian ini diukur dengan *Return on Assets* (ROA). tentang profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA), terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan masa Pandemi COVID-19 [5], [15], [17], [19], [20], [21]. Namun untuk hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [22], [10], [23] yang menyatakan Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan masa Pandemi COVID-19

Untuk penelitian mengenai rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), ada peneliti yang menyatakan bahwa CAR tidak bank sebelum dan masa Pandemi COVID-19 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19 [5], [22], [21]. Namun untuk hasil penelitian [19],[24] menemukan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan masa Pandemi COVID-19.

Penelitian mengenai *Non Performing Loan* (NPL). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Non Performing Loan* (NPL), tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan masa Pandemi Covid-19 seperti yang dilakukan oleh [17], [19]. Namun, untuk hasil penelitian terhadap lainnya, ada yang mengatkaan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) terdapat perbedaan antara kondisi sebelum dan masa pandemi COVID-19 seperti yang dilakukan oleh [24]

Profitabilitas merupakan suatu rasio yang mencerminkan keahlian manajemen perusahaan dalam memperoleh laba atau penghasilan semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya harta yang dimiliki. Dengan adanya pandemi

COVID-19 yang berdampak negatif secara drastis ke semua sektor usaha, termasuk industri perbankan. Pada sektor perbankan, hal ini berdampak pada kinerja Profitabilitas, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *NonPerforming Loan* (NPL), dan indikator lainnya yang mengalami penurunan signifikan. Adanya kebijakan “*lockdown*” atau istilah lain dari pemerintah sejak diumumkan masuknya virus korona ke Indonesia sampai sekarang, untuk mencegah penularan virus yang berdampak negatif pada perekonomian dan bisnis sehingga kinerja ekonomi dan bisnis pada hampir semua sektor mengalami keterpurukan, termasuk dalam sektor perbankan. Atas dasar pemahaman di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Terdapat perbedaan profitabilitas secara signifikan pada perusahaan sektor perbankan sebelum dan sesudah Covid-19

H<sub>2</sub>: Terdapat perbedaan *capital adequacy ratio* (CAR) secara signifikan pada perusahaan sektor perbankan sebelum dan sesudah Covid-19

H<sub>3</sub>: Terdapat perbedaan *Non Performing Loan* (NPL) secara signifikan pada perusahaan sektor perbankan sebelum dan sesudah Covid-19

## **Pembahasan**

### **a. Metodologi Penelitian**

Metodologi dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis komparatif atau uji beda yang digunakan untuk mencari perbedaan antara dua variabel atau lebih. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: 1) bank publik dengan nilai kapitalisasi pasar saham besar yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020, 2) laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik, 3) periode pada laporan keuangan yang dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Berdasarkan kriteria

tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak empat perusahaan perbankan yaitu Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia.

Operasionalisasi Variabel dan Instrumen yang digunakan adalah :

Tabel 1.1. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen

Tahap awal dari penelitian ini adalah melakukan uji klasik yaitu uji normalitas dari data yang dikumpulkan dan dianalisis. Uji Uji normalitas pada penelitian ini adalah uji *parametrik statistic Shapiro-Wilk Test (SW)*. Hasil proses uji atas data yang dikumpulkan menunjukkan nilai Sigifikan ROA pada sebelum COViD-19 sebesar 0,82. Nilai signifikan pada ROA masa COVID-19 sebesar 0,780. Untuk nilai Siginifikan pada CAR sebelum COVIC-19 sebesar 0,751, dan nilai signifikan CAR pada masa COVID-19 sebesar 0,159. Sedangkan nilai signifikan pada NPL sebelum COVID-19 sebesar 0,893, dan nilai signifikan NPL pada masa COVID-19 sebesar 0,996. Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut diketahui bahwa data sampel yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal sehingga penelitian ini menggunakan uji statistik parametrik dikarenakan hasil dari seluruh variabel dengan sig. lebih besar dari 0,05.

Hasil olah deskriptif dari data yang dikumpulkan terlihat pada tabel dibawah ini:

Mean	N	Std.	Std.
Pair 1 ROA SEBELUM COVID-	4	.69802	.34901
ROA MASA_COVID-			
Pair 2 CAR SEBELUM COVID-	4	.98452	.49226
CAR MASA_COVID-			
Pair 3 NPL SEBELUM COVID-	4	.44150	.22075
NPL MASA_COVID-			

Sumber data diolah

Tabel 1.2 Hasil Uji *Paired Samples Test* Sebelum dan Sesudah Covid-19

Pada hasil output tabel 1.23, ringkasan hasil statistik deskriptif dari ketiga rasio yang digunakan dalam penelitian ini pada perusahaan Bank Central Asia Tbk., Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Bank Mandiri (Persero) Tbk., Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang terdiri dari nilai ROA, CAR dan NPL sebelum COVID-19, yaitu tahun 2019, dan pada masa COVID-19, yaitu tahun 2020. Pada nilai rata-rata ROA sebelum COVID-19 sebesar 3,02% dengan nilai standar deviasi 0,69802. Sedangkan nilai rata-rata ROA pada masa COVID-19 sebesar 1,77% dengan nilai standar deviasi 1,04503. Untuk nilai rata-rata CAR sebelum COVID-19 sebesar 22,59% dengan nilai standar deviasi 0,98452. Sedangkan nilai rata-rata CAR pada masa COVID-19 sebesar 21,55% dengan nilai standar deviasi 2,94159. Sedangkan nilai rata-rata NPL sebelum COVID-19 sebesar 0,84% dengan nilai standar deviasi 0,44150, dan nilai rata-rata NPL pada masa COVID-19 sebesar 1,15% dengan nilai standar deviasi 0,71435. Selanjutnya yang terakhir nilai Std Error Mean untuk ROA sebelum COVID-19 sebesar 0,34901 dan ROA pada masa COVID-19 sebesar 0,52252. Sedangkan nilai Std Error Mean untuk CAR sebelum COVID-19 sebesar 0,49226 dan CAR pada masa COVID-19 sebesar 1,47079. Terakhir untuk nilai Std Error Mean NPL

sebelum COVID-19 sebesar 0,22075 dan NPL pada masa COVID-19 sebesar 0,35717. Berdasarkan hasil nilai rata-rata ketiga rasio tersebut terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan pada masa COVID-19.

Untuk uji signifikansi perbedaan antara sebelum dan masa COVID-19 untuk kondisi kinerja perbankan yang diukur dengan ROA, CAR dan npl dapat dilihat pada Tabel 1.3. Pada Tabel 1.3, terlihat nilai signifikansi ROA sebelum dan sesudah Covid-19 adalah sebesar 0,007, angka ini lebih kecil dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa pada hipotesis pertama terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA sebelum dan pada masa COVID-19 bagi keempat Bank dengan kapitalisasi pasar saham terbesar. Untuk nilai signifikansi CAR sebelum dan pada masa COVID-19 adalah sebesar 0,417 di mana angka ini lebih besar daripada 0,05 yang berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, sehingga hipotesis kedua tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproksikan dengan CAR sebelum dan pada masa COVID-19 untuk keempat bank dengan kapitalisasi pasar saham terbesar. Hipotesis terakhir, yaitu nilai signifikansi NPL sebelum dan pada masa COVID-19 adalah sebesar 0,121 yang menunjukkan angka lebih besar daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Untuk hipotesis ketiga ini berarti tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproksikan dengan NPL sebelum dan pada masa COVID-19 untuk keempat Bank tersebut.

		Paired Differences						
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper		
Pair 1	ROA SEBELUM COVID-19 - ROA MASA COVID-19	1.24307	.37031	.18516	.65382	1.83231	6.714	.007
Pair 2	CAR SEBELUM COVID-19 - CAR MASA COVID-19	1.03537	2.20739	1.10369	-2.47708	4.54782	.938	.417
Pair 3	NPL SEBELUM COVID-19 - NPL MASA COVID-19	-.31120	28989	14494	-.77248	.15007	-2.147	.121

Tabel 1.3 . Hasil Uji Paired Samples Test Sebelum dan Sesudah Covid-19

Pada Tabel 1.3 terlihat nilai signifikansi ROA sebelum dan sesudah *Covid-19* adalah sebesar 0,007, angka ini lebih kecil dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa pada hipotesis pertama terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA sebelum dan pada masa COVID-19 bagi keempat Bank dengan kapitalisasi pasar saham terbesar. Untuk nilai signifikansi CAR sebelum dan pada masa COVID-19 adalah sebesar 0,417 di mana angka ini lebih besar daripada 0,05 yang berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga hipotesis kedua tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproksikan dengan CAR sebelum dan pada masa COVID-19 untuk keempat bank dengan kapitalisasi pasar saham terbesar. Hipotesis terakhir, yaitu nilai signifikansi NPL sebelum dan pada masa COVID-19 adalah sebesar 0,121 yang menunjukkan angka lebih besar daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk hipotesis ketiga ini berarti tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproksikan dengan NPL sebelum dan pada masa COVID-19 untuk keempat Bank tersebut.

## **Diskusi**

Dari hasil hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas bagi empat bank dengan kapitalisasi saham terbebesar yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia bahwa pandemi COVID-19 membawa penurunan laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian [17] yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA antara sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian ini [22] Hal ini terlihat adanya terlihat perbedaan koefisien tahun 2019 dan 2020 menunjukkan perbedaan yang signifikan. Penurunan laba dapat dipahami karena pada masa pandemi pengusaha melakukan penghentian atau penundaan permintaan pinjaman ke bank. Namun bagi masyarakat bagi kelas menengah atas dan atas kelebihan dana mereka disimpan di bank sehingga kelebihan likuiditas tidak dapat disalurkan, artinya harta bertambah tetapi penghasilan tidak bertambah, bahkan beban bunga untuk tabungan/deposito nasabah tetap dibayar, sehingga beban lebih besar, yang pada akhirnya mengurangi laba.

Untuk Kecukupan modal atau CAR pada keempat bank dengan kapitalisasi pasar saham terbesar di Indonesia tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan antara sebelum dan pada masa Pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian [22] yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan yang diproksikan dengan CAR sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Namun berbeda dengan hasil penelitian [5]. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada saat Pandemi, turunnya tingkat pinjaman korporasi besar dan menengah, bahkan kecil baik untuk produksi maupun untuk konsumsi, di lain sisi, tabungan atau deposito dari masyarakat kelas menengah atas dan atas semakin besar, juga didukung dengan turunnya bunga penjamin dari Lembaga Penjamin Simpanan dan turunnya bunga antar bank dari Bank Indonesia

menyebabkan beban bunga yang tidak sebesar pada sebelum 2019, Sehingga modal yang akumulasi sebelumnya relatif tidak banyak berkurang.

Ukuran kinerja terakhir dalam penelitian ini masalah kredit yang diukur dengan NPK menunjukkan kredit bermasalah pada keempat bank dengan kapitalisasi pasar saham terbesar di Indonesia tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19) dan tahun 2020 (pada masa Pandemi COVID-19). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian [17] yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang diprosikan dengan NPL sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19, dan bertolak belakang dengan penelitian [24]. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keempat bank besar dengan sistem dan organisasi yang lebih memperhatikan pruden atau kehati-hatian tidak menyebabkan banyak masalah pada kredit yang disalurkan pada periode sebelumnya. Atas kebijakan pemerintah yang meminta dihentikn sementara cicilan bagi pengusaha ojol, rupanya kebijakan ini berdampak pada keempat bank ini, atau kebijakan ini lebih berdampak pada lembaga pembiayaan non bank. Dengan demikian keempat bank dengan nilai kapitaliasi saham besar ini secara umum masih sehat walaupun mengalami penurunan laba akibat Pandemi COVID-19.

### **1.3 Penutup**

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan seperti hanya melihat kesehatan bank-bank ini hanya pada profit dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Penelitian yang mengambil sampel empat bank dengan kapitalisasi besar belum dapat mewakili kondisi kesehatan perbankan secara nasional, atau untuk papan atas belum tentu menghasilkan hasil yang sama. Untuk penelitian berikutnya dapat dikembangkan untuk membandingkan kinerja bank papan atas, menengah dan kecil, namun tidak disarankan untuk melakukan pengujian dengan data yang menggabungkan semua bank.

Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan, bahwa tindakan pruden atau kehati-hatian sangat diperlukan oleh perbankan baik dalam keadaan ekonomi baik bahkan ekonomi lagi naik. Kondisi Pandemi COVID-19 yang berdampak resesi ekonomi tidak dapat diprediksi seperti resesi lainnya seperti resesi tahun 1989, 2008 dan 2011 di mana resesi pada tahun-tahun tersebut sudah menunjukkan simptom sebelumnya.

## Referensi

- [1] Ratcliffe, R. 2020. *First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears nation is ill-prepared for an outbreak*. The Guardian. [Diarsipkan](#) dari versi asli tanggal 2020-03-02. Diakses tanggal 13 September 2021. Ihsanuddin. 2020. Ini Pengumuman Lengkap Jokowi soal 2 WNI Positif Corona Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/12002701/inipengumuman-lengkap-jokowi-soal-2-wni-positif-corona?page=all>. Diakses tanggal 13 September 2021.
- [3] CNN Indonesia. 2020. "Cara Ajukan Penundaan Cicilan Kredit Motor di Masa Corona" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021084016-78-560866/cara-ajukan-penundaan-cicilan-kredit-motor-di-masa-corona>. Diakses tanggal 13 September 2021.
- [4] Fricilia., Lukman, H, 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Praktik Manajemen Laba Pada Industri Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol XIX/01/Januari/2015,
- [5] Ilhami., Thamrin, H. 2021. Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068).
- [6] Suwarno, R. C., Muthohar, A. M. (2018). Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(1), 94. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i1.3699>.
- [7] Dewi, O. T. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara*, 1(3), 748–756.
- [8] Talenta, J., Tambunan, A., Prabawani, B. 2018. *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Leverage dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan ( Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Tahun 2012-2016 )*. *Journal Of Social and Politic*, 1–10.
- [9] Yanti. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Environmental Performance Terhadap Kinerja Keuangan Bumn Dan Non Bumn Yang Terdaftar Di

- Bursa Efek Indonesia 2009-2012. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 242–259. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.97>.
- [10] Roosdiana. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 4(2), 133-141.
- [11] Satria, R. 2017. Analisis Laporan Keuangan Untuk Melihat Kinerja Perusahaan Pada PT. Darma Henwa Tbk. *Jurnal Sekuritas*, 1(2), 89–102. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKT/article/view/749>
- [12] Utami, W, B., Pardanawati, S, L. 2016. Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Dan Manajemen Aset Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Go Publik Yang Terdaftar Dalam Kompas 100 Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(01), 63–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i01.58>.
- [13] Nurdin, M., Hastuti, R, T. 2020. Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(9), 1067–1075.
- [14] Matindas, A, M., Pangemanan, S, S., Saerang, D, P, E. 2015. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Bopo Dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 10(1), 52–66. <https://doi.org/10.32400/gc.10.1.7367.2015>.
- [15] Fitriani, P, D. 2020. Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi COVID–19. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, II(2), 114-124.
- [16] Ichsan, R, N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., Sitompul, S. 2021. Determinant of Sharia Bank’s Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298–309. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1594>.
- [17] Pramasari, T. 2020. Comparative Analysis Of The Biggest Banking Performance In Indonesia. *Journal Proceedings of the 2nd International Conference of Business* <https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2020.2301098>.
- [18] Syachreza., Danny, R. G. 2020. Analisis Pengaruh CAR , NPF , FDR , Bank Size , BOPO Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal*

*Akuntansi dan Manajemen*, 17(01), 25–37.

- [19] Riftiasari, D., Sugiarti. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Bank Bca Konvesional Dan Bank BCA Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 33(2), 78–86. [20] Ferdiansah, M., Fatahilah., Diana, N., dan Afifudin. 2021. E-JRA Vol. 09 No. 02 Februari 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-Jra*, 10(03), 74–83.
- [21] Handayani, D., Ananto, R. P., Ferdawati, D. 2020. *Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh)*. 13(2), 60–69.
- [22] Sutrisno, S., Panuntun, B., & Adristi, F. I. 2020. The Effect of Covid-19 Pandemic on the Performance of Islamic Bank in Indonesia. *Equity*, 23(2), 125–136. <https://doi.org/10.34209/equ.v23i2.2245>
- [23] Khatib, S. F. A., Nour, A. N. I. 2021. The Impact of Corporate Governance on Firm Performance During The COVID-19 Pandemic: Evidence from Malaysia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 943–952. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0943>.
- [24] Stephanie, V., Widoatmodjo, S. 2021. Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan Selama Pandemi (COVID – 19). *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, III(1), 257–266.

## **Profil Penulis**

### **Drs. I Cenik Ardana, M.M., Ak., CA.**



Cenik Ardana menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia 1978 dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia dengan konsentrasi Manajemen Keuangan pada tahun 1998. Berpengalaman bekerja di Kantor Akuntan Publik dan menduduki berbagai jenjang manajerial di berbagai perusahaan swasta. Karir dalam bidang pendidikan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan pada tahun 2000-2004 dan Pembantu Dekan I di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara pada periode 2004-2008. Telah menulis buku Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Sistem Informasi Akuntansi, dan Life Ethics.

### **Jessica Metta Lumanau**

Jessica Metta Lumanau adalah mahasiswa S1 Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

## **BAB 12**

### **Peran UMKM dalam Mempercepat Pencapaian SDGs Pasca Covid-19**

Henny Wirianata

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

#### **Abstrak**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 17 tujuan universal yang hendak dicapai negara-negara di dunia agar tercipta pembangunan yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi tetapi juga terjaganya lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat dunia. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 menimbulkan krisis perekonomian global yang mengancam perusahaan besar dan kecil, termasuk UMKM. Pandemi juga berdampak pada pencapaian SDGs dimana hampir semua target dalam SDGs mengalami keterlambatan pencapaian. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian baik di dunia maupun di Indonesia. International Trade Centre (ITC) menyebutkan bahwa UMKM memiliki kontribusi terhadap pencapaian SDGs khususnya tujuan 8 dan 9. Membangkitkan kembali UMKM sebagai roda penggerak perekonomian diharapkan akan memban gkitkan kembali perekonomian di Indonesia yang didukung dengan kebijakan-kebijakan strategis dan kerjasama semua pihak. Pulihnya kondisi perekonomian akan mendorong pencapaian SDGs kembali pada Peta Jalan (Road Map) yang sudah direncanakan yang mengarah pada “Build Back Better”.

Kata kunci: UMKM, Sustainable Development Goals, Covid-19

## 1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang

*Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan) adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka [1]. *Sustainable development* menjadi awal pembangunan yang mencakup tiga elemen *triple bottom line* yaitu *people*, *profit*, dan *planet*. *Triple bottom line* diperkenalkan oleh John Elkington (1994) yang merupakan suatu kerangka akuntansi yang dikembangkan dari *sustainable development* dimana pelaporan keuangan perusahaan akan dilengkapi dengan satu laporan yang memberikan informasi tentang pencapaian perusahaan terkait bidang sosial dan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan [2].

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tujuan-tujuan pembangunan universal/global yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola [3]. SDGs disepakati oleh 193 kepala negara dari seluruh dunia dalam Sidang Umum PBB tanggal 25 September 2015. SDGs merupakan penyempurnaan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs dan SDGs muncul sebagai bentuk respon negara-negara dunia atas keprihatian kegiatan pembangunan yang tanpa disadari telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberadaan manusia di masa depan. SDGs berfokus pada pencapaian 17 tujuan, 169 target dengan 241 indikator untuk 15 tahun ke depan yang diharapkan dicapai pada 2030 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian baik di dunia maupun di Indonesia. Pada tahun 2018, kontribusi UMKM di Indonesia mencapai 99,99% dari populasi industri di Indonesia [4]. UMKM di Indonesia memiliki 3 peranan utama. UMKM memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang mencapai 97%. UMKM di

Indonesia berkontribusi membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 61,07%. Selain itu, UMKM di Indonesia menjadi jarring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 menimbulkan krisis perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di dunia mengalami penurunan bahkan negatif, termasuk di Indonesia. Seluruh sektor industri baik dalam skala besar maupun kecil mengalami penurunan kegiatan produksi bahkan terpaksa menutup operasionalnya. Tidak terkecuali UMKM di Indonesia yang selama ini menjadi jaring pengaman kegiatan perekonomian masyarakat. Saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, UMKM terbukti berhasil menjadi penyelamat dan roda penggerak bangkitnya perekonomian di Indonesia. Tetapi pada masa pandemi saat ini, UMKM di Indonesia turut mengalami kemerosotan.

*International Trade Centre (ITC) (2020)* menyebutkan UMKM memiliki kontribusi terhadap pencapaian SDGs khususnya target 8 “Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi” dan target 9 “Industri, inovasi dan infrastruktur” [5]. Namun, pandemi Covid-19 membawa dampak yang besar dalam pencapaian SDGs dimana hampir semua target dalam SDGs terancam mengalami keterlambatan pencapaian.

Target SDGs yang paling terdampak adalah yang berkaitan dengan upaya menghapus kemiskinan, terganggunya produksi dan tersedianya makanan sehat, terancamnya pencapaian kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan dan banyak sektor usaha yang ditutup. Target yang terdampak lagi adalah yang berkaitan dengan kesetaraan

gender dan timbulnya konflik baik dalam negeri maupun dengan luar negeri. Diperlukan kerjasama dari semua pihak, yaitu pemerintah dan pelaku usaha agar kondisi perekonomian bangkit kembali dan berdampak positif pada pencapaian target-target dalam SDGs. Selain itu diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dan kerjasama semua pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar pandemi segera berakhir dan kondisi perekonomian pulih sehingga pencapaian SDGs akan kembali pada Peta Jalan (*Road Map*) yang sudah direncanakan yang mengarah pada “*Build Back Better*”.

Pandemi Covid-19 memberikan gambaran bagaimana rentannya kehidupan manusia di bumi dan menyebabkan pada perubahan pola hidup dan perilaku manusia. Kebangkitan ekonomi global menjadi kunci utama dalam mengembalikan pencapaian SDGs. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan peranan UMKM dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung pencapaian SDGs di Indonesia pasca pandemi Covid-19. Pemaparan materi dilakukan berdasarkan hasil studi literatur/studi pustaka terkait UMKM dan pencapaian SDGs di Indonesia.

## **1.2 Isi/Pembahasan**

### ***Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia***

Prinsip pertama dalam pencapaian SDGs adalah *Universal* yaitu pembangunan dengan melibatkan semua negara baik negara besar maupun negara berkembang. Prinsip kedua adalah *Integrasi* dimana setiap tujuan dalam SDGs saling berkaitan dan saling mendukung, pencapaiannya dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga pencapaian pada salah satu tujuan akan berdampak pada pencapaian tujuan-tujuan yang lain. Prinsip terakhir adalah *Inklusif*, yaitu pelaksanaan pencapaian SDGs dengan melibatkan semua pemangku kepentingan serta memberi manfaat untuk kepentingan bersama terutama yang rentan, yang mencakup kesejahteraan

untuk semua, tidak diskriminasi, tidak membedakan gender, pendidikan untuk semua, kesehatan untuk semua, lingkungan yang terjaga, dan tercapainya tujuan-tujuan lain dalam SDGs. Semua prinsip tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang tertinggal atau yang lebih dikenal dengan istilah “*no one left behind*”. Platform pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia melibatkan peranan 4 pihak yaitu pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, ormas dan media, serta filantropi dan pelaku usaha. Masing- masing pihak memberikan dukungan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs sesuai fungsi masing- masing (lihat Gambar 1.1).



Gambar 1.1 Platform Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia [6]

Untuk memudahkan pelaksanaan pencapaiannya, Indonesia mengelompokkan 17 tujuan TPB/SDGs ke dalam empat pilar pembangunan, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Pilar Pembangunan Sosial

Mencakup tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5



Gambar 1.2 Platform Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia [7]

b. Pilar Pembangunan Ekonomi

Mencakup tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17



Gambar 1.3 TPB/SDGs dalam Pilar Pembangunan Ekonomi [8]

c. Pilar Pembangunan Lingkungan

Mencakup tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15



Gambar 1.4 Platform Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia [9]

d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Mencakup tujuan 16



Gambar 1.5 TPB/SDGs dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola [10]

Untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan 2020-2024 dimana substansi dari masing-masing target dalam TPB/SDGs telah diintegrasikan dan diselaraskan dengan program-program pembangunan pemerintah dalam RPJMN. Sampai saat ini, sebanyak 124 target dari TPB/SDGs telah terintegrasi dalam RPJMN tahun 2020-2024. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk mensukseskan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia dan sebagai bentuk dukungan Indonesia untuk pencapaian agenda SDGs tahun 2030 secara global [11] Untuk pelaksanaannya telah diatur dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang dijabarkan dalam Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs yang ditetapkan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2018, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi.

Dalam tahun 2019, Indonesia telah mengukir prestasi sebanyak 146 indikator (52%) telah mencapai target yang ditetapkan pada RAN 2017-2019 yang terdiri dari 39 indikator dalam pilar sosial, 48 indikator dalam pilar ekonomi, 42 indikator dalam pilar lingkungan. Serta 17 indikator dalam pilar hukum dan tata kelola (lihat Gambar 1.6). Tahun 2020, pencapaian SDGs Indonesia berada pada

posisi 101 dunia, naik satu peringkat yang sebelumnya di posisi 102 dunia [12]. Posisi Indonesia ini berada pada posisi ke-4 di Asia Tenggara setelah Thailand, Malaysia, dan Filipina.

Perjalanan pencapaian SDGs di Indonesia juga telah mendapat apresiasi secara internasional. Indonesia telah beberapa kali menyampaikan *Voluntary National Reviews (VNR)* dalam acara *High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF SD)* di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). VNR merupakan dokumen laporan capaian TPB/SDGs untuk tingkat global yang menjabarkan capaian atas 17 Tujuan (*Goals*) di Indonesia yang disusun dengan prinsip keterbukaan dan inklusif. Laporan tersebut disusun dengan melibatkan pihak-pihak pemerintah dan non pemerintah. PBB menilai dan menetapkan bahwa VNR Indonesia tahun 2017 merupakan salah satu VNR terbaik sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang diundang dalam SDG Investment Fair 2019 [13].



Gambar 1.6 Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019 [13]

Meskipun pandemi Covid-19 berdampak pada pencapaian SDGs di Indonesia, namun beberapa tujuan dalam SDGs tetap menunjukkan kinerja pencapaian yang dikaitkan dengan program pemulihan ekonomi di Indonesia. VNR Indonesia tahun 2021 mengusung tema “*Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic for the achievement of the 2030 Agenda*” dan terfokus menjabarkan pencapaian tujuan 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, dan 17. Seluruh pencapaian tersebut menggambarkan reformasi kebijakan nasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mempercepat pencapaian SDGs pasca pandemi yang terbagi dalam empat strategi reformasi yaitu *Industry Recovery*, *Tourism And Investment Towards Green Economy*, *Disaster Resilience System*, *National Health System*, dan *Social Protection System* [14].

### **Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs**

Seluruh target dalam SDGs dapat tercapai dengan adanya perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan semua industri, termasuk juga perubahan-perubahan pada masyarakat. *United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UNDESA) menjelaskan perubahan-perubahan tersebut adalah dengan menerapkan model bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business model*) [15]. Model bisnis yang berkelanjutan ditunjukkan dari kemampuan perusahaan dalam melakukan adaptasi model bisnis yang baru, melakukan inovasi dan penggunaan teknologi baru, seperti teknologi ramah lingkungan, dan melakukan bisnis secara berbeda yaitu dengan lebih berkelanjutan dan lebih beretika. Perubahan-perubahan tersebut akan membuka peluang bisnis yang baru tidak hanya bagi perusahaan besar tetapi juga bagi UMKM. *Sustainable Development Commission* menyebutkan bahwa model bisnis berkelanjutan dapat membuka peluang di bidang ekonomi yang bernilai \$12 triliun dan mampu menciptakan 380 juta peluang kerja baru pada tahun 2030 dimana lebih dari 50% akan bersumber dari negara-negara berkembang [15].

*International Trade Centre* (ITC) menyebutkan bahwa kontribusi UMKM terhadap pencapaian SDGs didasari dari adanya nilai kompetitif/daya saing yang dimiliki UMKM. UMKM memiliki keterbatasan dari segi pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan stimulus bagi UMKM dalam bentuk pendanaan investasi di UMKM agar UMKM memiliki nilai kompetitif. ITC dalam analisisnya mengungkapkan bahwa investasi dan pendanaan bagi UMKM akan memberikan kontribusi tercapainya 60% dari 169 target SDGs [5].



Gambar 1.7 7 Kontribusi dan Peranan UMKM dalam Pencapaian SDGs [5]

UMKM berkontribusi dan memberi pengaruh pada pencapaian SDGs dilihat dari empat hal, yaitu pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, pengaruh terhadap praktek bisnis, pengaruh terhadap sektor-sektor tertentu, dan pengaruh terhadap ekonomi nasional [5]. Pengaruh UMKM terhadap pencapaian seluruh SDGs dapat dilihat pada Gambar 1.7 di atas. Dari semua dampak terhadap SDGs, UMKM memiliki kontribusi terbesar terhadap pencapaian SDGs khususnya target 8 “Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi” dan target 9 “Industri, inovasi dan infrastruktur.

UMKM dapat mempengaruhi pencapaian SDGs yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja karena UMKM dapat menjadi sumber pertumbuhan, inovasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Dalam ekonomi global, UMKM mampu menyerap 60%-70% tenaga kerja di tiap negara [5]. Bank Dunia (*World Bank*) dan *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa UMKM mampu membuka 4 dari 5 (90%) lapangan pekerjaan baru [16]. Kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja akan berkontribusi pada pencapaian SDGs untuk tujuan 1, 2, 3, dan 8. Dukungan pendanaan bagi UMKM akan memungkinkan UMKM menciptakan pekerjaan yang layak dan memberikan upah yang memadai sehingga secara signifikan akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. UMKM akan berkontribusi mendorong terciptanya kualitas hidup yang lebih baik, sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan [16].

UMKM juga akan memberikan pengaruh pada praktek bisnis yang terjadi di masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian SDGs untuk tujuan 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, dan 16. Pemilik UMKM dapat menjalankan usaha mereka dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Seperti membuka lapangan pekerjaan dengan mengedepankan kesetaraan gender, mengembangkan usaha yang hemat energi dan ramah lingkungan, serta melakukan produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab [5]. Selain sebagai penyedia jasa, UMKM juga dapat berperan menjadi pengguna yang memiliki pola konsumsi yang berkelanjutan dan peduli pada lingkungan. UMKM juga membantu mengurangi kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah perdesaan atau di daerah dimana terdapat kelompok-kelompok masyarakat miskin atau yang kurang beruntung secara sosial [16], seperti memberdayakan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik. Secara tidak langsung, UMKM akan menciptakan rasa damai dan keadilan di masyarakat.

UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan dengan menyediakan jasa profesional di bidang kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, sektor manufaktur, pertanian, serta energi. Keberadaan UMKM pada berbagai bidang usaha dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs tujuan 2, 3, 4, 6, 7, 9, dan 11. Dengan tidak ada pembatasan pada bidang usaha yang dijalankan UMKM, maka semakin besar kesempatan masyarakat dari berbagai golongan untuk mengakses dan mendapatkan pekerjaan layak.

UMKM memegang peranan penting dalam ekonomi nasional di tiap-tiap negara dan berkontribusi pada pencapaian SDGs untuk tujuan 1, 8, 9, 10, dan 17. Bank Dunia dan OECD mengungkapkan bahwa di negara-negara berkembang, UMKM formal memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja hampir 45% dan berkontribusi terhadap pencapaian *Gross Domestic Product* (GDP) hingga 33% [16]. UMKM harus dapat beroperasi dengan menciptakan nilai (*value-creating*) untuk mendorong terciptanya persaingan, inovasi, diversifikasi, dan bahkan perdagangan berskala internasional [5]. UMKM dapat berinovasi dengan membuka model bisnis berkelanjutan yang peduli pada lingkungan dan melibatkan masyarakat sekitar. Dengan mengembangkan usaha baik di perkotaan maupun di perdesaan, secara tidak langsung UMKM juga akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

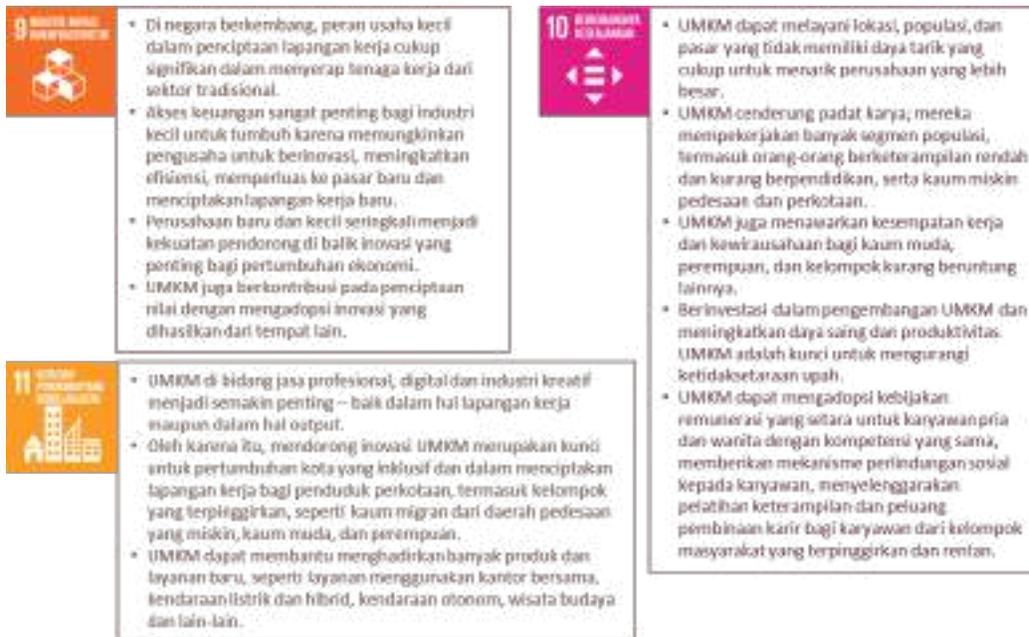
Peranan UMKM dalam mencapai masing-masing tujuan SDGs dijelaskan pada Gambar 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 dan 1.12 di bawah ini.



Gambar 1.8 Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs Untuk Tujuan 1, 2, 3, dan 4 [15]



Gambar 1.9 Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs Untuk Tujuan 5, 6, 7, dan 8 [15]



Gambar 1.10 Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs Untuk Tujuan 12, 13, dan 14 [15]



Gambar 1.11 Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs Untuk Tujuan 12, 13, dan 14 [15]



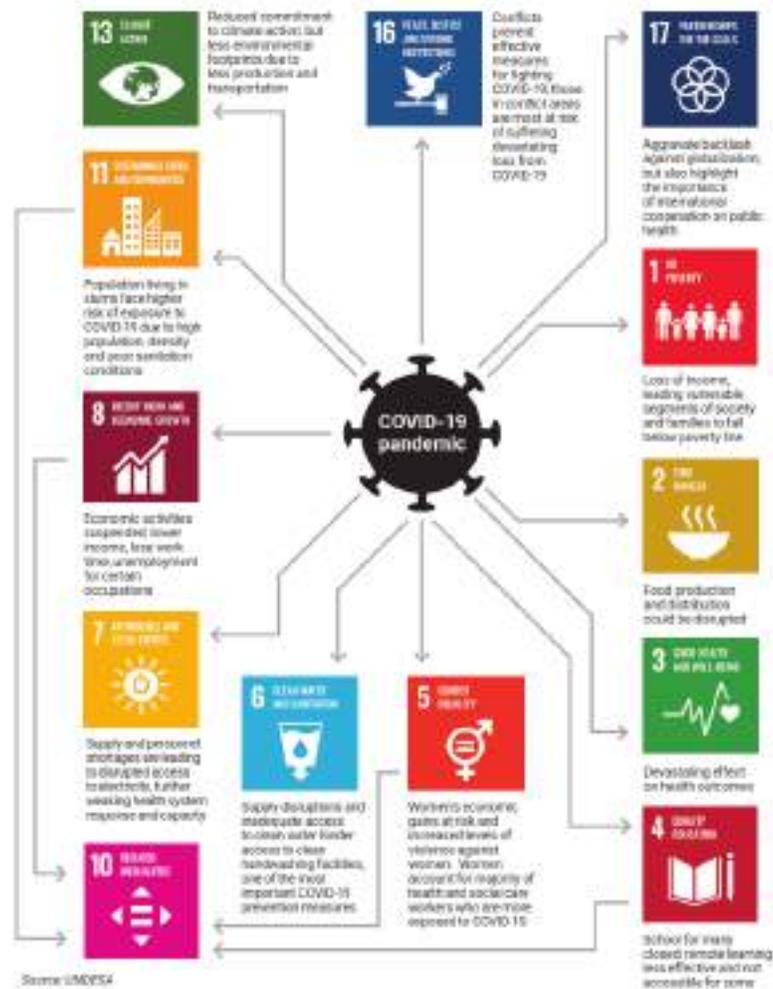
Gambar 1.12 11 12 Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs Untuk Tujuan 15, 16, dan 17 [15]

### Dampak Covid-19 Terhadap Pencapaian SDGs

Pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019 menimbulkan efek ganda pada kehidupan manusia di dunia. Krisis pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang tidak pernah muncul sebelumnya, yaitu krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial. Dunia menghadapi krisis kesehatan global akibat penyebaran virus Covid-19 yang mengancam kehidupan manusia. Krisis kesehatan ini menimbulkan krisis kemanusiaan. Pandemi Covid-19 seolah menyadarkan bagaimana rentannya kehidupan manusia di bumi.

Kehidupan sosial masyarakat dunia pun mengalami perubahan drastis karena harus melakukan *Physical Distancing* dan membatasi kegiatan di luar rumah. Pembatasan kegiatan menyabatkan perekonomian dunia mengalami keterpurukan sehingga menimbulkan krisis ekonomi global. Setiap unsur masyarakat dipaksa untuk bekerja dari rumah (*work from home*) dan kegiatan pendidikan dilakukan dari rumah (*school from home*). Kondisi ini mendorong era digitalisasi datang lebih cepat dan merubah pola hidup dan pola konsumsi masyarakat.

Pencapaian seluruh target dalam SDGs diharapkan terwujud pada tahun 2030. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya disrupsi dan keterlambatan pada pencapaian target-target tersebut. UN memaparkan ada 13 tujuan dalam SDGs yang terdampak pencapaiannya karena pandemi Covid-19 [18]. Dampak utamanya adalah terganggunya pencapaian tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, dan 17. Terganggunya pencapaian tujuan 4, 5, 8, dan 11 berdampak secara tidak langsung pada pencapaian tujuan 10. Dampak pandemi terhadap 13 tujuan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.13.



Gambar 1.13 Dampak Covid-19 Terhadap SDGs [18]

Sementara, Filho, et. al. dalam penelitiannya mengemukakan pandemi Covid-19 berdampak pada pencapaian tujuan-tujuan SDGs dimana dampak utamanya adalah terhadap tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 8,10, dan 16 [19]. Gambar 1.14 di bawah ini menjabarkan hasil penelitian Filho, et. al. terkait dampak Covid-19 terhadap SDGs.



Gambar 1.14 Dampak Covid-19 Terhadap SDGs [18]

Terpuruknya kegiatan perekonomian menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan dan bertambahnya tingkat kemiskinan di berbagai negara. Kondisi ini mengancam tercapainya tujuan 1 yaitu untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Sejak pandemi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2020 adalah sebesar 7,07%, mengalami kenaikan sebesar 1,84% dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,23%. Jumlah penduduk miskin di Indonesia juga bertambah sebanyak 27,55 juta orang pada September 2020, naik 1,13 juta orang dibandingkan dengan Maret 2020 dan naik 2,76 juta orang dibandingkan dengan September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, yaitu mengalami kenaikan 0,41% dibandingkan Maret 2020 dan naik 0,97% dibandingkan September 2019 [20]. Gambar 1.15 memperlihatkan perkembangan kemiskinan di Indonesia dimana telah mengalami penurunan terus menerus sebelum terjadi pandemi, namun meningkat kembali sejak pandemi terjadi.



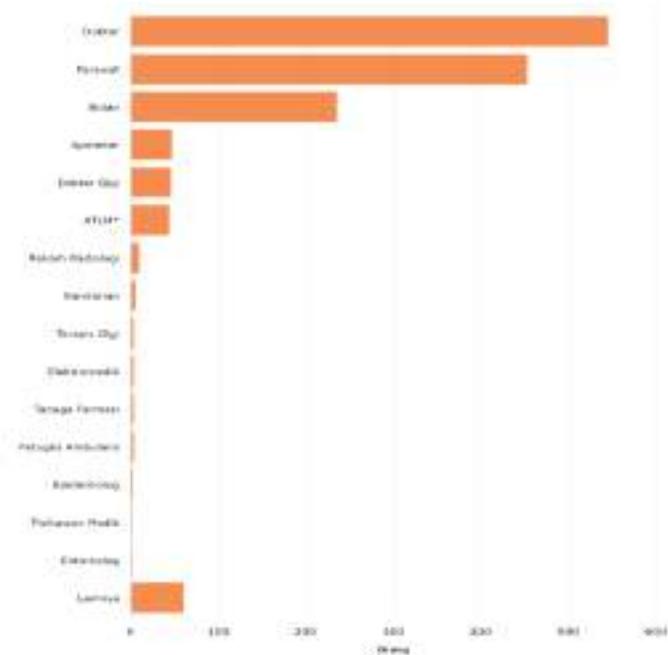
Gambar 1.15 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia  
Maret 2011 – September 2020 [20]

Kenaikan pada tingkat kemiskinan di Indonesia terjadi lebih parah di perkotaan dibandingkan di perdesaan, yaitu di perkotaan mengalami kenaikan 1,32% dan di perdesaan naik 0,60% dalam rentang waktu sejak September 2019 hingga September 2020 (lihat Gambar 1.16).



Gambar 1.16 Peningkatan Kemiskinan di Perkotaan dan di Perdesaan [20]

Pandemi menyebabkan adanya disrupsi pada pencapaian tujuan 2. Banyak negara melakukan *lockdown* dan pembatasan kegiatan sehingga terjadi keterlambatan pada produksi dan distribusi pangan. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, industri pengolahan di Indonesia mengalami penurunan kinerja. Hal ini dikarenakan masih tingginya ketergantungan dalam memperoleh bahan baku dari Cina yang mana negara tersebut menjadi pusat wabah pandemi. Rantai pasokan global terganggu termasuk rantai pasokan di Indonesia. Banyak industri pengolahan yang mengalami keterlambatan produksi bahkan mengalami penipisan pasokan bahan baku [21]. Bertambahnya pengangguran menyebabkan semakin banyak masyarakat yang mengalami penurunan dan kehilangan pendapatan sehingga berkurangnya akses untuk mendapatkan pangan dan gizi yang baik.



Gambar 1.17 Jumlah Tenaga Kesehatan di Indonesia yang Meninggal Karena Covid-19 per 21 Juli 2021 [22]

Disrupsi juga terjadi pada tujuan 3. Cepatnya penyebaran virus Covid-19 menimbulkan efek buruk pada kesehatan masyarakat dunia. Mereka yang terdampak dan yang tidak terdampak virus harus melakukan isolasi untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Fasilitas kesehatan di berbagai negara mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*) dengan jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang terbatas, bahkan mengalami kekurangan karena banyak dari dokter dan tenaga kesehatan yang harus melakukan isolasi akibat terdampak virus bahkan banyak yang meninggal. Sampai dengan 21 Juli 2021 tercatat sebanyak 1.459 tenaga kesehatan di Indonesia meninggal karena Covid-19 [22] (lihat Gambar 1.34). Bekerja dan belajar dari rumah juga menimbulkan efek buruk pada kesehatan mental masyarakat.

Tujuan 4 untuk mencapai pendidikan yang berkualitas justru mengalami penurunan selama pandemi. Pandemi menyebabkan banyak sekolah dari jenjang paling rendah sampai tingkat sekolah tinggi/universitas harus tutup dan melakukan pembelajaran *online*/jarak jauh. Pembelajaran *online* menjadi tidak efektif karena ketidaksiapan baik tenaga pendidik maupun peserta didik. Keterbatasan pada akses internet juga menyebabkan pembelajaran tidak dapat diakses oleh semua peserta didik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan 50% peserta didik di luar Jawa tidak terlayani pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena ketiadaan sarana teknologi (tidak memiliki laptop, smartphone, kuota internet) hingga jaringan internet yang tidak stabil, serta adanya kesenjangan dalam pelaksanaan PJJ dimana peserta didik dari kelas menengah ke atas cenderung lebih siap dan lebih mampu untuk mengikuti proses PJJ [23].

Selama pandemi, masyarakat perempuan juga lebih rentan mengalami kekerasan karena harus mendampingi suami yang mungkin mengalami pemutusan kerja. Kaum perempuan juga lebih rentan mengalami tekanan karena pengaruh bekerja dari rumah dan di saat yang bersamaan harus mendampingi anak-anaknya sekolah dari rumah. Tenaga medis yang banyak didominasi kaum perempuan juga menyebabkan banyak kaum perempuan harus tinggal jauh dari keluarga karena tuntutan pekerjaan dan isolasi selama pandemi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya ketidakadilan bagi kaum perempuan dan terancamnya pencapaian tujuan 5.

Selain itu, *physical distancing* dan pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah juga membatasi akses pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di beberapa daerah tertentu sehingga berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat (tujuan 6). Begitu pula dengan adanya keterbatasan akses pelayanan pada fasilitas listrik dan energi (tujuan 7). Keterbatasan tersebut karena menurunnya ketersediaan tenaga kerja atau personil yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB di Indonesia pada awal pandemi hingga diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), banyak perusahaan yang terpaksa menghentikan kegiatannya bahkan menutup usahanya. Akibatnya banyak yang mengalami penurunan pendapatan, sedikitnya waktu kerja, dan bahkan merumahkan dan pemutusan kerja pada karyawan (tujuan 8). Keberlanjutan pembangunan di beberapa desa dan kota juga mengalami perlambatan karena risiko penularan dari penyebaran virus Covid-19 (tujuan 11). Disrupsi pada tujuan 4, 5, 8, dan 11 secara tidak langsung menimbulkan disrupsi pada pencapaian tujuan 10 untuk mengurangi kesenjangan.

Dengan terjadinya pandemi juga menimbulkan disrupsi pada komitmen untuk

mengurangi dampak perubahan iklim karena tiap negara di dunia fokusnya beralih untuk menetapkan kebijakan dan mengambil tindakan agar dapat keluar dari krisis pandemic (tujuan 13). Namun, pandemi membawa dampak positif terhadap kondisi lingkungan. Pembatasan kegiatan diluar rumah memberikan dampak positif terhadap lingkungan yaitu berkurangnya tingkat polusi (lihat Gambar 1.35), lingkungan mulai asri kembali, lubang ozon mulai tertutup kembali, dan memberikan dampak positif pada kehidupan manusia di bumi yaitu membuka tren baru dan meningkatkan solidaritas kemanusiaan antar negara [24].

Negara-negara yang sedang mengalami konflik akan memberikan dampak menurunkan efektivitas penanggulangan pandemi. Oleh karena itu tujuan 17 untuk mewujudkan perdamaian semakin sulit untuk dicapai jika konflik masih terjadi.



Gambar 1.18 Infografis Penurunan Polusi Udara di Dunia Saat Pandemi [25]

### Peran UMKM Dalam Mempercepat Pencapaian SDGs Pasca Covid-19

Populasi UMKM di Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 65.465.497 UMKM dari sebelumnya 64.194.057 UMKM (lihat Tabel 1.1). Jumlah tersebut mencapai 99,99% dari populasi industri di Indonesia [4]. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi sebanyak 119.562.843 orang, namun dari % mengalami penurunan menjadi 96,92% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 97%. Tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap tingkat PDB mencapai 9.580.762,7 milyar rupiah atau turun dari 61,07% di tahun 2018 menjadi 60,51% di tahun 2019 [4]. Meskipun mengalami sedikit penurunan persentase, namun nilai-nilai tersebut menunjukkan

masih besarnya peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia.

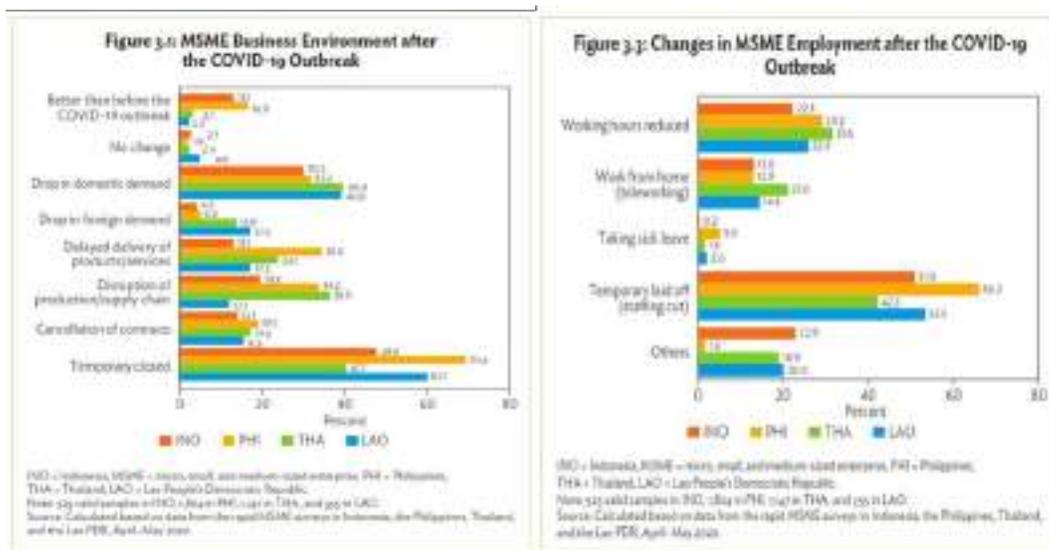
INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		PERKEMBANGAN	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
<b>Unit usaha</b>	Unit	64.199.606		65.471.134		1.271.528	1,98
A. UMKM	Unit	64.194.057	99,99	65.465.497	99,99	1.271.440	1,98
Usaha Mikro (UM)	Unit	63.350.222	98,68	64.601.352	98,67	1.251.130	1,97
Usaha Kecil (UK)	Unit	783.132	1,22	798.679	1,22	15.547	1,99
Usaha Menengah (UM)	Unit	60.702	0,09	65.465	0,10	4.763	7,85
B. Usaha Besar (UB)	Unit	5.550	0,01	5.637	0,01	87	1,58
<b>Tenaga Kerja</b>	Orang	120.598.138		123.368.672		2.770.534	2,30
A. UMKM	Orang	116.978.631	97,00	119.562.843	96,92	2.584.212	2,21
Usaha Mikro (UM)	Orang	107.376.540	89,04	109.842.384	89,04	2.465.844	2,30
Usaha Kecil (UK)	Orang	5.831.256	4,84	5.930.317	4,81	99.061	1,70
Usaha Menengah (UM)	Orang	3.770.835	3,13	3.790.142	3,07	19.307	0,51
B. Usaha Besar (UB)	Orang	3.619.507	3,00	3.805.829	3,08	186.322	5,15
<b>PDB</b>	Rp Milyar	14.837.756,0		15.832.535,4		997.779,4	6,70
A. UMKM	Rp Milyar	9.062.581,3	61,07	9.580.762,7	60,51	518.181,3	5,72
Usaha Mikro (UM)	Rp Milyar	5.605.334,9	37,77	5.913.246,7	37,35	307.911,8	5,49
Usaha Kecil (UK)	Rp Milyar	1.423.885,1	9,60	1.508.970,1	9,53	85.085,0	5,98
Usaha Menengah (UM)	Rp Milyar	2.033.361,3	13,70	2.158.545,8	13,63	125.184,5	6,16
B. Usaha Besar (UB)	Rp Milyar	5.776.174,7	38,93	6.251.772,7	39,49	475.598,1	8,23

Tabel 1.1 Data UMKM tahun 2018-2019 [4]

Selama pandemi, UMKM khususnya di negara berkembang berjuang untuk dapat tetap bertahan. Pada awal pandemi Covid-19, *Asian Development Bank* (ADB) melakukan penelitian di kawasan Asia dan Pacific dan menemukan beberapa dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan operasional UMKM di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Laos.

Dampak pertama adalah UMKM mengalami perubahan pada lingkungan bisnis dan operasionalnya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah menurunnya jumlah permintaan, terjadinya penundaan dan disrupsi pada rantai produksi, tertundanya pengiriman produk kepada pelanggan, pembatalan pesanan, dan menutup sementara usaha mereka. Namun, ada pula UMKM yang tidak

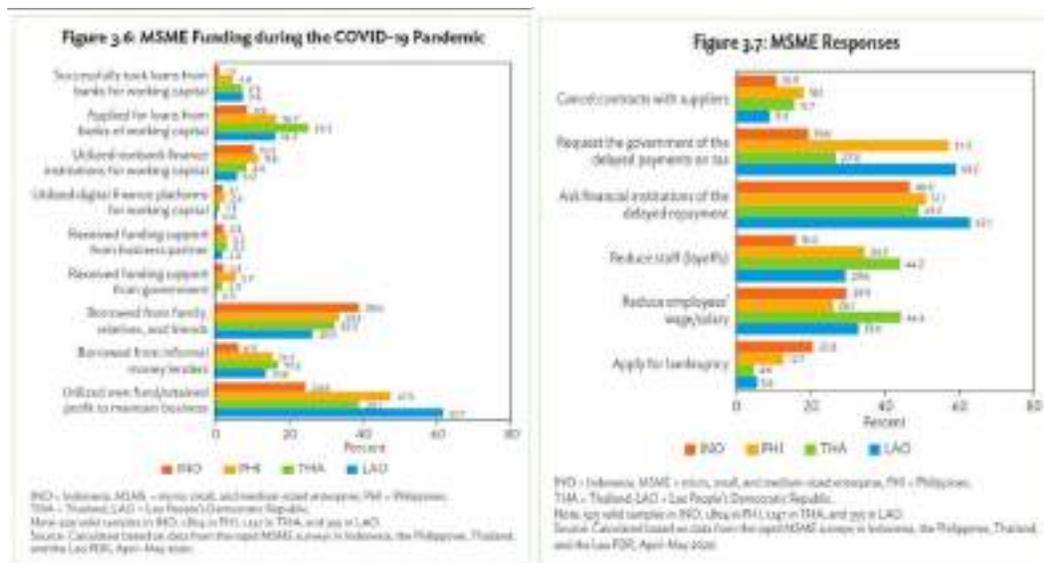
mengalami perubahan apapun bahkan mengalami perubahan operasional yang lebih baik. Dampak berikutnya adalah terjadinya perubahan pada pola *employment* atau pekerjaan UMKM. Adanya pembatasan kegiatan mendorong UMKM melakukan sejumlah perubahan pada pekerjaan yang dilakukan seperti mengurangi jumlah jam kerja, meminta karyawan bekerja dari rumah, memberikan cuti, dan memberhentikan sejumlah karyawan. Gambar 1.19 menunjukkan dampak perubahan operasional dan perubahan pola pekerjaan yang terjadi pada UMKM.



Gambar 1.19 Dampak Covid-19 Terhadap Lingkungan Bisnis dan Pekerjaan UMKM [26]

Dengan menutup sementara kegiatannya, UMKM kesulitan memperoleh pendapatan dan pendanaan. Dampak ketiga dari pandemi ini memaksa UMKM mencari berbagai alternatif sumber pendanaan agar dapat menutup sejumlah biaya tetap di UMKM. Alternatif sumber pendanaan paling utama adalah dengan memanfaatkan cadangan laba/laba di tahan yang dimiliki UMKM, meminjam dari

keluarga, kerabat, dan teman, meminjam dari lembaga keuangan, serta menerima bantuan baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Dengan berbagai kesulitan-kesulitan serta risiko yang timbul, UMKM merespon kondisi yang ada dengan membatalkan sejumlah kontrak/transaksi, meminta keringanan pembayaran hutang dan pajak, melakukan pengurangan sejumlah tenaga kerja, mengurangi pemerian upah, dan yang terburuk adalah mengajukan kebangkrutan dan terpaksa menutup usaha mereka (Gambar 1.20).



Gambar 1.20 Sumber Pendanaan dan Respon UMKM Selama Pandemi [26]

Untuk tetap dapat bertahan selama masa krisis dan mempertahankan nilai daya saing UMKM, ITC menyampaikan 15 poin rencana aksi yang dapat dilakukan UMKM, Organisasi Pendukung, dan Pemerintah (Gambar 1.21). Dengan berbagai alternatif dan dukungan pemulihan untuk membangkitkan kembali UMKM, dapat dilakukan sejumlah adaptasi sebagai bagian dari perubahan. Agar mampu bertahan melewati krisis yang terjadi UMKM harus melakukan adaptasi

pada proses bisnis yang dilakukannya. Pemanfaatan platform digital menjadi pilihan utama dalam proses adaptasi kegiatan bisnisnya karena kondisi krisis mengharuskan setiap kegiatan bisnis mengurangi interaksi secara langsung. Selain itu, menjalankan proses bisnis yang berkelanjutan juga dapat menjadi alternatif bagi UMKM. Selama masa krisis, pendapatan UMKM mengalami penurunan. Sehingga, dukungan sumber pendanaan dari pemerintah dan organisasi non pemerintah akan membantu UMKM untuk dapat bertahan menghadapi krisis.



Gambar 1.21 Rencana Aksi bagi UMKM, Organisasi Pendukung, dan Pemerintah [27]

Untuk mengatasi krisis ekonomi selama pandemi, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dituangkan dalam PERPU No. 1 Tahun 2020. Dalam program tersebut, berbagai stimulus keuangan diberikan untuk semua sektor tidak terkecuali UMKM. Hingga 23 Desember 2020, realisasi program PEN mencapai Rp502,71 Triliun atau 72,3% dari total yang dianggarkan sebesar Rp695,2 Triliun. Realisasi bantuan untuk

UMKM mencapai 92,8% atau Rp107,93 Triliun dari total alokasi anggaran UMKM sebesar Rp116,31 Triliun. Realisasi program untuk UMKM mencapai 100% Bantuan Produktif Pelaku Usaha Mikro, Restrukturisasi Kredit UMKM, dan Pembiayaan Investasi Melalui LPDB KUMKM. Sementara, realisasi program UMKM yang belum mencapai 100% adalah untuk Penjaminan Kredit UMKM yang mencapai 99,52%, PPh Final UMKM sebesar 96,10%, dan Subsidi Bunga 63% [28]. Pada Tahun 2021, pemerintah kembali menunjukkan komitmen dukungan kepada UMKM dengan memberikan stimulus keuangan sebesar Rp 48,8 Triliun [29].

Membangkitkan kembali potensi UMKM sebagai roda penggerak perekonomian di Indonesia akan membantu percepatan pencapaian SDGs. UMKM dapat menjadi pendorong percepatan pencapaian SDGs dengan menerapkan model bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business model*). UNDESA mendefinisikan model bisnis yang berkelanjutan ditunjukkan dari kemampuan perusahaan dalam melakukan adaptasi model bisnis yang baru, melakukan inovasi dan penggunaan teknologi baru, seperti teknologi ramah lingkungan, dan melakukan bisnis secara berbeda yaitu dengan lebih berkelanjutan dan lebih beretika [15]. Berikut ini dipaparkan beberapa strategi yang dapat dilakukan UMKM untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan mendorong percepatan pencapaian tujuan-tujuan SDGs.

#### 1) Digitalisasi UMKM

A. A. Widayasanti, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas dalam salah satu webinar yang diadakan SMESCO menegaskan perlunya adaptasi UMKM Indonesia dalam menghadapi perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat akibat pandemi Covid-19 [30]. Adaptasi yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan teknologi (digitalisasi) dari segi

pemasaran, distribusi, produksi, hingga sistem pembayaran. Adanya pembatasan sosial mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Pada awal masa pandemi, sebanyak 84,20% Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 82,29% Usaha Menengah Besar (UMB) mengalami penurunan pendapatan. Sebanyak 8 dari 10 perusahaan baik UMK dan UMB mengalami penurunan permintaan karena pelanggan mereka juga terdampak pandemi [31]. Sampai dengan triwulan III tahun 2020, terdapat 67,77% UMK dan 57,29% UMB yang masih mengalami penurunan pendapatan [32].

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan era digitalisasi datang lebih cepat dan mendorong UMKM beralih dari cara pemasaran konvensional menjadi pemasaran via *online*. Hasil survei BPS selama pandemi menemukan bahwa 47,75% dari perusahaan di Indonesia telah memanfaatkan pemasaran via *online*, sebanyak 5,76% perusahaan baru memanfaatkan internet dan TI untuk melakukan pemasaran saat pandemi, dan sisanya 46,5% perusahaan tidak/belum menggunakan pemasaran secara *online*. Dalam hasil surveinya, BPS menemukan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan pemasaran *online* mempunyai pendapatan 1,14 kali lebih tinggi dibanding perusahaan yang baru *online* setelah pandemi terjadi [31]. Hal ini menunjukkan digitalisasi berperan membantu perusahaan termasuk UMKM untuk bertahan melewati krisis yang terjadi.

Riset dari *International Data Corporation* (IDC) dan Cisco menunjukkan, digitalisasi UMKM dapat meningkatkan pendapatan negara. Setidaknya Produk Domestik Bruto (PDB) bisa bertambah US\$ 160 miliar-US\$ 164 miliar (Rp 2.372,6 triliun-Rp 2.432 triliun) pada 2024 [33]. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato menyebutkan bahwa jika potensi digitalisasi Indonesia dapat dimaksimalkan maka diproyeksikan akan memberikan nilai ekonomi digital mencapai Rp 125 miliar di tahun 2025

[34].

Pemerintah melalui Kementerian UKM dan Koperasi telah meluncurkan program-program bagi UMKM untuk beralih ke platform digital. Diantaranya adalah mempermudah akses UMKM untuk masuk dalam pasar digital melalui Program UMKM Hub dan Bangga Buatan Indonesia. Kemenkop dan UMKM mengakselerasi Koperasi dan UMKM Go Digital melalui platform digital Edukukm.id sebagai sarana pembelajaran daring dan sarana pendampingan. Selain itu, pemerintah mendorong *startup digital* melalui Program Pahlawan Digital UMKM untuk membantu Digitalisasi UMKM bekerja sama dengan *startup digital* yang sudah berjalan. Kemudian juga ada pendampingan transformasi digital bersama SMESCO melalui program Kakak Asuh UMKM, penyediaan platform *e-brochure*, dan program daring SMESCO Sparc. Selama tahun 2020 tercatat sudah 8 juta atau sekitar 13% UMKM yang telah masuk (*onboarding*) dalam platform *e-commerce*. Jumlah ini mengalami kenaikan di tahun 2021, yaitu per Juni 2021 UMKM yang masuk dalam ekosistem digital telah mencapai 19% atau sebanyak 12 juta UMKM [35].

Adanya pemahaman pada kebutuhan pasar, akan membantu UMKM dalam melakukan inovasi digitalisasi produk dan pemasarannya [36]. Digitalisasi membantu UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas pasar, dapat menjalankan proses bisnis dengan lebih efisien, dan tidak membutuhkan pembiayaan sebesar proses bisnis konvensional. Dengan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi, UMKM berkontribusi dalam menjalankan bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan.

2) Kolaborasi dalam *supply chain* (rantai pasokan)

UMKM dapat melakukan kolaborasi dengan mitra dalam *supply chain*. Dengan kolaborasi, UMKM mendapat menjamin ketersediaan bahan baku atau sebaliknya UMKM mendapat jaminan penjualan/pelanggan sehingga UMKM tidak hanya menjadi penjual tetapi juga dapat menjadi produsen [30]. Apabila UMKM melakukan bisnis di bidang makanan, UMKM dapat melakukan kolaborasi dan membangun rantai pasokan dengan petani atau produsen lokal. Kolaborasi juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan mitra yang mempromosikan penggunaan kemasan ramah lingkungan.

Memberdayakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan untuk menjadi *reseller* atau menjadi kurir dapat membantu masyarakat kembali mendapatkan pekerjaan dan tingkat kehidupan layak. UMKM pun dapat memperluas jaringan pasar dan meningkatkan produktivitasnya. Disini akan terjadi simbiosis mutualisme bagi UMKM dan masyarakat terdampak Covid-19 [36].

3) Inovasi dan diversifikasi

Selama pandemi, UMKM juga dituntut untuk melakukan inovasi dan modifikasi produk yang sesuai kebutuhan pasar saat ini serta yang ramah lingkungan untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs. Selama masa pandemi dan masuk *new normal*, kebutuhan masyarakat mengalami perubahan dan terjadi perubahan tren pada pola konsumsi masyarakat. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM sebagai peluang untuk melakukan inovasi dan menciptakan produk baru. Seperti kebutuhan akan masker, UMKM dapat melakukan inovasi dengan memproduksi masker untuk anak dan dewasa. Contoh lainnya adalah melakukan inovasi kebutuhan akan *hand*

*sanitizer* seperti memproduksi *hand sanitizer* dengan bahan baku yang alami. Diversifikasi produk dan jasa juga menjadi salah satu cara adaptasi bagi UMKM untuk bertahan di tengah pandemi. Dengan diversifikasi, UMKM dapat menawarkan produk dan jasa dengan keunikan/kekhasan yang tidak dimiliki pesaing sehingga konsumen bersedia mencari produk dan jasa yang ditawarkan UMKM [37]. Namun, sebelum melakukan diversifikasi, perusahaan harus menganalisis aspek keuangan dan non keuangan yang ada di perusahaan. Aspek non keuangan mencakup analisis terhadap perilaku konsumen, potensi pasar perusahaan, pesaing, operasional, dan personil yang ada di perusahaan, sementara aspek keuangan mencakup analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan [38].

Hasil survei BPS terhadap perusahaan yang memanfaatkan internet dan TI, ditemukan sebanyak 27,45% perusahaan telah melakukan diversifikasi, 9,9% melanjutkan usaha di bidang yang berbeda, dan 62,64% tetap melakukan usaha di bidang yang sama. Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa 45,19% dari pelaku usaha yang melakukan diversifikasi usaha memiliki optimisme bahwa usaha mereka akan mampu bertahan lebih dari 3 bulan. Sementara sebanyak 43,98% percaya perusahaan mereka hanya mampu bertahan antara 1-3 bulan dan 10,83% hanya mampu bertahan kurang dari 1 bulan [31].

4) *Circular Economy* (ekonomi sirkular) sebagai bisnis model

Perekonomian dunia telah banyak mengalami perubahan besar mulai dari penerapan ekonomi linear, ekonomi daur ulang, dan kemudian berkembang menjadi ekonomi sirkular. Konsep ekonomi linear mengusung konsep *take-make-consume-waste*. Konsep ekonomi linear dipandang sebagai konsep ekonomi yang tidak berpihak pada keberlangsungan lingkungan. Dalam

konsep ekonomi linear kegiatan produksi dilakukan dengan mengambil sumber daya alam secara terus menerus dan ketika hasil akhir selesai dikonsumsi akan menghasilkan sampah yang merusak lingkungan, seperti sampah plastik, sampah bahan kimia dan beracun, serta tingginya polusi sehingga mengganggu keseimbangan keanekaragaman hayati. Konsep ekonomi kemudian berkembang menjadi ekonomi daur ulang. Konsep ekonomi daur ulang menjadi alternatif perbaikan dari ekonomi linear. Sebelum menjadi sampah, sisa produk yang telah dikonsumsi dipilah dan dipisahkan untuk didaur ulang dan dimanfaatkan kembali dalam proses produksi. Namun, konsep ekonomi daur ulang pada akhirnya tetap masih menghasilkan sampah.

Konsep ekonomi sirkular diperkenalkan oleh Ellen Macarthur Foundation sejak 2009, tetapi konsep ini baru mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2018-2019 [39]. Ekonomi sirkular merupakan pendekatan usaha dimana sumber daya diolah dan dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai dan memiliki masa konsumsi yang paling maksimal, kemudian diproses kembali di akhir masa pemakaiannya sehingga membentuk suatu proses ekonomi yang berkelanjutan [40]. Konsep ekonomi sirkular merupakan konsep ekonomi terbaru yang mulai diterapkan sebagai bagian untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi sirkular memiliki prinsip 5R, yang mencakup *reduce* yang berarti mengurangi pengambilan sumber daya dari alam, *reuse* yaitu mengoptimalkan pemakaian material yang dapat digunakan kembali, *recycle* yaitu melakukan daur ulang atas sisa pemakaian produk, *recovery* yaitu dipulihkan dan digunakan kembali, dan *repair* yaitu memperbaiki untuk dapat digunakan kembali [41].

UMKM dapat memanfaatkan peluang pada masa pandemi ini dengan melakukan kolaborasi masuk dalam proses bisnis yang mengarah pada

ekonomi sirkular. Contohnya adalah seperti yang dilakukan Garda Pangan. Garda Pangan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai bank makanan dengan menerima makanan lebih dari restoran, katering, bakery, hotel, lahan pertanian, dan pihak manapun yang kemudian melalui serangkaian uji kelayakan makanan untuk disalurkan pada masyarakat pra-sejahtera [42]. UMKM dapat berkolaborasi dengan menjadi rekanan yang mendonasi makanan, dana, merekomendasikan golongan masyarakat pra-sejahtera, atau menjadi relawan. Dengan masuk pada model bisnis ekonomi sirkular, UMKM dapat turut berperan serta mempercepat pencapaian tujuan-tujuan SDGs.

5) Dukungan pendanaan

Tujuan dari SDGs adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menyeluruh melalui penciptaan kesempatan kerja dan kehidupan layak untuk semua. UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi roda penggerak pemulihan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pencapaian target-target SDGs di Indonesia. Burger et al. (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan empat tantangan UMKM Indonesia, yaitu adanya hambatan/akses layanan keuangan, akses untuk mendapatkan bahan mentah, akses ke pasar dan permintaan, serta permasalahan pada kualitas tenaga kerja dan sumber daya manusia. Dalam Peta Jalan SDGs Indonesia, disebutkan bahwa UMKM memiliki potensi dalam mengakses layanan keuangan di tahun 2030 antara hingga 41,60% [43]. Dukungan akses pendanaan akan membantu UMKM membangun nilai kompetitif yang dimilikinya. UMKM yang memiliki nilai kompetitif secara tidak langsung akan mendorong percepatan pencapaian SDGs [5]. Selain kemudahan dalam akses keuangan, selama masa pandemi UMKM dapat memanfaatkan bantuan pendanaan dari pemerintah yang disediakan dalam program PEN.

6) *Crowdfunding* sebagai alternatif pendanaan UMKM

*Crowdfunding* merupakan alternatif bentuk pendanaan untuk membantu membiayai pengembangan usaha khususnya bagi yang baru berjalan/para pemula. *Crowdfunding* dilakukan melalui platform digital dengan mengumpulkan sejumlah dana dari banyak orang sebagai penanam dana [44]. Bagi pelaku usaha, *crowdfunding* menjadi alternatif sumber pendanaan yang dapat diakses dengan mudah dan dapat menjadi tempat untuk mempromosikan konsep bisnis yang akan dijalankannya dengan prosedur yang lebih mudah dari pembiayaan tradisional [45].

*Crowdfunding* dapat berbentuk *donation*, *reward*, *pre-purchase*, *lending (peer-to peer)*, dan *equity* [46]. *Donation* atau sumbangan berarti kontributor tidak mengharapkan adanya pengembalian dari pelaku usaha karena dana yang diberikan adalah untuk amal dan membantu kegiatan sosial. Dalam *reward* pelaku usaha akan memberikan pengembalian kepada pemberi dana dalam bentuk tertentu yang disepakati, sementara *pre-purchase* pemberi dana mendapatkan pengembalian dalam bentuk produk yang dikembangkan pelaku usaha. *Peer-to peer* merupakan pinjaman, maka pemberi dana akan memperoleh pendapatan dari pemberian pinjaman tersebut, sementara pada *equity* pemberi dana akan mendapatkan keuntungan karena sudah memberikan penyertaan modal kepada pelaku usaha.

Untuk mendapatkan pendanaan melalui *crowdfunding*, pelaku usaha dan UMKM harus menjajaki terlebih dahulu apakah platform tersebut dapat dipercaya atau tidak. Di Indonesia, ada beberapa platform *crowdfunding* yang telah terbukti aman dan terpercaya, yaitu Kolase.com, Akseleran, Kitabisa.com, Ayopeduli.id, dan Gandeng Tangan [47]. Dengan melihat pada

karakteristiknya, *crowdfunding* dapat menjadi solusi masalah keuangan bagi UMKM khususnya di masa pandemi ini. Melalui *crowdfunding*, UMKM dapat memperoleh tambahan dana dengan mudah, cepat, dan juga murah. Sementara, bagi penanam dana, *crowdfunding* dapat menjadi wadah melakukan diversifikasi investasi serta sebagai wadah untuk melakukan kegiatan kemanusiaan.

#### 7) Menerapkan Protokol Kesehatan

Dari hasil survei BPS pada triwulan III tahun 2020, sebanyak 60,47% UMK sudah menerapkan protokol kesehatan 3M secara menyeluruh, 24,55% sudah menerapkan sebagian protokol kesehatan 3M, dan 14,98% belum menerapkan seluruhnya. Sebanyak 85,22% UMB sudah menerapkan protokol kesehatan 3M secara menyeluruh, 10,09% menerapkan sebagian, dan 4,69% belum menerapkan seluruh protokol kesehatan 3M. Pada semua perusahaan yang sudah menerapkan sebagian protokol 3M, sebanyak 65,71% belum menerapkan jaga jarak dan menghindari kerumunan, 32,71% belum menerapkan pemakaian masker, dan 28,64% belum menerapkan protokol mencuci tangan [32].

Fasilitas kesehatan yang paling banyak disediakan oleh perusahaan adalah masker yang mencapai 96,74% perusahaan telah menyediakan fasilitas masker bagi karyawan. 28,90% perusahaan telah menyediakan suplemen/vitamin, 25,02% menyediakan *face shield*, dan 5,40% menyediakan APD. Sementara penyediaan fasilitas *rapid test* untuk karyawan baru dilakukan oleh 6,98% perusahaan, dan *swab/PCR test* baru disediakan oleh 0,02% perusahaan [32].

Meskipun UMKM dapat mengalihkan proses bisnisnya secara digital, namun

ada sejumlah UMKM yang tetap perlu melakukan proses bisnisnya secara langsung. Penerapan standar keamanan produk dan protokol kesehatan menjadi pilihan utama tidak hanya bagi UMKM tapi juga pelaku usaha di sektor yang lain. Sejumlah adaptasi kebiasaan baru dalam menjaga kebersihan akan membantu pelaku UMKM dan masyarakat tetap sehat.

Adaptasi kebiasaan baru yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan membersihkan atau melakukan disinfeksi pada tempat usaha secara berkala, mewajibkan penggunaan masker bagi pelaku UMKM dan pelanggan, menyediakan sarana cuci tangan dan menyediakan *hand sanitizer*, menggunakan sarung tangan apabila proses bisnis UMKM berkaitan dengan makanan, memastikan pelaku UMKM dan masyarakat menjaga jarak dengan memberlakukan antrian pada saat transaksi, serta memanfaatkan pembayaran non-tunai untuk mengurangi kontak fisik. Terjaganya kesehatan, para pelaku UMKM dan masyarakat dapat tetap beraktivitas dan produktif yang berarti ikut mendorong percepatan pencapaian SDGs.

### 1.3 Penutup

Terpuruknya kondisi perekonomian selama pandemi Covid-19 juga berdampak pada UMKM. Untuk menyelamatkan kondisi perekonomian, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang salah satunya adalah program pemulihan untuk UMKM. Peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional sangat besar peranannya mengingat populasi UMKM di Indonesia yang mencapai 99,99% dari seluruh industri di Indonesia.

UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dan melakukan strategi-strategi pemulihan. Menjalankan model bisnis berkelanjutan menjadi alternatif utama yang dapat dilakukan UMKM. Beberapa strategi yang dapat dilakukan UMKM untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di Indonesia adalah dengan melakukan digitalisasi dalam proses bisnisnya, melakukan kolaborasi dengan masuk dalam *supply chain*, melakukan inovasi dan diversifikasi, masuk dalam proses bisnis yang menerapkan ekonomi sirkular, mengakses dukungan pendanaan dari pemerintah ataupun alternatif pendanaan seperti *crowdfunding*, serta menerapkan protokol kesehatan.

Dengan mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia usaha selama dan setelah pandemi Covid-19 diharapkan UMKM dapat bangkit kembali seperti sebelum terjadinya pandemi, bahkan menjadi lebih maju. Dengan pulihnya perekonomian nasional akan membawa dampak positif pada pencapaian target-target SDGs. Pencapaian target-target dalam SDGs dapat tetap dilaksanakan searah dengan Peta Jalan (*Road Map*) yang telah direncanakan yang mengarah pada “*Build Back Better*”.

## Referensi

- [1] World Commission on Environment and Development, 1987, *Our Common Future* (Oxford:Oxford University Press)
- [2] Elkington, J., 1998, *Cannibals with forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Businesses* (Gabriola Island, BC Canada: New Society Publishers)
- [3] <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- [4] Kementerian Koperasi dan UKM, 2020, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019* (Kemenkop dan UKM).
- [5] International Trade Centre (ITC), 2019, *SME Competitiveness Outlook 2019: Big Money for Small Business – Financing the Sustainable Development Goals* (ITC: Geneva). [6] <https://www.icctf.or.id/sdgs/>
- [7] Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial Edisi II* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [8] Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Ekonomi Edisi II* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [9] Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan Edisi II* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [10] Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola Edisi II* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [11] Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana*

*Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* (Kementerian PPN/Bappenas).

- [12] <https://www.gatra.com/detail/news/485592/ekonomi/peringkat-indeks-sdgs-2020-di-indonesia-meningkat>
- [13] Kementerian PPN/Bappenas, 2019, *Ringkasan Eksekutif Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [14] Kementerian PPN/Bappenas, 2021, *Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the Covid-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [15] United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2020, *Micro-, Small, and Medium-sized Enterprises (MSMEs) and their role in achieving the Sustainable Development Goals* (UNDESA).
- [16] <https://oecd-development-matters.org/2019/04/23/smes-and-sdgs-challenges-and-opportunities/>
- [17] <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f32ae9109931/pelaku-umkm-perempuan-terus-bertambah-butuh-perhatian-pemerintah>
- [18] United Nations, 2020, *Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19* (United Nations).
- [19] Filho, W. L., Brandli, L., Salvia, A., Bacchus, L. M. R., & Platje, J., 2020, COVID-19 and the UN Sustainable Development Goals: Threat to Solidarity or an Opportunity?. *Sustainability* 2020, 12, 5343. doi:10.3390/su12135343.
- [20] Badan Pusat Statistik, 2021, *Berita Resmi Statistik 15 Februari 2021* (Badan Pusat Statistik).
- [21] <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200227113256-17-140811/terparah-di-bei-kapitalisasi-sektor-manufaktur-raib-rp-309-t>
- [22] <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/sebanyak-1459-tenaga-kesehatan-meninggal-akibat-covid-19>

- [23] <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/08/11/akses-pendidikan-di-masa-pandemi- masih-timpang-apa-langkah-selanjutnya>
- [24] <https://www.pantau.com/topic/visual/infografis-5-dampak-positif-covid-19-bagi-lingkungan-dan-kehidupan-di-bumi>
- [25] <https://www.liputan6.com/global/read/4217476/headline-polusi-udara-sejumlah-negara- turun-saat-pandemi-corona-bagaimana-indonesia>
- [26] Park, C. Y. & Shinozaki, S., 2020, Micro, Small, and Medium Sized-Enterprises: Policy Measures for COVID-19, *Navigating Covid-19 in Asia and The Pacific* (Asian Development Bank).
- [27] International Trade Centre, 2020, *Supporting Small Business Through The COVID-19 Crisis And Towards The Future: A 15-Point Action Plan, 2020* (ITC: Geneva).
- [28] [https://www.kominfo.go.id/content/detail/32192/perindungan-umkm-program-pemulihan- ekonomi-nasional/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/32192/perindungan-umkm-program-pemulihan- ekonomi-nasional/0/artikel_gpr)
- [29] <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5305199/anggaran-pemulihan-ekonomi-2021-capai-rp-372-t-ini-rinciannya>
- [30] Widayasanti, A. A., 2020, Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi, *Loka Hejo Conference "DARI SMESCO UNTUK UMKM INDONESIA"*, 7 November 2020 (Kementerian PPN/Bappenas).
- [31] Badan Pusat Statistik, 2020, *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha* (BPS).
- [32] Badan Pusat Statistik, 2020, *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Jilid II* (BPS).
- [33] <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f58bbb66cf35/riset-umkm-digital-bisa- dongkrak-pdb-ri-rp-2432-triliun-pada-2024>
- [34] <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/16/ini-strategi-pemerintah-pulihkan-umkm-di- tengah-pandemi-covid-19>

- [35] Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021, *Press Release: Target Pemerintah 30 Juta UMKM Masuk Ekosistem Digital Pada Tahun 2024* (Kemenkop dan UMKM).
- [36] Ngatindriaturn, Pertiwi, N. A. dan Leha, A., 2021, Meningkatkan Produktivitas UMKM Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, *UMKM: Jejak, Aksi dan Solusi Saat Pandemi, Sebuah Antologi ISEI Bagi Negeri* (Fastindo: Semarang).
- [37] Wahyuningtyas, I. K., 2020, Strategi Bisnis UMKM Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Daya Saing*, Vol. 6, No. 3, Oktober 2020.
- [38] Mutamimah dan Muharam, H., 2021, Strategi Mitigasi Risiko Bisnis Bagi UKM Di Era Covid-19 Berbasis Diversifikasi Terintegrasi, *UMKM: Jejak, Aksi dan Solusi Saat Pandemi, Sebuah Antologi ISEI Bagi Negeri* (Fastindo: Semarang).
- [39] <https://waste4change.com/blog/5-tantangan-dalam-mengimplementasikan-ekonomi-sirkular/>
- [40] <https://www.facebook.com/kemenkopukm/posts/penerapan-ekonomi-sirkular-membantu-pelaku-usaha-untuk-mengoptimalkan-sumber-day/1683029365198154/>
- [41] Kementerian Perindustrian RI, 2019, Siaran Pers: Industri Berperan Ciptakan Indonesia Bersih Lewat Konsep ‘Circular Economy’ (Kemenperin).
- [42] <https://gardapangan.org/>
- [43] Burger, N., C. Chazali, A. Gaduh, A.D. Rothenberg, I. Tjandraningsih and S. Weilant., 2015, *Reforming Policies for Small and Medium Enterprises in Indonesia*, Jakarta, Indonesia, RAND Corporation in collaboration with Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jakarta, Indonesia.
- [44] <https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding>

- [45] Hijadat, T., 2021, Model Peningkatan Inklusi Keuangan UMKM Melalui Crowdfunding Berbasis Prinsip Bagi Hasil, *UMKM: Jejak, Aksi dan Solusi Saat Pandemi, Sebuah Antologi ISEI Bagi Negeri* (Fastindo: Semarang).
- [46] Harrison, R., 2013, Crowdfunding and the revitalisation of the early stage risk capital market: catalyst or chimera, *International Journal of Entrepreneurial Finance*, Volume 15, 2013 - Issue 4
- [47] <https://cerdasbelanja.grid.id/read/522508155/ini-beberapa-platform-crowdfunding-yang-cocok-untuk-menggalang-dana?page=all>

## **Profil Penulis**

### **Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS.**



Henny Wirianata menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara tahun 1999 dan Magister Sains dari Universitas Trisakti dengan konsentrasi Pemeriksaan Akuntansi dan Akuntansi Keuangan pada tahun 2005. Berpengalaman bekerja sebagai Accounting Staff di PT Monysaga Prima Jakarta pada tahun 2000. Tahun 2017 mengikuti GRI Certified Training Course dan mendapatkan sertifikasi Certified Sustainability Reporting Specialists (CSRS). Karir dalam bidang pendidikan pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Akuntansi Manajemen FE Untar periode 2008 - 2012 dan sejak tahun 2018 menjabat sebagai Sekretaris II Prodi S1 Akuntansi FEB Untar.

## **BAB 13**

### **Industri Perhotelan di Indonesia Sebelum dan pasc Masa Pandemi Covid-19**

Hendro Lukman

I Cenik Ardana

Karen Thalia

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

#### **Abstrak**

Pandemi cirus korona 19 yang dikenal dnegan COVID19 sejak awal tahun 2020 sangat berdampak pada sendi perekonomian pada semua negara, termasuk Indonesia. Salah satu sektor perekonomian yang sangat berdampak adalah industri pariwisata beserta turunannya, salahnya subsekor perhotelan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan bisnis perhotelan dengan proksi profitabilitas dan struktur modal. Subjek penelitian adalah perusahaan perhotelan di Indonesia. yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2020. Data yang terkumpul sebanyak 22 perusahaan dan dianalisis dengan *paired sample test* dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada proksi profitabilitas, namun berbeda dengan proksi struktur modal. Hal ini menunjukkan pengatguran pembatasan pergerakan masyarakat oleh pemerintah perlu dipertimbangkan untuk sedikit dilonggarkan agar perekonomian tetap berjalan.

Kata kunci: Virus Covid-19, Profitabilitas, Sturkur Modal, Perhotelan

## 1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang

Pandemi Virus Corona atau yang dikenal dengan COVID-19 sejenis virus yang masuk dalam keluarga *Coronaviridae* [1] seperti virus SARS (flu burung) dan MERS (flu Unta) yang terjadi sejak awal tahun 2020 sudah terjadi di berbagai negara. Pandemi yang diawal epidemi virus ini di ibu kota propinsi Hubei, Tiongkok, yaitu Wuhan pada bulan Desember 2019. Virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru ini sangat mematikan. Cepatnya penyebaran virus ini melalui *droplplet* yang dikeluarkan oleh penderita. Bedanya virus ini dengan jenis virus cukup lama bertahan diluar tubuh manusia, bahkan pada tubuh manusia yang sudah mati, yang tidak seperti jenis virus lainnya dalam keluarga *Coronaviridae*. Hal ini yang menyebabkan penyebaran virus ini begitu cepat. Dengan mobilitas manusia yang tinggi, dan virus yang menginfeksi tubuh manusia dapat ditularkan melalui *droppet* maka penyebaran virus ini menjadi sangat cepat ke semua negara. Dengan demikian epidemi di Wuhan menjadi Pandemi di seluruh dunia.

COVID-19 masuk ke Indonesia dimulai saat dua warga Jakarta terkena infeksi COVID-19 dari rekannya yang baru datang dari Jepang. Kasus pertama ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 [2] dan dengan cepat tersebar di 34 propinsi di Indonesia setelah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 3 Maret 2020 [3]. Untuk itu pemerintah dengan menetapkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau dikenal dengan *lock down* pada minggu kedua Maret 2020. Dan ditetapkannya PSBB, di mana kantor- kantor diminta untuk ditutup dan karyawan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan produksi distop atau dikurangi. Tentunya kondisi membuat perekonomian mengalami ketidakpastian yang pada saat itu perekonomian berjalan dengan optimis menjelang akhir kuartal I tahun 2020.

Penyebaran Pandemi Covid-19 melalui manusia yang mobilitas tinggi dan kebijakan PSBB yang berlaku di hampir kota-kota di Indonesia, juga berdampak pada sektor pariwisata (dan ekonomi kreatif) mengalami penurunan sangat tajam. Seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, wisatawan yang datang ke Indonesia di bulan Februari 2020 hanya 158 ribu dan puncaknya di bulan April 2020 sehingga selama tahun 2020 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia hanya 4.052 juta orang atau sekitar 25% dibanding tahun 2019 dengan nilai Rp 20.7 milyar [4] Turunnya sektor pariwisata berdampak pada bisnis turunan dari pariwisata seperti transportasi, tempat hiburan/wisata, restoran/kuliner, hotel, dan lainnya. Bisnis transportasi yang paling terpuak karena adanya pembatasan pergerakan manusia antar kota atau provinsi, termasuk ke luar negeri karena beberapa negara pun melakukan *lock down*.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan ingin melihat kinerja industri perhotelan sebelum dan masa pandemi COVID-19 dari sudut kinerja keuangan. Alasan pemilihan industri perhotelan adalah karena bisnis ini memang awalnya sepi karena adanya PSBB, namun dalam periode pandemi tahun 2020, bisnis ini mendapat bisnis dari pemerintah sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan ketika rumah sakit COVID-19 penuh atau bagi pasien yang mempunyai kelas ekonomi menengah ke atas. Artinya, bisnis perhotelan dapat dikatakan tidak mati suri penuh selama pandemi. Sebagian hotel bisa dapat menghasilkan pendapatan dan tetap dengan beban operasi yang relatif rendah dibanding dengan dengan bisnis lainnya dalam sektor pariwisata seperti transportasi dan tempat hiburan/wisata. Bisnis hotel yang membutuhkan biaya awal atau *initial cost* yang besar untuk penyediaan lahan, izin, dan pembangunan fisik hotel dan infrastruktur juga menjadi pertimbangan dalam penelitian ini. *Initial cost* untuk usaha ini relatif memerlukan pendanaan yang relatif besar.

Pendanaan kadang menjadi masalah penting yang harus diperhitungkan oleh para pengusaha [5] yang merujuk pada permodalan. *Initial cost* yang diperhitungkan tingkat pengembaliannya (return) pada saat perencanaan pembangunan memerlukan penyesuaian dan penghitungan kembali dengan adanya pandemi ini. Dengan demikian, dalam penelitian ini hanya di fokuskan pada kinerja keuangan yang diukur dari tingkat laba yang diperoleh dan struktur modal pada masa sebelum dan dalam masa COVID-19 dengan segala pembatasan gerak yang diatur Pemerintah.

## **1.2 Isi/Pembahasan**

### **Landasan Teori**

#### a) Teori Hirarki Kebutuhan.

Teori hirarki kebutuhan ini merupakan teori yang kebutuhan hidup seseorang yang dilihat dari kebutuhan secara fisik dan mental seiring pertumbuhan manusia. Teori yang dikembangkan oleh Abraham Harold Maslow, selanjutnya dikenal dengan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, membagi motivasi untuk memnuhi kebutuhan manusia menjadi fisiologis, keamanan, kepemilikan/cinta, harga diri, aktualisasi diri, dan transendensi-diri [6]. Motivasi kebutuhan tersebut sering digambarkan dalam bentuk piramid yang disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dasar manusia. Piramid ini dikenal sebagai Piramid Kebutuhan Maslow seperti gambar dibawah ini :



Gambar 1.1 Hirarki Kebutuhan Maslow

Kebutuhan dasar manusia yang terutama adalah memenuhi kebutuhan fisik seperti makan, pakaian (sandang) dan tempat tinggal (papan). Dalam konteks penelitian ini, hotel akan menjadi kebutuhan manusia yang mempunyai mobilitas tinggi dalam melakukan aktivitas rutin untuk keluar daerah, kota atau negeri. Tingkat kebutuhan atau motivasi untuk orang-orang yang mempunyai mobilitas tinggi ini dapat menjadi kebutuhan fisiologis atau fisik, jika kebutuhan ini diikuti dengan motivasi sebagai kebutuhan (*needs*) tempat tinggal (walau sementara), namun bagi orang-orang akan menjadi hotel sebagai prioritas lainnya yang lebih tinggi seperti keamanan, harga diri atau aktualisasi diri, jika kebutuhan hotel menjadi suatu motivasi “keinginan” (*wants*). Bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan di luar daerah, kota atau luar negeri sebagian besar hotel akan menjadi suatu kebutuhan fisik (*needs*), walaupun ada yang menjadikan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk orang dengan kelas ekonomi menengah, dan menengah atas, atau tujuan berpegiang selain urusan pekerjaan, hotel merupakan menjadi kebutuhan diatas kebutuhan fisik.

Berdasarkan motivasi kebutuhan ini, dengan adanya pandemi COVID-19, kebutuhan hotel baik secara fisik atau kebutuhan lainnya, telah hilang karena adanya kebijakan pembatasan gerak masyarakat (*lock down*). Orang dilarang untuk berkunjung ke luar daerah, kota, atau luar negeri untuk tujuan apapun. Namun dalam perjalanan masa pandemi COVID-19, kadang hotel telah menjadi kebutuhan fisik atau tingkat kebutuhan lainnya untuk kebutuhan isolasi mandiri pada tahap penyembuhan dari COVID-19.

b) Kinerja Keuangan.

Semua aktivitas perusahaan akan berakhir dengan transaksi keuangan. Transaksi keuangan akan di catat dalam catatan akuntansi yang pada akhir periode akan dilaporkan pada suatu laporan yang disebut Laporan Keuangan. Laporan keuangan dapat dikatakan merpakaan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan [7], dan sebagai cerminan hasil kerja manajemen dalam mengelola perusahaan [8]. Dengan demikian, dari laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, dapat di analisis bagaimana kinerja manajemen dalam mengoperasikan perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

c) Profitabilitas.

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu [9]. Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio, yaitu perbandingan laba yang dihasilkan dari modal atau harta yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, profitabilitas dapat dikatakan merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba [10], atau dapat juga untuk mengukur efektifitas manajemen menggunakan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan besar kecil rasio ini [11].

Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba dengan mengoptimalkan sumber daya perusahaan yang dimiliki dalam artian modal atau harta yang dimiliki, dengan kata lain profitabilitas merupakan adalah hasil dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen [12].

a) Struktur Modal.

Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas, (yang terdiri modal dan saldo laba dalam perseroan terbatas) dan utang atau kewajiban pada suatu perusahaan. Pendanaan dalam menjalankan sangat penting dalam perusahaan, baik saat pendirian atau pembangunan maupun ketika bisnis berjalan. [5]. Struktur modal dihitung berdasarkan besaran relatif, yaitu perbandingan kewajiban (baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek) dengan ekuitas. Struktur modal ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan untuk menjamin akan keberlangsingan usaha operasi perusahaan. Oleh karena struktur model ini mengandung unsur kewajiban kepada pihak eksternal, maka dalam menganalisis struktur modal tidak lepas dari adanya unsur risiko. Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko gagal memenuhi kewajiban bergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai aset yang dimiliki perusahaan [13]. Struktur modal akan menjadi penting ketika kondisi usaha mengalami penurunan kinerja dari penghasilan dari periode sebelumnya sebelumnya di mana perusahaan telah mempunyai kewajiban, terutama kewajiban jangka panjang. Oleh karenanya, struktur modal akan menjadi perhatian perusahaan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengukur kelangsungan hidup perusahaan.

b) Pandemi Covid19 (COVID-10).

Kasus COVID-19 yang ditemukan pertama kali pada bulan Desember 2019 di Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok memuncak pada akhir Januari hingga awal Februari 2020 di provinsi lainnya di Tiongkok. Awal tahun 2020, telah merebak ke negara-negara lain seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman [14]. Sedangkan COVID-19 masuk di Indonesia pertama kali diberitakan pada tanggal 2 Maret 2020 yang disusul dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran pada pertengahan bulan Maret 2020. COVID-19 yang merupakan virus dari ‘keluarga’ *Coronaviridae* merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan paru-paru merupakan virus yang cepat berkembang biak dalam “media” atau “inang” dalam tubuh manusia, dan sangat mematikan, serta dapat bertahan hidup di alam terbuka dengan “inang”nya untuk beberapa jam. Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat yang banyak disebabkan karena mobilitas manusia yang sangat tinggi saat itu, telah merontokan perekonomian dunia, termasuk negara kaya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, Rusia, dan lainnya bahkan negara kecil dan miskin di dunia ini. Indonesia sebagai negara terbuka dan bagian dari perdagangan dunia, COVID-19 telah mulai menjadi suatu Pandemi pada kuartal kedua tahun 2020. Tentunya pandemi COVID-19 juga meluluhlantakkan perekonomian Indonesia yang pada tahun 2020 dimulai dengan keyakinan pertumbuhan yang optimis.

c) Pengembangan Hipotesis.

Perubahan motivasi kebutuhan tempat tinggal, dalam kasus ini adalah hotel, bagi orang-orang melakukan perjalanan keluar daerah, kota dan luar negeri pada pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan tingkat lainnya. Hal ini disebabkan adanya

kebijakan pembatasan pergerakan sosial baik dilakukan di Indonesia maupun di negara-negara lain. Namun dengan kebijakan pemerintah (baik di Indonesia maupun di negara-negara pandemi COVID-19 lainnya) telah memanfaatkan hotel sebagai tempat “rumah sakit” sementara untuk pasien dalam tahap penyembuhan, dan pasien tanpa gejala, atau karantina bagi orang yang baru datang dari luar negeri. Selain itu selama masa pandemi dari tahu Maret 2020 sampai saat ini, pemerintah telah melakukan penertatan dan pengendalian pembatasan pergerakan manusia yang menyebabkan orang-orang melakukan perjalanan terbatas atau berwisata lokal dengan menginap di hotel. Dengan demikian, bisnis hotel selama pandemi COVID-19 tidak mati suri selamanya, ada kalanya mereka mendapatkan penghasilan dan ada kalanya mereka tutup. Sehingga dapat dikatakan bisnis hotel masih mendapatkan penghasilan untuk menutupi kewajibannya, atau kewajiban itu timbul karena operasinya hotel tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA sebelum dan pada masa COVID-19 dan struktur modal seperti penilitan yang dilakukan oleh [15], [16], [17], dan [18]. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan proksi profitabilitas dan struktur modal merumuskan hipotesis yang digunakan adalah : H<sub>1</sub>: Terdapat perbedaan profitabilitas perusahaan subsektor perhotelan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. H<sub>2</sub>: Terdapat perbedaan struktur modal perusahaan subsektor perhotelan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19.

#### d) Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif

komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda menurut [19]. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: 1) perusahaan sektor hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan 2020; 2) telah menerbitkan laporan keuangan sampai dengan tahun 2020. Maka jumlah sampel yang dipilih sebanyak 22 perusahaan. Pengujian menggunakan uji *paired sample t-test*.

Operasionalisasi Variabel dan Instrumen yang digunakan adalah :

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen

Berdasarkan data yang dikumpulkan dilakukan uji deskriptif untuk melihat penyebaran data dengan rata-rata data. Hasil uji deskriptif dapat lihat pada tabel dibawah ini:

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA sebelum COVID-9	22	-373.81	241.06	-7.2981	98.98296
ROA masa COVID-9	22	-289.73	6.07	-46.5187	75.85523
STRUKTURMODAL sebelum COVID-19	22	7.77	1.80E5	9.5016E3	38280.11197
STRUKTURMODAL masa COVID-19	22	8.96	2.99E5	1.4459E4	63541.40643
Valid N (listwise)	22				

Sumber : Hasil Olah SPSS

Tabel 1.2 Uji Statistik Deskriptive

Pada hasil output tabel 1.2, terlihat nilai rata-rata ROA sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019) sebesar -7.29 dengan standar deviasi 98.982, nilai maksimum dan minimumnya 241.06 dan -373.81. Pada masa COVID-19 nilai rata-rata ROA pada masa COVID-19 (tahun 2020) sebesar -46.518 dengan standar deviasi 75.855, nilai maksimum dan minimum pada masa COVID-19 (tahun 2020) adalah sebesar 6.07 dan -289.73. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ROA sebelum dan setelah masa COVID-19 pada perusahaan sektor ini mengalami penurunan (-39.22) pada masa Pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelum Pandemi (2019).

Nilai rata-rata struktur modal sebelum COVID-19 sebesar 9.501 dengan standar deviasi 38280.111, nilai maksimum dan minimumnya sebelum Covid-19 (tahun 2019) adalah 7.77 dan 1.80. Sedangkan pada masa COVID-19 menunjukkan jumlah nilai rata-rata sebesar - 1.4445 dengan standar deviasi

63541.40, nilai maksimum dan minimum adalah 8.96 dan 2.99. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur modal sebelum dan masa COVID-19 perusahaan sektor ini mengalami penurunan (8.06)

Untuk melihat apakah ada perbedaan profitabilitas dan struktur modal sebelum (tahun 2019) dan pada masa COVID-19 (tahun 2020), menggunakan *Wilcoxon Sign Ranks Test* (Uji Non Parametrik). Hasil uji d dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

	ROA Masa dan Sebelum COVID-19	Struktur Modal Masa dan Sebelum COVID-19
Z	-3.198 <sup>a</sup>	-1.315 <sup>b</sup>
Asymp.Sig. (2 tailed).	.001	.189

- a. Based on negative ranks  
b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Tabel 1.3 Hasil Uji Wilxon

Hasil uji Wilcoxon pada tabel 3 menunjukkan ROA sebelum dan masa COVID-19 menunjukkan bahwa nilai koefisien sig sebesar 0,001 di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05 (pada tingkat kepercayaan 95%). Hasil ini sejalan dengan penelitian dari [15], [16], [17], dan [18]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil ROA sebelum dan pada masa COVID-19 dengan pemberlakuan pembatasan gerak masyarakat dan pemanfaatan hotel sebagai “rumah sakit” atau tempat wisata.

Sedangkan struktur modal sebelum dan pada masa COVID-19 meunjukkan bahwa nilai koefisien sig 0,189 di mana nilai ini lebih besar dari 0,05 pada tingkat kepercayaan 95%,. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil peneitian [15], [16], [17], dan [18]. Dengan demikian, untuk struktur modal dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil struktur modal

sebelum dan pada masa COVID-19 diberlakukannya pembatasan pergerakan masyarakat.

a) Hasil dan Diskusi

Profitabilitas usaha sektor ini sebelum dan pada masa Pandemi COVID-19 menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini sudah pasti terdapat perbedaan. Pada tahun 2019, ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%. Ini menunjukkan hampir semua sektor mendukung perekonomian Indonesia. Berkembangnya kegiatan ekonomi umumnya diikuti dengan tingginya mobilitas manusia, baik untuk urusan bisnis atau sekedar wisata. Tetapi ketika terjadi pandemi COVID-19 dibatasinya pergerakan manusia untuk bepergian keluar daerah, antar kota bahkan ke luar negeri. Juga didukung adanya larangan dari negara-negara lain yang terkena pandemi maupun tidak, sehingga bisnis ini seperti mati suri. Terlihat dari jumlah wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia hanya 25% dibanding tahun 2019, itu pun terbantu pada saat bulan Januari sampai pertengahan Maret 2020. Jadi hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan.

Untuk struktur modal yang tidak mengalami perbedaan sebelum dan pada masa COVID-19. Hal ini dimungkinkan bahwa *initial cost* yang dikeluarkan dalam bentuk hutang jangka panjang tidak terjadi. Artinya, ada kemungkinan pada pengusaha dalam membangun bisnis menggunakan modal sendiri, atau hutang jangka panjang untuk mendanai *initial cost* sudah lunas atau dipenuhi kewajibannya sebelum pandemi ini menerpa Indonesia, sehingga pengusaha tidak dibebani memenuhi kewajiban ini, sehingga struktur modal usaha di sektor ini tidak berubah atau berbeda.

### 1.3 Penutup

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan seperti hanya mengambil sektor perhotel dari industri perhotelan tanpa melihat atau menganalisis sektor lainnya yang terkait dalam mendukung tingkat hunian hotel seperti transportasi, tempat pariwisata dan kuliner. Keterbatasan untuk mengkaitkan sektor terkait lainnya adalah belum banyak keterbukaan informasi kinerja keuangan dari sektor lainnya, atau mereka belum melakukan go publik.

Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus korona -19 ini melalui kegiatan pembatasan pergerakan masyarakat (*lock down*) dengan beberapa istilah dan terminologi dan kondisi sejak terjadinya pandemi, membawa industri pariwisata tidak mati suri selama pandemi. Khusus untuk industri perhotelan, kebijakan pemerintah bagi perusahaan dan beberapa kementerian untuk melakukan kerja dari rumah (*work from home*-WFH), dan kebijakan kelonggaran pembatasan pergerakan masyarakat dimanfaatkan oleh para pelaku sektor perhotelan dengan memberikan promosi agar orang bisa bekerja jauh dari rumah (*work form remote*) tetapi bekerja dari hotel (*work from hotel* - WFH). Selain itu, pemerintah juga telah bekerja sama dengan hotel-hotel untuk menampung para pasien yang dalam tahap pemulihan atau gejala ringan agar melakukan isolasi mandiri dapat dilakukan di hotel. Dengan kondisi ini, industri ini masih dapat beroperasi selama masa pandemi COVID-19. Untuk membangkitkan industri pariwisata, termasuk perhotelan, kiranya pemerintah dapat sesering mungkin melonggarkan pergerakan masyarakat, namun untuk mencegah penyebaran yang sangat cepat, perlunya disiplin para aparat untuk mengawasi ketaatan protokol kesehatan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah.

## Referensi

- [1] Fan, Z, K., Shi, S.I/. Zhou, P. 2019. "Bat Coronavirus in China". *Viruses*. 11(3):210.DOI: 3390/v/11030210.
- [2] Ihsanuddin. 2020. Ini Pengumuman Lengkap Jokowi soal 2 WNI Positif Corona <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/12002701/inipengumuman-lengkap-jokowi-soal-2-wni-positif-corona?page=all>. Diakses tanggal 13 September 2021.
- [3] CNN Indonesia. 2020. "Cara Ajukan Penundaan Cicilan Kredit Motor di Masa Corona" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021084016-78-560866/cara-ajukan-penundaan-cicilan-kredit-motor-di-masa-corona>. Diakses tanggal 13 September 2021.
- [4] Lazuardi, B. 2021. Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi. <https://www.kemendparekraf.go.id/pustaka/Buku-Tren-Pariwisata-2021>. Diakses tanggal 15 September 2021.
- [5] Ilhami, & Thamrin, H. (2021). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- [6] Ghozali., I. 2022. 25 Grand Teori : 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis. Yoga Pratama. Semarang
- [7] Fahmi, I. 2012, Analisis Kinerja Keuangan, Alfabeta. Bandung.
- [8] Putri, M. C., & Dermawan, E. S. (2020). *Putri dan Dermawan: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada ..... Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara / FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFaktur*. 2(1), 469–477.
- [9] Hery (2019). Analisis Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition. Jakarta: PT Grasindo. [10] Kasmir. 2016, Analisis Laporan Keuangan, cetakan 9, Jakarta. PT Rajagarfindo

- [11] Sudaryo, Y., & Widiarni, F. (2015). Analisis hubungan rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas terhadap rasio profitabilitas pada pt telkom tbk. *Jurnal Pada STIE Indonesia Membangun*, 188–210.
- [12] Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston, 2018. Manajemen Keuangan, Edisi 8, Erlangga, Jakarta.
- [13] Subramanyam. K. R dan John J. Wild. 2014. Analisi Laporan Keuangan. Penerjemah Dewi Y. Jakarta: Salemba Empat
- [14] WHO Indonesia.2020. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report-10*. who.int/Indonesia.
- [15] Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>
- [16] Atmojo,M.E., H.D.Fridayani.2021. An Assessment of Covid-19 Pandemic Impact on Indonesian Tourism Sector, *Journal of Governance and Public Policy*. ISSN: 2460-0164 (print), 2549-7669 (Online) Vol 8, No 1 (2021): Page no: 1-9.
- [17] Skare,M., D.R. Soriano, M.P.Rocho. Impact of COVID-19 on the travel and tourism industry, *Technological Forecasting & Social Change* 163 (2021) 1204. homepage: [www.elsevier.com/locate/techfore](http://www.elsevier.com/locate/techfore).
- [18] Malra, R. 2021. Impact of COVID-19 on Tourism Industry. *Journal of Interdisciplinary Cycle Research · January 2021*. ISSN NO: 0022-1945. <https://www.researchgate.net/publication/348663079>
- [19] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Alfabeta)
- [20] Sudana, M 2015. Akuntansi Keuangan: International Financial Reporting Standards.Penerjemah Gina Gania. Jakarta: Erlangga

## **Profil Penulis**

**Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA (Aust.), CSRS.**



E Hendro Lukman menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara tahun 1987. S2 Magister Manajemen pada STIE IPWI tahun 1997.. Saat ini berprofesi sebagai dosen dan Ketua Jurusan Akuntansi di FEB Universitas Tarumanagara. Penelitian dan bidang pengajaran terkonsentrasi pada bidang Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal, Akuntansi Prilkau, Sistem Informasi, Audit, dan Pajak. Aktif mengikuti kegiatan asosiasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Kompartemen Akuntan Pendidik

Forum Dosen DKI sebagai Sekretaris, ICAEW (sebagai tim pembekalan).

## **Drs. I Cenik Ardana, M.M., Ak., CA.**



I Cenik Ardana menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia 1978 dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia dengan konsentrasi Manajemen Keuangan pada tahun 1998. Berpelangalam bekerja di Kantor Akuntan Publik dan menduduki berbagai jenjang manajerial di berbagai perusahaan swasta. Karir dalam bidang pendidikan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan pada tahun 2000-2004 dan Pembantu Dekan I di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara pada periode 2004-2008. Telah menulis buku Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Sistem Informasi Akuntansi, dan Life Ethics).

## **Karen Thalia**

Karen Thalia adalah mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara

## **BAB 14**

# **Prospek Implementasi SAK EMKM di Masa Pandemi Covid-19**

Elsa Imelda

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku usaha mengenai pentingnya kualitas laporan keuangan EMKM, kredit perbankan yang pelaku UMKM dapat dan bagaimana prospek implementasi SAK EMKM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 42 responden dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jabodetabek. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan t statistik dengan tingkat kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh negatif, sedangkan latar belakang pendidikan, ukuran usaha dan lama usaha berdiri tidak memiliki pengaruh signifikan, dan jenjang pendidikan berpengaruh positif terhadap prospek implementasi SAK EMKM.

Kata Kunci : SAK EMKM, Implementasi, Kualitas Laporan Keuangan, Lama Usaha, Ukuran Perusahaan

## **1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang**

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan setiap negara (Moore et al, 2008).UMKM telah terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di setiap negara serta memiliki kemampuan yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja, tidak terkecuali di Indonesia.

Awalnya, pemerintah di Indonesia tidak begitu menaruh perhatian kepada UMKM, namun ketika dua kali krisis ekonomi yang melanda Indonesia, terbukti bahwa UMKM memiliki kemampuan untuk bertahan dalam krisis dan mampu menyokong kegiatan perekonomian Indonesia. Saat ini pada masa pandemi Covid-19, sekali lagi UMKM membuktikan mampu menjadi solusi bagi masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan turunnya perekonomian di Indonesia [7]. Banyak sekali usaha ukuran mikro dan kecil bermunculan dan banyak pula yang memakai e-commerce untuk memasarkan produk mereka.

Untuk mengembangkan usaha, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi keuangan usaha mereka saat ini. Namun para pelaku usaha kesulitan jika harus mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan pemerintah dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) saat ini. Maka dari itu, IAI [8] menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi yang ditujukan bagi entitas yang kurang mampu memenuhi persyaratan akuntansi dari SAK ETAP. SAK EMKM ini telah disahkan pada 24 Oktober 2016 lalu yang akan diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2018.

SAK EMKM ini hanya akan mencatat laporan posisi keuangan usaha periode saat itu dan periode sebelumnya, laporan laba rugi dan juga catatan atas laporan keuangan SAK EMKM. Pemerintah berharap dengan diterbitkannya SAK EMKM ini dapat membantu pada pelaku UMKM untuk melakukan pembukuan akuntansi dan laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi standar sehingga membantu pelaku UMKM lebih mudah untuk mengetahui kondisi sebenarnya usaha mereka dan mengembangkan usaha mereka. Dengan usaha yang semakin berkembang diharapkan UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Penelitian kali ini bertujuan untuk melihat prospek implementasi SAK EMKM di masa pandemi Covid-19. Beberapa penelitian seperti [5] di Mataram menyatakan bahwa para UMKM di Mataram masih belum siap untuk menerapkan SAK EMKM saat ini. Sedangkan penelitian Pratama Putra [4] mengatakan bahwa UMKM di Surabaya berpendapat bahwa sosialisasi SAK EMKM mempengaruhi implementasi SAK EMKM. Penelitian ini akan melihat apakah sosialisasi, latar belakang pendidikan, ukuran usaha dan lama usaha dapat mempengaruhi implementasi SAK EMKM.

Tulisan ini akan menjabarkan reimajinasi desain produk dalam upaya menjawab optimisme masa depan pasca krisis, menjadikan manusia sebagai pusat dalam segala keputusan dan perwujudan desain, bagaimana desain mempermudah pengguna untuk kembali menjalani aktivitas yang mereka cintai. Aktivitas bekerja, pelayanan Kesehatan, gaya hidup dan inovasi material menjadi konsentrasi dalam penelusuran tulisan artikel ini.

## 1.2 Isi/Pembahasan

### Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Menurut [2] *Institutional Theory* ini membicarakan tentang cara organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teori institusional mengusulkan agar organisasi harus menyesuaikan diri dengan norma masyarakat tentang praktik yang dapat diterima sehingga dapat mencapai dukungan terus – menerus yang diperlukan untuk bertahan dari para pemangku kepentingan mereka. Penyesuaian yang dilakukan organisasi disebut *isomorphic* yang dilakukan dengan tiga cara. Pertama dengan *coersive*, yaitu dengan tekanan dari peraturan atau pengaruh politik. Kedua dengan *normative*, adanya karya nyata profesional dan organisasi lain menirunya. Ketiga dengan *mimetic*, dimana organisasi meniru organisasi lain, terutama dikeadaan tidak pasti. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan dan menerapkannya di dalam usahanya dengan meniru keberhasilan pelaku usaha lainnya. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah perlu menerapkan peraturan standar kualitas laporan keuangan yang telah ditetapkan sehingga bisa mendapatkan bantuan permodalan dari pihak perbankan seperti pelaku usaha lain yang mendapat bantuan untuk menegembangkan usahanya.

Kriteria UMKM menurut SAK EMKM adalah sebagai berikut: 1) Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000. 2) Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp. 50.000.000 dan Rp500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 dan Rp2.500.000.000. 3) Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp. 500.000.000 dan Rp 10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 2.500.000.000 dan Rp 50.000.000.000.

Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM). Entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi standar dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut – turut.

SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang paling sederhana jika dibandingkan yang lain. SAK EMKM telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada 24 Oktober 2016 dan berlaku secara efektif per 1 January 2018.

Penyajian laporan keuangan SAK EMKM. Penyajian laporan keuangan SAK EMKM harus: 1) Relevan, informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan; 2) Representasi Tepat, informasi dalam laporan keuangan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias; 3) Keterbandingan, informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisis dan kinerja keuangan; dan 4) Keterpahaman, informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Komponen laporan keuangan yang disajikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah minimum terdiri dari: 1) laporan posisi keuangan pada akhir periode, 2) laporan

laba rugi selama periode dan 3) catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan dapat mencakup: 1) kas atau setara kas, 2) piutang, 3) persediaan, 4) aset tetap, 5) utang usaha, 6) utang bank dan 7) ekuitas. Laporan laba rugi dapat mencakup: 1) pendapatan, 2) beban keuangan dan 3) beban pajak. Catatan atas laporan keuangan dapat memuat: 1) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, 2) ikhtisar kebijakan akuntansi, dan 3) informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Pemberian informasi dan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman terhadap SAK EMKM. Sehingga prospek implementasi SAK EMKM akan meningkat pula (hipotesis 1). Menurut [6] pemberian informasi dan sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman SAK EMKM dikarenakan masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait SAK EMKM. Berbeda dengan [3] dan [1] yang menyatakan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh positif dikarenakan pemberian informasi dan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman EMKM terhadap SAK EMKM.

Jenjang pendidikan yang makin tinggi dianggap akan membuat pelaku UMKM lebih sadar pentingnya penyusunan laporan keuangan. Jika yang berpendidikan tinggi tidak memahami SAK EMKM, mereka akan berusaha dan mudah untuk memahami karena mereka telah memiliki dasar pendidikan yang baik. Sehingga hipotesis kedua ingin melihat pengaruh jenjang pendidikan terhadap prospek implementasi SAK EMKM. Menurut [6] dan [3] jenjang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM terhadap laporan keuangan. Bagi pelajar SD / SMP / SMA yang memiliki kemauan untuk menambah

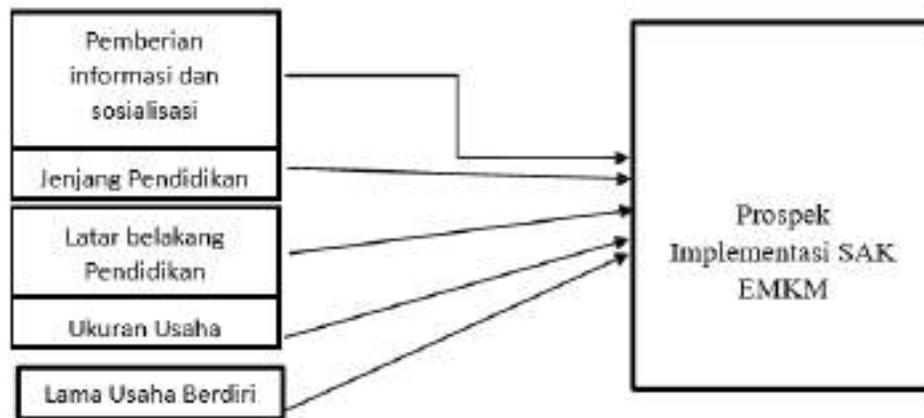
pemahaman terhadap SAK EMKM akan memahami laporan keuangan SAK EMKM dengan baik. Sedangkan menurut [1] jenjang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman serta prospek implementasi SAK EMKM karena semakin tinggi jenjang pendidikan semakin pelaku UMKM akan lebih mengerti dan memahami SAK EMKM.

Latar belakang pendidikan khususnya di bidang ekonomi dan akuntansi dianggap mampu meningkatkan prospek implementasi SAK EMKM. Hal ini dikarenakan sesuai dengan bidang ilmu latar belakang pendidikan para pelaku UMKM. Menurut [3], [6] dan [1] latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan karena banyak pelaku UMKM di luar pendidikan akuntansi / manajemen dapat memahami laporan keuangan.

Perusahaan yang menengah dianggap lebih berprospek mengimplementasi SAK EMKM karena dianggap lebih memiliki sumber daya dibandingkan perusahaan berskala kecil. Menurut [6] dan [3] ukuran usaha tidak berpengaruh signifikan karena karena besar kecilnya sebuah usaha tidak menjamin pemahaman UMKM terhadap SAK ETAP lebih baik.

Perusahaan dengan waktu pendirian yang lebih lama dianggap memenuhi kualifikasi untuk lebih memahami SAK EMKM karena telah lama berkecimpung di dunia UMKM. Menurut [6] lama usaha berdiri berpengaruh positif terhadap pemahaman SAK EMKM karena seiring dengan lamanya sebuah usaha berdiri, maka pengalaman yang dimiliki oleh usaha tersebut akan semakin bertambah. Dimana hal tersebut akan mempengaruhi UMKM dalam menyikapi pentingnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada. Sedangkan menurut [3] berpengaruh negatif signifikan karena pemahaman akan SAK EMKM akan lebih mudah didapat oleh pengusaha yang baru mendirikan usahanya. Pada saat usaha baru berdiri akan mendorong seorang pengusaha untuk lebih giat mencari

informasi dan cara untuk dapat mengembangkan usahanya di masa yang akan datang. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:



Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran

H1 : Pemberian Informasi dan Sosialisasi berpengaruh positif terhadap Prospek Implementasi SAK EMKM

H2 : Jenjang Pendidikan berpengaruh positif terhadap Prospek Implementasi SAK EMKM  
H3 : Latar Belakang Pendidikan berpengaruh positif terhadap Prospek Implementasi SAK EMKM

H4: Ukuran Usaha berpengaruh positif terhadap Prospek Implementasi SAK EMKM

H5 : Lama Usaha Berdiri berpengaruh negatif terhadap Prospek Implementasi SAK EMKM

## 2 Metodologi

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di wilayah Jabodetabek, Luar Jabodetabek dan Luar Jawa. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 42 responden yang mengetahui tentang SAK EMKM.

Variabel operasional dalam penelitian ini terdiri dari pemberian informasi dan sosialisasi (*info*), jenjang pendidikan (*edu\_lev*), latar belakang pendidikan (*edu\_back*), ukuran usaha (*size*) dan lama usaha berdiri (*age*) sebagai variabel independent dan *Prospek Implementasi SAK EMKM* sebagai variabel dependen. Model penelitian untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$\text{SME\_UNDERSTAND}_i = \gamma_1 + \gamma_2 \text{INFO}_i + \gamma_3 \text{EDU\_LEV}_i + \gamma_4 \text{EDU\_BACK}_i + \gamma_5 \text{SIZE}_i + \gamma_6 \text{AGE}_i + e_i$$

Keterangan:

SME_UNDERSTAND	: Prospek Implementasi SAK EMKM
INFO	: pemberian informasi dan sosialisas
iEDU_LEV	: jenjang pendidikan terakhir
EDU_BACK	: latar belakang pendidikan
SIZE	: ukuran usaha
AGE	: lama usaha berdiri
e	: error

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari [3]. Data yang digunakan berasal dari kuisisioner yang dibagikan kepada 100 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan 38 responden yang mengetahui tentang SAK EMKM. Berikut penjelasan mengenai pengukuran variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Prospek Implementasi SAK EMKM (SME\_UNDERSTAND). Variabel ini dihitung dengan menilai jawaban responden atas pertanyaan berikut:

1. Apakah Bapak/ Ibu cukup memahami isi dari SAK EMKM:
  - a) Ya (jika Ya, tolong jelaskan dengan singkat terkait isi laporan keuangan SAK EMKM).
  - b) Tidak
2. Apa Bapak / Ibu mengetahui perbedaan antara PSAK dengan SAK EMKM.
  - a) Ya (jika Ya, tolong jelaskan dengan singkat terkait isi SAK EMKM).
  - b) Tidak

Jika menjawab Ya, akan mendapat nilai 1 – 5 tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan dan yang menjawab Tidak akan mendapat nilai 0.

Pemberian Informasi dan Sosialisasi (INFO). Merupakan usaha yang dilakukan IAI dan lembaga lain dalam proses sosialisasi terkait SAK EMKM. Variabel ini diukur dari penjumlahan nilai dari jawaban yang diberikan untuk pertanyaan berikut:

1. Mengetahui adanya SAK EMKM yang efektif pada 1 Januari 2018. Jika jawaban ‘Ya’ maka mendapat nilai 1, sedangkan Tidak akan mendapat nilai 0.

2. Sumber informasi yang didapat terkait SAK EMKM. Ada 4 pilihan jawaban dan setiap jawaban akan mendapat nilai 1.
3. Apakah pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan mengenai SAK EMKM. Jika 'Ya' akan mendapat nilai 1 dan 0 untuk jawaban 'Tidak'.

Jenjang Pendidikan Terakhir (EDU\_LEV). Pengukuran untuk variabel ini adalah berikan poin 1 jika pendidikan lebih rendah dari SMA/SMK, 2 untuk SMA/SMK, 3 untuk S1, 4 untuk S2, dan 5 untuk diatas S2.

Latar Belakang Pendidikan (EDU\_BACK). Pengukuran untuk variabel ini adalah berikan poin 3 untuk pendidikan akuntansi, 2 untuk manajemen dan ekonomi, dan 1 untuk latar belakang pendidikan lainnya (termasuk SMA/SMK atau dibawahnya).

Ukuran Usaha (SIZE). Untuk mengukur ukuran usaha ditentukan dari jumlah karyawan berdiri, kekayaan bersih dan hasil penjualan pertahun.

1. Jumlah karyawan:
  - a) < 4 orang,
  - b) 5 – 19 orang,
  - c) 20 – 99 orang, dan
  - d)  $\geq$  100 orang.
2. Kekayaan bersih perusahaan:
  - a) < Rp 50.000.000
  - b) Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000
  - c) Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000
3. Hasil penjualan pertahun:
  - a) < Rp 300.000.000
  - b) Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000

c) Rp 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000

Masing – masing jawabana beri poin 1 untuk jawaban “a”, 2 untuk jawaban “b”, 3 untuk jawaban “c” dan 4 untuk jawaban “d”. Nilai dari ketiga jawaban tersebut dijumlahkan dan dikelompokan menjadi ukuran usaha mikro jika nilai yang didapat 1 -4, ukuran usaha kecil jika nilai 5 – 8, dan ukuran usaha menengah jika nilai  $\geq 9$ .

Lama Usaha Berdiri (AGE). Variabel ini dilihat dari seberapa lama usaha telah berdiri yang diukur dengan cara nilai 1 untuk usaha  $< 1$  tahun, 2 untuk 1 – 3 tahun, dan 3 untuk  $\geq 3$  tahun.

### **Hasil Uji Statistik**

Uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang SAK EMKM masih rendah yang berkisar di nilai 4,5 dari maksimal angka 10. Variabel informasi dan sosialisasi menunjukkan angka 1,88 yang berarti para pelaku UMKM sudah mendengar SAK EMKM namun belum memahami. Jenjang pendidikan memiliki rata-rata 2,35 yang berarti ada di level SMA. Latar belakang pendidikan juga berada di level SMA di mana artinya pelaku UMKM sedikit yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi (nilai rata-rata 1,7). Ukuran perusahaan memiliki rata-rata 1,4 yang berarti berada di level mikro. Sedangkan nilai rata-rata umur adalah 2,4 tahun yang berarti bnyk yang baru berdiri di masa pandemi Covid 19 ini.

Uji Asumsi Klasik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik pada model regresi. Uji Normalitas. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan One-sample Kolmogorov-Smirnov. Dalam penelitian ini menunjukkan nilai sig.(2-tailed) sebesar  $0,200 > 0,05$  yang berarti

data berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji selanjutnya adalah heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansinya, di mana hasil pengolahan dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi  $> 0.05$  untuk semua variabel maka persamaan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Dan yang terakhir yaitu uji multikolinieritas, uji untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* atau VIF. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai *tolerance*  $> 0.10$  dan nilai VIF  $< 10$  untuk semua variabel maka persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka disajikan pokok-pokok temuan penelitian secara keseluruhan. Hasil Analisis regresi berganda, dapat disimpulkan persamaan model regresi dari Prospek Implementasi SAK EMKM yaitu:

$$\mathbf{SME\_UNDERSTAND}_i = \mathbf{1.049 -0.740 INFO}_i + \mathbf{1.646 EDU\_LEV}_i + \mathbf{0.124 EDU\_BACK}_i + \mathbf{0.029 SIZE}_i + \mathbf{0.063AGE}_i + e_i$$

Uji F atau uji ANOVA menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Besarnya *sig* dengan menggunakan uji F adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ , Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwaseluruh variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen secara simultan dengan tingkat keyakinan 95%.

Uji t adalah uji yang digunakan untuk menguji keterkaitan secara individu antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk menguji hipotesis nol ditolak atau diterima, titik tolaknya adalah bila nilai p-value t-test  $<$  atau  $> 0,05$ , artinya jika nilai signifikansi dari variabel independen di bawah 0,05, maka  $H_0$

ditolak dan  $H_a$  diterima dan sebaliknya. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,049	1,314		,798	,430
	INFO	-,740	,366	-,248	-2,019	,051
	EDU_LEV	1,646	,478	,619	3,446	,001
	EDU_BACKG	,124	,321	,067	,385	,702
	SIZE	,029	,239	,027	,122	,903
	AGE	,063	,137	,095	,458	,650

a. Dependent Variable: SME\_UNDERTAND

Tabel 1.2 Uji t statistik

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,726 <sup>a</sup>	,527	,461	1,205

a. Predictors: (Constant), AGE, EDU\_LEV, INFO, EDU\_BACKG, SIZE

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58,205	5	11,641	8,014	,000 <sup>b</sup>
	Residual	52,295	36	1,453		
	Total	110,500	41			

a. Dependent Variable: SME\_UNDERTAND  
b. Predictors: (Constant), AGE, EDU\_LEV, INFO, EDU\_BACKG, SIZE

Tabel 1.3 Pengujian F dan R2

Untuk mengetahui korelasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji korelasi ( $R^2$ ). Nilai R square ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.527 atau 52.7%. Hasil 52.7% berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 52.7% sedangkan sisanya yang didapat sebesar 47.3% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen penelitian ini.

### **Diskusi**

Hasil pengujian statistik dengan uji regresi menunjukkan bahwa variabel Pemberian Informasi dan Sosialisasi (*info*) berpengaruh negatif terhadap *Prospek Implementasi SAK EMKM*. Dari 42 kuisisioner hanya ada 38% pelaku usaha yang memahami isi dari SAK EMKM. Dari hasil ini disimpulkan bahwa sebenarnya para pelaku usaha membutuhkan SAK EMKM untuk membantu mereka membuat laporan keuangan yang baik, namun mereka tidak mengerti tentang SAK EMKM dengan baik. Dari hasil kuisisioner 60,53% tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, manajemen atau ekonomi. Sebagian besar tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, manajemen atau ekonomi sehingga sulit bagi mereka untuk mengerti sepenuhnya tentang SAK EMKM sehingga walaupun mereka membutuhkan SAK EMKM, tapi setelah disosialisasikan mereka menjadi bingung sehingga tidak mengaplikasikan SAK EMKM untuk usahanya. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian [3] dan [1].

Hasil variabel Jenjang Pendidikan (*Edu\_Lev*) menunjukkan pengaruh positif signifikan antara jenjang pendidikan dengan prospek implementasi SAK EMKM. Karena semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin pelaku usaha mengerti pentingnya kualitas laporan keuangan untuk kelangsungan usaha mereka, sehingga mereka akan lebih memiliki kemauan untuk memahami SAK EMKM. Hasil ini sesuai dengan [1], namun tidak sesuai dengan penelitian dari [6],

Rudiantoro & Siregar [3].

Hasil penelitian Latar Belakang Pendidikan (*Edu\_Back*) menunjukkan pengaruh tidak signifikan antara latar belakang pendidikan dengan prospek implementasi SAK EMKM karena mayoritas responden bukan berasal dari pendidikan akuntansi / manajemen, namun mereka sadar akan pentingnya laporan keuangan. Bagi mereka yang bukan berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi, mereka mempekerjakan pekerja khusus yang mengerti dan handal dalam bidang akuntansi atau menyewa konsultan untuk masalah keuangan mereka. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian [3], [6] dan [1].

Hasil penelitian Ukuran Usaha (*size*) menunjukkan bahwa ukuran usaha tidak mempengaruhi prospek implementasi SAK EMKM. Ukuran usaha yang lebih besar belum tentu akan selalu lebih memahami SAK EMKM dibandingkan dengan ukuran usaha yang kecil. Pengaplikasian SAK EMKM harus disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing ukuran usaha, misalnya kebutuhan kredit perbankan. Hasil penelitian ini sesuai dengan [6] dan [3] .

Dan hasil penelitian Lama Usaha Berdiri (*age*) menunjukkan bahwa lama usaha tidak mempengaruhi prospek implementasi SAK EMKM karena dalam memahami SAK EMKM bukan berdasarkan usaha yang sudah lama berdiri atau baru berdiri, usaha yang sudah lama berdiri tidak menjamin jika mereka akan lebih mengerti tentang SAK EMKM dibandingkan usaha yang baru berdiri, begitu sebaliknya. . Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari [6] dan menurut [3].

### 1.3 Penutup

Berdasarkan hasil pengujian data dalam penelitian ini, penelitian prospek implementasi SAK EMKM dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Sedangkan pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, ukuran usaha dan lama usaha berdiri tidak mempengaruhi. Hasil penelitian ini diharapkan IAI dapat lebih baik lagi memberikan sosialisasi tentang SAK EMKM ini karena pelaku usaha membutuhkan SAK EMKM namun mereka tidak mengerti bagaimana mengaplikasikan. Jika SAK EMKM ini dapat diaplikasikan dengan baik maka diharapkan akan mempermudah para pelaku usaha untuk mengetahui kondisi usaha mereka dengan baik dan juga akan mempermudah mereka untuk melakukan akses pinjaman ke pihak bank karena mereka memiliki laporan keuangan yang informatif dan dapat diandalkan.

Saran untuk Ikatan Akuntan Indonesia adalah membuat suatu aplikasi yang *user friendly* dan dapat digunakan di aplikasi Android dan iOS. Mengingat kondisi Covid-19 saat ini yang juga menyebabkan teknologi informasi terus berkembang, software akuntansi yang sejalan dengan SAK EMKM pasti akan mendapat sambutan hangat dari para pelaku UMKM. Hal ini juga pasti mendorong penerapan SAK EMKM yang makin meluas.

## Referensi

- [1] Oktaritama, E. D. (2015). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Bagian Akuntansi Koperasi Atas Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
- [2] Otchere, F. A. & Agbeibor, J. (2012). The International Financial Reporting Standard for Small and Medium – Sized Entities (IFRS for SMEs). *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 10 No. 2, 2012
- [3] Rudiantoro, R. & Siregar, S. V. (2012). Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9 – No. 1, Juni 2012
- [4] Pratama Putra, Moh Fadil dan Tituk Diah Widajanti (2021) The Effect of Socialization, Understanding of Information Technology and Accounting on the Application of Small and Medium Microfinance Accounting Standard (SAK-EMKM) to MSMES at Coffee Shop in Tegalsari Subdistrict Central Surabaya, *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* Vol 5 No 2
- [5] Kartika, Sinta Eka; Diah Ayu Puspaningrum dan Widowati (2021), Tingkat Pemahaman dan Kesiapan Pelaku UMKM di Kota Mataram dalam Impelemntasi SAK EMKM, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol 9 no 1
- [6] Tuti, R. & Dwijayanti, S, P. F. (2014). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM Dalam Menyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. ISSN NO:1987 – 6522
- [7] Indonesia, C. (n.d.). Menyelamatkan UMKM, Menyelamatkan Ekonomi Indonesia.2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200626123545-297-517786/menyelamatkan-umkm-menyelamatkan-ekonomi-indonesia>
- [8] Indonesia, I. A. (2020). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Ikatan Akuntan Indonesia.

## **Profil Penulis**

### **Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.**



Elsa Imelda menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara dan S2 Magister Sains di Universitas Gajah Mada. Saat ini berprofesi sebagai dosen dan kaprodi di S1 Akuntansi FEB Universitas Tarumanagara. Penelitian dan bidang pengajaran terkonsentrasi pada bidang akuntansi keuangan dan pasar modal serta audit. Aktif mengikuti kegiatan asosiasi profesi, berwirausaha, dan merupakan pembina sebuah yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan.



**PENERBIT**  
Lembaga Penelitian dan  
Publikasi Ilmiah  
Universitas Tarumanagara

**PENERBIT**

Jln. Letjen S. Parman No. 1  
Kampus I UNTAR  
Gedung M Lantai 5  
Jakarta Barat

Telp: 021-5671747, ext215  
Email: publikasi@untar.ac.id

